



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019 yang akan dijadikan dasar penyusunan kegiatan pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2020.

Pasal 2

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi:

- a. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- b. penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Kabupaten Magelang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
- c. seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung terlaksananya pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2020.

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 19670212 199312 1 001

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Juni 2019
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KOTA MUNGKID
2019**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan antar Dokumen	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan	I-5
1.5 Sistematika Penyusunan RKPD	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-27
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-48
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-138
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019	II-163
2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-163
2.2.2 Aspek Daya Saing.....	II-164
2.2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-164
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-192
2.3.1 Permasalahan Perekonomian Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-192
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-192
2.3.3 Isu Strategis Daerah	II-19
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017	III-1
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	III-6
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-6
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-6
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-9
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-10

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
TAHUN 2020	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-5
4.3. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang	IV-12
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	V-1
5.1. Kerangka pendanaan Tahun 2020	V-1
5.2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020	V-1
5.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar	V-1
5.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	V-4
5.2.3 Urusan Pilihan	V-9
5.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	V-11
5.3. Rencana Implementasi Program Unggulan	V-15
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah	VI-1
6.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	VI-4
6.3 Indikator Kinerja Daerah	VI-21
BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan, serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-2
Tabel 2.2	Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang	II-3
Tabel 2.3	Penyebaran Sumber Daya Mineral dan Kegunaannya	II-5
Tabel 2.4	Data Mata Air Kabupaten Magelang.....	II-7
Tabel 2.5	Tipe Iklim di Kabupaten Magelang.....	II-5
Tabel 2.6	Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017 (Ha)	II-9
Tabel 2.7	Perhitungan Daya Dukung Lahan Terbangun per Kecamatan	II-10
Tabel 2.8	Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Kabupaten Magelang Tahun 2017	II-11
Tabel 2.9	Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang Berdasarkan RTRW Kabupaten Magelang.....	II-12
Tabel 2.10	Desa-Desa Rawan Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang.....	II-16
Tabel 2.11	Data Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-18
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-19
Tabel 2.13	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-20
Tabel 2.14	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Magelang per Kecamatan Tahun 2014-2018	II-22
Tabel 2.15	Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-23
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 ...	II-26
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-27
Tabel 2.18	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018	II-28
Tabel 2.19	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-29
Tabel 2.20	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-30
Tabel 2.21	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Di Kabupaten Magelang	II-32

Tabel 2.22	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2016 (Juta Rupiah)II-33
Tabel 2.23	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)II-33
Tabel 2.24	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017II-34
Tabel 2.25	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017II-34
Tabel 2.26	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017II-35
Tabel 2.27	Inflasi Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2014-2018.....II-36
Tabel 2.28	Indeks Gini Kabupaten Magelang tahun 2014-2018II-37
Tabel 2.29	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia Di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018II-38
Tabel 2.30	Kemiskinan Berdasarkan Tingkat Konsumsi di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018II-39
Tabel 2.31	Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan Kab. Magelang, Provinsi dan Nasional 2014-2018.....II-40
Tabel 2.32	Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan Kab. Magelang Dengan Kota/Kabupaten Se-Eks Karisidenan Kedu 2014-2019.....II-40
Tabel 2.32	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2017 ... II-42
.....	
Tabel 2.33	Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 II-42
Tabel 2.34	Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 II-44
Tabel 2.35	Indeks Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 II-44
Tabel 2.36	Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 II-45
Tabel 2.37	Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017 II-45
Tabel 2.38	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018II-46
Tabel 2.39	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017II-47
Tabel 2.40	Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018II-48
Tabel 2.41	Angka Kelulusan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018II-48
Tabel 2.42	Rerata Nilai Ujian Nasional di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018II-49

Tabel 2.43	Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang Berakreditasi Minimal B Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-49
Tabel 2.44	Kompetensi Pendidik di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017	II-50
Tabel 2.45	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-52
Tabel 2.46	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-52
Tabel 2.47	Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-53
Tabel 2.48	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-55
Tabel 2.49	Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-56
Tabel 2.50	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-56
Tabel 2.51	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-58
Tabel 2.52	Penderita Malaria dengan Pemeriksaan Darah (positif) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-59
Tabel 2.53	Prevelensi HIV/AIDs di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-59
Tabel 2.54	Penyakit Tidak Menular Tahun 2014-2018 di Kabupaten Magelang.....	II-59
Tabel 2.55	Data Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kabupaten Magelang.....	II-60
Tabel 2.56	Kondisi Permukaan Jalan Di Kabupaten Magelang Sesuai Kewenangan Tahun 2014-2018	II-61
Tabel 2.57	Kondisi Standar Jalan Di Kabupaten Magelang Sesuai Kewenangannya Tahun 2017 - 2018	II-61
Tabel 2.58	Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten	II-62
Tabel 2.59	Kebutuhan Air di Kabupaten Magelang Tahun 2017.....	II-63
Tabel 2.60	Ketersediaan Air di Kabupaten Magelang Tahun 2017	II-63
Tabel 2.61	Pengelolaan Air Untuk Layanan Irigasi di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-63
Tabel 2.62	Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-64
Tabel 2.63	Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-65
Tabel 2.64	Kinerja Makro Urusan Penataan Tahun 2014-2018	II-66
Tabel 2.65	Kondisi Perumahan di Kabupaten Magelang.....	II-66
Tabel 2.66	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Magelang Tahun 2015-2018	II-67
Tabel 2.67	Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-67

Tabel 2.68	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-68
Tabel 2.69	Cakupan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-69
Tabel 2.70	Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2014-2018	II-71
Tabel 2.71	Penanganan PMKS di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-71
Tabel 2.72	Cakupan Penanganan PMKS Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-73
Tabel 2.73	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Bantuan.....	II-73
Tabel 2.74	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-74
Tabel 2.75	Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-74
Tabel 2.76	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-75
Tabel 2.77	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-76
Tabel 2.78	Tenaga Kerja yang Mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial (Jamsostek).....	II-77
Tabel 2.79	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-78
Tabel 2.80	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-79
Tabel 2.81	Desa dan kecamatan Layak Anak di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-79
Tabel 2.82	Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten Magelang Tahun 2015-2018	II-81
Tabel 2.83	Daya Dukung Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2017	II-82
Tabel 2.84	Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1) Kabupaten Magelang.....	II-83
Tabel 2.85	Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-85
Tabel 2.86	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018	II-85
Tabel 2.87	Persentase Perusahaan Minimal Berpredikat Proper Biru Tahun 2017-2018	II-86
Tabel 2.88	Persentase Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018	II-87
Tabel 2.89	Persentase Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Wilayah Perkotaan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018.....	II-88

Tabel 2.90	Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018	II-89
Tabel 2.91	Persentase Kasus Lingkungan dan Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang Ditangani di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-90
Tabel 2.92	Rasio Perekaman KTP - elektronik dan Keluarga yang Ber KK Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018	II-91
Tabel 2.93	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan Berakta Perkawinan, Penduduk Meninggal Berakta Kematian Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-91
Tabel 2.94	Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-92
Tabel 2.95	Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-92
Tabel 2.96	Persentase Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-94
Tabel 2.97	Persentase Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-94
Tabel 2.98	Kinerja Makro Urusan Perhubungan Tahun 2014-2018 ..	II-95
Tabel 2.99	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standart komunikasi Informasi di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018	II-96
Tabel 2.100	Cakupan Layanan Informasi bagi Desa dan PD di Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-96
Tabel 2.101	Cakupan Layanan dan Diseminasi Informasi Publik di Kabupaten Magelang tahun 2017-2018	II-97
Tabel 2.102	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-98
Tabel 2.103	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-99
Tabel 2.104	Jumlah UMKM Non BPR/LKM UKM di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-99
Tabel 2.105	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Yang Dibina Di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-100
Tabel 2.106	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-101
Tabel 2.107	Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-102
Tabel 2.108	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-102
Tabel 2.109	Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-103
Tabel 2.110	Cakupan Prestasi Generasi Muda di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-104
Tabel 2.111	Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-105

Tabel 2.112	Rasio Lapangan Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-105
Tabel 2.113	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-107
Tabel 2.114	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-108
Tabel 2.115	Jumlah Unit Pengolah/Pencipta Arsip yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku/Tertib di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018	II-108
Tabel 2.116	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-112
Tabel 2.117	Kontribusi PDRB Kategori Penyedia Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017	II-113
Tabel 2.118	Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-114
Tabel 2.119	Jumlah Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-114
Tabel 2.120	Perkembangan Kelas Kelompok Tani di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-123
Tabel 2.121	Jumlah Penyuluh di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-123
Tabel 2.122	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017	II-124
Tabel 2.123	Pasar yang Menerima Penghargaan Tertib Ukur Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018	II-125
Tabel 2.124	Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-125
Tabel 2.125	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017	II-126
Tabel 2.126	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-127
Tabel 2.127	Capaian Kesesuaian Perencanaan Program Tahun 2014-2018	II-128
Tabel 2.128	Opini BPK di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-129
Tabel 2.129	Prosentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-129
Tabel 2.130	Proporsi dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 ...	II-130
Tabel 2.131	Persentase Tahapan Penetapan APBD Tepat Waktu Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-131
Tabel 2.132	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-131

Tabel 2.133	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-131
Tabel 2.134	Pendapatan Usaha dan Laba Bersih BUMD 2014-2018 (Dalam Juta Rupiah)	II-132
Tabel 2.135	Kegiatan Kelitbangan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-134
Tabel 2.136	Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018	II-134
Tabel 2.137	Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018	II-135
Tabel 2.138	Level Kapabilitas APIP dan Nilai Maturitas SPIP.....	II-136
Tabel 2.139	Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2013–2018....	II-136
Tabel 2.140	Komposisi Pendidikan PNS (orang) Kabupaten Magelang Tahun 2013–2018.....	II-137
Tabel 2.141	Data PNS yang Mengikuti Diklat Jabatan Struktural Kabupaten Magelang Tahun 2013–2018 (Orang)	II-137
Tabel 2.142	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-138
Tabel 2.143	Produktivitas Total Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-140
Tabel 2.144	Nilai Tukar Petani Kabupaten Magelang Tahun 2014-2016	II-141
Tabel 2.145	Cakupan Pembangunan Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018	II-142
Tabel 2.146	Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-143
Tabel 2.147	Luas Kawasan Budidaya di Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-144
Tabel 2.148	Luas Wilayah Pertanian Produktif di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-145
Tabel 2.149	Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-146
Tabel 2.150	Luas Wilayah Peruntukan Industri di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-146
Tabel 2.151	Luas Wilayah Permukiman Perkotaan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-147
Tabel 2.152	Wilayah Rawan Bencana Erupsi dan Banjir Lahar Dingin Gunung Api di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-148
Tabel 2.153	Wilayah Rawan Bencana Gerakan Tanah Tinggi di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-148
Tabel 2.154	Jenis dan Jumlah Bank di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-149
Tabel 2.155	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018	II-150

Tabel 2.156	Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-150
Tabel 2.157	Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-151
Tabel 2.158	Pertumbuhan Investasi Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-152
Tabel 2.159	Angka Kriminalitas Tertangani di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-152
Tabel 2.160	Lama Proses Perizinan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-153
Tabel 2.161	Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-155
Tabel 2.162	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-155
Tabel 2.163	Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-157
Tabel 2.164	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-157
Tabel 2.165	Rasio Ketergantungan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-158
Tabel 2.166	Cakupan Penegakan Hukum Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-160
Tabel 2.167	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-161
Tabel 2.168	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-162
Tabel 2.169	Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-163
Tabel 2.170	Capaian Kinerja Aspek Daya Saing.....	II-164
Tabel 2.171	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan	II-165
Tabel 2.172	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan	II-167
Tabel 2.173	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum.....	II-168
Tabel 2.174	Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang.....	II-169
Tabel 2.175	Capaian Kinerja Urusan Perumahan	II-170
Tabel 2.176	Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.....	II-171
Tabel 2.177	Capaian Kinerja Urusan Sosial	II-172
Tabel 2.178	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan	II-173
Tabel 2.179	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan	II-173
Tabel 2.180	Capaian Kinerja Lingkungan Hidup.....	II-175
Tabel 2.181	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan	II-176
Tabel 2.182	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	II-176
Tabel 2.183	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-177

Tabel 2.184	Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II-178
Tabel 2.185	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II-179
Tabel 2.186	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal.....	II-180
Tabel 2.187	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan	II-180
Tabel 2.188	Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga.....	II-181
Tabel 2.189	Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.....	II-182
Tabel 2.190	Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan.....	II-183
Tabel 2.191	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-183
Tabel 2.192	Capaian Kinerja Urusan Statistik	II-184
Tabel 2.193	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan.....	II-184
Tabel 2.194	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika	II-185
Tabel 2.195	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan.....	II-185
Tabel 2.196	Capaian Kinerja Urusan Pertanian	II-186
Tabel 2.197	Capaian Kinerja Urusan Kehutanan	II-188
Tabel 2.198	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral.....	II-188
Tabel 2.199	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata	II-189
Tabel 2.200	Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	II-189
Tabel 2.201	Capaian kinerja Urusan Perdagangan.....	II-190
Tabel 2.202	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian	II-190
Tabel 2.203	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan	II-191
Tabel 2.204	Capaian Kinerja Urusan Keuangan.....	II-191
Tabel 2.205	Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-201
Tabel 3.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017.....	III-2
Tabel 3.2	Kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017	III-2
Tabel 3.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017	III-3
Tabel 3.4	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017.....	III-4
Tabel 3.5	Target Indikator Makro Ekonomi Tahun 2020	III-6
Tabel 3.6	Realisasi Pendapatan Tahun 2017- 2018 dan target 2019 serta Proyeksi Tahun 2020-2021	III-8
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Tahun 2017 - 2018, Target Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020-2021.....	III-10
Tabel 3.8	Realisasi Pembiayaan Tahun 2017- 2018, Target 2019 dan Proyeksi Tahun 2020-2021.....	III-11
Tabel 3.9	Realisasi APBD Tahun 2017- 2018 dan Target 2019, dan Proyeksi Tahun 2020-2021.....	III-13
Tabel 4.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Magelang Tahun 2020.....	IV-3

Tabel 4.2.	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang, Provinsi, dan Nasional	IV-9
Tabel 5.1.	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020	V-1
Tabel 5.2.	Rencana Implementasi Program Unggulan Tahun 2020...	V-16
Tabel 6.1.	Matriks Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020	VI-1
Tabel 6.2.	Matriks Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020	VI-5
Tabel 6.3.	Matriks Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020	VI-21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya	I-5
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Magelang	II-2
Gambar 2.2.	Posisi Sebaran Bahan Tambang di Kabupaten Magelang .	II-6
Gambar 2.3.	Grafik Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang	II-10
Gambar 2.4.	Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang	II-18
Gambar 2.5.	Grafik Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2014 - 2018	II-21
Gambar 2.6.	Grafik Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-21
Gambar 2.7.	Grafik Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-24
Gambar 2.8.	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-25
Gambar 2.9.	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018	II-26
Gambar 2.10.	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018.....	II-28
Gambar 2.11.	PDRB Perkapita (ADHK dan ADHBm) Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018	II-36
Gambar 2.12.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2014-2017.....	II-43
Gambar 2.13.	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2014-2017.....	II-43
Gambar 2.14.	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Magelang tahun 2014-2018.....	II-51
Gambar 2.15.	Prevalensi Kasus Stunting di Kab. Magelang Tahun 2015-2018.....	II-54
Gambar 2.16.	Angka Kesakitan Kab. Magelang Tahun 2013-2017	II-57
Gambar 2.17.	Cakupan CNR TBC BTA di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-57
Gambar 2.18.	Perkembangan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017.....	II-76
Gambar 2.19.	Perkembangan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2013-2017	II-77
Gambar 2.20.	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/Tahun) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-80
Gambar 2.21.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-81
Gambar 2.22.	Stabilitas Harga Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-82

Gambar 2.23.	Peta Sebaran Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1) ..	II-83
Gambar 2.24.	Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1)	II-84
Gambar 2.25.	Grafik Perkembangan Pengolah Arsip yang menerapkan Pengelolaan Arsip secara Baku Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018.....	II-109
Gambar 2.26.	Produksi Ikan Konsumsi (Ton) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-110
Gambar 2.27.	Produksi Benih Ikan (Juta ekor) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-110
Gambar 2.28.	Konsumsi Ikan di Kabupaten Magelang Tahun 2014- 2018.....	II-111
Gambar 2.29.	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-111
Gambar 2.30.	Produktivitas Tanaman Bahan Makanan Utama (Ton/Ha) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-115
Gambar 2.31.	Total Produksi Tanaman Bahan Makanan Utama Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 (Ton).....	II-116
Gambar 2.32.	Luas Panen Tanaman Bahan Makanan Utama di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-116
Gambar 2.33.	Total Produksi Sayur-sayuran (Kwintal) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-117
Gambar 2.34.	Perkembangan Produksi Buah-Buahan (Kuintal) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-118
Gambar 2.35.	Total Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-119
Gambar 2.36.	Total Populasi Ternak (Ekor) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-119
Gambar 2.37.	Perkembangan Produksi Ternak (kg) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-120
Gambar 2.38.	Grafik Perkembangan Populasi Ternak Unggas (Ekor) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-121
Gambar 2.39.	Grafik Perkembangan Produksi Daging Ternak Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-122
Gambar 2.40.	Grafik Perkembangan Produksi Susu Sapi Perah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-122
Gambar 2.41.	Persentase Pengeluaran Perkapita Komoditas Non Makanan Menurut Golongan Pengeluaran (Rp/kapita).....	II-139
Gambar 2.42.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017	II-139
Gambar 2.43.	IPM Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017	II-200
Gambar 2.44.	Perbandingan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Magelang, Provinsi JawaTengah Dan Nasional	II-202
Gambar 2.45.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017.....	II-204

Gambar 2.46.	Idenks Pemberdayaan Gender (IDG) Di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017	II-205
Gambar 3.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017.....	III-4
Gambar 3.2.	Grafik Laju Inflasi Tahun 2018 Menurut Kelompok Pengeluaran	III-5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka pendek. Rencana pembangunan jangka panjang untuk kurun waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah kurun waktu 5 (lima) tahun dan rencana pembangunan jangka pendek kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan pembangunan harus terintegrasi dan mendukung pencapaian target pembangunan yang satu dengan lainnya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 (lima) tahun yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai program tahunan. RKPD memuat rencana kerja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan, yang mendasarkan pada arahan dan program prioritas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 265 ayat (3) menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS. RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 merupakan pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020, dan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2020. Hal ini sesuai ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Tahap penyusunan RKPD Kabupaten Magelang tahun 2020 dilakukan melalui 4 (empat) urutan kegiatan yaitu penyiapan rancangan awal RKPD, penyiapan Rancangan RKPD, musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan akhir RKPD. Masukan-masukan pada saat Musrenbang akan membahani proses penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2020 melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan Rapat Teknis.

Penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Pada saat RKPD ini ditetapkan tahap penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024 masih dalam proses penyusunan rancangan akhir RPJMD. RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 merupakan tahapan strategis karena merupakan titik awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

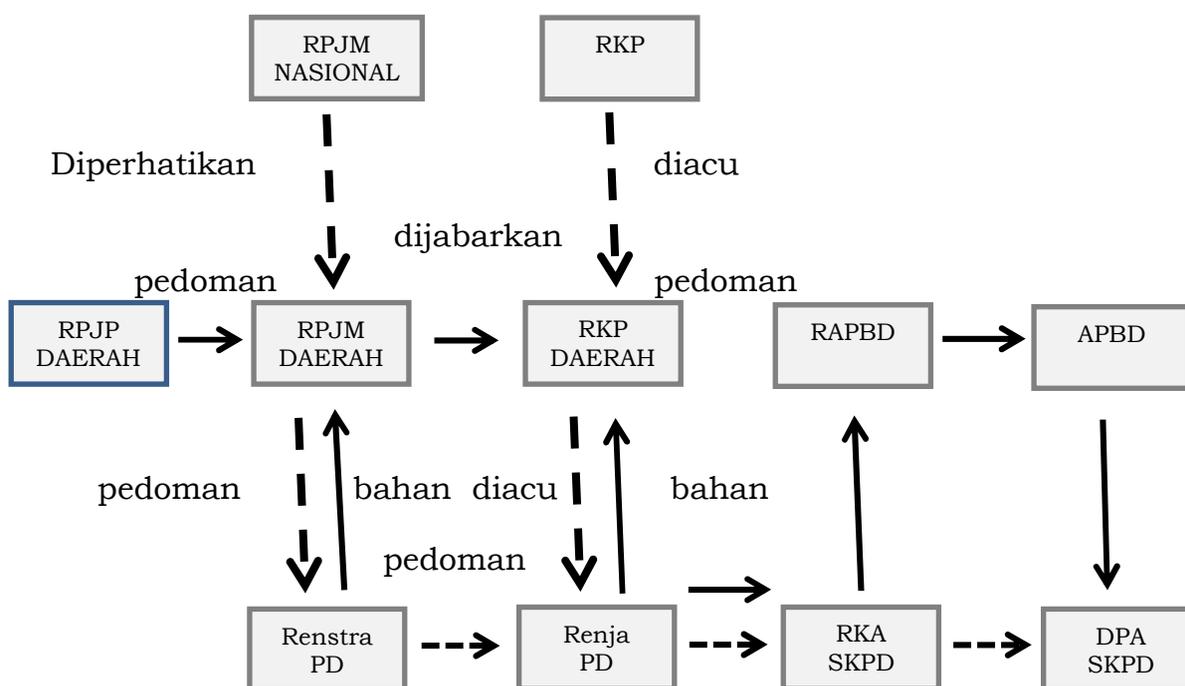
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19).

1.3. Hubungan antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (RKPD). RPJMD berfungsi untuk menjalankan pembangunan tahunan dan mencapai sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kondisi saat ini dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 masih dalam proses penyusunan Rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RKPD Tahun 2020 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.

RPJMD dan Renstra PD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu dalam penyusunan RKPD, perlu dilakukan secara rinci dengan prioritas utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan mencakup indikator dan target kinerja, serta perkiraan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1.

Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahunan dan mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2020.

Tujuan penyusunan RKPD ini adalah :

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;

3. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2020.

1.5. Sistematika Penyusunan RKPD

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 disusun dengan sistematika :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum kondisi daerah yang terdiri dari Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2018.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah Tahun 2017, tantangan dan prospek perekonomian daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah serta arah kebijakan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Memuat arahan pelaksanaan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum kondisi Kabupaten Magelang yang meliputi aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

2.1 Kondisi Umum Daerah

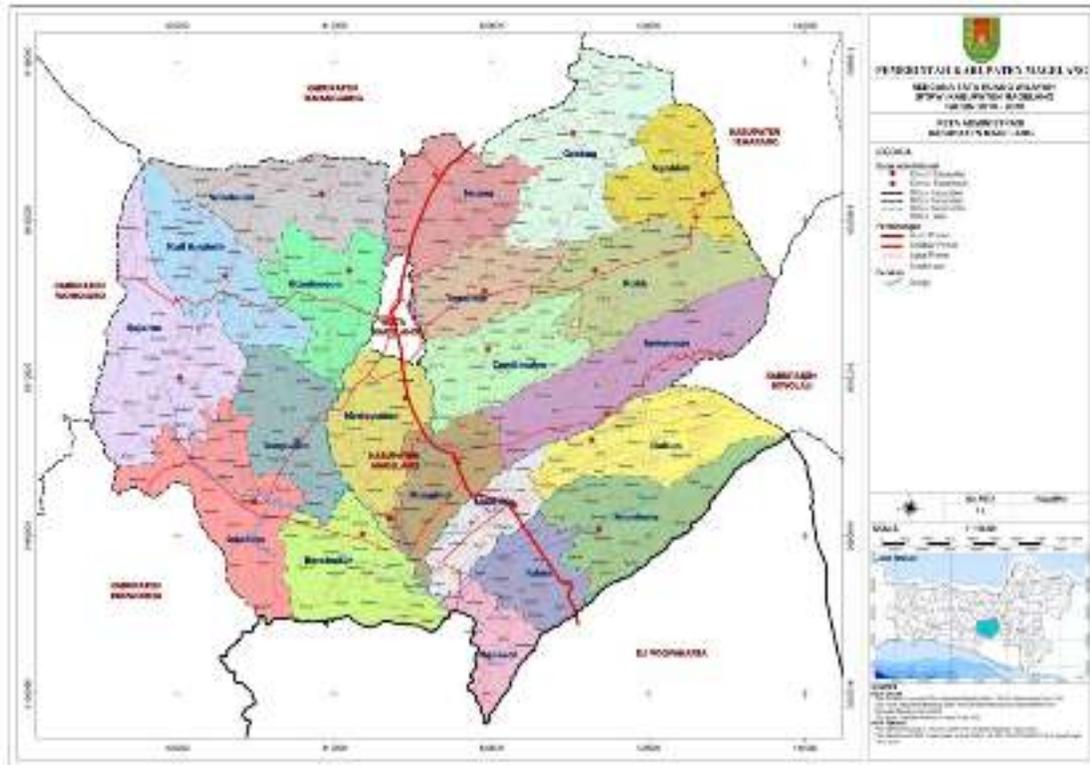
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi

Kabupaten Magelang termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah menurut BPS seluas 108.573 hektar atau sekitar 3,34 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pemetaan yang digunakan dalam penyusunan revisi RTRW Kabupaten Magelang, luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih adalah 113.034,84 hektar. Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak pada posisi antara 110°01' 51" – 110°26'58" Bujur Timur dan 7°19'13" – 7°42'16" Lintang Selatan, dengan batas-batas Kabupaten Magelang sebagai berikut.

Sebelah utara	: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
Sebelah timur	: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
Sebelah selatan	: Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Sebelah barat	: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
Bagian tengah	: Kota Magelang

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisinya, yaitu di antara dua kota besar, Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu, letak strategis Kabupaten Magelang juga dapat dilihat dari posisinya yang berada di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi, yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo, sehingga memudahkan aksesibilitas, mendorong perkembangan ekonomi dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Magelang.



Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Magelang

Berikut tabel mengenai luas masing-masing kecamatan, jumlah desa, dan kelurahan serta jarak kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.1

Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan, serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	Salaman	20	-	68,87	6,34	15
2	Borobudur	20	-	54,55	5,02	4
3	Ngluwar	8	-	22,44	2,07	22
4	Salam	12	-	31,63	2,91	19
5	Srumbung	17	-	53,18	4,90	19
6	Dukun	15	-	53,40	4,92	21
7	Muntilan	13	1	28,61	2,64	17
8	Mungkid	14	2	37,40	3,44	7
9	Sawangan	15	-	72,37	6,67	15
10	Candimulyo	19	-	46,95	4,32	17
11	Mertoyudan	12	1	45,35	4,18	6
12	Tempuran	15	-	49,04	4,52	8
13	Kajoran	29	-	83,41	7,68	31
14	Kaliangkrik	20	-	57,34	5,28	34
15	Bandongan	14	-	45,79	4,22	20
16	Windusari	20	-	61,65	5,68	25
17	Secang	19	1	47,34	4,36	22
18	Tegalrejo	21	-	35,89	3,31	22
19	Pakis	20	-	69,56	6,41	29

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
20	Grabag	28	-	77,16	7,11	33
21	Ngablak	16	-	43,80	4,03	37
	Jumlah	367	5	1.085,73		

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2018

Dari tabel di atas, kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Kajoran dengan luas 83,41 km² atau sekitar 7,68% dari luas wilayah kabupaten, sedangkan kecamatan yang wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Ngluwar seluas 22,44 km² atau sekitar 2,07 % dari luas wilayah kabupaten. Terdapat empat kecamatan yang memiliki kelurahan, yaitu Kecamatan Muntilan, Mertoyudan, dan Secang, masing-masing memiliki 1 kelurahan, kecuali Kecamatan Mungkid yang memiliki 2 kelurahan. Kecamatan yang memiliki desa terbanyak, yaitu Kecamatan Kajoran dengan 29 desa. Adapun kecamatan yang memiliki desa paling sedikit, yaitu Kecamatan Ngluwar dengan hanya 8 desa.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahan Kabupaten Magelang berada di Kota Mungkid.

2.1.1.2. Topografi

Wilayah Kabupaten Magelang secara topografis sangat beragam dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi, membentuk 'basin' (cekungan) dengan dikelilingi gunung-gunung (Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing) dan Pegunungan Menoreh. Terdapat beberapa sungai di antaranya Sungai Progo, Sungai Elo, Sungai Tangsi, Sungai Pabelan dengan beberapa cabang anak sungai yang bermata air di lereng gunung-gunung tersebut. Daerah yang bertopografi datar seluas 8.599 ha, bergelombang seluas 44.784 ha, topografi curam seluas 41.037 ha, dan sangat curam seluas 14.155 ha. Ketinggian wilayah antara 153-3.065 meter di atas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 360 meter di atas permukaan laut. Kelerengan lahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang

No.	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
1	0 - 2%	Datar	Kecamatan Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan, dan Salaman (\pm 1,5% dari luas wilayah)
2	2 - 15%	Bergelombang sampai berombak	Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55% dari seluruh wilayah
3	15 - 40%	Bergelombang sampai berbukit	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan, dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5% dari seluruh wilayah)

No.	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
4.	> 40%	Berbukit sampai bergunung gunung	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan, dan Dukun (18% dari luas wilayah)

Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Variasi kemiringan lereng di Kabupaten Magelang memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya bahwa variasi tersebut menjadi salah satu faktor penunjang pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada alam seperti kegiatan pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Dampak negatifnya adalah potensi bencana alam gerakan tanah (tanah longsor) di Kabupaten Magelang.

2.1.1.3. Geologi

Kabupaten Magelang di bagian barat daya (Kecamatan Salaman dan Borobudur bagian selatan) tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa lapili, aglomerat, dan lava andesit yang merupakan bagian dari formasi andesit tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling wilayah ini merupakan unsur batuan yang membentuk Dataran Magelang berupa tanah endapan alluvial yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang bagian tengah merupakan tanah endapan/alluvial yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut.

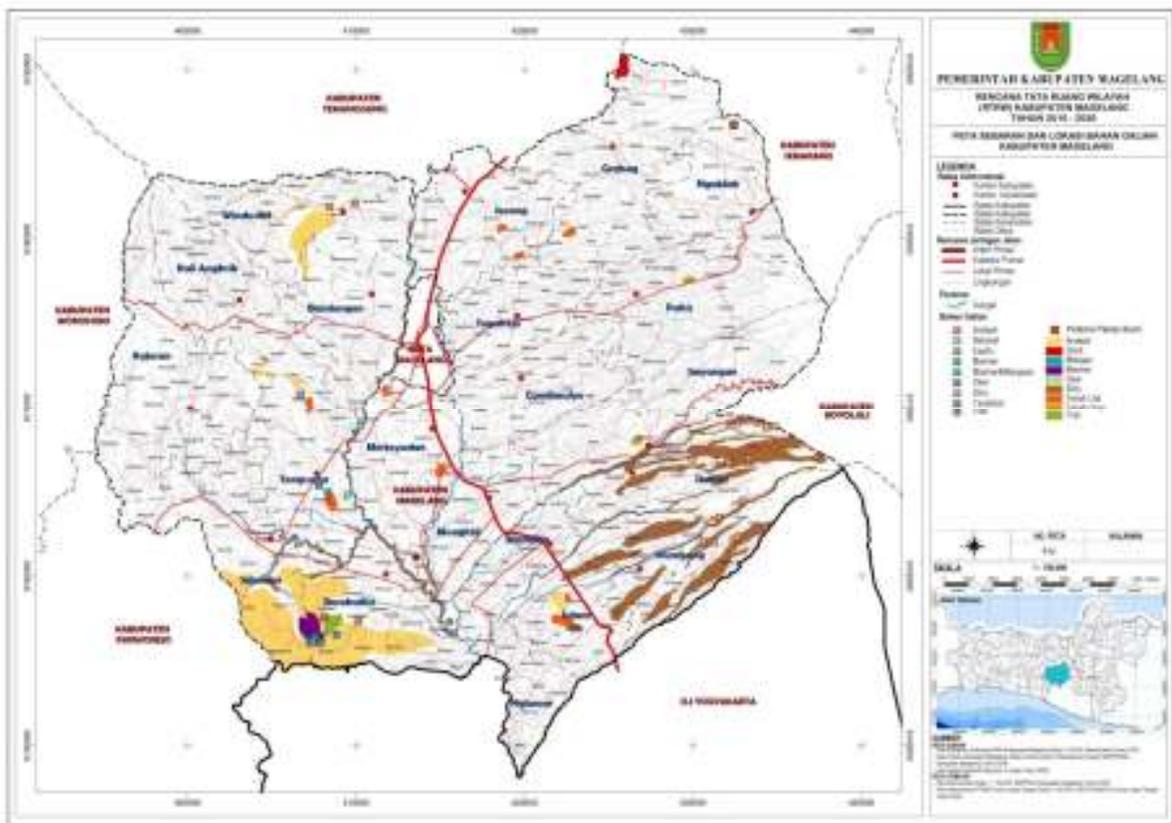
- (1) Alluvial kelabu, alluvial coklat, regosol coklat kelabu, dan coklat tua yang banyak terdapat di daerah dataran seperti, Kecamatan Mertoyudan, Mungkid, Candimulyo, Salaman, Secang, Tegalrejo, Muntilan, Srumbung, Salam, dan Ngluwar.
- (2) Regosol kelabu dan coklat tua, andosol coklat, lithosol latosol coklat, banyak terdapat di daerah lereng pegunungan, seperti Kecamatan Windusari, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Grabag, Pakis, dan Bandongan.
- (3) Latosol coklat kemerahan ada di Kecamatan Grabag dan Ngablak.
- (4) Latosol coklat tua kemerahan ada di Kecamatan Salam, Kajoran, Kaliangkrik, Salaman, Tempuran, Bandongan, dan Windusari.
- (5) Latosol merah kekuningan ada di wilayah Kecamatan Salaman dan Borobudur.

Kondisi fisiografi Kabupaten Magelang berbentuk cekungan yang dikelilingi oleh Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Perbukitan Menoreh memberikan manfaat positif bagi Kabupaten Magelang, seperti berlimpahnya bahan galian tambang golongan B dan C. Bahan tambang galian B dan C tersebut banyak tersebar di seluruh Kabupaten Magelang. Jenis bahan tambang yang jumlahnya relatif banyak adalah pasir batu dan marmer. Marmer berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan yang selama ini hanya ditambang saja. Tabel di bawah ini akan menunjukkan berbagai macam sumber daya mineral yang terdapat di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.3
Penyebaran Sumber Daya Mineral dan Kegunaannya

No.	Jenis Bahan Galian	Kegunaan	Lokasi
1	Trass	Bahan baku pembuatan semen puzolan, bahan baku pembuatan batako, bahan bangunan konstruksi ringan/berat, semen alam, dan tanah urug	- Kecamatan Salaman - Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur - Desa Bawang Kecamatan Tempuran
2	Tanah Liat	Bahan baku pembuatan batu bata, gerabah, genteng, semen, dan keramik	- Kecamatan Salaman - Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur - Desa Sidoagung dan Somoketro Kecamatan Salam
3	Batu Gamping	Digunakan dalam berbagai macam bidang seperti aneka industri kimia, industri bangunan, dan pertanian	- Kecamatan Salaman - Kecamatan Borobudur
4	Marmer	Untuk pembuatan tegel, meja, patung, pilar, dan perangkat toilet	- Kecamatan Salaman - Kecamatan Borobudur
5	Andesit	Bahan pondasi, bangunan gedung, jalan raya, dan dam. Selain itu bisa digunakan sebagai batu split, pasir, dan abu batu sebagai bahan utama pembuatan beton	- Desa Giripurno Kecamatan Borobudur - Desa Bawang Kecamatan Tempuran
6	Pasir dan batu	Bahan bangunan perumahan, jalan, dan saluran air	- Kecamatan Windusari - Kecamatan Bandongan - Kecamatan Borobudur - Kecamatan Srumbung - Kecamatan Dukun - Kecamatan Sawangan - Kecamatan Pakis - Kecamatan Salam - Kecamatan Candimulyo
7	Kaolin	Bahan baku industri keramik, filler dalam industri kertas, karet, cat, dan plastik	- Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur
8	Oker	Sebagai pigmen dan serbuk poles, bahan pewarna cat, pembuatan semen, plester, campuran karet, dan campuran plastik	- Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan - Desa Giripurno Kecamatan Borobudur
9	Mangaan	Menjadi bahan baku industri metalurgi maupun non metalurgi. Bahan non metalurgi bisa menjadi produksi baterai, kimia, keramik dan gelas, glasir dan frit, pertanian, dan proses produksi uranium	- Desa Giripurno Kecamatan Borobudur - Desa Ngargoretno Kecamatan Salaman

Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030



Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Gambar 2.2
Peta Sebaran Bahan Tambang di Kabupaten Magelang

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran bahan tambang paling banyak terdapat di sekitar Gunung Merapi dan Pegunungan Menoreh. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber bahan tambang dominan berasal dari Gunung Merapi dan Pegunungan Menoreh. Meskipun Merapi juga sering erupsi, tetapi dari erupsi tersebut mengeluarkan berbagai macam sumber daya mineral yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar.

2.1.1.4. Hidrologi

Kabupaten Magelang memiliki curah hujan tinggi dan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan industri serta kebutuhan lainnya. Wilayah Kabupaten Magelang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Bogowonto. DAS Progo bagian hulu terdapat sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Progo. DAS Progo ini meliputi wilayah di Kecamatan Windusari, Secang, Bandongan, Mertoyudan, Tempuran, Borobudur, Mungkid, Tegalrejo, Muntilan, Salam, Ngluwar, Grabag, Sawangan, Dukun, dan Srumbung. Sedangkan DAS Bogowonto berada di sebagian kecil wilayah Kecamatan Salaman dan Kajoran.

- a. Air permukaan yaitu air yang mengalir di sungai-sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil. Sungai besar yang ada di Kabupaten Magelang adalah Sungai Progo.
- b. Air tanah, di Kabupaten Magelang air tanah berdasarkan hidrologi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) mandala air tanah, yaitu:

- 1) Mandala air tanah gunung api strato, air tanah jenis ini terletak di antara puncak sampai lereng Gunung Api Merbabu, Merapi, dan Sumbing.
- 2) Mandala air tanah antar pegunungan, air tanah jenis ini berada di antara Gunung Api Merbabu, Merapi, dan Sumbing yang terletak di ketinggian berkisar antara 300-500 m di atas permukaan laut. Air tanah di daerah ini tersedia cukup banyak dengan produktivitas aquifer yang tinggi dan muka air tanah ini cukup dangkal (<10 m) dan debit sumur mencapai 4 liter/detik.

Posisi Kabupaten Magelang yang terletak di hulu DAS Progo dan dikelilingi oleh 3 (tiga) gunung api yang menyebabkan Kabupaten Magelang kaya akan mata air. Berdasarkan Penyusunan Profiling Mata Air tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa terdapat 223 sumber mata air, yang mana 55 mata air merupakan sumber mata air baru yang berhasil diidentifikasi. Pengukuran dilakukan antara bulan Mei sampai dengan Agustus 2018 yang merupakan bagian dari musim kemarau. Berdasarkan kajian tersebut, dari 223 mata air, ada sebanyak 13 mata air diidentifikasi mati dan 5 mata air tidak ada limpasan, sehingga mata air yang memiliki debit sebanyak 205 mata air dengan total debit dari hasil perhitungan sebesar 8.173,28 liter/detik. Debit tersebut jika dikonversi dalam setahun, maka memiliki potensi air mencapai 257.752.602 m³/tahun.

Tabel 2.4
Data Debit Mata Air Kabupaten Magelang

No	Klasifikasi Debit Mata Air (liter/detik)	Jumlah Mata Air (buah)	Debit Total Mata Air (liter/detik)	Persentase (%)
1	0 < mata air < 10	142	265,13	3,29
2	10 ≤ mata air < 20	14	202,14	2,51
3	20 ≤ mata air < 30	11	271,48	3,37
4	30 ≤ mata air < 40	8	271,70	3,37
5	40 ≤ mata air < 50	3	122,52	1,52
6	50 ≤ mata air < 60	1	53,00	0,66
7	60 ≤ mata air < 70	1	65,00	0,81
8	70 ≤ mata air < 80	2	146,00	1,81
9	80 ≤ mata air < 90	2	169,60	2,11
10	90 ≤ mata air < 100	1	92,00	1,14
11	mata air ≥ 100	20	6393,92	79,40
	JUMLAH	205		

Sumber: *Pendataan Mata Air, DLH Kabupaten Magelang 2018 diolah*

Selain itu, ketiga gunung api yang ada di Kabupaten Magelang dengan kondisi fisiknya yang spesifik merupakan *recharge area* bagi DAS Kabupaten Magelang. Mata air yang bermunculan di kaki Gunung Merapi, Merbabu, dan Sumbing tersebut merupakan *discharge area*. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa *recharge area* dan *discharge area* di Kabupaten

Magelang berada dalam satu wilayah administrasi. Hal tersebut akan mempermudah pengelolaan lingkungan utamanya dalam pengelolaan sumber daya air, sehingga akan terwujud tata kelola lingkungan yang lebih baik.

2.1.1.5. Klimatologi

Suhu rata-rata di Kabupaten Magelang adalah 25,62°C dengan kelembaban udara 82%. Curah hujan rata-rata 3.922 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 189 hari dan kecepatan angin 1,8 knot.

Curah hujan merupakan salah satu sumber daya air yang mempengaruhi besaran debit mata air. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang Tahun 2018, curah hujan pada tahun 2017 berkisar antara 0 - 506 mm/bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan yang tinggi. Kabupaten Magelang terbagi menjadi beberapa tipe iklim sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Tipe Iklim di Kabupaten Magelang

No.	Kecamatan	Sc. Ferguson	Mohr	Oldeman
1	Salaman	B	I	B2
2	Borobudur	C	III	C3
3	Ngluwar	-	-	-
4	Salam	B	I	B3
5	Srumbung	B	I	B1
6	Dukun	C	I	B3
7	Muntilan	C	I	C3
8	Mungkid	B	II	C3
9	Sawangan	B	I	C3
10	Candimulyo	B	I	B2
11	Mertoyudan	B	I	B2
12	Tempuran	B	I	B2
13	Kajoran	B	I	B1
14	Kaliangkrik	B	I	B2
15	Bandongan	B	I	C2
16	Windusari	B	I	C2
17	Secang	B	II	C2
18	Tegalrejo	B	I	B2
19	Pakis	C	I	B3
20	Grabag	B	I	B2
21	Ngablak	C	I	C2

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kahutanan Kabupaten Magelang, 2014 dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt Ferguson, Mohr maupun Oldeman, Kabupaten Magelang sebagian besar bertipe iklim basah. Suatu bulan disebut bulan kering, jika dalam satu bulan terjadi curah hujan kurang dari 60 mm. Disebut bulan basah, jika dalam satu bulan curah hujannya lebih dari 100 mm.

Bulan basah dan bulan kering dikaitkan dengan kegiatan pertanian di daerah tertentu, sehingga penggolongan iklimnya disebut juga zona agroklimat. Misalnya, jumlah curah hujan sebesar 200 mm tiap bulan dipandang cukup

untuk membudidayakan padi sawah. Adapun untuk membudidayakan palawija, jumlah curah hujan minimal yang diperlukan adalah 100 mm tiap bulan. Selain itu, musim hujan selama 5 bulan dianggap cukup untuk membudidayakan padi sawah selama satu musim.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

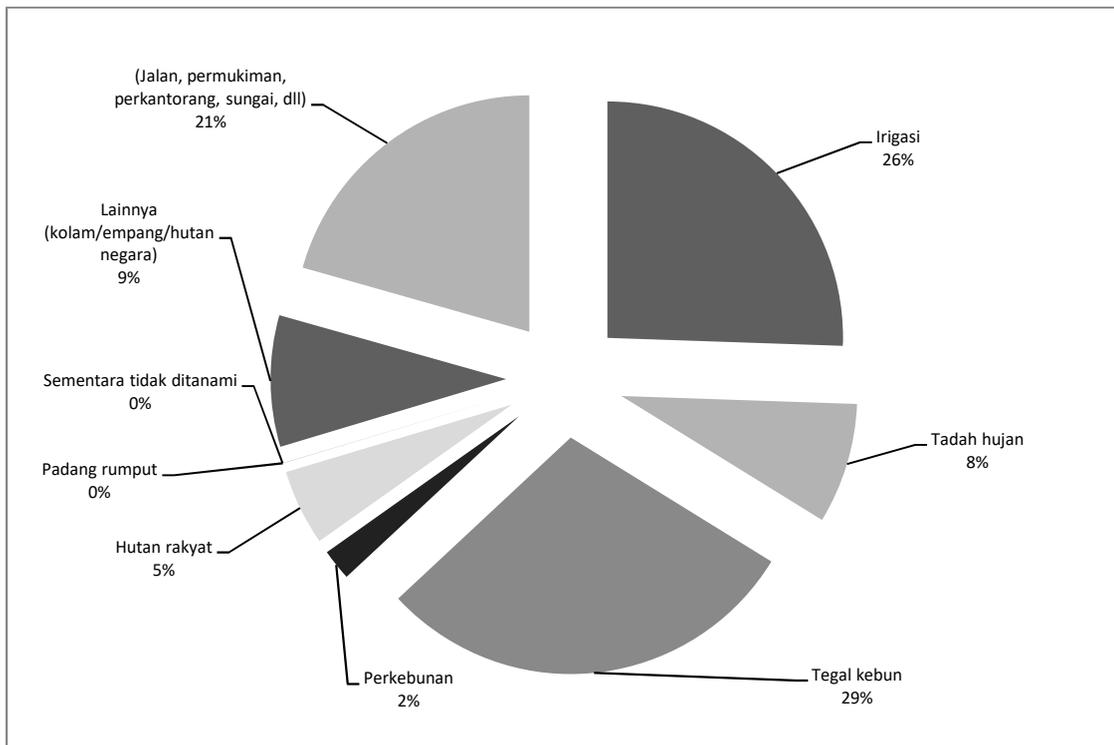
Berdasarkan data Kabupaten Magelang dalam Angka Tahun 2018, rincian penggunaan lahan di Kabupaten Magelang tahun 2017, yaitu lahan pertanian menempati lahan seluas 86.175 hektar yang terdiri dari lahan sawah (*wetland*) seluas 36.681 ha dan lahan kering (*dryland*) seluas 49.494 ha. Selain itu, ada lahan bukan pertanian yang mencakup jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dan lain-lainnya memiliki luasan sebesar 22.398 hektar. Adapun untuk lahan peruntukan sawah di antaranya sawah irigasi seluas 27.732 ha dan tadah hujan (reservation) seluas 8.949 ha. Perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Magelang tahun 2014-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017 (ha)

No.	Penggunaan Lahan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
A	Lahan Sawah				
1	Irigasi	28.028	27.898	27.653	27.732
2	Tadah hujan	8.854	8.964	9.202	8.949
	Jumlah	36.882	36.862	36.855	36.681
B	Lahan Kering				
1	Tegal kebun	32.437	32.100	31.904	31.813
2	Perkebunan	399	399	2.219	2.317
3	Hutan rakyat	6.562	6.919	5.611	5.609
4	Padang rumput	2	2	2	2
5	Sementara tidak ditanami	107	107	7	7
6	Lainnya (kolam/empang/hutan negara)	10.016	10.016	9.807	9.746
	Jumlah	49.523	49.543	49.550	49.494
	Total lahan pertanian (A+B)	86.405	86.405	86.405	86.175
C	Lahan Bukan Pertanian				
1	(Jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dll)	22.168	22.168	22.168	22.398
	TOTAL (A+B+C)	108.573	108.573	108.573	108.573

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2015, 2016, 2017, 2018

Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terluas adalah lahan pertanian (79,37%) dan lahan bukan pertanian (jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dan lain-lain) 20,63%. Oleh karena itu, sektor pertanian dijadikan unggulan karena adanya daya dukung potensi/ketersediaan lahan. Komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang tahun 2017 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Hasil Olah, 2018

Gambar 2.3
Grafik Persentase Penggunaan Lahan
di Kabupaten Magelang Tahun 2017

Untuk menghitung sejauh mana lahan terbangun di Kabupaten Magelang, masih mempunyai daya tampung untuk pengembangan atau tidak, maka dihitung daya dukung lahan untuk bangunan. Daya dukung lahan untuk bangunan mempertimbangkan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, dan luas lahan terbangun.

Berdasarkan hasil penghitungan KLHS RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024, daya dukung lahan terbangun di Kabupaten Magelang masuk dalam kategori daya dukung lahan bersyarat atau sedang dengan nilai 2,96. Dengan demikian, Kabupaten Magelang masih memiliki daya tampung bangunan yang relatif baik untuk pengembangan, namun ke depannya harus tetap memperhatikan karakteristik Kabupaten Magelang. Jika dilihat pada setiap kecamatan di Kabupaten Magelang, tidak ada kecamatan yang berada pada kategori terlampaui atau buruk. Kategori bersyarat/sedang terdapat di 12 kecamatan dan kategori baik terdapat di 9 kecamatan.

Tabel 2.7
Perhitungan Daya Dukung Lahan Terbangun per Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas (%)	Luas Bangunan (Ha)	Luas Lahan Terbangun (Ha)	DDL	STATUS
BANDONGAN	4.891,98	0%	640,84	769,00	3,82	BAIK
BOROBUDUR	5.761,38	5%	1386,53	1.663,84	2,08	SEDANG
CANDIMULYO	4.928,56	4%	830,41	996,49	2,97	SEDANG
DUKUN	5.852,40	5%	589,14	706,96	4,97	BAIK

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas (%)	Luas Bangunan (Ha)	Luas Lahan Terbangun (Ha)	DDL	STATUS
GRABAG	8.143,19	7%	1177,94	1.413,53	3,46	BAIK
KAJORAN	8.648,78	8%	841,91	1.010,30	5,14	BAIK
KALIANGKRIK	5.709,82	5%	527,78	633,33	5,41	BAIK
MERTOYUDAN	4.897,43	4%	1857,64	2.229,17	1,32	SEDANG
MUNGKID	4.102,56	4%	1093,63	1.312,36	1,88	SEDANG
MUNTILAN	3.019,63	3%	989,60	1.187,52	1,53	SEDANG
NGABLAK	4.607,46	4%	452,54	543,05	5,09	BAIK
NGLUWAR	2.430,15	2%	713,32	855,99	1,70	SEDANG
PAKIS	6.820,31	6%	684,82	821,79	4,98	BAIK
SALAM	3.361,33	3%	965,08	1.158,09	1,74	SEDANG
SALAMAN	6.679,37	6%	1289,52	1.547,43	2,59	SEDANG
SAWANGAN	7.373,78	7%	765,16	918,19	4,82	BAIK
SECANG	5.294,87	5%	1178,76	1.414,51	2,25	SEDANG
SRUMBUNG	5.699,14	5%	962,48	1.154,98	2,96	SEDANG
TEGALREJO	3.798,93	3%	726,30	871,56	2,62	SEDANG
TEMPURAN	4.824,39	4%	864,73	1.037,67	2,79	SEDANG
WINDUSARI	6.189,36	5%	526,94	632,33	5,87	BAIK
KAB. MAGELANG	113.034,84	100%	19.065,08	22.878,10	2,96	SEDANG

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024.

Untuk mengetahui sejauh mana fungsi lindung di Kabupaten Magelang, digunakan daya dukung fungsi lindung. Daya dukung fungsi lindung ditinjau dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan dan luasan wilayah. Daya dukung fungsi lindung (DDL) memiliki kisaran nilai antara 0 (minimal) sampai 1 (maksimal). Apabila nilai mendekati angka 1, semakin baik fungsi lindung yang ada dalam wilayah tersebut. Demikian pula sebaliknya, apabila mendekati angka 0, fungsi lindung semakin buruk atau lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya.

Tabel 2.8
Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kabupaten Magelang 2017

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)	Ci	$\sum (ci \times Ai)$
Cagar Budaya	102,24	0,09%	0,18	18,40
Danau	1,56	0,00%	0,98	1,53
Hutan Lindung	1.363,57	1,21%	1	1.363,57

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)	Ci	$\sum (ci \times Ai)$
Hutan Produksi Terbatas	1.792,44	1,59%	0,68	1.218,86
Hutan Produksi Tetap	2.049,51	1,81%	0,68	1.393,67
Industri	152,52	0,13%	0,18	27,45
Kebun Campur	43.060,87	38,10%	0,54	23.252,87
Kolam	16,60	0,01%	0,98	16,27
Lahan Terbuka	221,57	0,20%	0,21	46,53
Permukiman	18.912,56	16,73%	0,18	3.404,26
Rumput	0,22	0,00%	0,28	0,06
Sawah	28.688,43	25,38%	0,46	13.196,68
Taman Nasional	4.406,78	3,90%	1	4.406,78
Tegalan	11.310,22	10,01%	0,21	2.375,15
Tubuh Air	955,75	0,85%	0,98	936,64
Total	113.034,84	100%	0,46	51.658,71

Sumber: KLHS RPJMD 2019-2024

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, maka daya dukung fungsi lindung Kabupaten Magelang memiliki koefisien 0,46 berada dalam kategori sedang. Luas lahan kebun memberikan kontribusi besar dalam daya dukung lindung yang tinggi, sementara permukiman dan lahan terbangun lainnya menyebabkan daya dukung lindung menjadi kecil.

Untuk hutan rakyat, luasannya selalu mengalami perubahan setiap tahunnya selama tahun 2014-2017. Secara implisit, penambahan luas hutan rakyat di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa sumber daya hutan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi ekonomi dan juga mengurangi dampak bahaya bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Magelang seperti bencana gerakan tanah.

2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi potensi pengembangan wilayah Kabupaten Magelang untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya sesuai dengan RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030.

Tabel 2.9
Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang
Berdasarkan RTRW Kabupaten Magelang

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	Kawasan peruntukan hutan produksi	
	Hutan produksi terbatas	Kecamatan Bandongan, Grabag, Kaliangkrik, Kajoran, Ngablak , dan Windusari

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
	Hutan produksi tetap	Kecamatan Bandongan, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Salaman, Tempuran, dan Windusari
2	Kawasan hutan rakyat	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Salam, Sawangan, Secang, Tempuran, dan Windusari
3	Kawasan peruntukan pertanian	
	Kawasan pertanian lahan basah	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Candimulyo, Dukun, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salam, Salaman, Sawangan, Secang, Srumbung, Tegalrejo, Tempuran, dan Windusari
	Kawasan pertanian lahan kering	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Candimulyo, Dukun, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salam, Salaman, Sawangan, Secang, Srumbung, Tegalrejo, Tempuran, dan Windusari
4	Kawasan peruntukan perkebunan	Kecamatan Grabag, Kajoran, Dukun, Borobudur, dan Salaman
5	Kawasan peruntukan perikanan	
	Daerah pembenihan	Kecamatan Muntilan, Sawangan, Dukun, Grabag, dan Mungkid
	Daerah pembesaran perikanan	Kecamatan Salam, Ngluwar, Mertoyudan, Kajoran, Bandongan, Secang, Srumbung, Candimulyo, dan Tegalrejo
6	Kawasan peruntukan peternakan	
	Kawasan peternakan besar	Kecamatan Sawangan, Candimulyo, Dukun, Kajoran, Windusari, Pakis, Ngablak, Grabag, Tegalrejo, dan Kaliangkrik, Bandongan, Secang, Srumbung, dan Salam
	Kawasan peternakan sedang	Semua kecamatan
	Kawasan peternakan unggas	Kecamatan Srumbung, Dukun, Salam, Secang, Salaman, Tempuran, Bandongan, Candimulyo, Grabag, Mertoyudan, dan Ngluwar
7	Kawasan peruntukan pertambangan	
	Kawasan peruntukan pertambangan batuan pasir batu	Kecamatan Windusari, Bandongan, Borobudur, Srumbung, Dukun, Pakis, Salam, Candimulyo, Muntilan, Ngluwar, Tempuran, Salam, Secang, Grabag, dan Salaman.
	Kawasan peruntukan pertambangan batuan marmer	Kecamatan Borobudur, Salaman, Tempuran, Bandongan, dan Windusari.
	Kawasan peruntukan pertambangan mineral	Kecamatan Borobudur dan Salaman

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
	logam	
8	Kawasan peruntukan pariwisata	
	Kawasan peruntukan pariwisata budaya	Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Ngawen, Candi Gunung Wukir/Canggal, Candi Asu, Candi Pendem, Candi Lumbung, Candi Selogriyo, Makam Gunung Pring, Makam Kyai Raden Santri dan Mbah Jogoreso, Makam Pasteur Van Lith, Makam Kyai Condrobumi, Makam Sunan Geseng, Langgar Agung Pangeran Diponegoro, Pasarean Pangeran Singosari, Makam Kyai Mijil, Makam Kyai Raden Syahid, dan Candi Umbul
	Kawasan peruntukan pariwisata alam	Air Terjun Sekarlangit, Air Terjun Seloprojo, Ketep Pass, Air Terjun Kedungkayang, Agro Wanawisata Sambak, Agro Wisata Salak Lumut, Pendakian Gunung Merapi, Pendakian Gunung Merbabu, Curug Silawe, dan Telaga Bleder
	Kawasan peruntukan pariwisata buatan	Taman Rekreasi Mendut, Ketep Pass, Induk Selokan Mataram (Wisata Bendungan Ancol), Taman Rekreasi Kalibening, dan Deyangan
9	Kawasan peruntukan industri	
	kawasan peruntukan industri mikro, kecil, menengah	tersebar di masing-masing kecamatan
	Kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus	tersebar di masing-masing kecamatan
	Kawasan peruntukan industri besar	Kecamatan Tempuran dan Salaman
10	Kawasan peruntukan permukiman	
	Kawasan peruntukan permukiman perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkotaan-perkotaan yang masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 2. Perkotaan Borobudur di Kecamatan Borobudur yang kaidah pengaturannya mengikuti Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) 3. Ibukota-ibukota kecamatan yang meliputi ibukota kecamatan di Kecamatan Windusari, Bandongan, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Salaman, Srumbung, Dukun, Sawangan, dan Candimulyo
	Kawasan peruntukan permukiman perdesaan	tersebar di luar ibukota kecamatan
10	Kawasan peruntukan lainnya	

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
	Kawasan pertahanan dan keamanan	Kecamatan Bandongan, Windusari, Borobudur, Salaman, Candimulyo, dan Tempuran
	Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan	tersebar di masing-masing kecamatan

Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Dalam rangka membentuk dan memperkuat pola keterkaitan antar kegiatan dan pusat pelayanan serta mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, maka pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan peranan sektor pertanian, pariwisata, dan industri. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah Kabupaten Magelang yang menjadi pendorong pertumbuhan utama (*main prime mover*), yaitu sebagai berikut.

- a. Kawasan strategis cepat tumbuh meliputi perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya, serta Perkotaan Salam dan sekitarnya.
- b. Kawasan pertanian berbasis potensi lokal dengan konsep pengembangan agropolitan dan minapolitan, meliputi Kawasan Agropolitan Sumbing, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, Kawasan Agropolitan Borobudur, dan Kawasan Minapolitan.
- c. Kawasan strategis pariwisata dengan konsep menumbuhkembangkan potensi-potensi wisata daerah dalam rangka menciptakan beragam alternatif daya tarik wisata disamping Candi Borobudur, meliputi Kawasan Strategis Pariwisata A di Wilayah Sumbing dan sekitarnya, Kawasan Strategis B di Wilayah Merapi-Merbabu dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata C di Wilayah Merapi dan sekitarnya, dan Kawasan Strategis Pariwisata D di Wilayah Borobudur dan sekitarnya.
- d. Kawasan peruntukan industri yang berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal.

Di samping pusat-pusat kegiatan sebagaimana telah dijelaskan di dalam Perda RTRW Kabupaten Magelang, struktur ruang kabupaten Magelang, juga dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan administratif, yaitu:

- a. pusat pelayanan administratif kabupaten/ibukota Kabupaten adalah Kota Mungkid;
- b. pusat pelayanan administratif kecamatan meliputi ibukota kecamatan : Salaman, Borobudur, Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun, Muntilan, Mungkid, Sawangan, Candimulyo, Mertoyudan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Tegalrejo, Pakis, Grabag, dan Ngablak;
- c. pusat pelayanan administratif kelurahan meliputi ibukota kelurahan : Secang, Sumberejo, Muntilan, Mendut, dan Sawitan; dan
- d. pusat pelayanan administratif desa meliputi 367 ibukota desa.

2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang sangat rawan bencana alam khususnya bencana erupsi gunung berapi dan gerakan tanah. Bencana alam yang terjadi di wilayah kabupaten ini merupakan konsekuensi dari kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah, dan keberadaan Gunung Merapi. Ancaman bencana yang disebabkan oleh faktor alam yang pernah terjadi di Kabupaten Magelang, antara lain:

- a. tanah longsor di 21 kecamatan;
- b. banjir di aliran sungai terutama di Sungai Progo dan Sungai Elo;
- c. angin lesus/puting beliung yang sering terjadi di 21 kecamatan;
- d. kekeringan/krisis air bersih di 21 kecamatan (kemarau panjang), sedangkan pada musim kemarau pendek terjadi krisis air bersih di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Borobudur (Desa Kenalan, Desa Candirejo, Desa Kembanglimus, Desa Wringinputih, Desa Bumiharjo dan Desa Giritengah), Kecamatan Kajoran (Desa Wonogiri) serta Kecamatan Salaman (Desa Margoyoso dan Desa Ngargoretno);
- e. Kebakaran hutan;
- f. Letusan Gunung Merapi, 3 kecamatan berada di KRB III.

Posisi Kabupaten Magelang yang dikelilingi oleh beberapa gunung api dan salah satunya masih dalam kondisi aktif memberikan konsekuensi munculnya bencana alam, seperti letusan gunung berapi, yaitu Gunung Merapi. Sebagian wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB). Kawasan Rawan Bencana adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Wilayah yang digolongkan wilayah KRB I, KRB II, dan KRB III di lingkup Gunung Merapi di wilayah Kabupaten Magelang ditunjukkan pada tabel berikut.

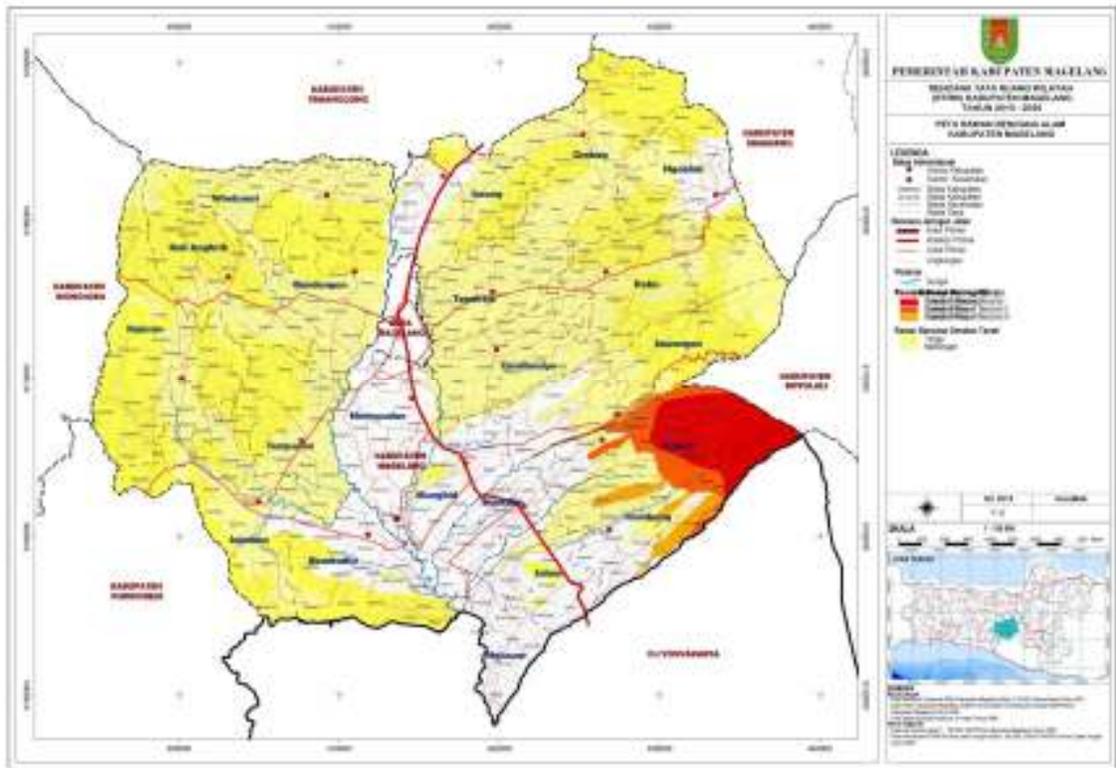
Tabel 2.10

Desa-Desa Rawan Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang

No.	Kawasan Rawan Bencana	Kecamatan	Desa
1	<p>KRB III</p> <p>a. Kawasan rawan bencana III adalah kawasan yang paling rawan (letaknya paling dekat dengan sumber bahaya) dan berisiko terlanda awan panas, aliran lava pijar (guguran batu/lontaran material pijar), gas beracun, serta hujan abu lebat, meliputi 3 wilayah kecamatan dan 16 desa</p> <p>b. Jarak dari puncak Merapi 0-10 km</p>	<p>Srumbung</p> <p>Dukun</p> <p>Sawangan</p>	<p>1. Kaliurang</p> <p>2. Kemiren</p> <p>3. Ngablak</p> <p>4. Nglumut</p> <p>5. Tegalrandu</p> <p>6. Mranggen</p> <p>7. Ngargosoko</p> <p>8. Srumbung</p> <p>1. Sengi</p> <p>2. Sewukan</p> <p>3. Paten</p> <p>4. Krinjing</p> <p>5. Kalibening</p> <p>6. Sumber</p> <p>7. Ngargomulyo</p> <p>8. Keningar</p> <p>1. Wonolelo</p> <p>2. Kapuhan</p> <p>3. Ketep</p>
2	KRB II	Srumbung	1. Kamongan

No.	Kawasan Rawan Bencana	Kecamatan	Desa
	<p>a. Kawasan rawan bencana II, juga berpotensi terlanda aliran awan panas, gas racun, lontaran batu pijar, lontaran material, aliran lava, dan aliran lahar, terdiri atas 16 desa di 3 kecamatan</p> <p>b. Jarak dari puncak Merapi 10-15 km</p>	<p>Dukun</p> <p>Sawangan</p>	<p>2. Jerukagung 3. Sudimoro 4. Pandanretno 5. Polengan 6. Bringin 7. Pucanganom</p> <p>1. Mangunsoko 2. Dukun 3. Banyudono 4. Banyubiru 5. Ngadipuro</p> <p>1. Krogowan 2. Sawangan 3. Gondowangi 4. Mangunsari</p>
3	<p>KRB I</p> <p>a. Kawasan rawan bencana I adalah kawasan yang rawan terhadap lahar/banjir dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava, meliputi : Sepanjang aliran sungai Krasak, Bebung, Sat, Putih, Blongkeng, Pabelan, Trinsing dan Apu</p> <p>b. Jarak dari puncak Merapi 15-20 km</p>	<p>Srumbung</p> <p>Dukun</p> <p>Salam</p> <p>Muntilan</p> <p>Mungkid</p> <p>Ngluwar</p>	<p>1. Bringin</p> <p>1. Ngadipuro 2. Ketunggeng</p> <p>1. Salam 2. Jumoyo 3. Gulon 4. Seloboro 5. Sirahan</p> <p>1. Gondosuli 2. Tamanagung 3. Keji 4. Menayu 5. Adikarto 6. Sokorini 7. Muntilan 8. Pucungrejo 9. Gunungpring 10. Ngawen 11. Sriwedari</p> <p>1. Bojong 2. Pabelan 3. Ngrajek 4. Progowati</p> <p>1. Blongkeng 2. Plosogede 3. Somokaton 4. Pakunden 5. Bligo</p>

Sumber Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, 2018



Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010 - 2030

Gambar 2.4

Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang

Wilayah Kabupaten Magelang >15% dan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana gerakan tanah. Wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah rawan gerakan tanah tingkat tinggi, tingkat menengah sampai dengan tingkat sangat rendah. Adapun data kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11

Data Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Jenis Bencana	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Angin puting beliung	60	42	32	33	105
2	Banjir	5	10	10	7	10
3	Gempa bumi	11	0	0	1	1
4	Kebakaran	56	55	40	23	71
5	Kekeringan	0	4	2	3	25
6	Tanah longsor	63	132	85	231	209
7	Bencana lainnya/KLB	11	28	23	15	14
8	Erupsi	0	0	0	0	12
	JUMLAH	206	271	222	352	477

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah bencana setiap tahunnya semakin bertambah. Hal ini perlu menjadi prioritas dalam upaya

penanggulangan ke depan, sehingga mampu meminimalisir jatuhnya korban jiwa terutama dalam perencanaan mitigasi bencananya yang harus direncanakan dengan sangat baik dalam berbagai bentuk.

2.1.1.9. Kondisi Demografi

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan wilayah. Perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan input dari pembangunan yang sangat penting bagi rencana-rencana, seperti permintaan akan barang dan jasa pelayanan serta kebutuhan akan lahan di masa yang akan datang.

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi. Dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Jumlah penduduk di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 mencapai 1.290.115 jiwa atau sekitar 3,76% dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah. Dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mertoyudan (109.652 jiwa) kemudian Kecamatan Grabag (92.212 jiwa) dan Secang (80.291 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (32.710 jiwa).

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Pertumbuhan Penduduk (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Salaman	72.674	76.856	73.833	73.372	73.913	-0.62
2	Borobudur	59.945	61.330	61.232	61.305	62.517	0.12
3	Ngluwar	31.991	32.530	32.415	32.319	32.710	-0.30
4	Salam	46.472	47.871	47.605	47.631	48.257	0.05
5	Srumbung	46.905	48.265	48.339	48.080	48.847	-0.54
6	Dukun	45.921	47.025	46.730	46.900	47.187	0.36
7	Muntilan	79.854	78.857	78.871	79.136	79.372	0.34
8	Mungkid	75.669	73.960	73.426	74.295	74.602	1.18

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Pertumbuhan Penduduk (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
9	Sawangan	56.642	59.812	57.118	57.287	57.986	0.30
10	Candimulyo	48.708	50.068	49.714	50.091	50.424	0.76
11	Mertoyudan	109.688	108.655	108.558	109.233	109.652	0.62
12	Tempuran	50.070	51.095	51.011	51.041	51.585	0.06
13	Kajoran	58.055	59.616	59.552	59.929	59.776	0.63
14	Kaliangkrik	58.796	60.178	59.161	59.575	59.405	0.70
15	Bandongan	59.681	61.074	60.858	60.916	60.481	0.10
16	Windusari	50.520	45.937	51.763	52.156	50.894	0.76
17	Secang	79.523	74.230	80.996	80.914	80.291	-0.10
18	Tegalrejo	52.031	49.860	52.829	52.981	53.369	0.29
19	Pakis	49.607	51.803	52.237	52.819	53.988	1.11
20	Grabag	89.304	85.861	90.807	91.559	92.212	0.83
21	Ngablak	40.444	42.207	41.569	41.866	42.647	0.71
	Jumlah	1.262.500	1.267.090	1.278.624	1.283.405	1.290.115	0.37

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, 2019

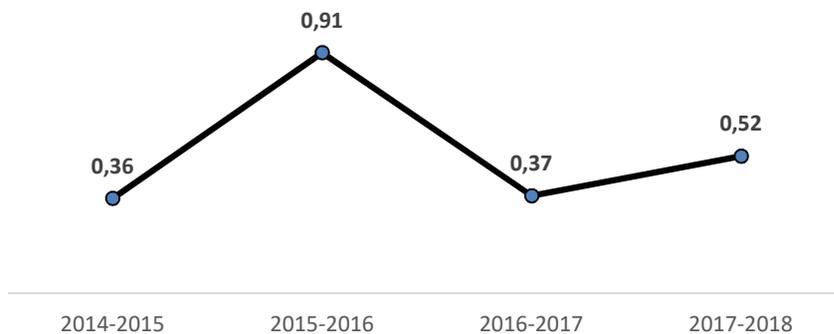
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Jika dilihat secara umum, jumlah penduduk di Kabupaten Magelang dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang per tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

No	Tahun	Pertumbuhan Penduduk (%)
2	2014-2015	0,36
3	2015-2016	0,91
4	2016-2017	0,37
5	2017-2018	0,52

Sumber : Hasil Olahan, 2019

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2014-2018 cukup fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pakis, yaitu sebesar 17,62%, sedangkan kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk yang pesat adalah Kecamatan Ngablak (4,77%). Berdasarkan data, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2012-2016 diketahui bahwa hanya Kecamatan Pakis saja yang memiliki tren mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kecamatan lainnya cenderung fluktuatif, bahkan hal sebaliknya terjadi pada Kecamatan Mungkid, yakni selama kurun waktu tersebut jumlah penduduknya mengalami penurunan setiap tahun.

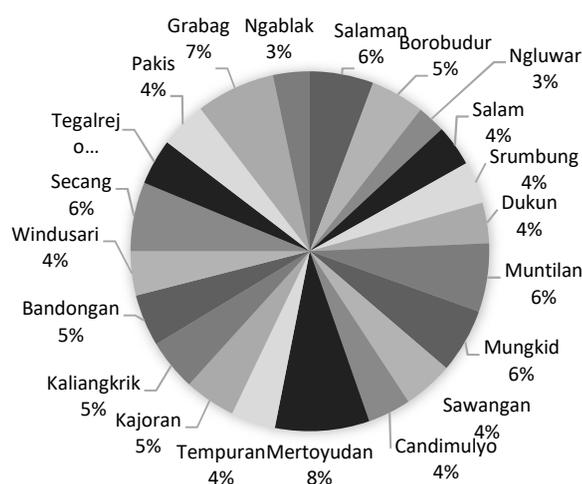


Sumber : Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.5
Grafik Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

b. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Dilihat dari sisi persebaran penduduk di Kabupaten Magelang per kecamatan, pada tahun 2018, terlihat bahwa penduduk hampir tersebar merata di semua kecamatan. Penduduk paling banyak berada di Kecamatan Mertoyudan (8,51%) disusul dengan Kecamatan Grabag (7,15%), sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (2,54%). Data distribusi penduduk di Kabupaten Magelang selengkapnya disajikan dalam grafik di bawah ini.



Sumber : Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.6
Grafik Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang
Tahun 2018

Penduduk akan banyak dijumpai pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, tersedianya sarana dan prasarana sosial, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Daerah yang memiliki kepadatan tinggi merupakan daerah yang memiliki perkembangan ekonomi yang tinggi dan sebaliknya. Berikut tabel yang menyajikan kepadatan penduduk di Kabupaten Magelang per kecamatan

Tabel 2.14
Kepadatan Penduduk di Kabupaten Magelang
per Kecamatan Tahun 2014-2018

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Salaman	68,87	1.055,23	1.115,96	1.072,06	1.065,37	1.073,22
2	Borobudur	54,55	1.098,90	1.124,29	1.122,49	1.123,83	1.146,05
3	Ngluwar	22,44	1.425,62	1.449,64	1.444,52	1.440,24	1.457,66
4	Salam	31,63	1.469,24	1.513,47	1.505,06	1.505,88	1.525,67
5	Srumbung	53,18	882,00	907,58	908,97	904,10	918,52
6	Dukun	53,40	859,94	880,62	875,09	878,28	883,65
7	Muntilan	28,61	2.791,12	2.756,27	2.756,76	2.766,03	2.774,27
8	Mungkid	37,40	2.023,24	1.977,54	1.963,26	1.986,50	1.994,71
9	Sawangan	72,37	782,67	826,48	789,25	791,58	801,24
10	Candimulyo	46,95	1.037,44	1.066,41	1.058,87	1.066,90	1.073,99
11	Mertoyudan	45,35	2.418,70	2.395,92	2.393,78	2.408,67	2.417,91
12	Tempuran	49,04	1.021,00	1.041,90	1.040,19	1.040,80	1.051,90
13	Kajoran	83,41	696,02	714,73	713,97	718,49	716,65
14	Kaliangkrik	57,34	1.025,39	1.049,49	1.031,76	1.038,98	1.036,01
15	Bandongan	45,79	1.303,36	1.333,78	1.329,07	1.330,33	1.320,83
16	Windusari	61,65	819,46	745,13	839,63	846,00	825,53
17	Secang	47,34	1.679,83	1.568,02	1.710,94	1.709,21	1.696,05
18	Tegalrejo	35,89	1.449,74	1.389,24	1.471,97	1.476,21	1.487,02
19	Pakis	69,56	713,15	744,72	750,96	759,33	776,14
20	Grabag	77,16	1.157,39	1.112,77	1.176,87	1.186,61	1.195,08
21	Ngablak	43,80	923,38	963,63	949,06	955,84	973,68
	Jumlah	1.085,73	1.162,81	1.167,04	1.177,66	1.182,07	1.188,25

Sumber:

1. Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2018
2. Hasil Olahan, 2019

Terdapat kesenjangan persebaran penduduk di masing-masing kecamatan terutama dengan kecamatan yang berada di wilayah perkotaan Kabupaten Magelang. Kecamatan-kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi biasanya terletak di wilayah perkotaan atau yang dilintasi oleh Jalan Nasional Yogyakarta-Semarang dan merupakan kawasan strategis cepat tumbuh (Kecamatan Muntilan, Secang, dan Mertoyudan). Hal ini memudahkan penduduk untuk mengakses sarana prasarana yang relatif lebih lengkap dan menjadi salah satu faktor penarik penduduk untuk tinggal disana. Selain itu, faktor geografis berupa kondisi topografi bergunung atau berbukit turut mempengaruhi persebaran penduduk karena cukup sulit untuk pengembangan permukiman.

Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Muntilan yang mencapai 2.774 jiwa/km², sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Kajoran yaitu 716 km/jiwa².

c. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio Jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Magelang secara umum memiliki angka rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang besar. Angka rasio jenis kelamin yang cukup besar ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Dilihat dari angka rasio jenis kelaminnya, secara umum selama kurun waktu tahun 2014-2016, angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Magelang relatif tetap, yakni 101. Pada tahun 2017 dan 2018 angka *sex ratio* 102 yang dapat diartikan bahwa terdapat 102 jiwa penduduk laki-laki untuk setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2014	619.125	614.570	1.233.695	101
2	2015	624.973	620.523	1.245.496	101
3	2016	630.821	626.302	1.257.123	101
4	2017	648.458	634.947	1.283.405	102
5	2018	650.382	639.733	1.290.115	102

Sumber :

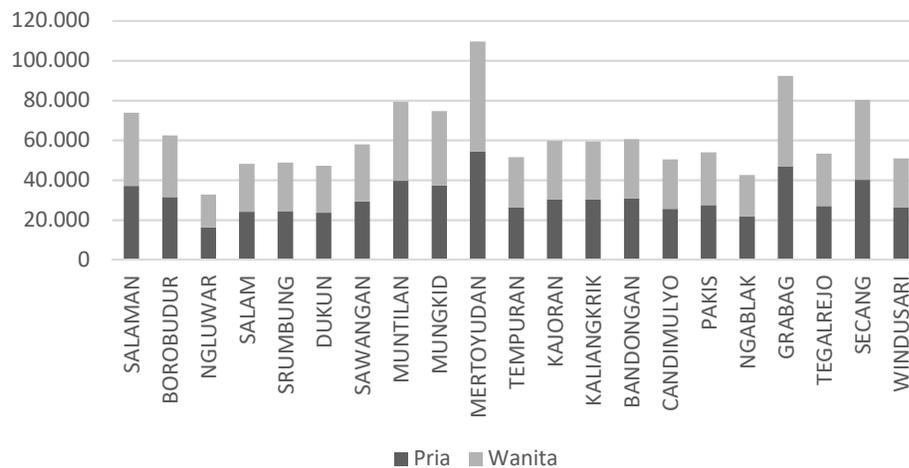
1. Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

2. Hasil Olahan, 2019

Berdasarkan data tahun 2018, angka *sex rasio* tertinggi berada di Kecamatan Windusari, yakni 106 artinya terdapat 106 jiwa penduduk laki-laki untuk setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan yang memiliki angka rasio terendah adalah Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Ngluwar, yakni dengan angka rasio 99, artinya hanya terdapat 99 jiwa penduduk laki-laki

untuk setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Hal tersebut mengindikasikan jumlah penduduk laki-laknya lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Terdapat dua kecamatan dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang yang penduduk laki-laknya lebih sedikit daripada penduduk perempuannya, yaitu Kecamatan Ngluwar dan Mertoyudan sehingga di kecamatan tersebut angka *sex ratio*-nya berada di bawah angka 100, sebagaimana digambarkan pada grafik berikut.

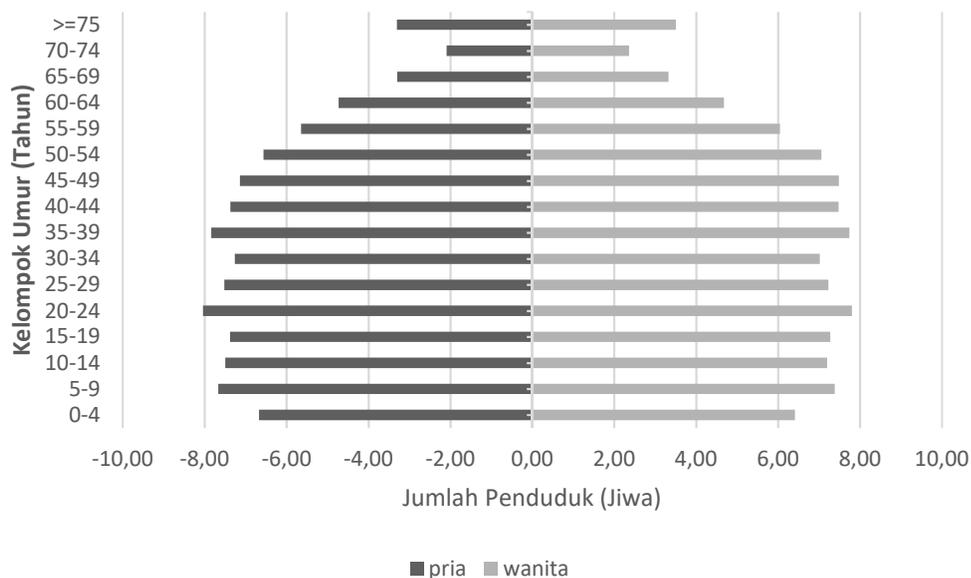


Sumber : Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.7
Grafik Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2018

d. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Penduduk dengan kelompok usia 5-9, 10-14, dan 15-19 tahun memiliki jumlah paling tinggi, terlihat pada piramida penduduk yang mengembang di bagian bawah. Artinya, penduduk usia muda cukup dominan di Kabupaten Magelang. komposisi penduduk menurut umur ini memperlihatkan bahwa warga usia produktif harus menanggung warga yang sudah tidak/belum produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Struktur penduduk menurut umur di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada piramida penduduk berikut ini.



Sumber : Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.8
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Magelang Tahun 2018

Pada tahun 2018, Kabupaten Magelang didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 898.473 jiwa. Adapun penduduk usia nonproduktif (<15 + >65 tahun) Kabupaten Magelang adalah sebesar 391.642 jiwa. Dengan demikian, dapat diukur bahwa rasio ketergantungan (*dependency ratio*) sebesar 0,44 menunjukkan rata-rata 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Magelang masih harus menanggung kurang lebih 44 penduduk usia non produktif.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Magelang mengalami bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia nonproduktif. Di dalam rentang masa bonus demografi, terdapat waktu yang rasio ketergantungannya pada titik terendah, hal ini yang disebut jendela kesempatan (*window of opportunity*). Kabupaten Magelang mulai menikmati bonus demografi sejak tahun 2011 dan berdasarkan proyeksi penduduk akan memiliki jendela kesempatan antara tahun 2017 sampai 2020.

e. Struktur Penduduk Menurut Pendidikan

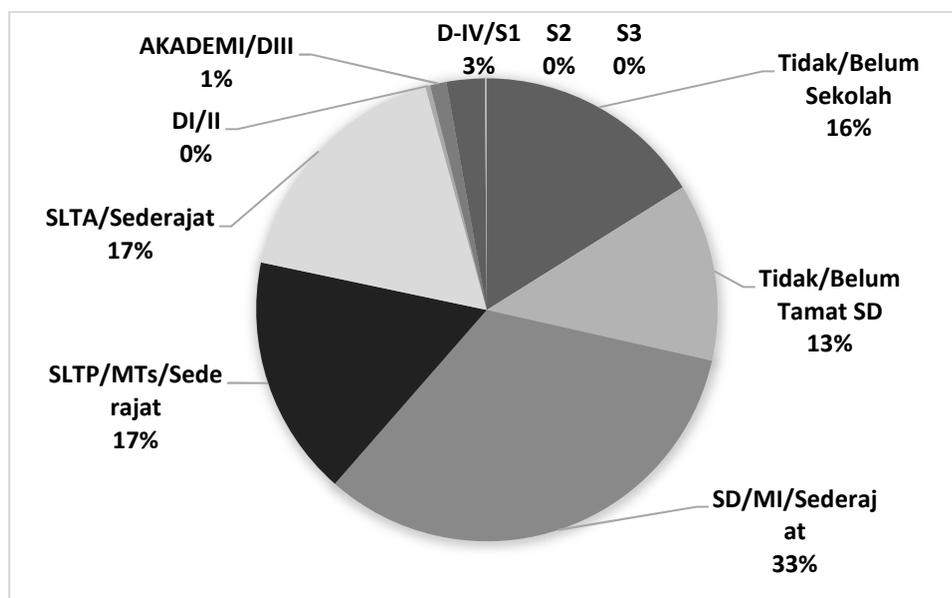
Struktur penduduk menurut pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk usia 5 tahun ke atas menurut status pendidikan. Data pada tahun 2014 hingga tahun 2018 menunjukkan bahwa struktur penduduk menurut pendidikan di Kabupaten Magelang masih didominasi oleh penduduk yang pendidikan terakhirnya SD/MI/ sederajat. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk menurut pendidikan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Tidak/Belum Sekolah	179.681	191.559	198.444	195.188	207.959
2	Tidak/Belum Tamat SD	192.725	181.101	167.929	167.215	160.204
3	SD/MI/Sederajat	428.824	433.149	432.473	432.488	424.710
4	SLTP/MTs/Sederajat	208.004	206.408	212.419	215.060	217.129
5	SLTA/Sederajat	204.506	205.823	216.346	220.622	224.694
6	DI/II	5.076	4.682	4.527	4.421	4.324
7	AKADEMI/DIII	13.993	13.958	14.187	14.432	14.802
8	PT	29.691	30.410	32.299	33.979	36.293
	D-IV/S1					34.449
	S2					1.648
	S3					196
	Jumlah	1.262.500	1.267.090	1.278.624	1.283.405	1.290.115

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, 2019

Grafik berikut menunjukkan penduduk dengan pendidikan SD/MI/ sederajat mendominasi di Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2014-2018. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Kabupaten Magelang.



Sumber : Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

f. Struktur Penduduk Menurut Agama

Struktur penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan program pembangunan yang berkaitan dengan kerukunan

umat beragama. Mayoritas penduduk di Kabupaten Magelang memeluk agama Islam, yaitu hingga mencapai 97%, selanjutnya penduduk beragama Katolik yakni sebesar 2%. Selain itu terdapat penduduk beragama Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dan aliran kepercayaan lainnya. Keberagaman agama di kabupaten ini sangat tinggi sehingga toleransi agama harus dikembangkan dan dipertahankan agar dapat hidup dengan harmonis.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

No.	Agama	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Islam	1.225.568	1.230.979	1.243.565	1.248.402	1.255.556
2	Kristen	10.609	10.657	10.544	10.532	10.562
3	Katolik	24.601	24.052	23.284	23.302	22.907
4	Hindu	206	207	212	197	188
5	Budha	323	309	294	291	290
6	Konghucu	10	11	11	11	9
7	Lainnya	1.183	875	714	670	603
Jumlah		1.262.500	1.267.090	1.278.624	1.283.405	1.290.115

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, 2019

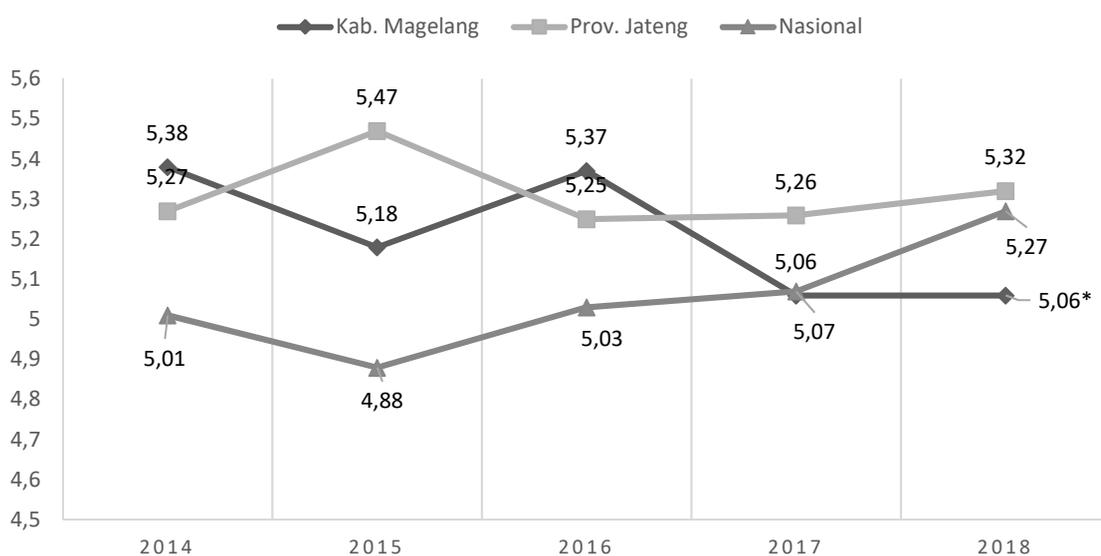
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama rentang waktu lima tahun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang relatif stabil pada kisaran 5,38% - 5,06% dengan rata-rata 5,26%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (rata-rata 5,05), namun lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (rata-rata). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2018 sebesar 5,06% setara dengan tahun 2017 (5,06%) dan lebih baik dibandingkan nasional (5,17%). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2018 sebesar 5,32% dan dibandingkan nasional (5,27%).

Terdapat tiga penjelasan, mengapa pertumbuhan ekonomi melambat. Pertama, karena terjadi perlambatan pertumbuhan dua sektor pemberi kontributor terbesar, yaitu sektor pertanian dan industri pengolahan. Sektor industri sebagai kontributor pertama (21,25%) mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 1,26%. Pada tahun 2016, sektor industri tumbuh 5,79% dan pada tahun 2017 tumbuh lebih lambat, yaitu sebesar 4,53%. Sektor pertanian sebagai kontributor terbesar kedua (20,71%) mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 1,46%. Pada tahun 2016 sektor industri tumbuh 3,32% dan pada tahun 2017 tumbuh lebih lambat menjadi 1,86%. Kedua, melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 juga disebabkan penurunan investasi yang ditunjukkan dalam angka PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto). Pada tahun 2013 PMTB sebesar 26,45%, terus menurun menjadi 25,78 pada tahun 2016. Ketiga, melambatnya

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 juga disebabkan penurunan *incremental capital output ratio* (ICOR). Pada tahun 2013 ICOR Kab. Magelang sebesar 4,47 menurun menjadi 5,45 pada tahun 2017.



*angka sementara

Gambar 2.10
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2013-2017 secara sektoral didukung dengan pertumbuhan positif seluruh lapangan usaha, dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah jasa perusahaan, diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Pertumbuhan tiap lapangan usaha di Kabupaten Magelang selama tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018 (%)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.89%	1,75%	3,54%	3.32%	1.86%	2.44%
B. Pertambangan dan Penggalian	5.90%	4,52%	1,71%	2.94%	4.20%	4.05%
C. Industri Pengolahan	10.93%	7,44%	5,52%	5.79%	4.53%	6.98%
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.65%	3,32%	1,50%	4.83%	4.91%	4.96%
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0.29%	1,81%	1,33%	2.17%	6.51%	2.49%
F. Konstruksi	5.42%	5,08%	5,93%	6.32%	6.23%	5.91%
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.13%	3,52%	3,99%	5.28%	6.09%	4.83%
H. Transportasi dan Pergudangan	8.56%	8,55%	8,54%	6.61%	6.13%	7.55%
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan	5.40%	7,50%	6,60%	6.02%	6.35%	6.27%

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Minum						
J. Informasi dan Komunikasi	7.95%	13,04%	9,45%	8.09%	11.27%	9.79%
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.39%	5,23%	8,44%	9.06%	5.89%	6.60%
L. Real Estate	7.70%	7,18%	7,35%	6.56%	6.49%	7.07%
M,N. Jasa Perusahaan	12.06%	8,36%	9,74%	10.18%	8.72%	10.10%
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2.73%	1,67%	4,24%	2.22%	2.57%	2.63%
P. Jasa Pendidikan	9.41%	10,17%	7,10%	6.45%	7.15%	8.00%
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.10%	11,17%	6,92%	9.78%	8.60%	8.81%
R,S,T,U. Jasa Lainnya	9.22%	8,51%	3,29%	8.64%	8.79%	8.17%
PDRB	5.91%	5,38%	5,18%	5.37%	5.06%	5.44%

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari Rp 17.020.755,61 juta (2013) menjadi Rp 20.882.801 juta (2017). Demikian juga dengan nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku pada periode yang sama meningkat dari Rp. 19.602.844,86 juta (2013) menjadi Rp. 28.045.174 trilyun (2017). Peningkatan nilai PDRB baik ADHK Tahun 2010 dan ADHB didukung dengan peningkatan nilai PDRB pada seluruh lapangan usaha. Rincian nilai PDRB tiap lapangan usaha baik ADHK 2010 maupun ADHB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19
 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
 Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2013	2014	2015	2016	2017
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.900.103	3.968.480	4.109.141	4.245.740	4.324.893
B. Pertambangan dan Penggalian	706.372	738.286	750.943	772.990	805.456
C. Industri Pengolahan	3.539.294	3.802.680	4.012.571	4.244.932	4.437.345
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10.907	11.269	11.439	11.992	12.581
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.080	18.407	18.652	19.057	20.297
F. Konstruksi	1.609.322	1.691.118	1.791.406	1.904.581	2.023.236

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2013	2014	2015	2016	2017
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.500.051	2.588.142	2.691.442	2.833.603	3.006.270
H. Transportasi dan Pergudangan	619.318	672.277	729.692	777.889	825.559
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	677.721	728.538	776.587	823.333	875.649
J. Informasi dan Komunikasi	667.692	754.788	826.096	892.927	993.559
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	435.101	457.848	496.492	541.480	573.355
L. Real Estate	346.974	371.874	399.216	425.387	452.994
M,N. Jasa Perusahaan	38.334	41.537	45.583	50.225	54.604
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	645.104	655.888	683.672	698.849	716.810
P. Jasa Pendidikan	818.858	902.153	966.240	1.028.593	1.102.138
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	121.845	136.202	145.634	159.884	173.634
R,S,T,U. Jasa Lainnya	365.678	396.801	409.849	445.280	484.420
PDRB	17.020.756	17.936.288	18.864.652	19.876.744	20.882.801

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.20
 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang
 Tahun 2013-2017

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2013	2014	2015	2016	2017
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.698.034	5.180.516	5.672.624	6.001.891	6.109.389
B. Pertambangan dan Penggalian	758.101	925.847	1.081.439	1.140.800	1.235.485
C. Industri Pengolahan	4.163.188	4.739.300	5.269.654	5.715.498	6.083.683
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10.330	10.703	11.433	12.564	14.278
E. Pengadaan Air,					

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2013	2014	2015	2016	2017
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.843	19.527	20.486	21.341	22.962
F. Konstruksi	1.804.903	2.032.068	2.240.639	2.421.237	2.653.667
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.792.601	2.980.680	3.223.591	3.516.599	3.855.484
H. Transportasi dan Pergudangan	627.824	729.827	820.656	879.968	997.903
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	776.872	882.266	980.916	1.096.807	1.201.523
J. Informasi dan Komunikasi	638.366	704.278	756.341	818.843	949.119
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	513.793	563.839	634.887	714.606	788.352
L. Real Estate	356.116	401.249	445.879	482.445	526.299
M,N. Jasa Perusahaan	42.711	47.921	55.349	63.090	71.045
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	755.468	805.662	873.406	941.578	997.561
P. Jasa Pendidikan	1.108.648	1.276.873	1.388.111	1.524.253	1.699.000
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144.741	168.512	188.190	208.452	231.882
R,S,T,U. Jasa Lainnya	392.304	454.346	485.043	548.977	607.541
PDRB	19.602.845.00	21.923.411.00	24.148.644.00	26.108.949.00	28.045.174.00

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Sektor yang dominan menunjang perekonomian daerah di Kabupaten Magelang adalah sektor primer yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan kontribusi sebesar 20,71% serta industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 21,25% pada tahun 2017. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung mengalami penurunan, sementara itu kontribusi sektor industri pengolahan menunjukkan trend meningkat. Pertumbuhan sektor primer terus menurun, sedangkan sektor sekunder dan tersier cenderung naik.

Tabel 2.21
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
di Kabupaten Magelang

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		Hb	Hk								
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,97	22,91	23,63	22,13	23,97	22,91	23,63	23,40	21,78	20,71
2	Pertambangan dan Penggalian	3,87	4,15	4,22	4,12	3,87	4,15	4,22	4,44	4,41	3,86
3	Industri Pengolahan	21,24	20,79	21,62	21,20	21,24	20,79	21,62	21,80	21,69	21,25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,11	0,09	0,10	0,10	0,11	0,09	0,08	0,08	0,10
6	Konstruksi	9,21	9,46	9,27	9,43	9,21	9,46	9,27	9,29	9,46	9,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,25	14,69	13,60	14,43	14,25	14,69	13,60	13,39	13,75	14,40
8	Transportasi dan Pergudangan	3,20	3,64	3,33	3,75	3,20	3,64	3,33	3,40	3,56	3,95
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,96	3,98	4,02	4,06	3,96	3,98	4,02	4,06	4,28	4,19
10	Informasi dan Komunikasi	3,26	3,92	3,21	4,21	3,26	3,92	3,21	3,13	3,38	4,76
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	2,56	2,57	2,55	2,62	2,56	2,57	2,66	2,81	2,75
12	Real Estate	1,82	2,04	1,83	2,07	1,82	2,04	1,83	1,85	1,88	2,17
13	Jasa Perusahaan	0,22	0,23	0,22	0,23	0,22	0,23	0,22	0,23	0,25	0,26
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,85	3,79	3,67	3,66	3,85	3,79	3,67	3,66	3,56	3,43
15	Jasa Pendidikan	5,66	4,81	5,82	5,03	5,66	4,81	5,82	5,77	6,06	5,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,72	0,77	0,76	0,74	0,72	0,77	0,78	0,83	0,83
17	Jasa Lainnya	2,00	2,15	2,07	2,21	2,00	2,15	2,07	2,01	2,17	2,32
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari Rp.19,602,844.00 juta (2013) menjadi Rp 26,108,949.00 juta (2016).

Demikian juga dengan nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan pada periode yang sama meningkat dari Rp 17.020.756 juta (2013) menjadi Rp. 20.882.801 juta (2017).

Tabel 2.22
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang
Tahun 2013-2016 (Juta Rupiah)

Sektor PDRB Pengeluaran Seri 2010	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	15.203.515.00	16.525.058.00	17.824.181.00	19.068.541.00
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	361.325.00	416.122.00	449.990.00	485.222.00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.730.237.00	1.916.932.00	2.127.326.00	2.208.562.00
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.147.306.00	5.909.839.00	6.568.277.00	7.049.221.00
Perubahan Inventori	985.074.00	1.152.563.00	799.000.00	207.342.00
Ekspor	7.054.331.00	7.483.485.00	8.093.797.00	9.200.203.00
Impor	10.878.944.00	11.480.588.00	11.713.927.00	12.110.142.00
Net Ekspor	(3,824,613.00)	(3,997,103.00)	(3,620,130.00)	(2,909,940.00)
	19,602,844.00	21,923,411.00	24,148,644.00	26,108,949.00

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2017

Tabel 2.23
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang
Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Sektor PDRB Pengeluaran Seri 2010	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12.716.030	13.170.151	13.707.303	14.317.885	14.967.593
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	304.619	323.926	319.783	337.020	351.286
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.394.414	1.429.358	1.464.116	1.472.425	1.513.353
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.501.616	4.679.504	4.889.693	5.124.684	5.481.955
Perubahan Inventori	544.883	561.287	157.169	142.566	151.535
Ekspor	7.297.928	7.276.740	7.844.697	8.292.527	8.641.789
Impor	9.738.734	9.504.677	9.518.108	9.810.362	10.224.710
Net Ekspor	(2.440.806)	(2.227.937)	(1.673.412)	(1.517.835)	(1.582.920)
PDRB Pengeluaran	17.020.756	17.936.288	18.864.652	19.876.744	20.882.801

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama lima tahun mengalami penurunan, jika pada tahun 2013 Konsumsi RT sebesar 77,56%, maka pada tahun 2017 Konsumsi RT menjadi sebesar 72,77%. Demikian juga komponen *net export* (expor – import) selama lima tahun mengalami penurunan, jika pada tahun 2013 komponen net export sebesar -19,51%, pada tahun 2017 komponen net export menjadi sebesar -19,51%. Perkembangan positif terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto

(PMTB). Jika pada tahun 2013 komponen PMTB sebesar 26,26%, pada tahun 2017 komponen PMTB menjadi sebesar 27.45%.

Tabel 2.24
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Sektor PDRB Pengeluaran Seri 2010	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	77.56	75.38	73.81	73.03	72.77
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.84	1.9	1.86	1.86	1.85
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.83	8.74	8.81	8.46	8.36
Pembentukan Modal Tetap Bruto	26.26	26.96	27.2	27	27.45
Perubahan Inventori	5.03	5.26	3.31	0.79	1.36
Ekspor	35.99	34.13	33.52	35.24	33.19
Impor	55.5	52.37	48.51	46.38	44.98
Net Ekspor	-19.51	-18.23	-14.99	-11.15	-11.79
PDRB Pengeluaran	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama lima tahun mengalami penurunan, jika pada tahun 2013 Konsumsi RT sebesar 74.71%, maka pada tahun 2017 Konsumsi RT menjadi sebesar 71.67%. Demikian juga komponen *net export* (expor - import) selama lima tahun mengalami penurunan, jika pada tahun 2013 komponen *net export* sebesar -14.34%, pada tahun 2017 komponen *net export* menjadi sebesar -7.58%.

Perkembangan stagnan terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Jika pada tahun 2013 komponen PMTB sebesar 26.45%, pada tahun 2017 komponen PMTB menjadi sebesar 26.25%.

Tabel 2.25
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Sektor PDRB Pengeluaran Seri 2010	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	74.71%	73.43%	72.66%	72.03%	71.67%
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.79%	1.81%	1.70%	1.70%	1.68%
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.19%	7.97%	7.76%	7.41%	7.25%
Pembentukan Modal Tetap Bruto	26.45%	26.09%	25.92%	25.78%	26.25%
Perubahan Inventori	3.20%	3.13%	0.83%	0.72%	0.73%
Ekspor	42.88%	40.57%	41.58%	41.72%	41.38%

Sektor PDRB Pengeluaran Seri 2010	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Impor	57.22%	52.99%	50.45%	49.36%	48.96%
Net Ekspor	-14.34%	-12.42%	-8.87%	-7.64%	-7.58%
PDRB Pengeluaran	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama lima tahun tumbuh 5,38%, namun mengalami pelambatan. Jika pada tahun 2013 tumbuh sebesar 5,91%, maka pada tahun 2017 menjadi sebesar 5,06%.

Kontribusi ekspor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama lima tahun mengalami pertumbuhan paling cepat sebesar 4,95%. Namun juga mengalami pelambatan, jika dibanding dengan komponen ekspor pada tahun 2013 yang tumbuh sebesar 7,33%, maka pada tahun 2017 komponen ekspor tumbuh sebesar 4,21%.

Demikian juga komponen *net export* (expor – import) selama lima tahun mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2013 komponen *net export* sebesar – 19,22%, pada tahun 2017 komponen *net export* menjadi sebesar 4,29%.

Perkembangan pertumbuhan terjadi pada komonen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Jika pada tahun 2013 komponen PMTB tumbuh sebesar 2,97%, pada tahun 2017 komponen PMTB tumbuh sebesar 6,97%.

Tabel 2.26

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Sektor PDRB Pengeluaran Seri 2010	Tahun					RATA-RATA
	2013	2014	2015	2016	2017	
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.32	3.57	4.08	4.45	4.54	4.19
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7.73	6.34	-1.28	5.39	4.23	4.48
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.83	2.51	2.43	0.57	2.78	2.42
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.97	3.95	4.49	4.81	6.97	4.64
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	
Ekspor	7.33	-0.29	7.81	5.71	4.21	4.95
Impor	-0.84	-2.4	0.14	3.07	4.22	0.84
Net Ekspor	-19.22	-8.72	-24.89	-9.3	4.29	-11.57
PDRB Pengeluaran	5.91	5.38	5.18	5.37	5.06	5.38

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.2.2. Laju Inflasi

Inflasi di Kabupaten Magelang mengalami penurunan, jika pada tahun 2014 sebesar 7,91 menjadi lebih lambat pada tahun 2018 menjadi sebesar 2,66. Pada tahun 2018 laju inflasi Kabupaten Magelang lebih lambat dari laju

inflasi Provinsi Jawa Tengah (2,83) maupun Nasional (3,13). Inflasi Kabupaten Magelang pada periode 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27

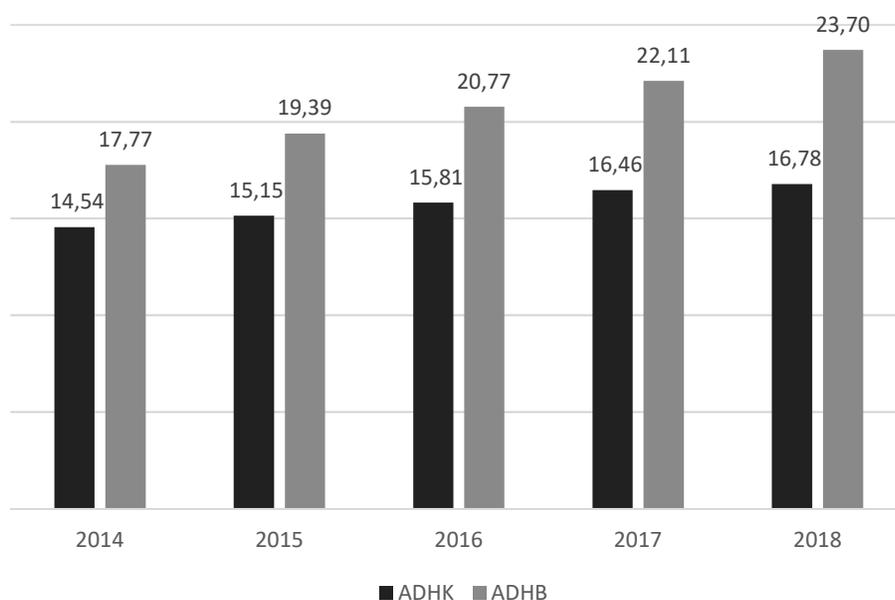
Inflasi Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY)
Tahun 2014-2018

No	Kelompok Pengeluaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bahan Makanan	%	13,02	3,80	6,25	2,15	3,39
2	Makanan Jadi, Minuman dan Rokok	%	5,23	6,40	5,23	2,47	2,99
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	%	7,83	5,34	1,21	5,67	1,68
4	Sandang	%	3,44	2,23	2,53	2,77	2,06
5	Kesehatan	%	3,30	3,45	2,42	2,21	2
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	%	2,36	2,67	0,80	2,64	1,45
7	Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan	%	10,48	-1,86	2,14	5,01	3,57
Inflasi Kabupaten Magelang		%	7,91	3,60	2,86	3,47	2,66
Inflasi Provinsi Jawa Tengah		%	8,22	2,73	2,36	3,71	2,83
Inflasi Nasional		%	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2019

2.1.2.3. PDRB Per Kapita

Pada tahun 2014 PDRB ADHK per kapita Kabupaten Magelang sebesar Rp.14.538.602/tahun dan meningkat menjadi Rp.17.005.825/tahun pada tahun 2018. Sementara itu, pada tahun 2014 PDRB ADHB per kapita Kabupaten Magelang sebesar Rp.17.770.441/tahun dan meningkat menjadi Rp.23.922.080/tahun pada tahun 2018. Data PDRB Per Kapita (ADHK dan ADHB), selengkapnya disajikan pada tabel berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun 2019

Gambar 2.11
PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

2.1.2.4. Indeks Gini/Koefisien Gini

Indeks gini/koefisien gini merupakan salah satu indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan atau dengan kata lain indikator pengukur ketimpangan pendapatan. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya, kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. Angka koefisien gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Angka koefisien gini yang semakin mendekati nol berarti dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati 1, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar.

Tabel 2.28

Indeks Gini Kabupaten Magelang tahun 2014-2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Indeks Gini	0,34	0,36	0,37	n/a	0,344
2	Kriteria Ketimpangan	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
3	Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah	0,38	0,38	0,37	0,37	n/a

Sumber: Laporan Akhir Evaluasi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Koefisien gini Kabupaten Magelang pada periode tahun 2014-2016 relatif tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi masih dalam kategori ketimpangan rendah, yaitu antara 0,34-0,37. Koefisien gini Kabupaten Magelang masih lebih kecil dibandingkan dengan koefisien gini Provinsi Jawa Tengah. Artinya, kondisi distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Magelang masih dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah.

2.1.2.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Ketimpangan pendapatan penduduk tidak hanya dapat dilihat dari angka koefisien gini, tetapi dapat diamati dengan pendekatan pemerataan pendapatan versi Bank Dunia. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia merupakan pemerataan pendapatan yang diperhitungkan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia. Pendekatan ini mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan sebagai berikut.

1. Ketimpangan pendapatan tinggi
Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen.
2. Ketimpangan pendapatan sedang/menengah
Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen.
3. Ketimpangan pendapatan rendah
Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen.

Tabel 2.29
Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Kelompok Penduduk					
		2014	2015	2016	2017	2018
1	40 % Penduduk Berpendapatan Terendah	19,46	19,18	n/a	n/a	18,61
2	40% Penduduk Berpendapatan Menengah	36,22	33,72	n/a	n/a	36,15
3	20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi	44,32	47,10	n/a	n/a	45,42
Kriteria Ketimpangan		Rendah	Rendah	n/a	n/a	rendah

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2019

Berdasarkan pendekatan ini, distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Magelang masuk ke dalam kategori ketimpangan pendapatan rendah. Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk pada periode 2014-2015 cenderung tetap, sedangkan untuk proporsi penduduk berpendapatan tinggi mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2014-2015. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk di dalam Kabupaten Magelang cenderung tetap.

2.1.2.6. Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Wilayah)

Indeks Williamson merupakan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah. Perhitungan Indeks Williamson didasarkan pada PDRB per kapita dan jumlah penduduk. Hasil pengukuran Indeks Williamson kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. $IW < 0,4$ artinya tingkat ketimpangan rendah;
- b. $0,4 < IW < 0,5$ artinya tingkat ketimpangan moderat;
- c. $IW > 0,5$ artinya tingkat ketimpangan tinggi.

Jika Indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi. Sebaliknya apabila Indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin besar ketimpangan pembangunan ekonomi.

Indeks Williamson Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori moderat. Tercatat besar indeks williamson Kabupaten Magelang pada tahun

2014 sebesar 0,40 dan cenderung stagnan hingga tahun 2016. Besar nilai Indeks Williamson yang masih masuk dalam kategori moderat menunjukkan bahwa masih perlunya pemerataan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Magelang.

2.1.2.7. Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya masalah pendapatan, akan tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang. Penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada tingkat global, nasional, provinsi maupun di Kabupaten Magelang.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal sebagai *Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs*, sesuai tujuan pertama, Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun, pada tahun 2030 menargetkan angka kemiskinan menjadi nol (*zero poverty*).

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh Pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Berbicara kemiskinan tidak hanya terkait capaian persentase kemiskinan, namun ada beberapa indikator lain yang perlu dilihat, yaitu jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Untuk melihat capaian indikator kemiskinan konsumsi tahun 2014-2019 bisa dilihat di tabel di bawah ini.

Tabel 2.30
Kemiskinan Berdasarkan Tingkat Konsumsi di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Indikator Kabupaten Magelang	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita Bulan	246.292	253.866	271.800	281.237	296.327
Jumlah penduduk miskin	000 Jiwa	160,48	162,38	158,86	157,15	143,44
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	12,98	13,07	12,67	12,42	11,23
Persentase Jumlah Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	(%)	87,02	86,93	87,33	87,58	88,77
Indek keparahan kemiskinan	%	0,47	0,32	0,44	0,34	0,31
Indek Kedalaman Kemiskinan	%	2,07	1,60	1,84	1,67	1,55

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2019

Pada tahun 2014, persentase penduduk miskin Kabupaten Magelang mencapai 12,98% atau setara dengan 160 ribu jiwa dari total penduduk. Angka ini terus mengalami penurunan secara perlahan hingga mencapai angka 11,23% atau 143 ribu jiwa di tahun 2018. Jika dilihat perbandingan dengan provinsi dan nasional, secara umum menunjukkan kecenderungan

menurun. Pada periode Maret tahun 2018, capaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (11,32%), namun lebih tinggi dari Nasional (9,82 %). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel di bawah ini.

Tabel 2.31
Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan Kab. Magelang, Provinsi dan Nasional 2014-2018

No	Wilayah	Tahun				
		2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	Kabupaten Magelang	12,98	13,07	12,67	12,42	11,23
2	Prov. Jawa Tengah	14,46	13,58	13,27	13,01	11,32
3	Nasional	11,25	11,22	10,86	10,64	9,82

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2019

Persentase angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang dari tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi, tetapi menunjukkan tren penurunan. Adapun penurunan angka kemiskinan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 1.19%. Demikian juga capaian provinsi dan nasional, jika dilihat di grafik di atas penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2018.

Penurunan angka kemiskinan tersebut secara umum dipengaruhi beberapa faktor. Adapun tiga faktor dominan tersebut adalah: 1) bantuan sosial dari pemerintah turun tepat waktu, 2) nilai inflasi bisa dikendalikan, dan 3) naiknya nilai tukar petani.

Walaupun angka kemiskinan di Kabupaten Magelang mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi capaian tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019 dan Target SDGs sebesar 9% pada tahun 2018.

Tabel 2.32
Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan Kab. Magelang dengan Kota/ Kabupaten se Eks. Keresidenan Kedu 2014-2018

No	Wilayah	Tahun				
		2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	Kabupaten Magelang	12,98	13,07	12,67	12,42	11,23
2	Kota Magelang	9,14	9,05	8,79	8,00	7,87
3	Kabupaten Purworejo	14,41	14,27	13,91	13,00	11,67
4	Kabupaten Temanggung	11,55	11,76	11,60	11,00	9,87
5	Kabupaten Wonosobo	21,42	21,45	20,53	20,00	17,58
6	Kabupaten Kebumen	20,50	20,44	19,86	19,00	17,47

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2019

Dibandingkan 6 (enam) kab/ kota se eks. Keresidenan Kedu, capaian angka kemiskinan Kabupaten Magelang tahun 2018 berada pada posisi ke 3 (tiga), diatas Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung, tetapi dibawah Kabupaten Wonosobo, Kabupeten Purworejo dan Kabupaten Kebumen. Penurunan angka kemiskinan tersebut secara umum dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:1) bantuan sosial dari pemerintah turun tepat waktu, 2) nilai inflasi bisa dikendalikan, dan 3) naiknya nilai tukar petani.

Penduduk miskin di Kabupaten Magelang memiliki ciri-ciri antara lain rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kondisi kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya keahlian, rendahnya akses terhadap tanah dan modal, sangat rentan terhadap gejolak ekonomi, bencana alam, dan rendahnya partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, serta masih kurangnya keamanan individu. Adapun faktor yang mempengaruhi kemiskinan, antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.

Dalam rangka mengoptimalkan ketepatan sasaran program dan kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah melakukan upaya yang komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan dengan mensinergikan antara peran masyarakat, pemerintahan desa, dan kebijakan Pemerintah Daerah. Bahkan pada tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang secara kelembagaan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Magelang.

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh dimensi politik yang disebabkan oleh struktur ekonomi politik yang timpang, sehingga pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada strategi penanggulangan kemiskinan. Strategi yang dilakukan dengan memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan menciptakan pembangunan yang inklusif, memperluas perumbuhan sector ekonomi kerakyatan dan kesempatan kerja, serta melakukan evaluasi efektivitas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

2.1.2.8. Indeks Pembangunan Manusia

Pada 2017 IPM Kabupaten Magelang mencapai 6,39 mengalami kenaikan sebesar 2,04 dari tahun 2014 yang sebesar 66,35 dengan rata-rata kenaikan per tahun 0,68. Semua komponen pembentuk indikator IPM mengalami peningkatan. Meski terus mengalami perkembangan positif, namun nilai indikator IPM Kabupaten Magelang masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Jawa Tengah maupun Indonesia. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.32
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang,
Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2017

Indikator IPM	Satuan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
Umur Harapan Hidup	Tahun	73,25	73,27	73,33	73,39
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,00	12,14	12,15	12,47
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,02	7,19	7,40	7,41
Pengeluaran Riil Per Kapita	Ribu Rp	7.877	8.182	8.501	8.627
IPM Kabupaten Magelang		66,35	67,13	67,85	68,39
Provisi Jawa Tengah		68,78	69,49	69,98	70,52
Nasional		68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber : BPS Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2019

1. Umur Harapan Hidup

Pada 2017 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Magelang mencapai 73,39 mengalami kenaikan sebesar 0,14 dari tahun 2014 yang sebesar 73,25. Namun UHH Kabupaten Magelang masih berada di bawah nilai dan pertumbuhan nilai IPM Provinsi Jawa Tengah maupun Indonesia. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

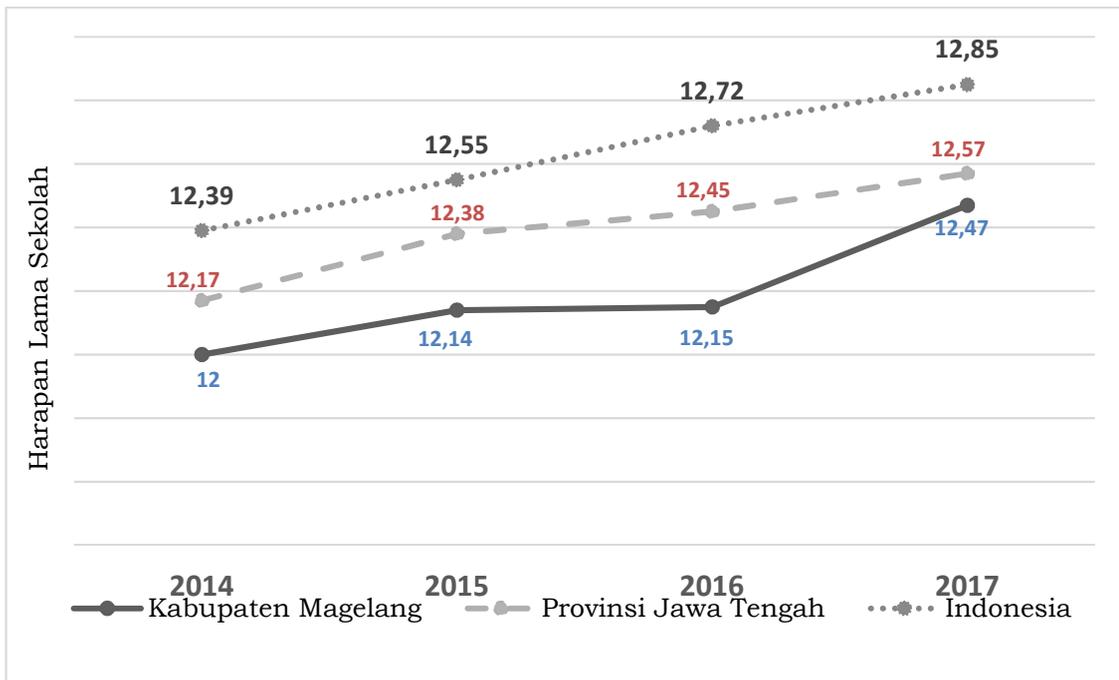
Tabel 2.33
Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Magelang	73,25	73,27	73,33	73,39
Provisi Jawa Tengah	73,88	73,96	74,02	74,08
Nasional	70,59	70,78	70,90	71,06

Sumber : Hasil Olahan 2019

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

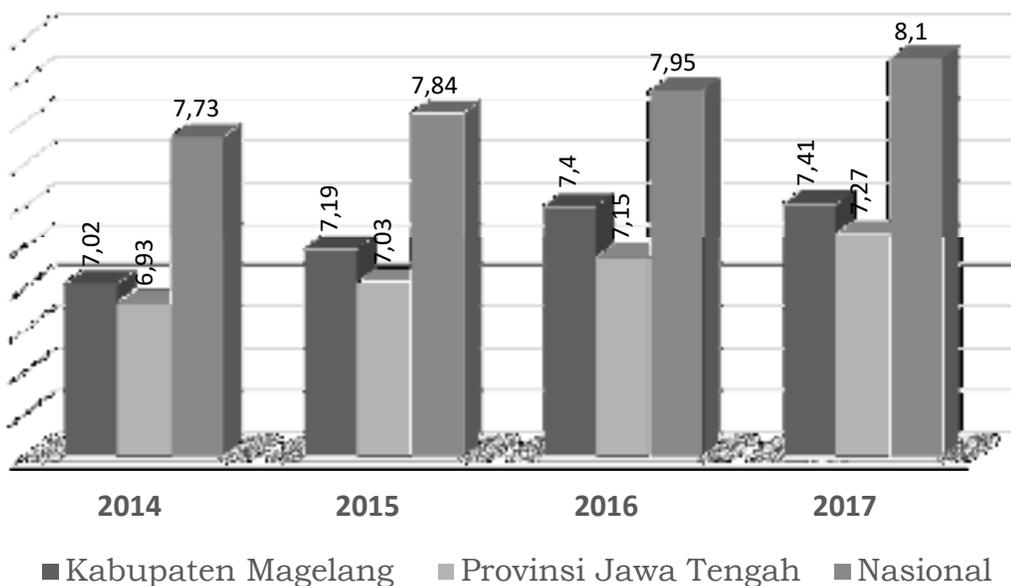
Perkembangan HLS di Kabupaten Magelang cenderung meningkat dari sebesar 12 (2014) menjadi 12,47 (2017). Harapan lama sekolah di Kabupaten Magelang tahun 2014-2017 lebih rendah dari provinsi dan nasional. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut



Gambar 2.12
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2014-2017

3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Pada 2017 RLS Kabupaten Magelang mencapai 7,41 tahun, mengalami kenaikan sebesar 0,39 tahun dari tahun 2014 yang sebesar 7,02. Jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa tengah dan nasional, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang pada tahun 2014-2017 lebih tinggi daripada Jawa Tengah namun lebih rendah dari Rata-rata lama sekolah nasional. Data selengkapnya disajikan dalam tabel beriku.



Gambar 2.13
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2014-2017

4. Pengeluaran per Kapita Riil yang Disesuaikan

Besar pengeluaran riil per kapita Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2014 hingga tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan besarnya pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang mencapai 2,38% selama empat tahun terakhir. Namun, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional nilai pengeluaran riil per kapita Kabupaten lebih rendah. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.34
Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Pengeluaran Riil Per Kapita (Ribu Rp)	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Magelang	7.877	8.182	8.501	8.627
Provinsi Jawa Tengah	9.640	9.930	10.153	10.377
Nasional	9.903	10.150	10.420	10.664

Sumber : Bappeda dan litbangda Kabupaten Magelang Tahun 2019

2.1.2.9. Angka Partisipasi Kasar

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK). Perkembangan APK Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.35
Indeks Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Partisipasi Kasar PAUD	52,66	55,57	60,27	62,64	62,64
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	101,33	99,87	103,69	105,87	110,75
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	83,52	84,49	82,40	88,38	88,91
Angka Partisipasi Kasar	82,73	87,51	87,70	88,55	87,43

Sumber Data : BPS Kabupaten Magelang, 2019

APK jenjang SD tahun 2014-2018 telah mencapai 100%, bahkan melampaui. Namun untuk jenjang SMP sederajat APK belum mencapai 100%. Besaran APK tidak sampai 100 menunjukkan masih ada anak yang seharusnya sekolah ternyata tidak sekolah. Hal ini secara umum menunjukkan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan

2.1.2.10. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Nilai ideal APM adalah 100%.

Tabel 2.36
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	87,02	86,74	89,70	92,66	98,86
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	62,40	64,86	62,78	67,76	76,42
Angka Partisipasi Murni	74,71	75,8	76,24	80,21	87,64

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019

APM jenjang SD dan SMP di Kabupaten Magelang selama periode tahun 2014-2018 menunjukkan peningkatan, namun belum mencapai angka 100%, bahkan untuk jenjang SMP masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah bahwa di kabupaten Magelang belum optimal.

2.1.2.11. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan adalah angka yang memperlihatkan penduduk yang telah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini mampu memperlihatkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Tabel 2.37
Angka Pendidikan yang Ditamatkan
di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No	APT	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI/Sederajat	%	34,48	33,97	34,18	33,82	33,70
2	SLTP/MTs/Sederajat	%	16,82	16,48	16,29	16,61	16,76
3	SLTA/Sederajat	%	16,34	16,20	16,24	16,92	17,19
4	Perguruan Tinggi	%	4,01	4,65	3,87	3,99	4,12

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2018

Persentase tertinggi pada indikator angka pendidikan yang ditamatkan (APT) di Kabupaten Magelang terdapat pada jenjang pendidikan SD. Hal tersebut menunjukkan sebagian besar penduduk Magelang hanya tamat pada jenjang pendidikan SD. Untuk perkembangan APT SD secara umum mengalami sedikit penurunan selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2016 APT SD sebesar 33, 82%, sedangkan tahun 2017 turun menjadi 33,70%. APT SMP pada tahun 2016 sebesar 16,61%, sedangkan pada tahun 2017 mencapai angka 16,76%. Dengan berkurangnya APT SD/MI/ sederajat dan naiknya angka APT SMP/MTs/sederajat, SLTA /sederajat serta perguruan tinggi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Magelang mengalami kenaikan.

2.1.2.12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender (BPS).

Pembangunan gender atau pembangunan yang berhubungan dengan gender (*Gender Development atau Gender Related Development*), ditujukan untuk mengetahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

Ketimpangan di antara laki-laki dan perempuan dinyatakan dalam suatu angka atau indeks. Semakin besar ketimpangan di antara keduanya dalam pembangunan manusia, semakin rendah nilai indeks tersebut. Variabel yang digunakan untuk menghitung indeks pembangunan gender (*GDI atau IPG*) adalah:

1. Proporsi jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan.
2. Usia harapan idup (laki-laki dan perempuan).
3. Persentase melek huruf (laki-laki dan perempuan).
4. Rata-rata lama sekolah (laki-laki dan perempuan).
5. Persentase penduduk aktif secara ekonomi (TPAK) laki-laki dan perempuan.
6. Upah di luar sektor pertanian (laki-laki dan perempuan).
7. Paritas daya beli (*purchasing power parity/PPP*).
8. Setiap variabel, kecuali proporsi penduduk dan paritas daya beli (*PPP*) dihitung indeks. Akhirnya didapatkan:
 1. indeks usia harapan hidup
 2. indeks pendidikan
 3. indeks distribusi pendapatan.

Berikut ini adalah capaian pembangunan gender (IPG) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018:

Tabel 2.38

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Kabupaten Magelang	92,79	92,91	n/a	91,95	92,23
Provinsi Jawa Tengah	91,89	92,21	92,22	91,94	91,95
Nasional	90,34	91,03	90,82	90,96	90,99

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2018

Secara umum IPG di Kabupaten Magelang pada Tahun 2014-2018 mengalami penurunan walaupun hanya sedikit. Pada tahun 2014 capaian IPG Kabupaten Magelang sebesar 92,79%, sempat turun di angka 91,95% pada tahun 2017 tetapi berhasil naik kembali menjadi 92,23% pada Tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan sedikit melebar di Kabupaten Magelang. Jika dibandingkan capaian IPG Provinsi dan Nasional, sampai dengan tahun 2018 capaian Kabupaten Magelang masih lebih baik (di atas Povinsi dan Nasional).

2.1.2.13. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG mencakup partisipasi berpolitik, ekonomi, dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dimensi berpartisipasi politik diwakili dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Dimensi ekonomi dan pengambilan keputusan diwakili oleh perempuan sebagai tenaga profesional teknisi, kepemimpinan, dan ketatalaksanaan. Dimensi terakhir berupa dimensi penguasaan sumber daya ekonomi, yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Berdasarkan data tahun 2014-2017, angka IDG di Kabupaten Magelang mengalami penurunan. Angka IDG dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2017, IDG di Kabupaten Magelang sebesar 62,43, menurun drastis jika dibandingkan dengan angka tahun 2015 serta lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Angka IDG tersebut menunjukkan masih cukup rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.39

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Magelang	65,54	68,53	n/a	62,43
Provinsi Jawa Tengah	74,46	74,80	74,89	75,10
Nasional	70,68	70,83	71,39	71,74

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2018

2.1.2.14. Kebudayaan

Pencapaian pembangunan seni budaya dapat dilihat berdasarkan indikator jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang diinventarisasi, serta jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir (2013- 2017) menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016. Jumlah sarana penyelenggaraan seni di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir (2013- 2017) menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2013 sebanyak 18 buah meningkat menjadi 27 buah di tahun 2017. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir (2013- 2017) menunjukkan kecenderungan meningkat, pada tahun 2013 sebanyak 600 buah meningkat menjadi 683 buah di tahun 2017.

Tabel 2.40

Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	54	44	81	38	n/a
2.	Jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya	25	25	25	27	n/a
3.	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang diinventarisasi	n/a	698	698	922	949
4.	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	n/a	n/a	10	10	10

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang Tahun 2019

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

1) Angka Kelulusan

Angka kelulusan di Kabupaten Magelang selama tahun 2014 sampai 2017 berada pada kondisi yang baik, hampir mendekati 100%. Capaian terbaik angka kelulusan SD/MI/Paket A diperoleh pada tahun 2016 yaitu sebesar 100%. Sementara itu, angka kelulusan SMP/MTs/Paket B mencapai 100% pada tahun 2015. Data angka kelulusan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41

Angka Kelulusan di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	99,98	99,98	100,00	99,99	100,00
Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	99,49	100,00	99,98	99,77	99,91

Sumber Data : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan data tahun 2018, angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Magelang sebesar 100 %. Artinya proses belajar mengajar di dalam kelas untuk mencetak murid yang sesuai kemampuan pada jenjang pendidikan tertentu yang dilakukan guru telah berhasil.

2) Rerata Nilai Ujian Nasional

Rerata nilai ujian nasional SD/MI/Paket A di Kabupaten Magelang selama tahun 2014 sampai 2018 cenderung menurun. Berbeda dengan rerata nilai ujian nasional SMP/MTs/Paket B yang cenderung naik walaupun angka kenaikannya belum signifikan. Data rerata nilai ujian nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.42
 Rerata Nilai Ujian Nasional di Kabupaten Magelang
 Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Rerata Nilai UN SD/MI/ Paket A	7,77	7,25	7,03	7,59	7,03
Rerata Nilai UN SMP/MTs/Paket B	5,81	6,19	5,86	5,78	5,98
Rerata Nilai UN	6,79	6,72	6,445	6,685	6,505

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2019

Tren untuk rerata nilai UN SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Magelang mengalami penurunan. Penurunan nilai rata-rata tersebut dapat mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kualitas pada lulusan peserta didik.

3) Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B

Setiap sekolah/madrasah di Indonesia harus mengikuti proses akreditasi. Akreditasi sekolah/madrasah merupakan kegiatan penilaian sekolah/madrasah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan evaluasi eksternal untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Hasil dari akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk pemetaan mutu pendidikan, pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan.

Peringkat akreditasi sekolah terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu: A (Amat Baik) dengan nilai $85 < \text{nilai} \leq 100$; B (Baik) dengan nilai $70 < \text{nilai} \leq 85$ dan C (Cukup) dengan nilai $56 \leq \text{nilai} \leq 70$. Sekolah dikatakan layak dan cukup bermutu apabila berakreditasi minimal B.

Tabel 2.43
 Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang Berakreditasi Minimal B
 Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase SD berakreditasi minimal B.	Persen	98,01	98,51	98,18	98,68	99,34
2	Persentase SMP berakreditasi minimal B.	Persen	90,98	89,60	88,19	86,82	88,37

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2019

Persentase SD berakreditasi minimal B di Kabupaten Magelang pada tahun 2014 sebesar 98,01%, naik menjadi 99,34% pada tahun 2018. Persentase SMP berakreditasi minimal B sebesar 90,98% pada tahun 2014, mengalami penurunan menjadi 88,37% pada tahun 2018.

Walaupun belum mencapai 100%, kenaikan persentase sekolah yang berakreditasi minimal B ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan mutu pendidikan SD/MI.

4) Kompetensi Pendidik

Pelaksanaan urusan pendidikan dilihat dari kompetensi guru meliputi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dan guru yang bersertifikat pendidik, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.44
Kompetensi Pendidik di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1.	Guru memenuhi kualifikasi S1/DIV					
	1.1 Guru SD/MI	%	64.44	74.69	79.66	83.75
	1.2 Guru SMP/MTs	%	85.22	87.92	87.97	90.48
2.	Guru bersertifikasi					
	2.1. Guru SD/MI	%	-	43,68	49,08	51,49
	2.2. Guru SMP/MTs	%	-	55,57	55,89	56,31

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2018

Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/DIV pada tahun 2014 sebesar 64,44%, tahun 2015 sebanyak 74,69%, tahun 2016 sebanyak 79,66% dan tahun 2017 sebanyak 83,75%. Terlihat bahwa jumlah guru SD/MI yang memiliki kualifikasi SI/DIV menunjukkan trend yang naik. Tahun 2017 jumlah guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV sebanyak 83,75% berarti masih ada guru SD/MI yang belum memenuhi kualifikasi DIV/S1 sebesar 16,25%. Selain itu, pada tahun 2017 masih terdapat permasalahan terhadap banyaknya guru non PNS (33%), yang pengangkatannya tanpa seleksi yang terstandar dan belum dipayungi regulasi yang jelas. Hal tersebut sebagai akibat tidak seimbang guru PNS SD/MI yang pensiun dengan guru PNS SD/MI yang direkrut pemerintah. Jumlah guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV, dari tahun 2014-2018 juga mengalami peningkatan. Guru yang bersertifikasi di SD/MI maupun di SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun 2014-2018. Namun jumlah guru yang bersertifikasi masih perlu ditingkatkan karena tahun 2017 baru mencapai 51,49% pada jenjang SD dan 56,31% pada jenjang SMP.

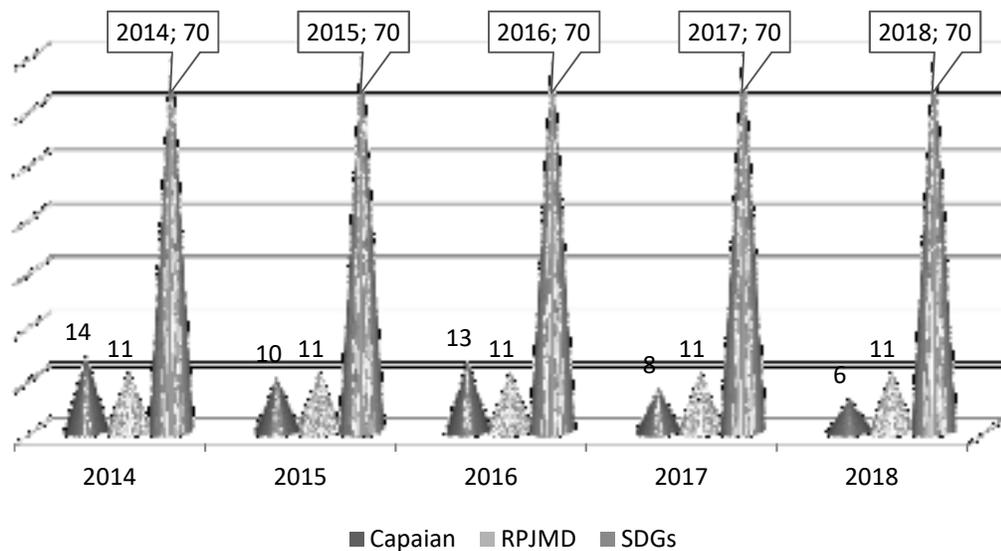
Saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk dapat memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan kualitas pada generasi muda. Salah satu langkah agar bonus demografi menjadi berkah bagi negara yaitu meningkatkan kualitas pendidikan melalui akses pendidikan yang meluas, merata, dan berkeadilan. Menurut data BPS, pada tahun 2017 persentase pengangguran terbuka masih tergolong besar. Jika dilihat dari pendidikan terakhir yang ditempuh, lulusan SD, SMP, SMA, SMK, menyumbang banyak angka pengangguran terbuka. Oleh karena itu,

dalam memanfaatkan bonus demografi dilakukan pemerataan pendidikan yang meluas dan berkeadilan. Pengembangan SDM melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga pendidik merupakan strategi persiapan guna menangkap peluang bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada tahun 2020-2030.

b. Kesehatan

1) Angka Kematian Ibu

Angka kematian menjadi salah satu indikator untuk mengukur kinerja pelayanan kesehatan di Kabupaten Magelang. Angka kematian merupakan komposit dari empat komponen yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABa), dan Angka Kematian Neonatal (AKN). AKI, AKB, AKABa dari tahun 2014-2018 sebagaimana gambar dibawah ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

Gambar 2.14
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Berdasarkan data Dinas Kesehatan tahun 2019 kejadian angka kematian ibu tahun 2014 sebesar 14 kasus, tahun 2015 sebesar 10 kasus, tahun 2016 sebesar 13 kasus, tahun 2017 sebesar 8 kasus dan pada tahun 2018 sebesar 6 kasus. Secara umum angka kematian ibu di Kabupaten Magelang mengalami trend penurunan dari 14 kasus pada tahun 2014 menjadi 6 kasus pada tahun 2018.

2) Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi per 1.000

kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi.

Tabel 2.45
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Kematian Bayi	Bayi	149	131	147	114	55
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	18.663	17.956	17.984	17.192	17.424
3	Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)	Permil	7,98	7,30	8,17	6,13	5,68

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magelang sebesar 7,98 per 1.000 kelahiran hidup. AKB tersebut justru mengalami tren naik turun hingga tahun 2016 yang kemudian menurun mencapai 5,68 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2018. Dalam gambar berikut dapat dibandingkan AKB di Kabupaten Magelang dengan target SDGs. Dalam goal SDGs 2030, AKB ditargetkan agar dapat ditekan hingga 12 per 1000 kelahiran hidup. Pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, AKB ditargetkan pada tahun 2019 menjadi 6,5 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan standar SDGs tersebut, AKB di Kabupaten Magelang berada di posisi yang sudah baik yaitu di bawah 12 sejak tahun 2014 atau 7,98 per 1000 kelahiran hidup menurut RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.

3) Angka Kematian Balita

Kematian balita adalah kematian yang terjadi pada anak usia 1 hingga tepat sebelum 5 tahun. Angka Kematian Balita (AKABA) menunjukkan banyaknya kasus kematian anak balita per 1.000 kelahiran hidup di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu. Kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak usia di bawah 5 tahun. Data angka kematian balita di Kabupaten Magelang dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Kematian	Balita	20	70	63	47	116

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	Balita						
2.	Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	18.663	17.956	17.984	17.192	17.424
3.	Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)	permil	1,07	3,90	3,50	2,73	6,66

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan tabel di atas, angka kematian balita di Kabupaten Magelang dalam periode 2014-2018 mengalami tren parabola dengan pola naik kemudian turun. Puncak AKB terjadi pada tahun 2018 yaitu mencapai 6,66 kematian per 1000 kelahiran hidup, sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 1,07 kematian per 1000 kelahiran hidup. Ada penurunan drastis kematian balita di tahun 2016 yaitu dari 63 kasus menjadi hanya 47 kasus pada tahun 2017 dan naik kembali pada tahun 2018.

4) Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Stunting

a) Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score <-3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwasiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). Persentase balita gizi buruk dihitung dari banyaknya balita yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah seluruh balita di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama. Data prevalensi balita gizi buruk dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.47

Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Balita Gizi Buruk	Anak	36	30	36	18	15
2.	Jumlah Balita	Anak	99.882	99.291	98.231	97.249	89.890
3.	Prevalensi balita gizi buruk	Persen	0,04	0,03	0,04	0,02	0,02
4	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan tabel di atas, persentase balita gizi buruk di Kabupaten Magelang dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami fluktuasi, meskipun pernah terjadi penurunan pada tahun 2015 yaitu dari 0,04% ke 0,03%, akan tetapi jika dilihat perkembangannya sejak tahun 2014 yang hanya sebesar 0,04% (36 kasus) menjadi 0,02% (18 kasus) pada 2017.

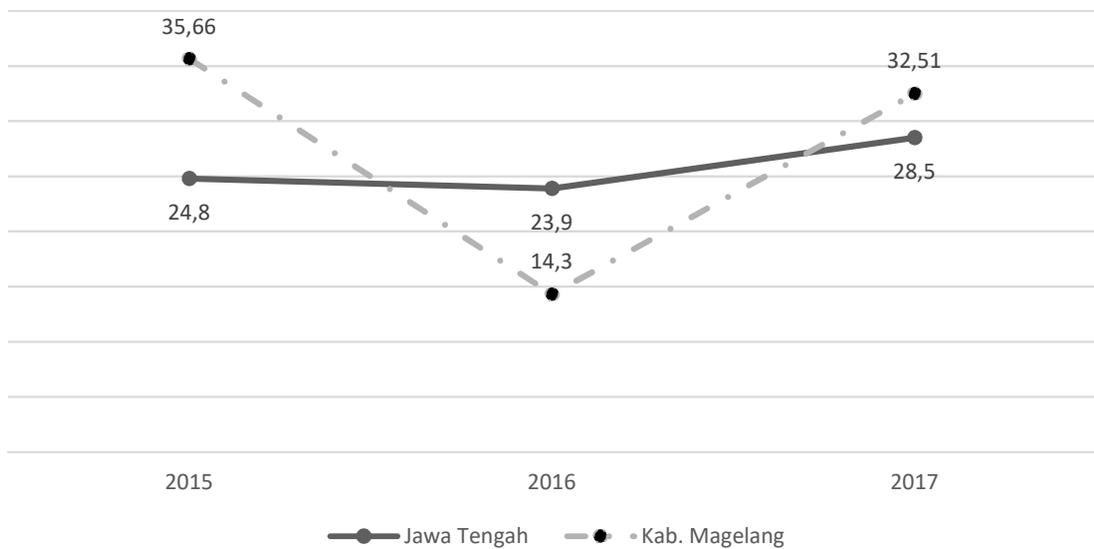
b) Stunting

Masih adanya kasus stunting disebabkan oleh beberapa hal antara lain minimnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, berimbang sehat, dan aman. Hal tersebut ditunjukkan dengan rendahnya angka rata-rata konsumsi energi, pola asuh orang tua terhadap balita, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, risiko akibat pernikahan anak, serta kurangnya ketersediaan akses air minum layak, air bersih, dan sanitasi.

Banyaknya anak yang menderita stunting ini tidak lepas dari banyaknya masalah kekurangan gizi yang terjadi pada ibu yang hamil, sehingga anak yang ada dalam kandungan mengalami kekurangan gizi untuk berkembang, sehingga terlahir dengan kondisi kurang normal.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah akses pangan dan gizi di beberapa wilayah di Kabupaten Magelang yang masih minim. Seperti di daerah pegunungan yang jauh dari cakupan pangan bergizi. Daerah endemik gondok seperti di pegunungan juga mempengaruhi. Kebanyakan stunting terjadi di daerah sana. Selain karena kurang cakupan pangan bergizi, bisa jadi akibat kekurangan yodium.

Pada tahun 2018 sesuai laporan dari puskesmas, prevalensi stunting sebesar 5,7. Sementara prevalensi Kasus Stunting di Kab. Magelang Tahun 2015-2017, disajikan dalam grafis berikut.



Sumber data : Dinas Kesehatan Prov, Jateng dan Kab. Magelang

Gambar 2.15

Prevalensi Kasus Stunting di Kab. Magelang Tahun 2015-2017

5) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur cakupan pelayanan dokter di masyarakat. Berdasarkan jenis profesinya, dokter dikelompokkan menjadi tiga yaitu

dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang bisa disebut dengan tenaga medis, yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dokter Umum	Orang	88	88	71	123	57
2	Dokter Gigi	Orang	37	38	37	44	29
3	Dokter Spesialis	Orang	52	51	51	52	15
4	Jumlah tenaga medis	Orang	177	177	159	219	101
5	Jumlah penduduk	Orang	1,262,500	1,267,090	1,278,624	1,283,405	1,290,115
6	Rasio dokter Umum per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	6.97	6.95	5.55	9.58	4.42
7	Rasio dokter gigi per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	2.93	3.00	2.89	3.43	2.25
8	Rasio dokter spesialis per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	4.12	4.02	3.99	4.05	1.16
9	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	14.02	13.97	12.44	17.06	7.83

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

Menurut data yang ada pada tabel di atas, secara jumlah, dokter umum dan dokter spesialis di Kabupaten Magelang mengalami penurunan kuantitas. Dokter umum tahun 2014 ada 88 orang, sedangkan dokter spesialis ada 52 orang. Di tahun 2018 jumlah dokter umum 57 orang dan dokter spesialis 15 orang. Penurunan juga terjadi pada jumlah dokter gigi yang mengalami kenaikan jumlah dari 37 tahun 2014 menjadi 29 di tahun 2018.

Rasio dokter umum yang berada pada angka 4 memiliki gap yang sangat besar dengan standar idealnya yang mencapai 43 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio dokter spesialis yang idealnya adalah 11 per 100.000 penduduk hanya mampu dipenuhi sebanyak 1,16 per 100.000 penduduk. Tidak jauh berbeda dengan rasio dokter gigi yang rasionya baru mampu dicapai sebanyak 2,25 per 100.000 penduduk dibandingkan standar idealnya yang sebesar 10.

6) Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit

Kualitas layanan kesehatan merupakan salah satu indikator kualitas layanan publik. Dengan kualitas layanan kesehatan yang baik maka akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kualitas puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Magelang dapat dilihat dari jumlah puskesmas dan rumah sakit yang terakreditasi seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.49
Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Puskesmas terakreditasi	Unit	29	29	29	29	29
2.	Jumlah Puskesmas yang ada	Unit	0	0	10	22	29
3.	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	0	0	34,48	75,86	100,00
4.	Jumlah RSUD	Unit	1	1	1	1	1
5.	Jenjang RSUD berakreditasi	tingkat	dasar	dasar	dasar	madya	madya

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

7) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan desa/kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, DPT 3 kali, Hepatitis B 4 kali, polio 4 kali, dan campak 1 kali) dalam waktu satu tahun. Standar Pelayanan Minimal Nasional menetapkan target 100% desa/kelurahan UCI pada tahun 2010 untuk setiap kabupaten. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

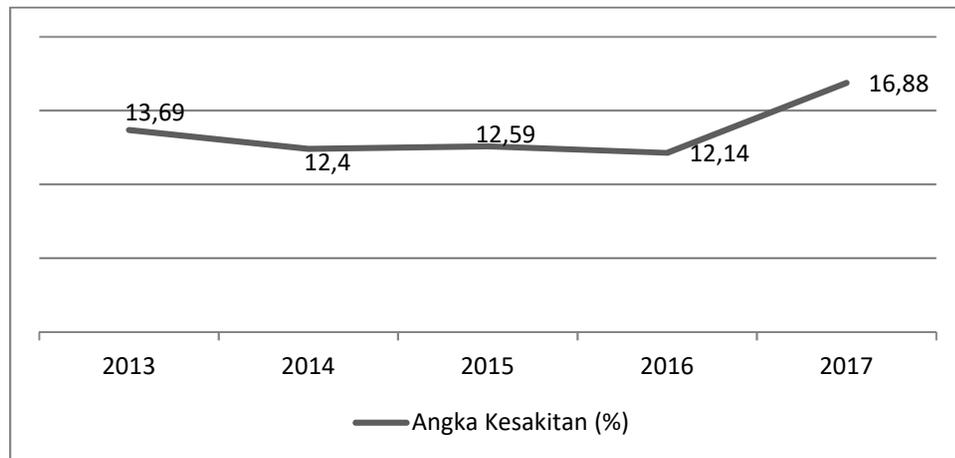
No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah desa / kelurahan UCI	Unit	372	372	372	372	372
2.	Jumlah Seluruh desa/ kelurahan	Unit	372	372	372	372	372
3.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

Cakupan desa/kelurahan UCI di Kabupaten Magelang berdasarkan tabel di atas telah mencapai 100% di setiap tahun (tahun 2014-2018). Dapat dilihat bahwa jumlah desa atau kelurahan UCI bersifat statis atau tidak berubah sejak tahun 2014 hingga 2018 yaitu sebanyak 372 unit.

8) Angka Kesakitan

Angka kesakitan Kabupaten Magelang pada tahun 2013 sebesar 13,69. Sementara pada tahun 2017 angka kesakitan meningkat menjadi 16,88. Data angka kesakitan di Kabupaten Magelang sebagai berikut.



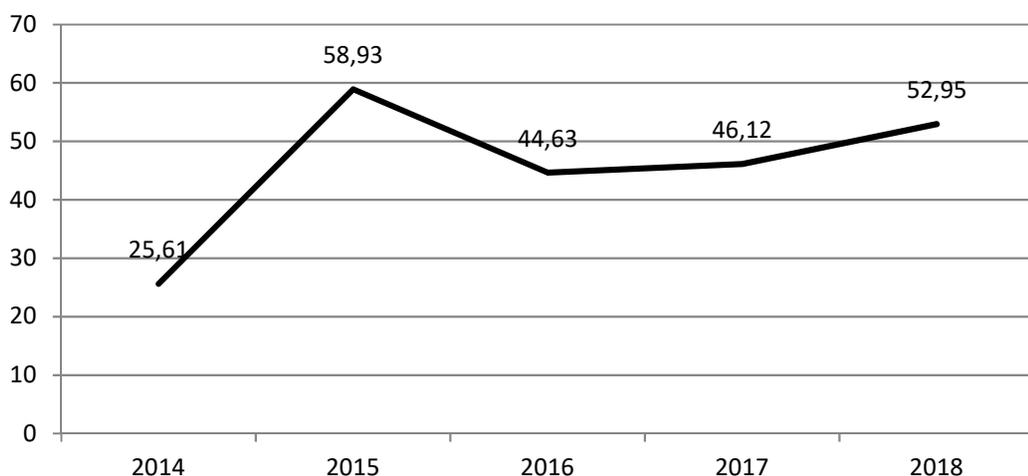
Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2.16
Angka Kesakitan Kab. Magelang Tahun 2013-2017

9) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular

a) Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) merupakan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) di seluruh Kabupaten Magelang disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

Gambar 2.17
Cakupan CNR TBC BTA di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Selama kurun waktu 5 tahun dari 2014-2018, terjadi fluktuasi jumlah penemuan dan penanganan kasus TBC BTA di Kabupaten Magelang. Tercatat, tahun 2014 CNR penderita TBC mengalami peningkatan di tahun 2015 dan menurun kembali pada tahun 2016 dan kembali meningkat di tahun 2017.

b) Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar, ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF).

Tabel 2.51
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penemuan penderita baru DBD	Jiwa	288	408	463	123	107
2	Jumlah penderita baru DBD yang diobati	Jiwa	288	408	463	123	107
3.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan tabel cakupan di atas, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD tahun 2014-2018 telah mencapai 100%. Cakupan 100% ini telah mampu dicapai sejak tahun 2014 dan dipertahankan hingga 2018. Bila dilihat dari data dasarnya, maka tidak ada perubahan pada jumlah penderita DBD yang ditemukan dan diobati dari tahun 2014 hingga tahun 2018.

c) Angka Kejadian Malaria

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang upaya pengendaliannya menjadi komitmen global dalam Sustainable Development Goals (SDG's). Di Kabupaten Magelang, pada tahun 2015 penderita malaria dengan pemeriksaan sedian darah (positif) sebanyak 166 jiwa. Tahun 2015 ini, merupakan jumlah kasus ini tertinggi selama kurun waktu 2014-2018. Semua kasus malaria tersebut tidak ada kematian sehingga Case Fatality Rate (CFR) adalah 0. Tahun 2016, terjadi penurunan drastis menjadi 21 jiwa, dan penderita malaria meninggal adalah 0 sehingga Case Fatality Rate-nya 0. Pada tahun 2018, jumlah penderita malaria kembali turun menjadi 4 jiwa. Penderita malaria di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Penderita Malaria dengan Pemeriksaan Darah (positif)
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penderita malaria dengan pemeriksaan darah (positif)	Jiwa	6	166	21	14	4
2.	Jumlah penderita malaria meninggal	Jiwa	0	0	0	0	0
3.	Case Fatality Rate (CFR)	Persen	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

d) HIV/AIDS

HIV dan AIDS merupakan permasalahan global yang juga dirasakan oleh seluruh negara, termasuk Indonesia. Penderita HIV/AIDS menyebar diseluruh wilayah dan berbagai kalangan. Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.53
Prevalensi HIV/AIDS
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penderita HIV/AIDS	Jiwa	26	12	62	60	29
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.233.695	1.245.496	1.275.123	1.268.396	1.274.881
3.	Prevelensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0.0021	0.0010	0.0049	0.0047	0.0023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penderita HIV/AIDS di Kabupaten Magelang angkanya pada tahun 2014 sebesar 26 jiwa dan tahun 2018 menjadi 29 jiwa.

- 10) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Tidak Menular
Penyakit menular yang dimaksud dalam narasi ini adalah penyakit hipertensi, Diabetes Melitus (DM), dan gangguan jiwa, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.54
Penyakit Tidak Menular Tahun 2014-2018 di Kab. Magelang

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Hipertensi	Jiwa	22.411	8.486	n/a	41.099	50.438
2.	Diabetes Melitus (DM)	Jiwa	3.873	1.346	n/a	2.812	7.077
3.	Gangguan Jiwa	Jiwa	695	575	n/a	889	1.434

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019; data diolah

Data di atas terlihat bahwa penyakit tidak menular tiap tahunnya mengalami peningkatan. Penyakit hipertensi pada tahun 2014 penderitanya 22.411 jiwa dan pada tahun 2018 menjadi 50.438 jiwa atau naik 44,43%. Penyakit diabetes melitus pada tahun 2014

penderitanya 3.673 jiwa dan pada tahun 2018 menjadi 7.077 jiwa atau naik 54,73%. Penyakit gangguan jiwa pada tahun 2014 penderitanya 695 jiwa dan pada tahun 2018 menjadi 1.434 jiwa atau naik 48,47%.

Kenaikan penyakit tidak menular ini salah satunya disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat. Untuk meminimalkan kenaikan penyakit tidak menular perlu perhatian dan penanganan yang lebih intensif.

Bonus demografi penduduk di usia produktif ini bisa menjadi sumber daya manusia yang baik, mendorong kemajuan bangsa karena tersedianya tenaga kerja dan penerus tenaga kerja tersedia.

Khususnya di Kabupaten Magelang bonus demografi merupakan tantangan bagi pemerintah daerah, jika pemerintah daerah dapat menjaga kestabilan penduduk yang hidup sehat, tidak sakit-sakitan, tidak stunting, tidak mengalami gizi buruk dan berotak cerdas, itu akan menjadi peluang bagus untuk pembangunan bangsa. Sehingga derajat kesehatan meningkat.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum yang harus ditangani sesuai kewenangan kabupaten meliputi jalan, bangunan pelengkap jalan, irigasi, cakupan layanan air minum, dan cakupan layanan air limbah domestik. Sedangkan urusan terkait dengan penataan ruang adalah kesesuaian tata ruang.

1) Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 180.182/180/KEP/25/2015 tentang Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebesar 1.000,83 km yang meliputi 249 ruas jalan. Data dan kondisi jalan di Kabupaten Magelang sebagai berikut:

Tabel 2.55
Data Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan
di Kabupaten Magelang

No	Uraian	Satuan	2017	2018
	JALAN			
1	Jalan Nasional	Km	36,40	36,40
2	Jalan Provinsi	Km	118,68	118,68
3	Jalan Kabupaten	Km	1000,83	1000,83
4	Jalan Lingkungan	Km	2123, 31	2123, 31
5	Jumlah ruas jalan kab	ruas	249	249
	BANGUNAN PELENGKAP JALAN			
1	Jembatan kabupaten	Buah	337	339
2	Panjang jalan kab yang berdrainase	Km	357,5	360
3	Panjang jalan kab yang bertrottoar	Km	50,59	52,62
4	Panjang jalan kab yang bertalud (memiliki dinding penahan tanah)	Km	95,55	96,55

Sumber: Hasil Olahan, 2019

Kondisi jalan kabupaten pada tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.56
Kondisi Permukaan Jalan di Kabupaten Magelang Sesuai Kewenangan Tahun 2014 - 2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Baik	Km	579,94	608,34	619,80	736,88	742,30
			65,32	68,52	61,93	73,63	74,17
2	Sedang	Km	195,66	170,27	227,94	156,65	143,83
			22,04	19,18	22,78	15,65	14,37
3	Rusak	Km	91,02	88,02	120,96	96,27	95,98
			10,25	9,91	12,09	9,62	9,59
4	Rusak Berat	Km	21,21	21,20	32,13	11,03	18,72
			2,39	2,39	3,21	1,10	1,87
	Total Panjang jalan	Km	887,83	887,83	1000,83	1000,83	1000,83

Sedangkan kondisi jalan kewenangan kabupaten sesuai dengan standar yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.57
Kondisi Standar Jalan di Kabupaten Magelang Sesuai Kewenangannya Tahun 2017 – 2018

No	Uraian	Satuan	2017	2018
	JALAN			
1	Jalan kabupaten lebar standar $\geq 5,5$ m (PP 34/2006)	Km	207,74	227,74
		%	20,76	22,76
	BANGUNAN PELENGKAP JALAN			
1	Jembatan kabupaten kondisi baik	Unit	332	336
		%	80,78	81,75
2	Jembatan kabupaten yang memiliki lebar standar 5,5 m	Buah	183	183
		%	44,53	44,53
3	Panjang jalan yang memiliki drainase kondisi baik	Km	268,13	270,63
		%	26,79	27,04
4	Panjang jalan yang memiliki trotoar kondisi baik	Km	50,59	52,62
		%	5,06	5,26
5	Panjang jalan bertalud (memiliki dinding penahan tanah) kondisi baik	Km	71,66	72,66
		%	7,16	7,26

Sumber: Hasil Olahan, 2019

Berdasarkan tabel di atas, kondisi pembangunan jalan di Kabupaten Magelang belum diselenggarakan secara holistik dan terintegrasi dengan bagian-bagian jalan. Hal ini dapat dilihat, pembangunan jalan tidak diimbangi dengan penyediaan bangunan pelengkap jalan yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan fungsi jalan bagi pengguna

jalan. Persentase bangunan pelengkap jalan terhadap panjang jalan kabupaten masih rendah :

- a) Persentase panjang jalan kabupaten yang memiliki trotoar terhadap panjang jalan kabupaten masih sebesar 5,26%.
- b) Persentase panjang jalan kabupaten terhadap panjang jalan kabupaten yang memiliki drainase sebesar 27,04%; dan
- c) Persentase panjang jalan kabupaten terhadap panjang jalan kabupaten yang bertalud (memiliki dinding penahan tanah) sebesar 7,26%.

2) Irigasi

Kondisi fisik jaringan irigasi di Kabupaten Magelang dijelaskan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.58
Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten

No	Jaringan Irigasi	Satuan	2017	2018
1	Jumlah Daerah Irigasi	DI	993	993
2	Luas Daerah Irigasi (DI)	Ha	35.662	35.662
3	Luas DI yang teraliri/terakses air irigasi	Ha	20.995,94	21.247
4	Panjang saluran irigasi	Km	887,12	887,12
5	Panjang saluran irigasi kondisi baik	Km	572,63	578,58
6	Jumlah bangunan irigasi	Unit	827	827
7	Jumlah Bangunan Irigasi kondisi baik	Unit	533	563

Sumber: Hasil Olahan, 2019

Luas Daerah Irigasi yang teraliri/terakses air irigasi dengan baik, baru mencapai 59,58% pada tahun 2018. Hal ini disebabkan 34,78% saluran irigasi dan 31,92% bangunan irigasi dalam kondisi rusak, serta terjadinya penurunan debit air yang cukup signifikan pada musim kemarau.

Dalam rangka mendukung meningkatnya produktivitas pertanian dan tercapainya ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Magelang, maka perlu menjamin ketersediaan air untuk keperluan irigasi melalui pengelolaan sumber-sumber daya air yang baik.

Pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Magelang menghadapi tantangan yang cukup besar. Kebutuhan akan penyediaan air yang mencakup kapasitas daya dukung serta tingkat perkembangan kebutuhan air semakin dirasakan meningkat, baik penyediaan air untuk kebutuhan domestik, pertanian, industri, pemukiman, dan sektor lainnya. Kebutuhan air untuk sawah irigasi di Kabupaten Magelang rata-rata sebesar 904.718.323 m³/tahun.

Tabel 2.59
Kebutuhan Air di Kabupaten Magelang Tahun 2017

Kebutuhan	Jumlah	Satuan	Kebutuhan	Satuan	Kebutuhan air (m³/tahun)
Penduduk	1.268.396	Jiwa	100,00	ltr/hr/kapita	46.296.454
Kota Magelang*					12.738.084
Sawah Irigasi	28.688,43	(Ha)	1,00	liter/detik/hektar	904.718.323
Lahan Kering	11.310,22	(Ha)	0,30	liter/detik/hektar	107.003.743
Pekerja Industri & Perdagangan	278.055	(Jiwa)	500,00	liter/hari/karyawan	50.745.038
Total					1.121.501.642

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Magelang, 2018

*Berdasarkan Debit eksisting yang diambil PDAM Kota Magelang,

Sedangkan total potensi ketersediaan air di Kabupaten Magelang mencapai 1.436.627.538 m³/tahun. Rincian ketersediaan air di Kabupaten Magelang sebagaimana disajikan didalam tabel berikut ini.

Tabel 2.60
Ketersediaan Air di Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Ketersediaan	Satuan	Jumlah
1.	Air Limpasan	m ³ /tahun	1.180.874.936
2.	Potensi Mata Air	m ³ /tahun	257.752.602
	Total	m ³ /tahun	1.436.627.538

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Magelang, 2018

Pemenuhan kebutuhan air untuk keperluan irigasi di Kabupaten Magelang, diperoleh melalui pemanfaatan air sungai dan mata air. Namun ketersediaan air untuk keperluan irigasi sering mengalami penurunan pada musim kemarau. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan mata air yang digunakan untuk irigasi dan air bersih. Sehingga perlu mencari solusi lain untuk pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka pemenuhan ketersediaan air untuk keperluan irigasi antara lain melalui pembangunan embung dan pembinaan kelembagaan petani pengelola air.

Tabel 2.61
Pengelolaan Air Untuk Layanan Irigasi
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	2017	2018
1.	Jumlah embung	Buah	1	3
2.	jumlah kelembagaan petani pengelola air	Kelompok	283	283

No	Uraian	Satuan	2017	2018
3.	jumlah kelembagaan petani pengelola air, yang berfungsi dengan baik	Kelompok	83	103

Sumber: Perhitungan Tim KLHS RPJMD Kabupaten Magelang, 2018

3) Bangunan Gedung

Pembangunan bangunan gedung di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2018. Pada tahun 2017 terdapat 1451 bangunan kantor pemerintah yang telah dibangun dan bertambah menjadi 1454 unit pada tahun 2018. Sedangkan pembangunan bangunan berupa landmark di kawasan perbatasan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 7 unit.

Dalam rangka meningkatkan kualitas bangunan gedung, maka mulai pada periode RPJMD yang selanjutnya, setiap bangunan gedung wajib memiliki SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang dimulai dengan bangunan gedung pemerintah. Direncanakan pada akhir periode RPJMD 2019-2024, bangunan gedung pemerintah yang telah memiliki SLF sebanyak 40 unit

4) Cakupan Layanan Air Minum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Kondisi cakupan layanan air minum di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62

Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah tangga terlayani air minum	RT	249.645	255.553	257.724	279.671	353.485
2.	Jumlah rumah tangga	RT	320.605	324.075	325.475	336.608	407.301
3.	Cakupan Layanan Air Minum	%	77,87	78,86	79,18	83,09	86,79

Sumber: Bidang AMPL Cipta Karya, Dinas DPUPR Kabupaten Magelang Tahun 2019; sata diolah

Jumlah rumah tangga terlayani air minum di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2014 hingga 2018 memiliki kecenderungan meningkat sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas. Namun demikian, capaian ini masih jauh dari target *Universal Access* yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu 100% akses masyarakat terhadap layanan air minum pada akhir tahun 2019. Sampai dengan akhir tahun 2018, masih terdapat 13,21% rumah tangga yang belum mendapat pelayanan air minum.

5) Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik

Seperti halnya layanan air minum, cakupan layanan sanitasi air limbah domestik merupakan urusan pemerintahan yang wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Jumlah rumah tangga yang mempunyai akses terhadap sanitasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi	Rumah tangga	257.703	258.862	263.081	274.057	351.460
2	Jumlah rumah tangga	Rumah tangga	320.605	324.075	325.475	336.608	407.301
3	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	80,38	79,88	80,83	81,42	86,29

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2019; Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, setiap rumah tangga minimal mempunyai satu akses pengolahan air limbah domestik. Berdasarkan data yang tertuang pada tabel di atas, masih terdapat *gap* sebesar 14,36% antara capaian dengan target ideal yaitu 100% akses masyarakat terhadap layanan sanitasi air limbah domestik pada akhir tahun 2019.

6) Sarana Prasarana ke-Puan

Peningkatan sarana prasarana ke-Puan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas konstruksi pembangunan di Kabupaten Magelang. Peningkatan sarana prasarana ke-Puan yang dimaksud meliputi peningkatan ketersediaan dan kondisi sarana prasarana ke-PUan dan peningkatan layanan jasa konstruksi.

Jumlah sarana dan prasarana ke-Puan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebanyak 122 buah, dengan jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik adalah sejumlah 122 buah. Pada tahun 2024 direncanakan terdapat penambahan kebutuhan sarana prasarana ke-Puan menjadi 150 buah.

Layanan jasa konstruksi yang sesuai SOP pada tahun 2017 sebanyak 225 buah dan pada tahun 2018 sebanyak 180 buah

7) Penataan Ruang

Pengaturan penataan ruang di Kabupaten Magelang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang 2010-2030. Belum adanya rencana rinci selain ketiga

dokumen tata ruang tersebut menjadikan perangkat perizinan menjadi belum memadai, sehingga kesesuaian tata ruang antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang masih belum optimal. Hal ini bisa dilihat pada nilai kesesuaian tata ruang pada tahun 2018 sebesar 76,31%, yang berarti bahwa penggunaan dokumen rencana tata ruang dalam pemanfaatan ruang masih belum optimal sehingga dibutuhkan upaya peningkatan kesesuaian tata ruang.

Tabel 2.64

Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (ha)	20.6	4.11	4.11	31	39,59
Jumlah IMB yang dikeluarkan (buah)	429	594	384	577	346

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2019

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Di dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penyediaan rumah layak huni dengan lingkungan yang sehat dan aman merupakan salah satu prioritas nasional yang ingin dicapai. Dalam rangka mengakomodir prioritas nasional, Pemerintah Kabupaten Magelang menyusun sasaran daerah, salah satunya yaitu meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas dengan dilengkapi dengan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman. Data *backlog* kepemilikan rumah yaitu selisih antara jumlah kepala keluarga dengan jumlah rumah yang ada di Kabupaten Magelang adalah 76.602.

Upaya mewujudkan sasaran daerah bidang perumahan tersebut diantaranya melalui fasilitasi penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), peningkatan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh dan penyediaan sarana dan prasarana permukiman.

Peningkatan rumah layak huni diarahkan sebagai berikut.

- 1) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin yang didasarkan pada pemutakhiran Basis Data Terpadu yang dilakukan 2 kali setiap tahun.
- 2) Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat (Permen PUPR Nomor 29/2018) tentang penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten.

Tabel 2.65

Kondisi Perumahan di Kabupaten Magelang

No.	Indikator	Satuan	2017	2018
1.	Penanganan RTLH	KK	15.279	23.356

No.	Indikator	Satuan	2017	2018
2.	Jumlah PBDT	Unit	66.273	65.830
3.	Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Unit	13	9

Sumber : DPRKP Kabupaten Magelang, 2019

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, baik melalui dana APBN maupun APBD. Sampai dengan tahun 2018, upaya pengurangan kawasan kumuh mengalami kenaikan yang signifikan. Simulasi perhitungan pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang yang berdasarkan pada PermenPU 2/PRT/M/2016 dan Surat Edaran DJCK Nomor 40/SE/DC/2016, baru dilakukan sejak tahun 2018. Hasil pengurangan atau penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.66
Persentase Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2018

No	Indikator	Satuan	2015-2017	2018
1.	Luas Kawasan kumuh	Ha	97,20	97,20
2.	Luas Kawasan kumuh yg sudah tertangani	Ha	13.91	66.53
3.	Persentase kawasan kumuh tertangani	%	14.31	68.45

Sumber : DPRKP Kabupaten Magelang, 2019

Upaya lain dalam rangka penanganan permukiman kumuh dan mencegah munculnya permukiman kumuh yang baru adalah dengan penyediaan sarana prasarana perumahan dan permukiman melalui pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU).

- e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1) Penegakan Perda

Jumlah penegakan perda merupakan persentase penyelesaian penegakan perda dibandingkan jumlah pelanggaran perda. Semakin tinggi persentase penegakan perda, maka semakin tinggi jumlah kasus yang berhasil diselesaikan. Hal tersebut menggambarkan kemampuan penyelesaian pelanggaran perda oleh petugas terkait. Tabel berikut menggambarkan data penegakan perda di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.67
Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	Kasus	171	190	174	251	81
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	Kasus	172	193	175	312	155

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
3	Penegakan PERDA	Persen	99,42	98,45	99,43	80,45	95,29

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah pelanggaran dan penegakan perda di Kabupaten Magelang fluktuatif. Namun, sebagian besar pelanggaran yang terjadi sudah mampu diselesaikan. Tingkat penyelesaian pelanggaran yang terjadi tersebut sudah jauh melebihi target setiap tahunnya yaitu 75%. Hal tersebut mengindikasikan penyelesaian masalah yang terjadi di Kabupaten Magelang sudah optimal.

2) Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Bencana kebakaran merupakan bencana yang memerlukan penanganan yang cepat. Penanganan yang cepat adalah penanganan yang dilakukan tidak melebihi tingkat waktu tanggap pada daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK). Tingkat waktu tanggap adalah ≤ 15 menit. Berikut adalah persentase tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.68
Persentase Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)
Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) ≤ 15 menit	Kejadian	23	75	54	35	81
2.	Jumlah Kejadian	Kejadian	46	94	72	55	155
3.	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	50,00	79,79	75,00	63,64	52,60

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) mengalami trend penurunan, sempat berada pada angka 79,79% pada tahun 2015, turun menjadi 52,60% pada tahun 2018. Pada tahun 2018, terdapat 81 kejadian yang dikategorikan sebagai kejadian kebakaran dengan waktu tanggap ≤ 15 menit dari 155 kejadian kebakaran atau mencapai 52,60%. Jumlah tersebut masih di bawah target Standar Pelayanan Minimum (SPM) yaitu 75%. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan tingkat kesigapan pemadam kebakaran dapat ditingkatkan

sehingga penanganan yang dilakukan dapat lebih cepat (response time rate) dan risiko kerugian akibat kebakaran dapat diminimalisir..

3) Cakupan Masyarakat yang Mendapat Pengetahuan Kebencanaan

Sebagai kabupaten yang terletak di kawasan rawan bencana, Kabupaten Magelang diwajibkan untuk memberi pengetahuan kepada penduduknya terkait kebencanaan, baik itu kerentanan, kapasitas, dan ancaman yang terdapat di kabupaten. Pengetahuan tersebut digunakan untuk peningkatan kapasitas masyarakat terutama dalam menghadapi bencana yang dapat sewaktu-waktu terjadi.

Apabila belajar dari sejarah, Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang rentan terkena bencana, terutama bencana gunung api Merapi. Selain itu, Kabupaten Magelang juga dikelilingi oleh gunung-gunung seperti Merapi, Merbabu, dan Sumbing yang mengakibatkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana tanah longsor. Oleh karena itu pengetahuan terhadap bencana menjadi penting. Di bawah ini disajikan data kebencanaan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.69
Cakupan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	15	13	21	23	8
2	Jumlah Desa Rawan Bencana	Desa	372	372	372	372	372
3	Jumlah Penanganan Tanggap Darurat yang Dilakukan	Kejadian	168	178	195	337	433
4	Jumlah Sasaran Dampak Bencana yang harus Dilakukan Tanggap Bencana	Kali	168	178	195	337	433
5	Jumlah Kejadian Bencana yang Direkomendasikan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kejadian	15	20	25	20	25
6	Jumlah Kejadian Bencana yang harus Dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kali	5	5	5	5	5
7	Cakupan Ketahanan masyarakat menghadapi bencana	%	20,00	20,00	47,00	66,67	74,10

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, 2018

Dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang, BPBD Kabupaten Magelang telah melaksanakan Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Magelang. selama kurun 2013-2018 di Kabupaten Magelang telah terbentuk 79 Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana.

Pembentukan desa tangguh bencana difokuskan pada desa-desa rawan bencana. Pembentukan destana penting karena sebagai bagian mitigasi

bencana kepada masyarakat. Selain dianggarkan dari APBD Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Magelang mendorong desa agar bisa mengalokasikan penganggaran kebencanaan melalui APBDes.

Desa-desa yang menjadi sasaran Program Desa Tangguh Bencana Tahun 2018 sejumlah 8 desa meliputi Desa Bigaran, Sidosari, Kalirejo, Genito, Salamkanci, Srumbung, Wonolelo, Ketep. Kegiatan dilaksanakan dalam beberapa tahap (8 kali pertemuan).

Adapun target yang ingin dicapai dari kegiatan desa/ kelurahan tangguh bencana antara lain:

1. Terbentuknya Tim Siaga Bencana Desa.
2. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana Desa.
3. Penentuan jalur evakuasi apabila terjadi bencana.
4. Peningkatan kapasitas tim siaga bencana khususnya dalam hal Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD).
5. Terselenggaranya Simulasi Penanganan Darurat Bencana.

BPBD Kabupaten Magelang telah melakukan pemasangan alat *EWS (Early Warning System)* Longsor sebagai system peringatan dini bahaya tanah longsor. *EWS* tersebut merupakan salah satu upaya mitigasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Magelang untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor. Sampai dengan saat ini telah dipasang sampai dengan tahun 2018, *EWS* di titik-titik rawan longsor yang mengancam beberapa desa di wilayah Kabupaten Magelang, antara lain di :

1. Dusun Citran Desa Ngepanrejo Kec. Bandongan yang mengancam warga di RW 04 sejumlah 180 KK 700 jiwa
2. Dusun Karang Wetan, Desa Kalirejo, Kec. Salaman, terdapat rekahan dengan panjang rekahan +100 m yang mengancam 13 KK/40 jiwa, jarak rekahan dg Permukiman paling atas + 5m
3. Dusun Kudusan, Desa Tirto, Kec. Grabag, terdapat rekahan dengan panjang rekahan +50 m yang mengancam 5 KK/20 jiwa, jarak rekahan dengan permukiman 100 m
4. Dusun Miriombo Wetan, Desa Giripuro, Kec. Borobudur terdapat rekahan dengan panjang rekahan + 50 m yang mengancam 14 Rumah/36 jiwa, jarak rekahan dg permukiman + 40m
5. Dusun Ngadisono Ds. Windusari Kec. Windusari

Diharapkan dengan adanya *EWS (Early Warning System)* Longsor tersebut masyarakat khususnya di wilayah terancam dapat lebih waspada akan terjadinya tanah longsor terutama di musim hujan.

f. Sosial

1) Sarana Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti pembangunan kehidupan beragama. Target pembangunan sosial diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yaitu Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang mengalami kesulitan dalam menjalani fungsi sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. Data historis kinerja makro urusan sosial disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.70
Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2014-2018

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Sarana sosial seperti panti asuhan*, Panti jompo dan panti rehabilitasi	Buah	39	39	39	39	39
PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Orang	890	3.080	40.016	38.001	79.069
PMKS yang tertangani	Orang	890	3.290	40.253	38.001	79.069
PMKS dan korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	-	-	-	28,96	46,29
Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	-	-	-	-	1,25
Korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100	100	100	100
Penduduk miskin yang memperoleh Jaminan kesehatan (JKN-PBI dan Jamkesda)	jiwa	-	-	-	752.478	759.599

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2019

Data di atas menunjukkan perkembangan PMKS dan penduduk miskin yang memperoleh bantuan pada tahun 2014-2018 meningkat. Peningkatan tersebut sangat dipengaruhi oleh penganggaran dana untuk PMKS. Mulai tahun 2016 terjadi peningkatan PMKS yang sangat drastis sampai tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan bantuan sosial yang disalurkan untuk PMKS.

Guna peningkatan pelayanan terhadap sarpras layak lansia dan difabel dilakukan sosialisasi terhadap lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk menyediakan sarana prasarana yang ramah terhadap anak, lansia maupun penyandang disabilitas. Untuk penanganan dan pemberdayaan lansia, di Kabupaten Magelang telah dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/69/Kep/24/2013 Tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Magelang Masa Bakti Tahun 2013 – 2015. Tindak lanjut dari pembentukan Komda Lansia tersebut, maka telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Komda Lansia Kab. Magelang yang melibatkan seluruh anggota Tim Komda Lansia Kab. Magelang. Pada kesempatan

tersebut disepakati bahwa masing-masing SKPD anggota Tim Komda Lansia akan melaksanakan program/ kegiatan yang mendukung terhadap penanganan lanjut usia, selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Komisi Lansia Tingkat Kecamatan di masing-masing kecamatan yang melibatkan seluruh anggota Tim.

2) PMKS yang tertangani

Pendekatan penanganan PMKS dilakukan melalui 4 (empat) pilar yakni perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Melalui pendekatan ini tidak semua penanganan PMKS bermuara pada bantuan. Namun disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan kondisi masing-masing PMKS. Penanganan PMKS dibagi ke dalam dua kelompok yaitu PMKS potensial dan non potensial. Dalam kurun waktu tahun 2014-2018 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan mengalami kenaikan secara signifikan yaitu dari 890 orang pada tahun 2014 menjadi 79.069 pada tahun 2018.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat diketahui dari jumlah persentase yang ditangani dibagi dengan jumlah PMKS yang ada. Berdasarkan data tahun 2014-2018, jumlah PMKS yang tertangani mengalami tren yang meningkat tetapi menurun pada tahun 2017.

Tabel 2.71
Penanganan PMKS di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	PMKS yang tertangani	Orang	890	3.290	40.016	38.001	79.069
2.	PMKS yang ada	Orang	141.266	112.203	131.222	131.222	170.684
3.	Penanganan PMKS	%	6,3	29,32	30,49	28,95	46,32
4.	Persentase penurunan PMKS	%	7,83	-20,57	16,95	0,00	30,07

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2013-2016 dan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2019

Perkembangan PMKS di Kabupaten Magelang dari tahun 2014-2018 fluktuatif, hal ini disebabkan karena permasalahan sosial bersifat sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Adanya kemajauan teknologi dan perbaikan kesejahteraan tidak secara signifikan akan mengurangi masalah sosial, karena kemajuna teknologi dan peningkatan kesejahteraan bisa menyebabkan permasalahan sosial baru.

Penanganan PMKS diluar panti yang dilakukan berupa bantuan sosial bagi PMKS baik untuk fakir miskin, lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar. Melalui bansos tidak terencana, membantu fakir miskin dalam bidang kesehatan (biaya perawatan bagi fakir miskin yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan), biaya pendidikan (biaya sekolah bagi yang tidak mampu membayar biaya sekolah).

Selain itu Pemkab Magelang saat ini sedang dalam proses pembentukan Unit Pelaksana Daerah (UPTD) Rumah Singgah. Bangunan yang telah ada menempati Gedung TEA Tanjung Muntilan. Guna mendukung kegiatan Rumah Singgah pada tahun 2020 telah diusulkan anggaran untuk Kegiatan Fasilitasi PMKS di Rumah Singgah sebesar Rp. 125.000.000,- (. Seratus dua puluh lima juta rupiah). Cakupan penanganan PMKS di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.72
Cakupan Penanganan PMKS
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	PMKS yang tertangani	Orang	890	3.080	40.016	38.001	79.069
2	PSKS yang berperan dalam penanganan PMKS	%	-	-	-	23,39	23,39
3	Cakupan Penanganan PMKS	%	0,63	2,93	30,49	28,96	46,29

Sumber : Dinsos, PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa cakupan penanganan PMKS di Kabupaten Magelang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 semakin baik.

3) Jumlah disabilitas dan bantuan yang diberikan

Perhatian khusus diberikan Pemerintah Kabupaten Magelang kepada kaum disabilitas dengan melibatkan kelompok tersebut dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Selain bantuan modal dan pelatihan, Pemerintah Kabupaten melibatkan penyandang difabel dalam penyusunan setiap kebijakan pembangunan. Melalui keterlibatan penyandang difabel dalam setiap kegiatan pembangunan, diharapkan akan menunjang lahirnya kemandirian, sehingga akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi difabel. Adapun jumlah penyandang difabel, jumlah penyandang difabel yang memperoleh bantuan dan jumlah bantuan yang diberikan bisa dilihat dalam tabel dibawah

Tabel 2.73
Jumlah Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Bantuan

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penyandang Disabilitas	n/a	10.508	9.009	9.578
2	Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh Bantuan	343	412	417	406
3	Jumlah Bantuan	620.300.000	741.600.000	797.200.000	1.158.600.000

Sumber : Dinsos, PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2019

Dari tabel di atas bisa dilihat jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan cenderung meningkat setiap tahunnya, dimana data terakhir pada tahun 2018 jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan sebanyak 406 orang dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 1.158.600.000.

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angka TPAK mengindikasikan besarnya presentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Magelang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.74
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	668.142	657.666	677.609	722.295	699.907
2	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun)	Orang	931.057	944.483	899.809	969.654	981.963
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,76	69,63	75,34	74,49	71,28
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Jawa Tengah	%	69,68	67,85	67,15	69,11	68,56

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2018, Disperinaker Kabupaten Magelang 2018

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Magelang tahun 2014-2018 cukup fluktuatif, namun pada tahun 2017 meningkat signifikan. Tingkat partisipasi angkatan Kabupaten Magelang tahun 2014-2018 lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Jawa Tengah.

2) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari Indeks Produktifitas Tenaga Kerja. Indeks ini diukur dari total PDRB dibandingkan dengan total angkatan kerja yang bekerja. Pada tahun 2014 produktivitas tenaga kerja sebesar Rp 32,81 juta per pekerja meningkat menjadi Rp 43,36 juta per pekerja pada tahun 2018. Peningkatan produktivitas tenaga kerja Kab. Magelang lebih tinggi dari peningkatan produktivitas tenaga kerja Provinsi Jawa Tengah, rata-rata sebesar 7,32%. Namun, jika dilihat nilai absolutnya, produktivitas tenaga kerja Kabupaten Magelang jika dibandingkan produktivitas

tenaga kerja Provinsi Jawa Tengah hanya sebesar 79,46%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.75
Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	PDRB	Rp. (juta)	21.923.411	24.148.644	26.108.949	28.045.174	29.464.259,80
2	Total Angkatan Kerja yang Bekerja	Orang	668.142	657.666	704.651	722.295	679.506
3.	Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. (juta)	32,81	36,72	37,05	38,83	43,36
4.	Produktivitas Tenaga Kerja Prov. Jateng	Rp. (juta)	46,30	49,16	51,44	52,01	54,57

Sumber : BPS Kabupaten Magelang dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

3) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan menurun meskipun mengalami peningkatan di tahun 2018. Angka ini juga jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Magelang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.76
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pengangguran terbuka	Orang	49.777	33.936	n/a	17.644	20.401
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	668.142	657.666	n/a	722.295	699.907
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Magelang	%	7,45	5,16	n/a	2,44	2,91
4	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah	%	5,68	4,99	5,63	4,57	4,51

Sumber : BPS Kabupaten Magelang dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

4) Pencari kerja yang ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Menempatkan pencari kerja yang mendaftar merupakan salah satu program pemerintah daerah. Oleh karena itu, indikator ini dapat

mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan kesempatan lapangan pekerjaan guna mengurangi angka pengangguran. Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Magelang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.77

Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

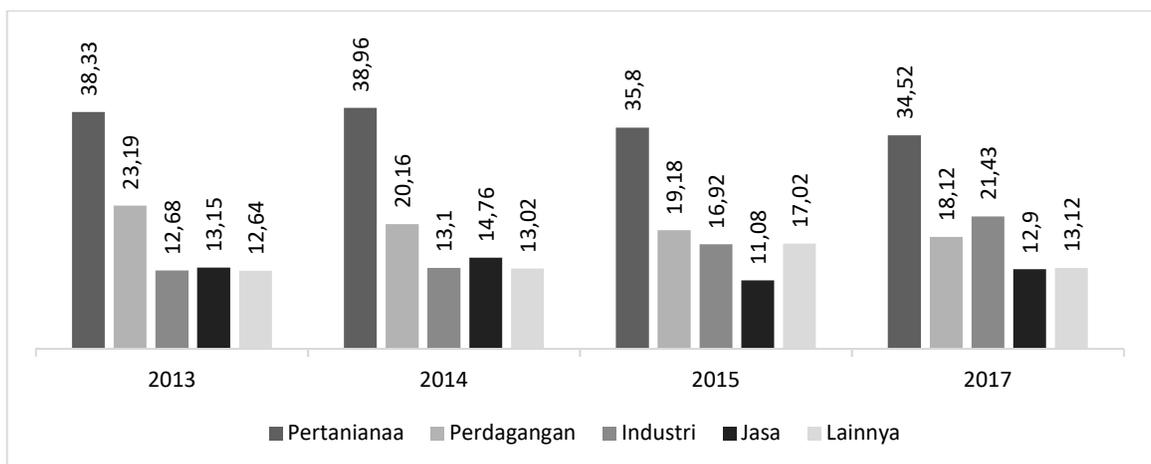
No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	672	632	1.442	1.749	1.797
2	Pencari kerja yang terdaftar	Orang	4.141	5.996	3.573	4.038	4.193
3	Pencari kerja yang ditempatkan	%	16,23	10,54	40,36	43,31	42,86

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah melaksanakan program penempatan tenaga kerja yang mendaftar. Pada tahun 2014 jumlah pencari kerja yang terdaftar adalah sebanyak 4.141 orang dan hanya 16,23% dari jumlah tersebut yang berhasil ditempatkan atau sekitar 672 pekerja saja. Persentase pencari kerja yang ditempatkan meningkat pada tahun 2014 sampai tahun 2018 dari 16,23% menjadi 42,86%, kecuali pada tahun 2015 hanya mencapai 10,54%. Perbedaan persentase pekerja yang ditempatkan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perbedaan jumlah kesempatan kerja yang tersedia dan hubungan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam menyediakan lapangan pekerjaan.

5). Persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha

Lapangan usaha penyerapa angkatan kerja terbesar adalah lapangan usaha pertanian. Namun penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian cenderung menurun. Penurunan penyerapan tenaga kerja juga terjadi pada lapangan usaha perdagangan. Sementara itu, terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi pada lapangan usaha industri.

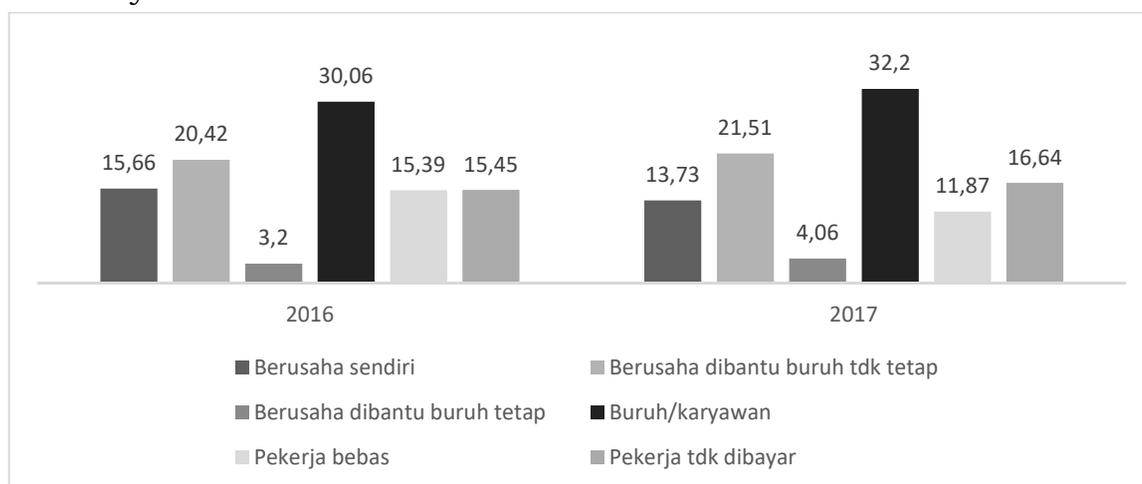


Gambar 2.18

Perkembangan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013-2017

6) Persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha

Pada tahun 2017, menurut status pekerjaan, 39,30 persen sebagai pengusaha di pekerjaan utamanya. Sedangkan 32,20 persen sebagai buruh/ karyawan/ pegawai. Akan tetapi masih ada 16,64 persen yang bekerja sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga pada pekerjaan utamanya.



Gambar 2.19

Perkembangan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan
Tahun 2013-2017

5) Jumlah Peserta Jaminan Perlindungan Sosial (Jamsostek)

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Di Kabupaten Magelang masih banyak potensi tenaga kerja yang belum mendapatkan jaminan perlindungan sosial. Adapun tenaga kerja yang sudah mendapatkan jaminan perlindungan sosial (jamsostek) bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.78

Tenaga Kerja yang Mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial (Jamsostek)

NO	TAHUN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA	JUMLAH PESERTA JAMSOSTEK	%
1	2014	404	24,131.00	n/a	-
2	2015	341	27,041.00	11,801.00	43,64
3	2016	372	25,653.00	13,143.00	51,23
4	2017	372	25,653.00	13,143.00	51,23

NO	TAHUN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA	JUMLAH PESERTA JAMSOSTEK	%
5	2018	370	25,457.00	13,351.00	52,45

Sumber: Disperinaker Kabupaten Magelang, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat tenaga kerja yang mendapatkan jaminan perlindungan sosial (jamsostek) setiap tahun meningkat. Di sisi lain hampir separuh jumlah tenaga kerja di Kabupaten Magelang masih belum tercover jaminan sosial tenaga kerja. Hal ini disebabkan masih banyaknya tenaga kerja, khususnya sektor informal yang tidak mendaftarkan kepesertaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat melalui cakupan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Cakupan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dihitung dari persentase perempuan di lembaga legislatif, persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi dan persentase PD yang melaksanakan perencanaan penganggaran resposif berbasis gender. Cakupan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari presentase perempuan di lembaga legislatif sebesar 14 % selama tahun 2014-2018.

1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Secara umum jumlah pekerja perempuan yang berada di lembaga pemerintah mengalami penurunan. Pada tahun 2017 hanya terdapat 1,88% perempuan yang terdapat di lembaga pemerintahan. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan besarnya jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah.

Tabel 2.79

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	Jiwa	5.753	5.926	5.415	5.304	5.008
2.	Jumlah Pekerja Perempuan	Jiwa	275.073	276.997	279.504	281.958	253.317
3.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	2,44	2,14	1,94	1,88	1,98

Sumber : Dinsos, PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2018.

2) Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan ini dapat diketahui dari jumlah pengaduan yang terselesaikan dan jumlah pengaduan secara keseluruhan. Berdasarkan data tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, jumlah penyelesaian

pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Magelang mengalami stagnasi yaitu pada persentase 100%. Dengan kata lain, setiap aduan yang dilaporkan dapat diselesaikan di tiap tahunnya. Berikut ini tabel yang menunjukkan jumlah penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.80

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan	Kasus	82	99	113	115	75
Jumlah seluruh pengaduan perlindungan perempuan dan anak	Kasus	82	99	113	115	98
Penyelesaian pengaduan	Persen	100	100	100	100	76,53

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2018

3) Kabupaten Layak Anak

Kabupaten/kota layak anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak

Dukungan pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah melalui pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Magelang dengan penguatan gugus tugas kabupaten, kecamatan dan desa, serta meningkatkan pencapaian hasil kegiatan dari klaster-klaster KLA sesuai dengan Perda nomor 20 tahun 2016 Tentang KLA, meningkatkan peran dan dukungan dunia usaha yang tergabung dlm Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Magelang, serta meningkatkan peran dan dukungan media. Jumlah desa dan kecamatan layak anak di Kabupaten Magelang sebagai berikut.

Tabel 2.81

Desa dan kecamatan Layak Anak di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Urian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tingkat Pratama	Desa	10	12	0	0	0
2.	Tingkat Madya	Desa	0	0	11	14	92
3.	Tingkat Nindya	Desa	0	0	0	0	0
4	Tingkat Utama	Desa	0	0	0	0	0
1.	Tingkat Pratama	Kecamatan	0	0	0	0	0

No	Urian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
2.	Tingkat Madya	Kecamatan	0	0	3	5	13
3.	Tingkat Nindya	Kecamatan	0	0	0	0	0
4	Tingkat Utama	Kecamatan	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat desa dan kecamatan layak anak di Kabupaten Magelang selalu meningkat.

c. Pangan

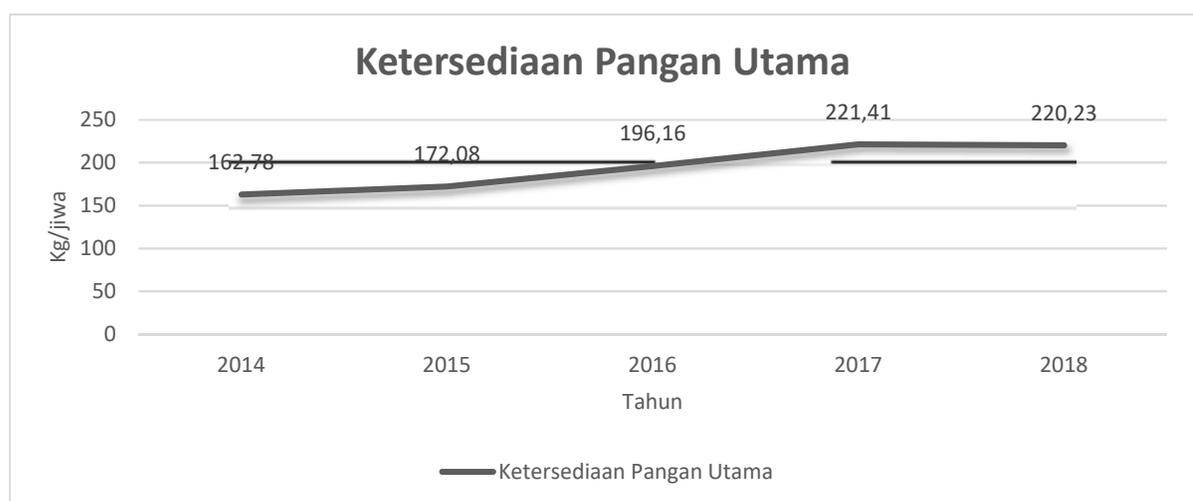
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah. Hal tersebut tergambar dalam beberapa hal berikut.

1) Regulasi Ketahanan Pangan

Untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ketahanan pangan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun regulasi terkait ketahanan pangan. Regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Magelang diwujudkan dalam bentuk peraturan bupati yang untuk pertama kalinya diundangkan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang. Sehubungan dengan adanya perubahan SOTK baru, peraturan bupati tersebut kemudian diubah menjadi Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang.

2) Ketersediaan Pangan Utama

Gambaran ketersediaan pangan utama di Kabupaten Magelang tahun 2014-2018 disajikan pada tabel dibawah ini.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.20
Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/Tahun) Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Ketersediaan pangan utama beras selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang baik. Maka secara ketersediaan, Kabupaten Magelang sudah mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya, jika dibandingkan dengan kebutuhan beras perkapita per tahun.

3) Pola Pangan Harapan (PPH)

Keberagaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan Pola Pangan Harapan (PPH). Terdapat dua pola pangan harapan, yaitu PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi. Capaian skor PPH dapat dilihat pada tabel berikut.

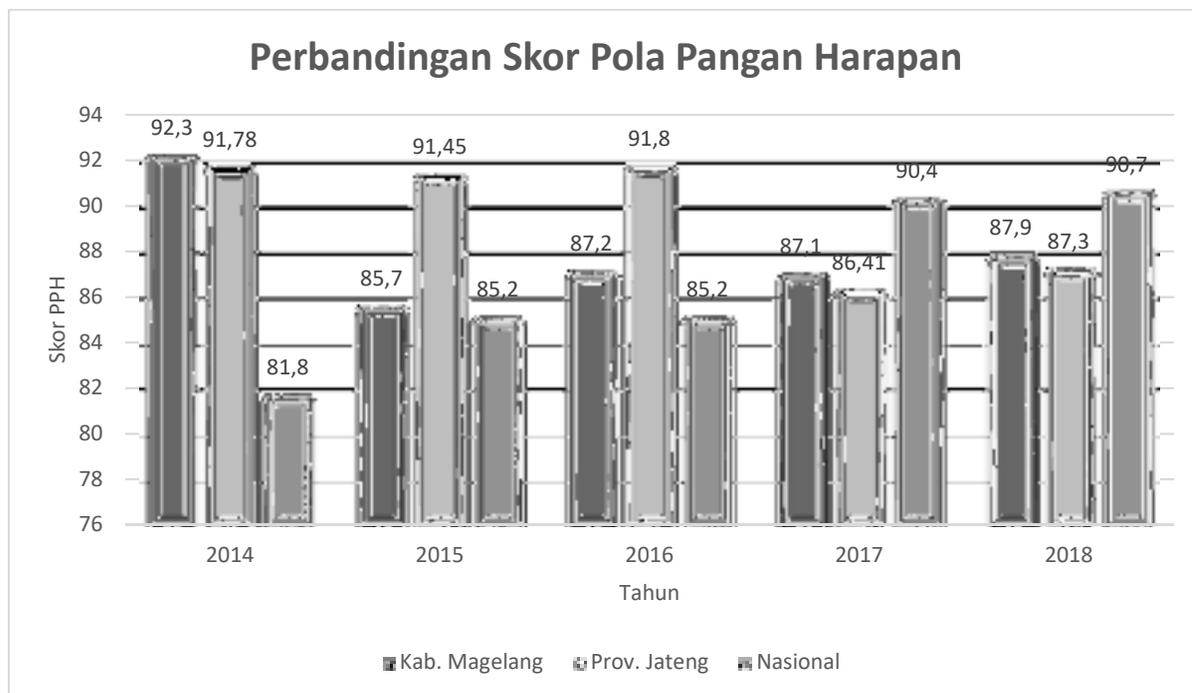
Tabel 2.82
Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2018

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
1	PPH Ketersediaan Kab. Magelang	%	85,42	72,85	70,60	73,59*
2	PPH Ketersediaan Prov. Jawa Tengah	%	-	-	85,3	85,3

*Angka sementara

Sumber: Distan Pangan Kabupaten Magelang diolah, 2019

Pola pangan ketersediaan di Kabupaten Magelang mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 72,85% menjadi 70,60% pada tahun 2017. Namun angka ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun berikutnya, yaitu 73,59% pada tahun 2018. Meskipun demikian, angka ini masih jauh dibawah angka ketersediaan Provinsi Jawa tengah, yaitu sebesar 85,3%.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

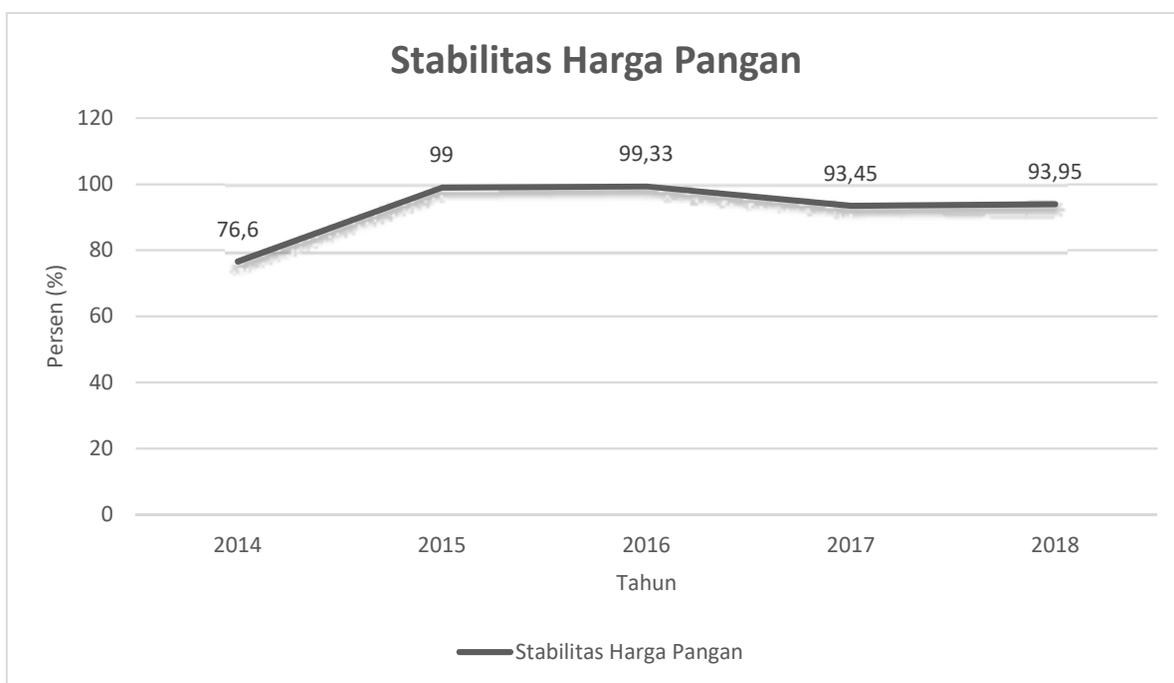
Gambar 2.21
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Selama kurun waktu 2015-2018, skor PPH terus meningkat, kecuali tahun 2017 yang turun dari capaian tahun sebelumnya. Dibandingkan

dengan capaian Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2018 capaian Kabupaten Magelang lebih tinggi, namun jika dibandingkan dengan nasional, capaian Kabupaten Magelang lebih rendah.

4) Stabilitas Harga Pangan

Terjadinya gejolak harga akan berpengaruh pada besaran tingkat akses pangan masyarakat. Perkembangan stabilitas harga pangan di Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2014-2018 sebagaimana tabel berikut.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.22
Stabilitas Harga Pangan Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

5) Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras di Kabupaten Magelang. Konsumsi beras mulai tahun 2016 berdasarkan hasil prognosis terkait konsumsi beras oleh Kementerian Pertanian sebesar 124,89 kg/orang/tahun. Daya dukung pangan yang dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras, yaitu indeks Daya Dukung Lahan untuk pangan (DDL)¹. Berikut hasil perhitungan daya dukung pangan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.83
Daya Dukung Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2017

Uraian	Jumlah
Jumlah produksi padi (ton)	366.981
Konversi Gabah Giling/GKG ke beras (62,74%)	230.244

¹ Perhitungan yang digunakan SUSENAS - BPS

Uraian	Jumlah
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.268.396
Angka konsumsi beras (kg/tahun/tahun)	124,89
Jumlah beras dikonsumsi (ton)	124.303
DDL (Daya Dukung Lahan) untuk pangan	1,85
Surplus beras (Ton/Tahun)	105.941

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024, 2018

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, diketahui bahwa daya dukung lahan untuk pangan di Kabupaten Magelang sebesar 1,85 dengan kondisi surplus sebesar 105.941 ton.

6) Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (JEP 1)

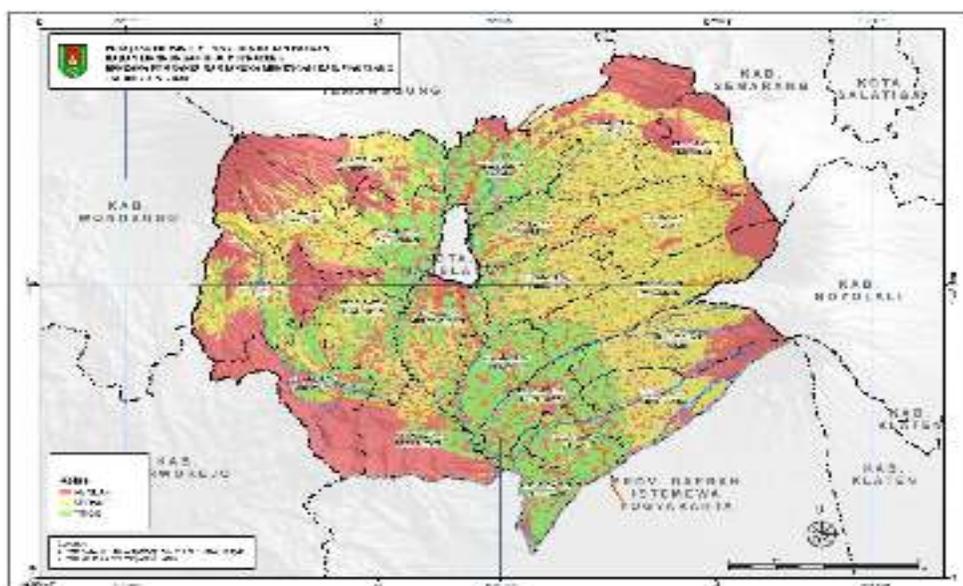
Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1) merupakan hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan serta hasil peternakan, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas lingkungan untuk mendukung penyediaan pangan. Berikut kategori Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP1) di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.84

Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1)
Kabupaten Magelang

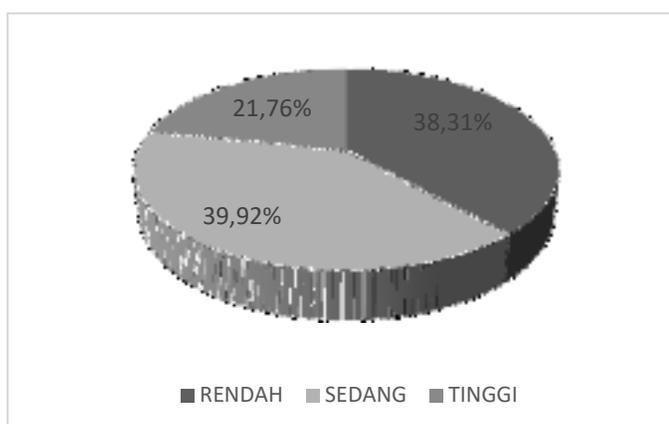
KELAS	LUAS (Ha)	PERSEN
RENDAH	43.306,03	38,31%
SEDANG	45.128,48	39,92%
TINGGI	24.600,33	21,76%
TOTAL	113.034,84	100,00%

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2014



Sumber: KLHS RPJMD Kab. Magelang 2019-2024, 2018

Gambar 2.23
Peta Sebaran Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1)



Sumber: KLHS RPJMD Kab. Magelang 2019-2024, 2018

Gambar 2.24
Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1)

Berdasarkan diagram dan peta di atas dapat dilihat bahwa Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP1) di Kabupaten Magelang lebih dominan berada pada kategori sedang dengan luas lahan 45.128,48 ha atau sebesar 39,92%, kemudian diikuti dengan kategori rendah dengan luas 43.306,03 ha atau sebesar 38,31% dan kategori dengan persentase paling kecil adalah kategori tinggi dengan luas lahan 24.600,33 ha atau sebesar 21,76%.

d. Pertanahan

Urusan pertanahan menjadi urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa urusan pertanahan memiliki tiga indikator, yaitu (1) persentase luas lahan bersertifikat, (2) penyelesaian kasus tanah negara dan (3) penyelesaian izin lokasi.

Hingga tahun 2017, terdapat 416.154 unit tanah yang telah bersertifikat dimana pembagian terbesarnya adalah merupakan tanah hak milik yakni sebesar 97,30%, sedangkan yang terkecil adalah hak guna usaha. Kinerja persentase luas lahan bersertifikat sampai dengan tahun 2017 adalah 53,41%.

Sedangkan untuk penyelesaian kasus tanah negara dari tahun 2013-2017 sebesar 100% dimana semua permasalahan terkait dengan kasus tanah negara dapat diselesaikan seluruhnya.

Indikator penyelesaian izin lokasi dikaitkan dengan investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Magelang khususnya. Masalah yang sering dihadapi investor dalam mencari izin lokasi adalah birokrasi. Birokrasi yang panjang dan adanya pungutan liar membuat penyelesaian izin menjadi lama. Semakin lama izin dikeluarkan, maka

investor akan kehilangan waktu untuk memulai usahanya sehingga diharapkan izin lokasi dapat diperoleh dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Tabel 2.85
Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persertifikatan tanah					
	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	33,55	51,38	51,80	52,10	53,41
	Hak Milik	352.365	367.807	375.586	380.322	404.921
	Hak Guna Bangunan	4.925	5.566	6.438	7.829	8.996
	Hak Guna Usaha	1	1	1	1	1
	Hak Pakai	1.689	1.758	1.861	1.934	2.226
	Hak Pengelola	9	9	9	10	10
2.	Penyelesaian kasus tanah negara (%)	100	100	100	100	100
3.	Penyelesaian izin lokasi (%)	80	90,57	122,73	N/A	100

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, 2018; Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang

e. Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang memadukan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan adanya keterbatasan sumberdaya alam kaitannya dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Terjadinya pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas masyarakat menyebabkan beban terhadap daya dukung lingkungan menjadi semakin besar. Perubahan kegiatan dan pola hidup masyarakat menimbulkan potensi terjadinya pencemaran lingkungan baik pencemaran air, tanah, maupun udara. Hal ini mempengaruhi pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup.

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks dapat menjadi angka atau titik referensi kualitas lingkungan, apakah pada posisi kondisi yang baik, buruk atau pada kisaran keduanya.

Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Magelang pada tahun 2017 mencapai 70,95 dan meningkat menjadi 71,93 pada tahun 2018 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.86
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018

No.	Indikator	2017	2018
1.	Indeks Kualitas Air	59,09	54,62

No.	Indikator	2017	2018
2.	Indeks Kualitas Udara	82,39	82,82
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	71,27	76,74
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,95	71,93

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

Sesuai klasifikasi angka indeks, capaian IKLH Kabupaten Magelang berada dalam kategori cukup. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yaitu 60,60 pada tahun 2017.

Indeks kualitas lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh emisi gas rumah kaca (GRK). Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Sementara (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, penyebab terjadinya emisi GRK dikelompokkan menjadi tiga sektor yaitu penggunaan energi untuk kegiatan transportasi, pertanian, dan pengelolaan limbah. Emisi GRK pada tahun 2017 di Kabupaten Magelang tertinggi berasal dari kegiatan pengadaan dan penggunaan energi untuk kegiatan transportasi sebesar 531.600 ton CO₂e (61%) dan emisi terendah adalah dari pengelolaan limbah yaitu sebesar 71.040 ton CO₂e (8%).

2) Jumlah Usaha Peserta Proper yang Mencapai Minimal Ranking Biru

Indikator jumlah usaha peserta Proper yang mencapai minimal ranking biru merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur ketercapaian *Sustainable Development Goals (SDG's)*. Penilaian ini penting dilaksanakan sebagai wujud penerapan mekanisme insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan yang dapat mendorong perusahaan untuk dapat berperan dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat Proper Biru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87
Persentase Perusahaan Minimal Berpredikat Proper Biru
Tahun 2017-2018

No.	Indikator	Satuan	2017	2018
1.	Jumlah perusahaan mencapai ranking emas	perusahaan	0	0
2.	Jumlah perusahaan mencapai ranking hijau	perusahaan	7	7
3.	Jumlah perusahaan peserta Proper	perusahaan	115	115
4.	Persentase perusahaan minimal berpredikat Proper Biru	%	6,09	6,09

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

3) Persentase Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga disebutkan bahwa target pengelolaan sampah adalah 100% pada akhir tahun 2025. Target pengelolaan sampah tersebut meliputi target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dengan lingkup pelayanan seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Indikator program berkaitan dengan pengurangan sampah dalam RPJMD yang digunakan adalah persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R. Sedangkan indikator program berkaitan dengan penanganan sampah dalam RPJMD yang digunakan adalah persentase jumlah sampah yang tertangani. Data capaian pengelolaan sampah tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88
Persentase Pengelolaan Sampah
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018

No.	Indikator	Satuan	2017	2018
1.	Jumlah timbunan sampah	ton/hari	231.482,27	233.797,09
2.	Jumlah pengurangan sampah melalui 3R	ton/hari	34.238,17	44.472,43
3.	Jumlah sampah tertangani	ton/hari	28.390,66	31.336,77
4.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	14,79	19,02
5.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	12,26	13,40
6.	Persentase pengelola sampah	%	27,05	32,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

Persentase pengelolaan sampah pada tahun 2017 mencapai 27,05% dan meningkat menjadi 32,42% pada tahun 2018. Pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampai dengan tahun 2018, pengurangan sampah di Kabupaten Magelang sebesar 19,02% dan penanganan sampah sebesar 13,40%. Capaian ini jauh apabila dibandingkan dengan target yang diamanahkan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 yaitu 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah. Oleh karena itu, untuk mendukung ketercapaian target nasional pengelolaan sampah, maka dalam RPJMD Kabupaten Magelang program persampahan menjadi program prioritas dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Penanganan sampah di Kabupaten Magelang sampai dengan tahun 2018 mencakup 10 (sepuluh) kecamatan dari total 21 (dua puluh satu) kecamatan yang ada. Lingkup pelayanan sampah belum menjangkau seluruh desa di sepuluh kecamatan tersebut namun hanya sebagian kecil desa yang pada umumnya merupakan wilayah perkotaan. Kecamatan yang telah mendapatkan pelayanan penanganan sampah

meliputi: (a) Mungkid; (b) Muntilan; (c) Borobudur; (d) Salaman; (e) Mertoyudan; (f) Secang; (g) Grabag; (h) Tegalrejo; (i) Bandongan; dan (j) Salam. Dalam lima tahun ke depan, cakupan ini akan ditingkatkan sehingga penanganan sampah dapat menjangkau seluruh kecamatan.

4) Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian penting dalam membentuk struktur ruang wilayah perkotaan dan memiliki berbagai fungsi strategis. Secara ekologis, RTH berfungsi untuk meningkatkan kualitas udara, menjaga kelestarian air dan tanah sedangkan secara sosiologis RTH diperlukan sebagai ruang untuk berinteraksi dan rekreasi bagi penduduk di wilayah perkotaan. Di luar kedua hal tersebut, ketersediaan RTH di wilayah perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota. Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.89
Persentase Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Wilayah Perkotaan
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018

No.	Indikator	Satuan	2017	2018
1.	Luas wilayah perkotaan	Ha	16.069,09	16.069,09
2.	Luas RTH publik di wilayah perkotaan	Ha	302,85	302,85
3.	Luas RTH privat di wilayah perkotaan	Ha	6.059,65	6.008,23
4.	Persentase ketersediaan RTH publik di wilayah perkotaan	%	1,88	1,88
5.	Persentase ketersediaan RTH privat di wilayah perkotaan	%	37,71	37,39
6.	Persentase ketersediaan RTH terhadap luas wilayah wilayah perkotaan	%	39,59	39,27

Sumber : DLH Kabupaten Magelang, Tahun 2018

Capaian ketersediaan RTH terhadap luas wilayah perkotaan di Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 39,59% dan menurun menjadi 39,27% pada tahun 2018. Penurunan capaian tersebut terjadi karena adanya alih fungsi lahan sawah di perkotaan sehingga menyebabkan penurunan RTH privat. Secara akumulasi, capaian ketersediaan RTH terhadap luas wilayah perkotaan sudah melampaui persentase luas RTH yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu sebesar 30%. Namun apabila dilihat per komponen indikator maka RTH publik di wilayah perkotaan belum memenuhi target yang dipersyaratkan yaitu 20%. Sedangkan ketersediaan RTH privat di wilayah perkotaan telah memenuhi syarat minimal yaitu 10%. Berdasarkan tabel di atas, capaian persentase ketersediaan RTH publik di wilayah perkotaan pada tahun 2017 adalah sebesar 1,88%. Capaian ini tidak ada peningkatan di

tahun 2018 disebabkan tidak adanya penyediaan RTH publik baru tapi hanya peningkatan fungsi RTH publik yang sudah ada. Melihat kondisi tersebut, maka dalam lima tahun ke depan perlu adanya peningkatan penyediaan RTH publik di wilayah perkotaan sebesar 18,12%.

5) Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam

Kinerja urusan lingkungan hidup berkaitan dengan konservasi sumber daya alam meliputi konservasi daerah resapan air, rawan bencana dan mata air. Upaya pelaksanaan konservasi di Kabupaten Magelang juga dilakukan melalui program kampung iklim dan sekolah adiwiyata. Adapun capaian kinerja konservasi sumber daya alam tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90
Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018

No.	Indikator	Satuan	2017	2018
1	Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi	%	0,82	1,34
2	Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi	%	0,34	0,44
3	Persentase mata air yang dikonservasi	%	4,94	5,38
4	Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim	%	1,34	1,88
5	Persentase sekolah adiwiyata	%	0,49	1,06
6	Cakupan konservasi sumber daya alam	%	1,59	2,02

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tahun 2018

Konservasi sumber daya alam erat kaitannya dengan upaya menjaga dan meningkatkan daya dukung daya tampung lingkungan. Berdasarkan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, daya dukung air permukaan Kabupaten Magelang tahun 2017 sebesar 1,28 masuk dalam kategori sedang. Daya dukung ini cenderung menurun seiring dengan meningkatnya kebutuhan air untuk rumah tangga, pertanian, maupun industri. Berdasarkan tabel di atas, kinerja pelaksanaan konservasi sumber daya alam di Kabupaten Magelang masih sangat kecil. Pelaksanaan konservasi di daerah resapan air dan rawan bencana masih di bawah 1%. Berkaitan dengan upaya konservasi, perlu diperhatikan pula untuk kawasan-kawasan rawan bencana mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam kawasan rawan bencana. Sebagaimana hasil analisis KLHS RPJMD 2018-2024, 73,83% wilayah Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori Jasa Ekosistem Perlindungan Pencegahan Bencana kelas

sedang. Melihat masih rendahnya kinerja pelaksanaan konservasi di Kabupaten Magelang, maka dibutuhkan upaya kolaborasi pelaksanaan konservasi dengan berbasis masyarakat sehingga tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah.

6) Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani

Penegakan hukum lingkungan sangat diperlukan, melihat banyaknya kasus yang terkait dengan lingkungan. Tidak optimalnya penegakan hukum lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mengawasi pelaksanaan izin lingkungan oleh pemilik perusahaan membutuhkan peran serta masyarakat dalam mengawasi setiap kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada pemerintah terkait izin lingkungan yang selanjutnya menjadi kewajiban pemerintah untuk menanganinya. Data capaian kinerja penanganan kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91
Persentase Kasus Lingkungan dan Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang Ditangani di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kasus lingkungan dan pengaduan terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	Kasus	10	10	9	10	12
2	Jumlah pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan yang teregistrasi	Kasus	10	11	10	10	15
3	Persentase kasus lingkungan dan pengaduan terkait ijin lingkungan	%	100	90,91	90	100	80

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat lingkungan di Kabupaten Magelang dapat dikatakan sangat baik. Terlihat dari persentase jumlah kasus yang diselesaikan tidak kurang dari angka 80% dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2018. Hal ini menjadi prestasi yang baik tetapi harus terus ditingkatkan dan dipertahankan demi menjaga kelangsungan lingkungan hidup ke depannya. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan selalu ditindaklanjuti dengan baik oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. Hampir seluruh pengaduan ditangani pada tahun yang bersangkutan. Khusus pada tahun 2015, 2016, dan 2018 mengalami penurunan capaian karena aduan dari masyarakat teregistrasi mendekati akhir tahun anggaran sehingga baru dapat ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.

Hal yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Magelang bahwa meskipun penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan sudah sangat baik, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan banyaknya usaha atau kegiatan yang berjalan secara ilegal tanpa melalui prosedur izin lingkungan. Selanjutnya, harus ada tindakan yang dapat menjadi solusi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengembalikan lingkungan yang telah terlanjur rusak.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan publik yang baik diantaranya diukur dari pelayanan administrasi kependudukan. Kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel berikut ini.

Tabel 2.92
Rasio Perekaman KTP - elektronik dan Keluarga yang Ber KK
Kabupaten Magelang Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Penduduk yang melakukan perekaman e-KTP	%	93,91	88,62	94,90	96,62	96,13
2	Penerbitan KK	%	92,81	n/a	94,89	95,46	96,05
3	Rasio Perekaman KTP – elektronik dan Keluarga yang Ber KK	%	93,36	n/a	94,90	96,04	96,09

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2018

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pelayanan administrasi kependudukan semakin baik. Disamping itu, pelayanan akte kelahiran di Kabupaten Magelang semakin baik sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.93
Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase penerbitan Akta Kelahiran	%	18,14	22,98	30,80	32,37	34,85
2	Persentase Penerbitan Akta perkawinan	%	62,17	36,76	38,75	33,27	42,40

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
3	Persentase Penerbitan Akta Kematian	%	0	0	0	0	0
4	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	%				72,17	77,64

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2008

Rasio pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94
Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase pengelolaan informasi	%	0	0	0	0	0
2	Persentase pemanfaatan data	%	0	0	0	0	0
3	Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	%	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2018

g. Keluarga Sejahtera dan KB

1) Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut. Pasangan usia subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun. Angka cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para PUS. Data mengenai cakupan KB aktif di Kabupaten Magelang tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95
Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	IUD	Jiwa	22.190	30.936	32.494	33.894	25.110
	MOW/MOP	Jiwa	8.897	10.452	10.400	10.687	8.800
	Kondom	Jiwa	1.436	3.725	4.025	4.150	4.931
	Implant	Jiwa	14.827	21.564	23.147	24.818	16.515

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	Suntik	Jiwa	20.895	86.082	88.271	87.381	79.113
	Pil	Jiwa	13.696	20.990	21.050	20.612	14.924
	Jumlah peserta KB aktif	Jiwa	81.941	173.749	179.050	181.542	149.393
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	Jiwa	219.754	222.973	225.057	227.752	204.431
3	Cakupan peserta KB aktif	%	80,64	80,69	80,79	79,71	73,08
4	Cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi	%	11,08	9,93	8,97	9,32	13,36
5	Presentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)	%	77,27	77,93	79,77	79,31	73,08
6	Presentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	36,07	36,23	36,86	38,23	33,75
7	Usia Kawin Pertama (UKP) /Rata-rata usia kawin pertama wanita	%		20,62			
8	Prosentase anggota UPPKS dari keluarga pra sejahtera	%	59,20	57,90	56,09	55,03	55,11

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2018.

Berdasarkan tabel cakupan peserta KB aktif di atas, secara umum selama 5 tahun perkembangannya bisa dikatakan tidak terlalu berubah. Dalam lima tahun tersebut, rentang cakupan indikator ini berada pada posisi 80,64-80,79%. Berdasarkan SPM Nasional, Kementerian Kesehatan menargetkan rasio KB aktif sebesar 70% pada tahun 2008, sedangkan Peraturan Kepala BKKBN No 55/HK-010/B5/2010 target SPM untuk indikator cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif adalah 65% pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan target SPM dari Kemenkes maupun dari BKKBN tersebut, rasio KB Aktif Kabupaten Magelang telah mencapai target karena sejak tahun 2012 cakupannya sudah lebih dari 65% bahkan lebih dari 70%.

Dalam upaya meningkatkan kepesertaan KB, Pemkab Magelang mendukung melalui penyediaan biaya penyelenggaraan pelayanan KB bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera. Selain itu bantuan makan minum, dana pembuatan backdrop, dan biaya penggandaan sangat membantu kegiatan pelayanan KB terutama pada saat kegiatan safari pelayanan KB bersama mitra kerja (pemangku kepentingan di luar pemda).

2) Total Fertility Rate

TFR (*Total Fertility Rate*) bisa didefinisikan sebagai jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya

jika ia melampau masa-masa melahirkan anak. Capaian TFR di Kabupaten Magelang tahun 2015-2018 relatif turun. Pada tahun 2015 berada pada angka 2,26, tahun 2016 naik menjadi 2,28, tahun 2017 naik lagi menjadi 2,30 dan turun menjadi 2,17 pada tahun 2018. Salah satu faktor turunnya angka TFR adalah semakin membaiknya tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Magelang.

3) Keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera (KPS) adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai Keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Keluarga Sejahtera Tahap I (KSI) adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti yang telah disebutkan.

Tabel 2.96

Persentase Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	KK	92.743	91.815	91.106	90.389	86.283
2.	Jumlah Keluarga*	Keluarga	354.120	375.160	390.618	404.777	406.420
3.	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Persen	26,19	24,47	23,32	22,33	21,23

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, jumlah keluarga pra sejahtera di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu lima tahun dari 2014 hingga 2018 mengalami tren parabola naik kemudian turun. Persentase tertinggi atau puncak parabola terjadi pada tahun 2014 yaitu 26,19% dengan 92.743 keluarga pra sejahtera, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 21,23% dengan jumlah keluarga prasejahtera sebanyak 86.283 keluarga.

Sejenis dengan persentase keluarga pra-sejahtera, persentase keluarga sejahtera I juga memiliki tren parabola yaitu dengan pola naik kemudian turun. Puncak parabola yaitu persentase tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan persentase sebesar 18,01%, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2018 dengan persentase 15,24%. Secara persentase, indikator ini memiliki tren yang semakin membaik karena semakin menurun, akan tetapi bila dilihat dari jumlah keluarga sejahtera I, ternyata jumlahnya keluarga yang tergolong sejahtera I memiliki tren yang meningkat terus. Persentase semakin kecil karena jumlah keluarga semakin bertambah banyak, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.97
Persentase Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Keluarga Sejahtera I	KK	63.778	64.327	66.341	66.340	62.141
2.	Jumlah Keluarga	Keluarga	354.120	375.160	390.618	404.777	406.420
3.	Persentase Keluarga Sejahtera I	Persen	18,01	17,15	16,98	16,39	15,24

Sumber : Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2018.

h. Perhubungan

Perhubungan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menunjang pembangunan terutama mendukung perekonomian dan perkembangan wilayah. Kinerja urusan perhubungan sebagaimana tersebut antara lain dapat dilihat dari data yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas, pemasangan pagar pengaman jalan, jumlah uji kendaraan bermotor dan pembangunan terminal angkutan umum. Untuk realisasi pemasangan rambu rambu lalu lintas yang sangat tinggi, yaitu 111,7% dikarenakan pada tahun 2018 jumlah rambu yang terpasang (2.574 buah) lebih tinggi dari pada target rambu yang akan dipasang 2.304 buah).

Tabel 2.98
Kinerja Makro Urusan Perhubungan Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas (%)	64,80	32,84	61,24	106,38	111,7
Persentase Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (%)	28,22	20,51	78,39	78,39	84,27
Jumlah Terminal Bus (buah)	6	6	7	6	6
Persentase Uji Kendaraan Bermotor (%)	96,01	97,50	97,32	98,39	88,10

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2019.

i. Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, urusan komunikasi dan informatika terdiri atas lima indikator, yaitu cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan, cakupan layanan komunikasi, persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon, proporsi rumah tangga dengan akses internet, proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi. Beberapa indikator dalam urusan komunikasi dan informatika ini akan mengalami penyesuaian dengan kondisi wilayah Kabupaten Magelang dan ketersediaan data yang dimiliki oleh OPD, misalnya persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon, proporsi rumah tangga dengan akses

internet dan proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi ditiadakan.

Kabupaten Magelang mulai tahun 2017 sedang berupaya untuk mewujudkan Kabupaten Cerdas (*Smart Regency*). Dalam rangka mendukung terwujudnya hal tersebut maka perlu disusun indikator-indikator kinerja tambahan sebagai tolok ukur dalam ketercapaian perwujudan *smart regency*. Indikator-indikator berkaitan dengan urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut.

1) Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Berdasarkan penilaian mandiri Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 lalu, indeks SPBE Kabupaten Magelang 1,85 atau masuk dalam kategori cukup.

2) Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi.

Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar komunikasi informasi pada tahun 2018 terhitung 32,14% meningkat dari tahun 2017 sebesar 28,14%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya PD yang terfasilitasi jaringan komunikasi data dan peningkatan cakupan layanan komunikasi yang secara teknis mengurangi *blankspot* di area Kabupaten Magelang.

Tabel 2.99

Cakupan Ketersediaan Prasaranan dan sarana TIK yang memenuhi standart komunikasi Informasi di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018

No.	Indikator	Satuan	2017	2018
1	Cakupan PD dan Desa/Kelurahan yang terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	%	11,71	23,41
2	Cakupan Layanan Komunikasi	%	72,72	73,00
3	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standart komunikasi Informasi	%	28,14	32,14

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2019

3) Cakupan Layanan Informasi bagi Desa dan Perangkat Daerah

Persentase cakupan layanan informasi bagi desa dan Perangkat Daerah (PD) tahun 2018 sebesar 12,7% didapatkan dari persentase urusan yang terintegrasi dengan *big data*, persentase layanan domain dan sub domain pemerintah yang secara teknis memerlukan kuantitas dan kualitas jaringan TIK serta sarana lainnya. Persentase urusan yang terintegrasi dengan *big data* tahun 2017 sebesar 20,93% dan meningkat menjadi 21% pada tahun 2018.

Tabel 2.100
Cakupan Layanan Informasi bagi Desa dan PD
di Kabupaten Magelang Tahun 2018

No.	Indikator	Satuan	2018
1	Persentase urusan yang terintegrasi dalam <i>big data</i>	%	21
2	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK	%	17
3	Persentase layanan domain dan sub domain pemerintah	%	0,2
4	Cakupan Layanan Informasi bagi Desa dan PD	%	12,7

Sumber : Diskominfo Kab. Magelang Tahun 2019

Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK mulai fokus dilaksanakan dengan disusunnya *masterplan smartcity* serta Peraturan Daerah tentang Pengelolaan TIK.

4) Cakupan Layanan dan Diseminasi Informasi Publik

Persentase layanan *website* PD dan Desa yang memenuhi kriteria diarahkan untuk menampilkan informasi kinerja, data, layanan serta kegiatan yang dilaksanakan. Saat ini belum ada kriteria yang diberlakukan untuk mengarahkan isi dari *website* yang dimiliki PD maupun desa.

Tabel 2.101
Cakupan Layanan dan Diseminasi Informasi Publik
di Kabupaten Magelang tahun 2017-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase layanan website PD dan desa yang memenuhi kriteria	%	0	0	0	0	0
2	Persentase diseminasi informasi melalui media massa	%	66,67	66,67	66,67	66,67	70
3	Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat	%	41,67	41,67	41,67	41,67	25
4	Cakupan diseminasi melalui media interpersonal	%	0	175	41,67	75	0
5	Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang	%	58,33	41,67	41,67	58,33	25
6	Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah	%	0	0	0	128,22	100
7	Cakupan layanan dan diseminasi	%	27,78	54,17	31,95	61,65	36,67

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	informasi publik						

Sumber : Diskominfo Kab. Magelang Tahun 2019

Diseminasi informasi melalui berbagai media yang dilaksanakan oleh Diskominfo pada tahun 2014 sampai dengan 2016 bergantung dengan kegiatan langsung yang belum memanfaatkan teknologi informasi, hal ini dapat dilihat dari variansi angka cakupan layanan diseminasi informasi publik antara tahun 2016 sebesar 31.95% dengan tahun 2017 sebesar 61.65%.

5) Persentase layanan *website* PD dan desa yang memenuhi kriteria

Keterbukaan informasi publik telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang salah satunya dilakukan menggunakan media baru berupa layanan *website* PD dan *website* desa. Tolok ukur dari layanan *website* ini adalah persentase layanan *website* PD yang memenuhi kriteria informatif dan layanan *website* desa yang memenuhi kriteria cukup informatif. Kriteria ini didasarkan pada pemeringkatan dari Badan Publik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi melalui penilaian kuesioner secara mandiri yang dilanjutkan dengan visitasi verifikasi. Pada tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Magelang belum berpartisipasi dalam pemeringkatan layanan *website* PD sehingga belum ada data yang dapat ditampilkan.

6) Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI

Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI diindikasikan dengan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) serta Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar. Tingginya cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM dipengaruhi oleh aktifitas KIM di tiap kecamatan. Sedangkan konten literasi TIK diarahkan agar informasi yang disampaikan ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar.

Tabel 2.102

Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%	119,05	119,05	119,05	119,05	100
2	Cakupan konten literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar	%	0	0	0	16,67	25
3	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	%	61,9	61,9	61,9	67,86	62,5

j. Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi menjadi salah satu penggerak perekonomian terutama di tingkat masyarakat golongan menengah ke bawah. Semakin besar jumlah persentase koperasi yang aktif, maka semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dengan menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Pengaruh koperasi terhadap perekonomian wilayah ditunjukkan dari perannya dalam membantu menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai lapangan pekerjaan informal alternatif ketika pekerjaan formal tidak lagi dapat memenuhi permintaan lapangan pekerjaan.

Tabel 2.103
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	446	480	472	394	405
2	Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	570	580	587	421	430
3	Persentase Koperasi Aktif	%	78,25	82,75	80,41	93,59	94,18

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2018

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Magelang selama lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang cenderung fluktuatif. Tahun 2014, tercatat 446 koperasi aktif atau 78,25% dari jumlah keseluruhan koperasi di Kabupaten Magelang. Pada tahun 2015 jumlah koperasi aktif sebesar 480 unit. Pada tahun 2016 jumlah koperasi aktif mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi 394 unit. Peningkatan jumlah koperasi aktif kembali terjadi pada tahun 2018 menjadi 405 unit. Walaupun jumlahnya menurun, namun persentase koperasi aktif meningkat pesat pada tahun 2017, yaitu menjadi 93,59%. Perkembangan positif ini menunjukkan bahwa keberadaan koperasi di Kabupaten Magelang menjadi salah satu media penggerak perekonomian skala kecil menengah.

2) Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Non BPR/LKM UKM

Usaha kecil maupun usaha menengah merupakan usaha mandiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha besar (bukan merupakan cabang). Jumlah UKM menjadi aspek yang diperhitungkan dalam menganalisis kondisi perekonomian wilayah karena perannya dalam perekonomian rakyat yang mandiri.

Tabel 2.104

Jumlah UMKM Non BPR/LKM UKM di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah UMKM non BPR/LKM UKM	Unit	106.403	106.650	106.200	106.200	106.200

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah UKM di Kabupaten Magelang selama periode tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi. Jumlah UKM dari tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan signifikan, yang semula 106.403 unit menjadi 106.650 UKM. Namun jumlah ini kembali menurun pada tahun 2016 sampai 2018 menjadi 106.200 unit.

3) Jumlah BPR/LKM

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. LKM atau Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran sebagai transaksi jasa (*payment service*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

Jenis BPR dan LKM yang ada di Kabupaten Magelang adalah Usaha Simpan Pinjam yang perkembangannya cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2014, jumlah BPR/LKM hanya 7 unit dan kini telah mencapai 20 unit yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang. Jumlah BPR/LKM akan menunjukkan seberapa besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah khususnya untuk masyarakat ekonomi rendah dan pengusaha kecil. Meski demikian, tidak banyak usaha mikro yang menggunakan BPR/LKM sebagai lembaga bantuan modal. Sebagian besar usaha ekonomi kecil masyarakat masih mendapatkan bantuan modal dari bank komersial dan modal pribadi.

4) Usaha Mikro dan Kecil yang Dibina

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui perekonomian masyarakat, maka pemerintah daerah memiliki peran penting terutama untuk memberikan pembinaan terhadap usaha atau kegiatan ekonomi lokal. Pembinaan dari pemerintah dapat berbentuk fisik maupun nonfisik, seperti bantuan alat modal dan pelatihan teknis dan manajerial serta pendampingan dan fasilitasi pameran dan promosi produk. Keberhasilan dari program ini diindikasikan dengan meningkatnya omzet penjualan dan kapasitas produksi.

Persentase usaha mikro dan kecil yang telah menerima pembinaan dari seluruh usaha mikro dan kecil yang ada di Kabupaten Magelang masih

sangat kecil. Meski demikian, persentasenya cenderung meningkat. Pada tahun 2014, persentase usaha mikro dan kecil yang telah mendapatkan pembinaan mencapai 0,39% dari jumlah keseluruhan unit usaha mikro yang ada. Persentase tersebut mengalami peningkatan mencapai 1,6% pada tahun 2016 dan turun lagi pada tahun 2017 menjadi 0,96. Pada tahun 2018, persentase usaha mikro dan kecil yang telah mendapatkan pembinaan kembali mengalami peningkatan mencapai 1,15%.

Tabel 2.105
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	Unit	416	1.280	1.706	1.024	1.225
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	106.637	106.637	106.637	106.637	106.637
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	%	0,39	1,2	1,6	0,96	1.15

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2018

k. Penanaman Modal

1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investasi di suatu daerah seringkali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian secara makro. Terdapat dua jenis investasi menurut sumbernya, yaitu investasi dalam negeri dan investasi luar negeri/asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi skala nasional yang menjadi penyumbang pendapatan daerah yang besar.

Tabel 2.106
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA) di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

No	Jenis Perusahaan	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Investor PMDN	Unit	820	594	517	730	1.186
2	Investor PMA	Unit	1	-	1	0	8

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang Tahun 2018

Penanaman modal di Kabupaten Magelang masih didominasi oleh penanaman modal dalam negeri, yaitu hampir seluruhnya PMDN dan hanya 1 PMA. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik investasi di Kabupaten Magelang untuk pihak asing masih sangat kurang.

Pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah dan target baru untuk memanfaatkan potensi Kabupaten Magelang sebagai daya tarik investor asing.

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Besaran nilai investasi menggambarkan lebih nyata dan spesifik perkembangan investasi di suatu wilayah. Jumlah PMDN/PMA maupun proyek yang disetujui tidak dapat menjadi tolak ukur untuk menghitung kontribusi penanaman investasi terhadap perekonomian daerah. Jumlah dan nilai realisasi proyeklah yang menjadi ukuran fisik keberhasilan daerah dalam memfasilitasi PMDN/PMA dalam merealisasikan proyek. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Tabel 2.107

Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Nilai Investasi PMA	Milyar Rp	13.000	-	6.000	-	68.858
2	Nilai Investasi PMDN	Milyar Rp	374.769	476.232	484.941	1.030.690	1.907.516
3	Total Nilai Investasi	Milyar Rp	374.769	476.232	490.490	1.030.690	1.976.374

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang Tahun 2018

3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMDN/PMA dengan jumlah keseluruhan PMDN/PMA. Dengan melihat rasio daya serap tenaga kerja, dapat diketahui pengaruh adanya investasi dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMDN dan PMA akan mencerminkan besarnya daya tampung di perusahaan PMDN/PMA untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Tabel 2.108

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Variabel	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018*
1	Jumlah Proyek PMA dan PMDN	Unit	821	594	518	730	424
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap	Orang	9.890	4.455	7.583	8.297	9.205
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		8,3	13,3	6,83	11,37	21,71

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang Tahun 2018

Besar jumlah tenaga kerja yang terserap oleh perusahaan PMDN dan PMA sangat dipengaruhi jumlah perusahaan itu sendiri. Penyerapan tenaga kerja terbanyak terjadi pada tahun 2014, dimana jumlah perusahaan PMDN/PMA juga dalam jumlah terbanyak pada kurun waktu 2014-2015. Penyerapan tenaga kerja ini menurun di tahun selanjutnya seiring dengan menurunnya jumlah PMDN/PMA. Pada tahun 2016-2018 tenaga kerja yang terserap kembali meningkat.

4) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN/PMA akan menunjukkan besar pertumbuhan nilai realisasi proyek di suatu daerah. Angka pertumbuhan ini selanjutnya dapat menjadi salah satu aspek yang menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah mampu mempertahankan tren investasi dan daya tarik/potensi daerahnya. Selama periode 2014 hingga 2018 kecuali tahun 2016, Kabupaten Magelang mengalami kenaikan nilai investasi PMDN dan PMA, meski nilai kenaikannya berbeda-beda. Kenaikan nilai investasi PMDN dan PMA terbesar terjadi dari tahun 2016 menuju 2017, yakni sebesar 525.490 miliar rupiah, dari tahun 2014 menuju 2015 yang mampu mencapai 2.605 miliar rupiah, serta dari tahun 2015 ke tahun 2016 mencapai 5.863 miliar rupiah, serta dari tahun 2017 ke tahun 2018 dengan jumlah yang tetap. Kenaikan nilai investasi tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah perusahaan PMDN dan PMA yang berinvestasi pada tahun terkait, tetapi juga skala perusahaan atau proyek kegiatan yang dilakukan juga sangat mempengaruhi besar nilai investasi yang ditanamkan.

1. Kepemudaan dan Olahraga

1) Jumlah Organisasi Pemuda

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu upaya penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia seutuhnya. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menunjukkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Secara umum jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah organisasi pemuda dari 2 tahun sebelumnya yang stagnan. Pada tahun 2016 dan 2017 terdapat 26 jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Magelang. Hal tersebut menunjukkan semakin tingginya partisipasi penduduk terhadap pembangunan daerah. Berikut ini adalah tabel jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Magelang tahun 2014-2018.

Jumlah kegiatan kepemudaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan kepemudaan dapat diketahui dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam periode 1 (satu) tahun. Tingginya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda dalam mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan data tahun 2013-2017, jumlah kegiatan kepemudaan di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 mulai nampak peningkatan jumlah kegiatan kepemudaan yang signifikan yaitu menjadi sebesar 21 kegiatan dari sebelumnya 17 kegiatan. Peningkatan tersebut menunjukkan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah dan menunjukkan keefektifan organisasi pemuda dalam mendukung pembangunan daerah.

Tabel 2.109

Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah organisasi pemuda	organisasi	21	24	26	26	27
2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	17	21	21	17	20

Sumber :Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2018

Generasi muda yang dapat memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan suatu wilayah adalah generasi muda yang berprestasi. Prestasi generasi muda di Kabupaten Magelang cenderung meningkat sebagaimana tabel cakupan prestasi generasi muda di Kabupaten Magelang sebagai berikut.

Tabel 2.110

Cakupan Prestasi Generasi Muda di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah atlet berprestasi	orang	95	100	110	130	150
2	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan	orang	520	540	560	570	570
3.	Cakupan Prestasi Generasi Muda	%	12,96	13,09	13,65	15,23	16,99
4.	Cakupan pembinaan pemuda	%	15,73	16,33	19,21	33	37

Sumber :Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2018

2) Jumlah Organisasi Olahraga

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial (Undang undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Organisasi olahraga pada bahasan ini adalah induk organisasi cabang olahraga. Menurut Undang undang Nomor 3 tahun 2015 tentang Sistem Keolahragaan Nasional induk organisasi cabang olahraga yang membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan. Jumlah organisasi olahraga dapat dihitung dari jumlah olahraga yang aktif pada saat tahun pengukuran. Banyaknya organisasi olahraga di suatu wilayah menggambarkan peran aktif masyarakat dalam bidang pengembangan olahraga. Berdasarkan data tahun 2014-

2018, secara umum jumlah organisasi di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah khususnya bidang olahraga.

Kegiatan olahraga merupakan kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau masyarakat. Jenis kegiatan olahraga ini dapat berbentuk pertandingan dan perlombaan ataupun peristiwa sejenis. Meningkatnya jumlah kegiatan olahraga menunjukkan meningkatnya peran dan efektifitas organisasi pemuda dan/atau pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya bidang olahraga. Berdasarkan data tahun 2014-2018 perkembangan jumlah kegiatan olahraga di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 terdapat 30 jumlah kegiatan olahraga, meningkat dari 3 tahun sebelumnya yang stagnan berjumlah 23 kegiatan. Namun pada tahun 2017 jumlah kegiatan menurun menjadi 24. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah organisasi dan kegiatan olahraga di Kabupaten Magelang tahun 2014-2018.

Tabel 2.111

Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah organisasi olahraga	organisasi	28	34	30	31	35
2.	Jumlah klub olah raga	Unit	28	34	34	40	40
3.	Jumlah kegiatan olahraga	keg	23	23	30	24	24

Sumber :Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2018

3) Lapangan Olahraga

Lapangan olahraga dapat dilihat dari jumlah lapangan dibagi dengan jumlah penduduk per 1000 jiwa. Angka ini mampu menunjukkan ketersediaan sarana fisik untuk olahraga khususnya lapangan olahraga. Lapangan olahraga dalam hal ini dapat berbentuk lapangan bola, lapangan voli, lapangan basket atau lapangan lainnya yang peruntukannya sebagai sarana olahraga. Secara umum jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Akan tetapi, seiring meningkatnya jumlah penduduk maka perkembangan lapangan olahraga per 1000 penduduk tersebut mengalami penurunan. Jumlah lapangan olahraga mengalami peningkatan, sebagaimana data perkembangan jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Magelang dari tahun 2014-2018.

Tabel 2.112

Rasio Lapangan Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah lapangan olahraga	Unit	253	255	265	265	265
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	1.262.500	1.267.090	1.278.624	1.280.679	1.283.405

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
3.	Lapangan olah raga per 1.000 penduduk	Unit	0,2	0,2	0,2	0,21	0,21
4	Cakupan Pembinaan olah raga	Persen	40,38	44,55	42,32	43,22	44,97

Sumber :Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2018

m. Statistik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun terdapat 3 (tiga) indikator yang perlu diukur pada urusan statistik yaitu tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, Buku Kabupaten Dalam Angka, dan Buku PDRB. Indikator tersebut diperlukan untuk mengetahui ketersediaan data dan statistik sebagai dasar dalam proses perencanaan pembangunan.

1) Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi

Mulai tahun 2017, urusan statistik menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Sampai dengan tahun 2018, Kabupaten Magelang belum mempunyai satu sistem data dan statistik yang terintegrasi. Pada tahun 2019 mulai dirilis sistem data statistik yang terintegrasi dengan alamat: <http://opendata.magelangkab.go.id/>. Sistem data statistik ini melingkupi semua data sektoral PD maupun Statistik Dasar dari Badan Pusat Statistik.

2) Buku Kabupaten Dalam Angka

Buku Kabupaten Dalam Angka memuat dua jenis data statistik yaitu data statistik dasar dan data statistik sektoral yang dihimpun dari instansi/dinas/lembaga pemerintah maupun swasta (data sekunder). Kontinuitas publikasi diindikasikan dengan terbitnya publikasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Ketersediaan publikasi buku Kabupaten Dalam Angka diperlukan bagi pemerintah dan masyarakat untuk analisis pembangunan.

3) Buku PDRB Kabupaten

Ketersediaan publikasi Buku PDRB Kabupaten bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan data yang diperlukan guna analisis pembangunan terutama yang berkaitan dengan perkembangan perekonomian kabupaten seperti pertumbuhan ekonomi dan analisis sektor unggulan. Selain itu, PDRB Kabupaten diperlukan untuk mengukur kondisi perekonomian kabupaten dibandingkan dengan wilayah regional dan provinsi. Hal ini penting untuk mengetahui kondisi daya saing kabupaten ditinjau dari sisi ekonomi. Buku PDRB Kabupaten Magelang ada/tersedia tahun 2013-2017.

n. Persandian

Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan bagaimana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era

keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka. Urusan persandian di Kabupaten Magelang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun program yang telah dilaksanakan untuk mendukung urusan tersebut adalah program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan satu kegiatan yaitu pengelolaan dan pengembangan persandian yang masih terbatas pada pelayanan komunikasi yakni distribusi informasi berdasarkan klasifikasi di internal Pemerintah Kabupaten Magelang.

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan persandian antara lain belum tersedianya sistem persandian dan keamanan informasi yang sesuai dengan standar, belum optimalnya pengamanan jaringan informasi, dan pengamanan ruang penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting. Untuk mengukur kinerja urusan persandian adalah persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Data kinerja ini untuk Kabupaten Magelang belum tersedia, namun selanjutnya akan digunakan sebagai tolak ukur kinerja urusan persandian.

o. Perpustakaan

1) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Per Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan merupakan indikator untuk menggambarkan seberapa besar minat masyarakat untuk membaca. Semakin banyak pengunjung maka minat membaca di masyarakat cukup tinggi. Selain itu, dengan melihat peningkatan jumlah pengunjung, dapat terlihat bahwa apakah pemerintah daerah sudah mampu menstimulasi penduduknya untuk lebih rajin membaca dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah fluktuatif dengan data sebagai berikut.

Tabel 2.113
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	Jiwa	36.595	33.726	55.854	39.967	76.548
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.262.500	1.267.090	1.278.628	1.283.405	1.290.115
3	Persentase Pengunjung Perpustakaan per tahun	Persen	2,9	2,66	4,37	3,11	5,93
4	Persentase Peningkatan Pemustaka per tahun	%	-9.10	-7.84	65.61	-28.44	91.52

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase pengunjung perpustakaan per tahun masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa minat baca masyarakat di Kabupaten Magelang masih rendah.

2) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jenis koleksi buku yang tersedia menggambarkan seberapa beragamnya bacaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari ilmu dalam tiap bidangnya. Semakin banyak judul koleksi buku, maka semakin beragam bacaan yang dapat dimanfaatkan. Jumlah koleksi judul buku tersebut kemudian diwujudkan ke dalam sebuah rasio yang menggambarkan perbandingan jumlah koleksi judul buku dengan jumlah buku secara keseluruhan di perpustakaan daerah tersebut.

Tabel 2.114
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Judul	23.984	24.512	24.955	26.179	27.230
2	Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Eksemplar	47.345	49.990	52.683	56.724	61.030
3	Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten	persen	1,97	2,04	2,11	2,16	2,24
4	Target		2,01	2,06	2,11	2,15	2,20

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang Tahun 2018

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah koleksi judul buku dan jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah Kabupaten Magelang terus meningkat dan beragam. Angka rasio yang dihasilkan juga meningkat setiap tahunnya dikarenakan jumlah koleksi yang tersedia semakin banyak dan judul buku yang dikoleksi juga terus bertambah. Dengan semakin beragamnya judul serta jumlahnya, diharapkan semakin banyak ragam dan jenis ilmu yang dapat diperoleh oleh masyarakat pengunjung perpustakaan.

p. Kearsipan

1) Pengelolaan Arsip Secara Baku

Tujuan penyelenggaraan kearsipan diantaranya adalah menjaga kelestarian arsip, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengelolaan arsip secara baku, yang dikelola sesuai kaidah arsip yang tertib sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat dibutuhkan.

Dibawah ini data pengelolaan arsip secara baku atau tertib di Kabupaten Magelang.

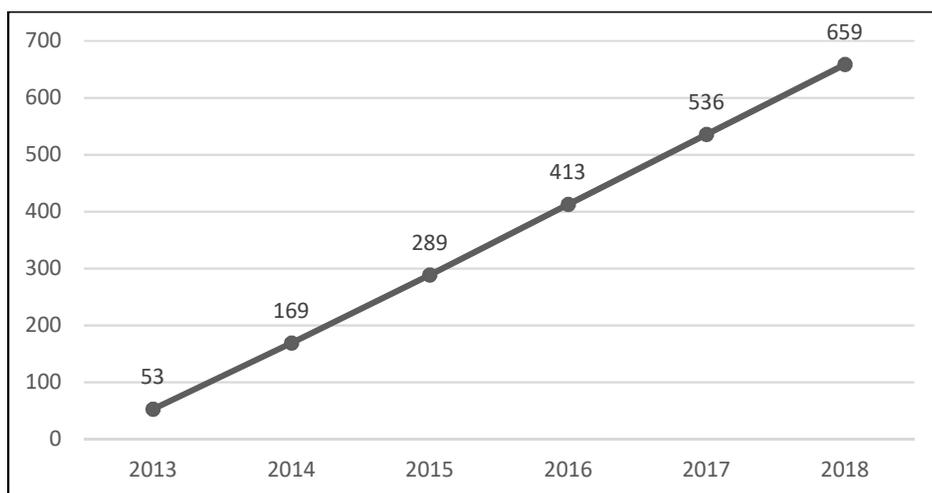
Tabel 2.115

Jumlah Unit Pengolah/Pencipta Arsip yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku/Tertib di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Unit Pengolah/Pencipta Arsip yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	Unit	53	169	289	413	536	659
2	Jumlah Unit Pengolah/Pencipta Arsip	Unit	734	734	734	734	734	734
3	Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku/Tertib	%	7,22	38,47	39,37	56,27	73,02	89,77

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Magelang belum menyentuh ke seluruh pengolah arsip/pencipta arsip, meskipun dari tahun 2013 hingga 2017 jumlahnya terus mengalami kenaikan. Hal tersebut mengindikasikan diperlukannya sosialisasi dan pendampingan kepada pengolah arsip/pencipta untuk melaksanakan pengelolaan arsip secara baku.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.25

Grafik Perkembangan Pengolah Arsip yang menerapkan Pengelolaan Arsip

secara Baku Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018

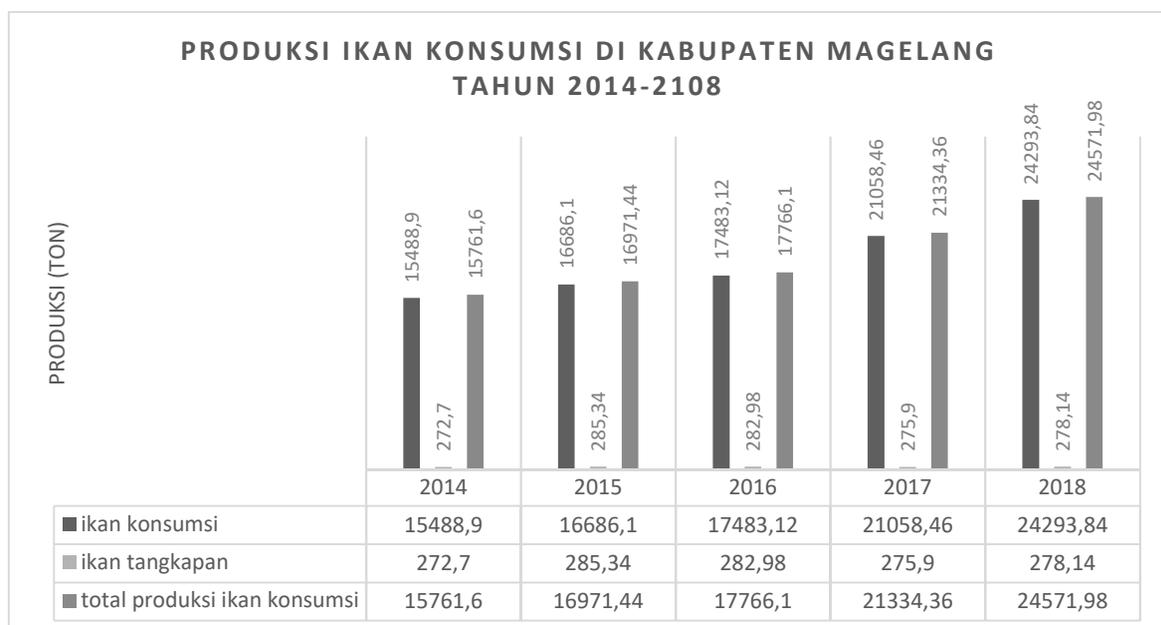
2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Magelang adalah sektor perikanan darat, mengingat Kabupaten Magelang bukanlah daerah pesisir.

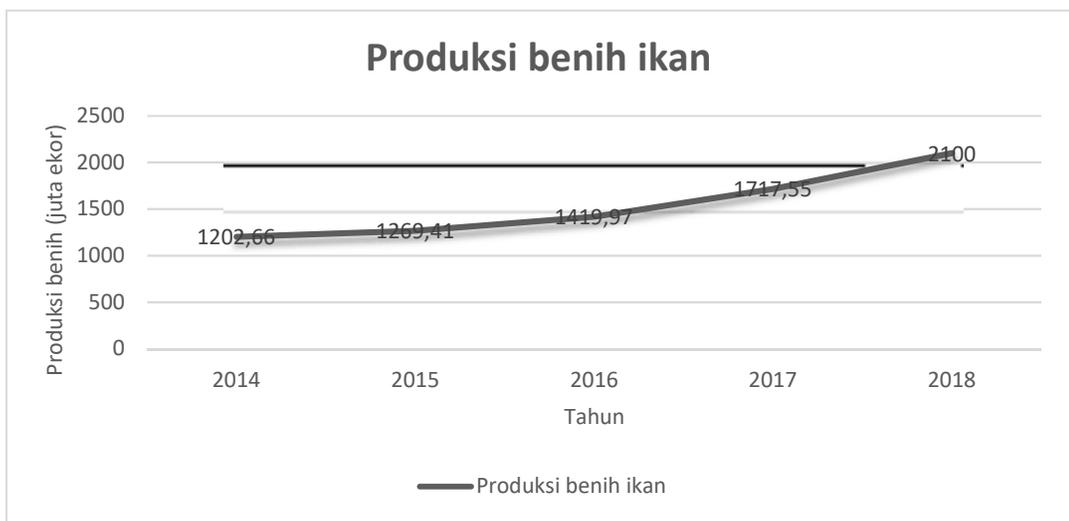
Perikanan budidaya yang dikembangkan di Kabupaten Magelang mayoritas adalah jenis ikan tawar konsumsi. Jumlah produksi perikanan budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Begitu juga pada produksi perikanan benih, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Selain perikanan budidaya, sektor perikanan di Kabupaten Magelang juga bersumber dari perikanan tangkap sungai. Jumlah produksi perikanan tangkap memang tidak sebanyak perikanan budidaya, namun banyaknya sungai di wilayah Kabupaten Magelang berpengaruh terhadap besarnya produksi perikanan tangkap yang cenderung meningkat. Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 272,70 ton sampai tahun 2018 sebesar 278,14 ton. Produksi perikanan di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel berikut.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

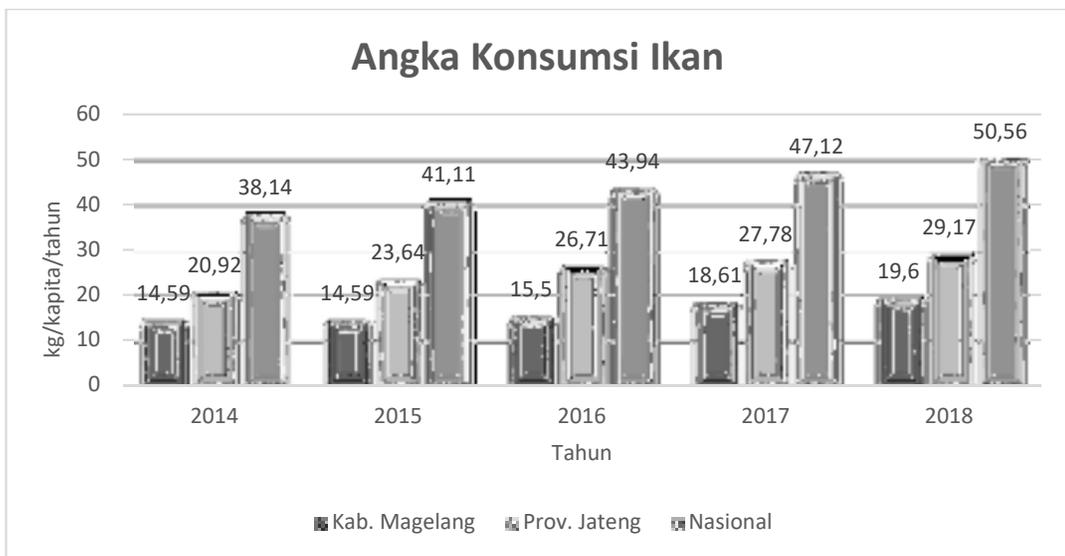
Gambar 2.26
Produksi Ikan Konsumsi (Ton) di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.27
Produksi Benih Ikan (Juta ekor) di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Besar konsumsi ikan menjadi salah satu indikator kesejahteraan karena berhubungan dengan variasi pangan yang dikonsumsi masyarakat untuk memenuhi kualitas gizi dan kesehatan. Ikan mengandung vitamin dan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama anak-anak yang masih dalam tahap pertumbuhan. Ikan mengandung omega 3 yang berfungsi baik bagi perkembangan otak manusia, selain itu protein yang ada juga penting perannya dalam mensuplai kebutuhan dan perkembangan organ tubuh manusia.



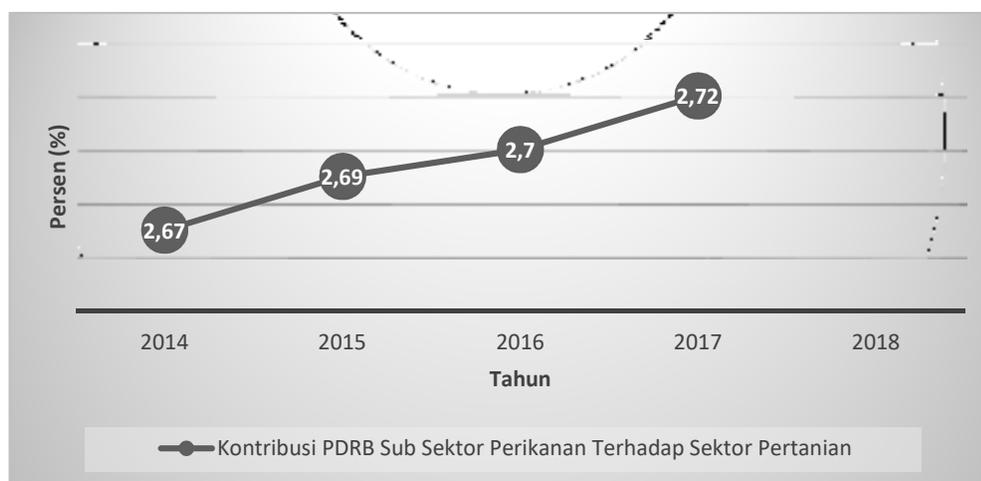
Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.28
Konsumsi Ikan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Jumlah konsumsi ikan per kapita di Kabupaten Magelang meningkat secara signifikan dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Namun hal ini masih jauh dari angka konsumsi ikan di tingkat provinsi Jawa Tengah

maupun nasional. Sehingga masih diperlukan kampanye memasyarakatkan makan ikan di Kabupaten Magelang.

Perikanan sebagai bagian dari sektor pertanian dalam arti luas, juga memberi kontribusi dalam pendapatan Kabupaten Magelang melalui produk domestik regional bruto. Sebagai kabupaten yang memiliki kondisi geografis perbukitan dan dataran membuat sektor perikanan yang berkembang masih sangat terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya kontribusi perikanan di dalam PDRB yakni berada di kisaran 2,6% sejak tahun 2014 hingga tahun 2015. Namun pada tahun 2016 dan 2017 kontribusinya naik menjadi 2,7%.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.29

Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

b. Pariwisata

1) Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi perekonomian wilayah. Eksistensinya mampu menjadi generator sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan penyedia akomodasi. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sektor pariwisata turut berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian wilayah adalah melalui jumlah kunjungan atau jumlah wisatawan, serta kontribusinya terhadap PDRB.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu destinasi wisata populer berkat adanya daya tarik wisata budaya dan alam, salah satunya Candi Borobudur, yang tidak hanya menarik wisatawan domestik saja, tetapi juga wisatawan mancanegara. Kunjungan wisata ke berbagai daya tarik wisata di Kabupaten Magelang pada tahun 2014 hingga tahun 2018 selalu mengalami peningkatan.

Tabel 2.116
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kunjungan Wisata manca	301.909	253.358	413.306	337.515	358.673
2	Kunjungan Wisata nusantara	3.619.554	3.902.502	4.753.255	5.064.569	5.977.422
Jumlah		3.921.463	4.155.760	5.166.561	5.402.084	6.336.095
Peningkatan Jumlah Kunjungan		11.870	480.270	764.828	235.523	934.011

Sumber :Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2018

Pada tahun 2014 kunjungan wisata hanya mencapai 3.921.463 selama setahun dan meningkat hingga 6.336.095 pada tahun 2018. Selisih jumlah kunjungan mancanegara dengan kunjungan domestik masih terpaut cukup besar. Sejak tahun 2014 hingga 2018, pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara rata rata kurang 10%.

2) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata hingga saat ini belum secara tersurat masuk ke dalam salah satu kategori lapangan usaha PDRB. Oleh karena itu digunakan kategori lapangan usaha lain yang merepresentasikan kontribusi pariwisata, yaitu sektor penyedia akomodasi dan makan minum. Sektor ini kemudian dibagi menjadi dua subsektor, yaitu penyedia akomodasi dan penyedia makan dan minum. Subsektor penyedia akomodasi mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek seperti hotel dan penginapan. Sedangkan subsektor penyedia makan minum meliputi pelayanan makan minum untuk dikonsumsi segera seperti restoran, baik restoran tradisional, *self service*, maupun *take away*.

Tabel 2.117
Kontribusi PDRB Kategori Penyedia Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
PDRB ADHK Kabupaten Magelang	17.936.288,38	18.838.351,97	19.855.844,24	20.882.801,00
PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (juta Rp)	728.538,27	776.587,13	823.333,08	875.649,00
Kontribusi terhadap PDRB (%)	4,06%	4,12%	4,15%	4,19%
Pertumbuhan (%)	7,50%	6,60%	6,02%	6,35%

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang diolah, Tahun 2018

Besar PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kabupaten Magelang menunjukkan tren yang cenderung meningkat positif. Pada tahun 2014, sektor penyedia akomodasi dan makan minum menyumbangkan 4,06% dari total PDRB ADHK

Kabupaten Magelang. Besar kontribusi sektor ini terhadap PDRB terus meningkat seiring dengan peningkatan nilai riil PDRB. Hingga tahun 2018, besar PDRB sektor penyedia akomodasi dan makan minum Kabupaten Magelang berhasil mencapai 875.649,00 juta rupiah atau 4,19% dari PDRB Kabupaten dengan laju pertumbuhan rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 6,18%.

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pariwisata secara langsung dan tidak langsung memberikan *multiplier effect* lewat sektor ekonomi lain mulai dari skala besar hingga mikro atau rumah tangga. Selain berkontribusi terhadap PDRB, sektor pariwisata yang apabila dikelola dengan tepat dan bijak dapat memberikan sumbangan pendapatan daerah yang cukup besar. Kebijakan pengelolaan yang terkadang dipegang oleh pemerintah pusat menjadi salah satu hambatan daerah untuk mengembangkan daya tarik wisata yang sebenarnya berada di wilayah otonomi mereka.

3) Lama Tinggal Wisatawan

Lama tinggal wisatawan menjadi salah satu indikator utama sektor pariwisata. Lama tinggal wisatawan mempengaruhi besarnya belanja wisatawan di suatu wilayah sehingga menggerakkan sektor ekonomi riil. Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Magelang cenderung meningkat dengan nilai yang tidak begitu signifikan. Mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan, setelah itu mengalami penurunan pada tahun 2017 dan kembali naik pada tahun 2018 dengan nilai rata-rata yang hampir sama dengan tahun 2016. Lambatnya tingkat kenaikan rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Magelang disebabkan masih lemahnya dukungan atraksi malam hari, tempat penginapan, terbatasnya daya tarik wisata dan paket wisata yang cenderung menjadikan DTW di wilayah Kabupaten Magelang bukan sebagai tujuan utama wisata.

Tabel 2.118

Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Wisman	Hari	1,30	1,64	1,14	1,004	1,65
2	Wisnu	Hari	1,41	1,31	1,01	1,006	1,31
Rata-rata		Hari	1,33	1,35	1,47	1,075	1,48
Peningkatan Lama Tinggal							0,475

Sumber :Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2018

4) Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW)

Magelang memiliki beragam jenis DTW yang dikelompokkan menjadi empat klasifikasi yaitu DTW alam, budaya, buatan, dan minat khusus, dan lainnya yang tidak masuk dalam klasifikasi empat tersebut. Daya tarik wisata yang paling dominan di Kabupaten Magelang adalah daya

tarik wisata alam yaitu sejumlah 82. Kemudian disusul dengan daya tarik wisata berbentuk *event*.

Tabel 2.119
Jumlah Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	DTW Alam	4	4	4	5	82
2	DTW Budaya	4	4	4	5	18
3	DTW Buatan	3	3	3	4	29
4	DTW Minat Khusus	N/a	N/a	N/a	N/a	29
5	Lain-lain (event)	N/a	N/a	N/a	N/a	53

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2018

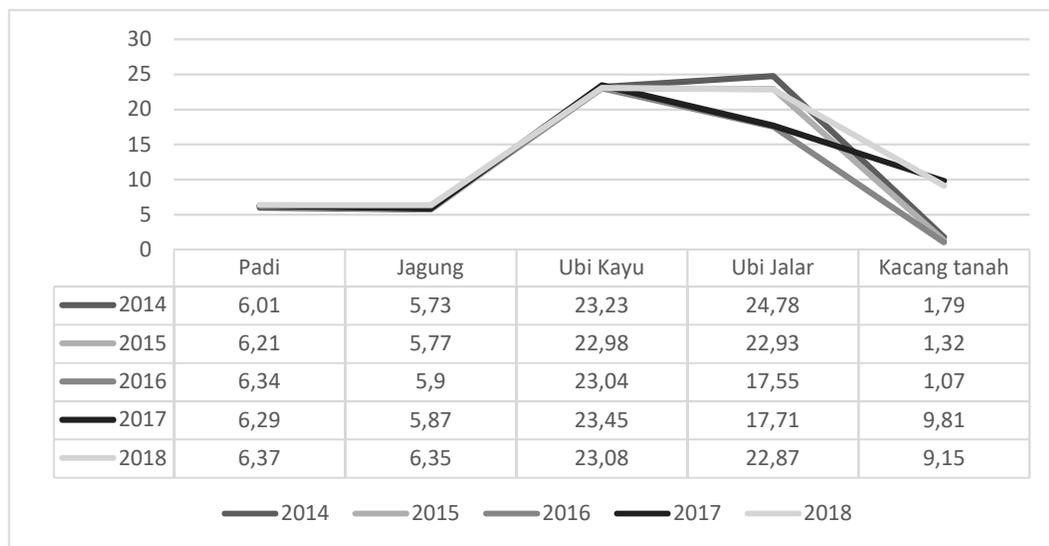
c. Pertanian

Gambaran tentang kondisi pembangunan pertanian di Kabupaten Magelang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

a) Produktivitas Tanaman Bahan Makanan Utama

Tanaman bahan makanan utama di Kabupaten Magelang terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Perkembangan produktivitas dari tanaman tersebut selama lima tahun terakhir dapat diketahui melalui gambar di bawah ini.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.30
Produktivitas Tanaman Bahan Makanan Utama (Ton/Ha)
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

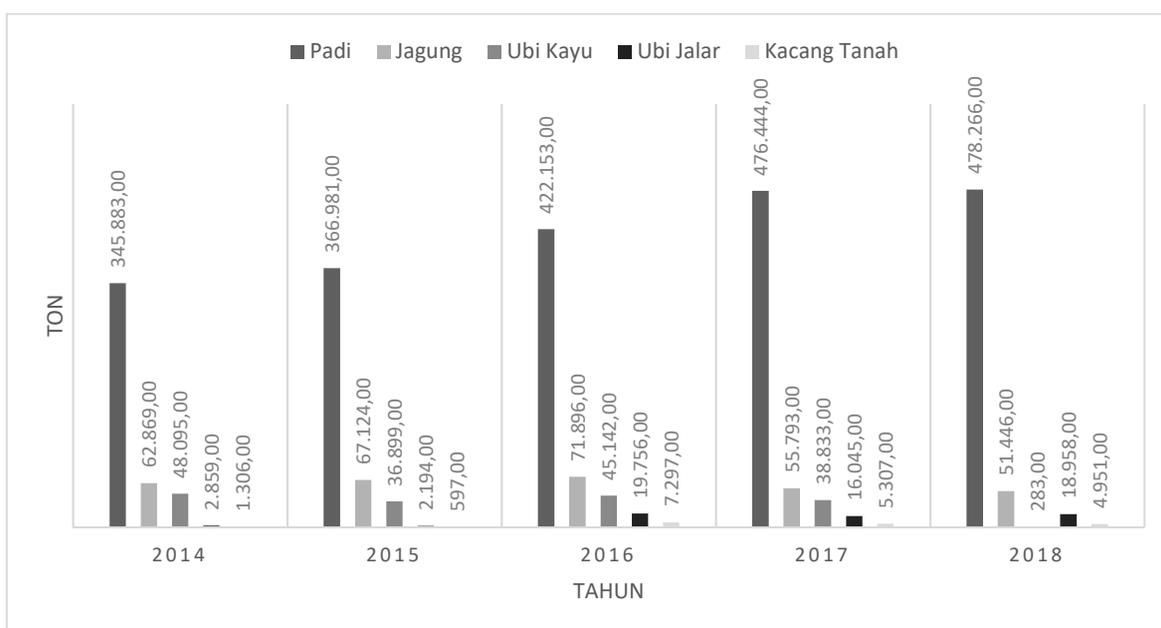
Produktivitas padi, jagung, ubi kayu cenderung tetap, meskipun ada kenaikan namun tidak terlalu signifikan. Produktivitas tertinggi diantara komoditas tersebut adalah golongan ubi-ubian. Produktivitas ubi kayu adalah yang tertinggi pada tahun 2017 yakni mencapai

23,45 Ha dengan tren perkembangan yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Ubi jalar menyusul dengan 22,87 ton/ha pada tahun 2018 meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 17,71 ton/ha.

Berbeda dengan ubi jalar dan ubi kayu, produktivitas padi di Kabupaten Magelang meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2018 hingga mencapai 6,37 ton/ha. Perkembangan produktivitas padi menunjukkan perkembangan yang terus meningkat perlahan dibanding produktivitas jagung yang cenderung stagnan selama lima tahun terakhir.

b) Total Produksi Tanaman Bahan Makanan Utama

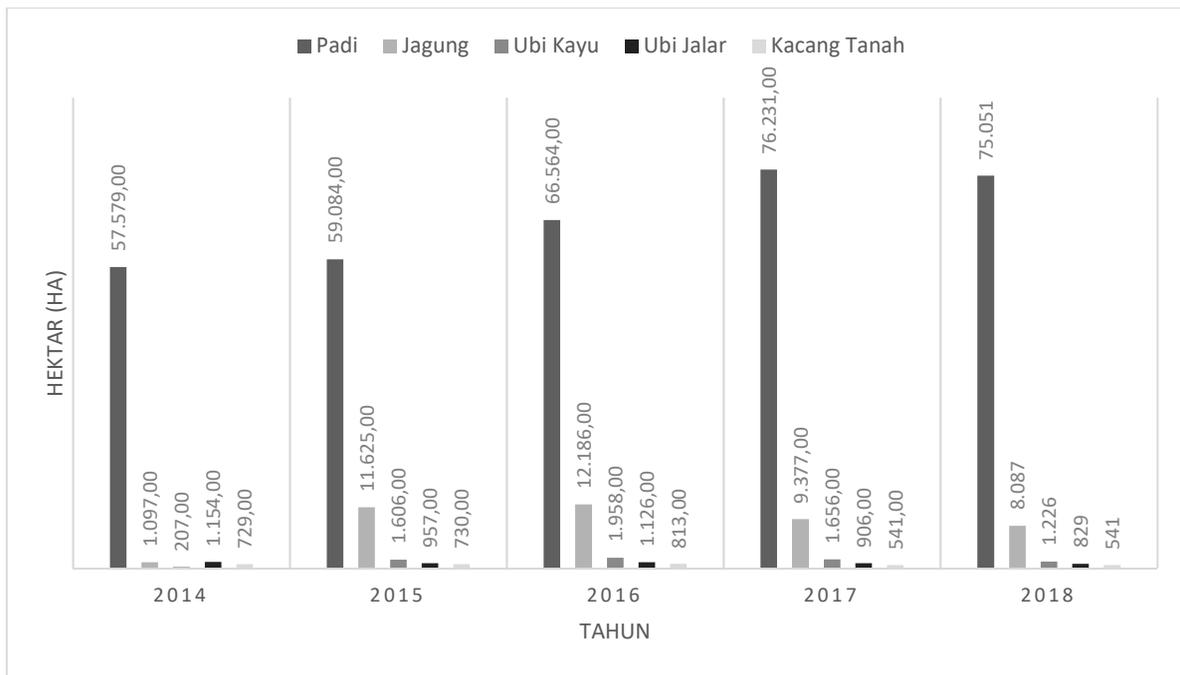
Apabila dilihat dari besar jumlah produksi tanaman bahan makanan utama, padi merupakan tanaman pangan dengan jumlah terbesar dibandingkan jenis tanaman pangan utama lainnya. Padi sebagai bahan pangan utama yang mentah sebelum menjadi beras, memiliki peran penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Total produksi komoditas tanaman pangan penting di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.31
Total Produksi Tanaman Bahan Makanan Utama
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 (Ton)

Total produksi padi mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai tahun 2017 sementara komoditas jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah mengalami penurunan produksi karena lahan bergiliran untuk peningkatan produksi padi (Pajale). Hal ini dapat dilihat dari luas panen tanaman bahan makanan di Kabupaten Magelang pada tabel di bawah ini.

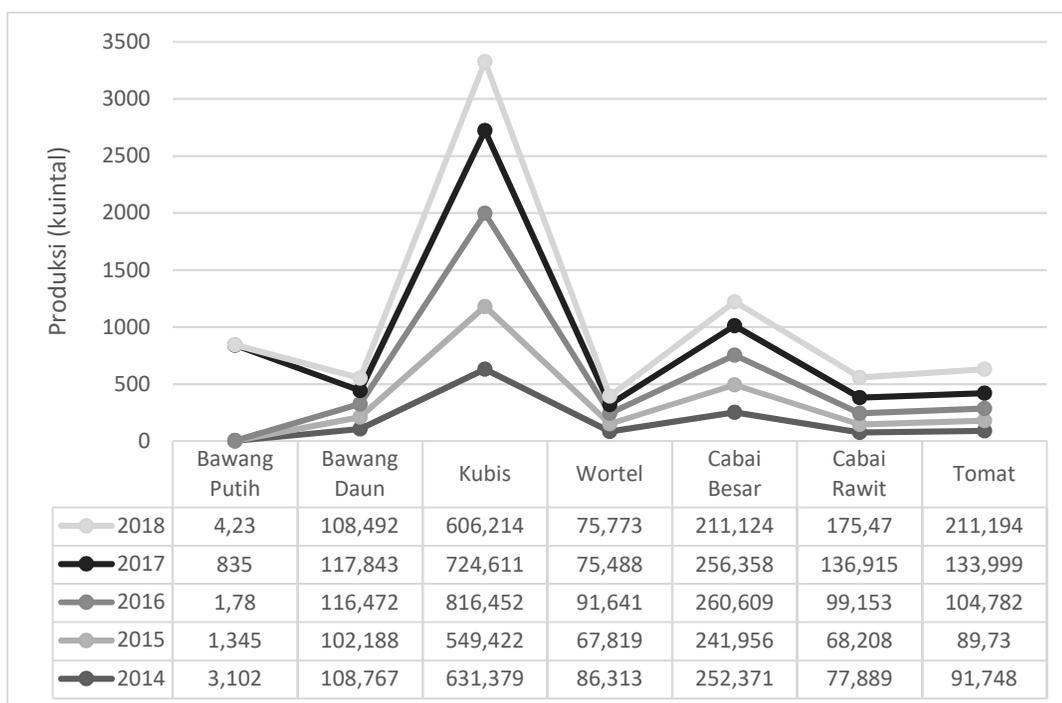


Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.32
Luas Panen Tanaman Bahan Makanan Utama di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

c) Total Produksi Komoditas Sayur-sayuran

Sebagai daerah yang memiliki lahan pertanian yang potensial dengan iklim yang sesuai, Kabupaten Magelang tidak hanya menghasilkan padi tetapi juga komoditas sayur-sayuran. Komoditas sayuran merupakan komoditas yang penting setelah komoditas tanaman pangan. Jenis dan karakteristik tanah serta kondisi geografis Kabupaten Magelang yang sebagian besar adalah wilayah tangkapan air membuat kabupaten ini sangat potensial untuk ditanami komoditas sayur-sayuran. Produksi beberapa jenis sayuran yang dihasilkan Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



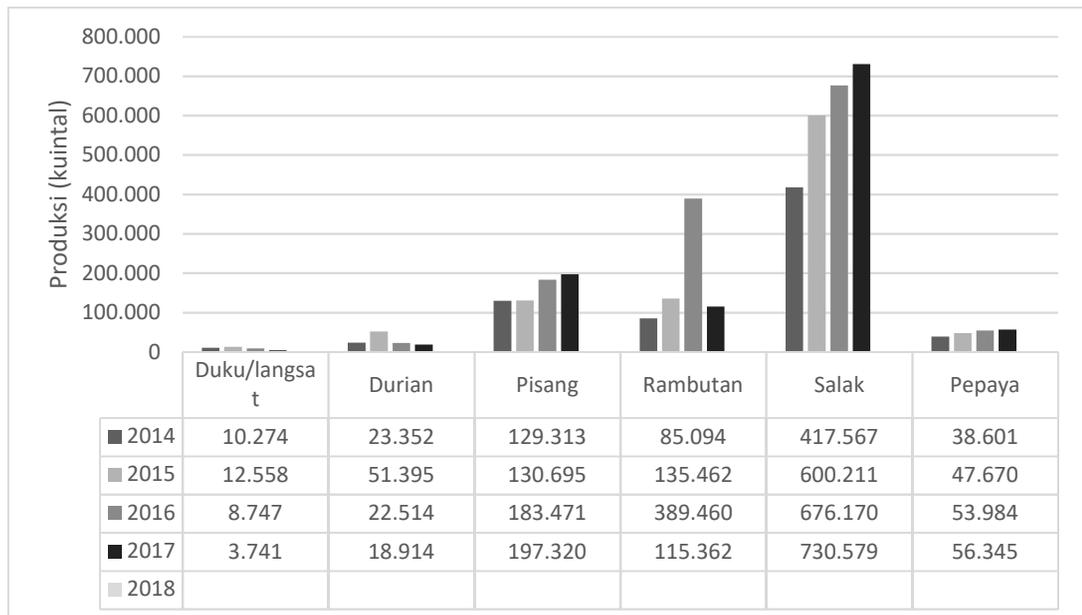
Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.33
Total Produksi Sayur-sayuran (Kwintal) di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Komoditas sayuran penting di Kabupaten Magelang antara lain kubis, bawang daun, wortel, tomat, cabai rawit, cabai besar dan bawang putih (sedang dikembangkan). Perkembangan produksi hampir seluruh komoditas sayuran fluktuatif namun relatif stabil dari tahun 2014-2018, dengan kecenderungan positif.

d) Total Produksi Komoditas Buah-Buahan

Komoditas buah-buahan merupakan komoditas pertanian lainnya yang penting setelah tanaman pangan dan sayuran, yang mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat tani. Komoditas buah-buahan umumnya rata-rata memproduksi setahun sekali. Komoditas buah-buahan pada umumnya bisa diproduksi di semua kabupaten dan kota. Beberapa jenis buah dengan produksi tertinggi antara lain salak, pisang, pepaya, dan rambutan. Unggulnya buah-buahan tersebut tidak lepas dari kondisi lingkungan yang subur untuk menanam buah jenis tertentu.



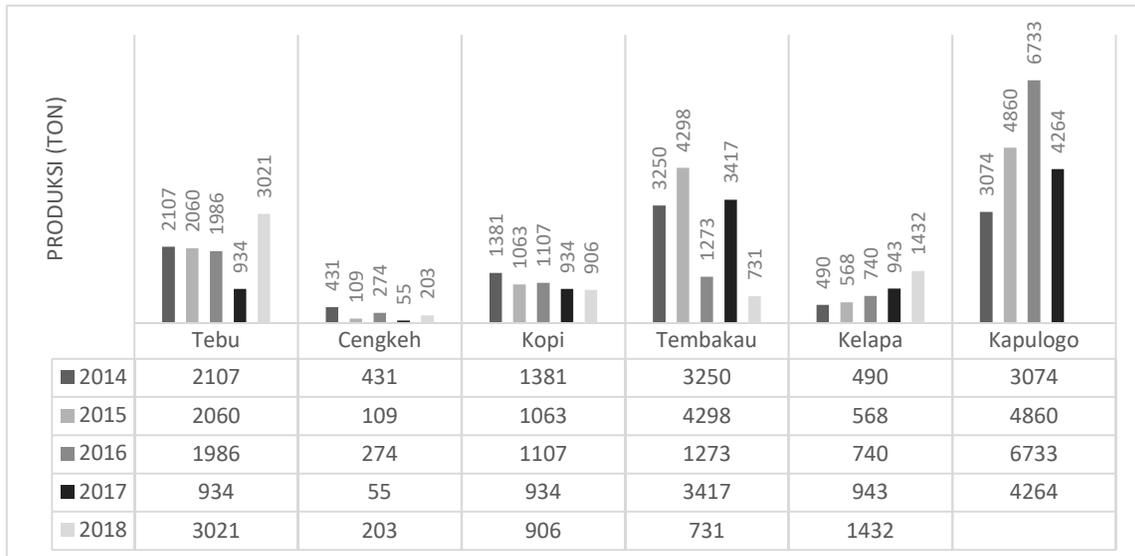
Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.34
Perkembangan Produksi Buah-Buahan (Kuintal)
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Komoditas buah salak merupakan salah satu komoditas unggulan daerah yang produksinya mencapai 730.579 kwintal pada tahun 2017 dengan tren perkembangan yang selalu meningkat sebesar 8,05% dari tahun 2016 ke tahun 2017. Produksi buah terbesar selanjutnya adalah pisang yang mencapai 197.320 kwintal atau meningkat 7,55% dari produksi tahun sebelumnya. Sama halnya dengan pisang, komoditas jambu biji juga mengalami peningkatan produksi hingga 39,22% dari tahun sebelumnya.

e) Total Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan

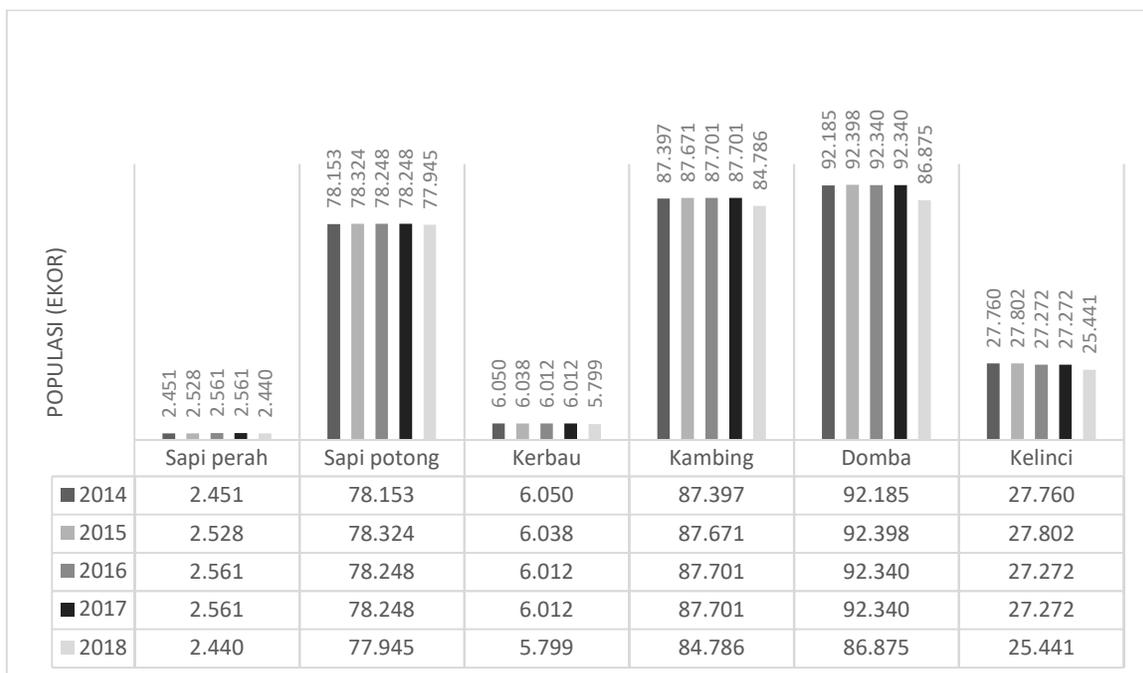
Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Magelang fluktuatif, didominasi oleh tanaman perkebunan tembakau dan kapulaga, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.35
Total Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

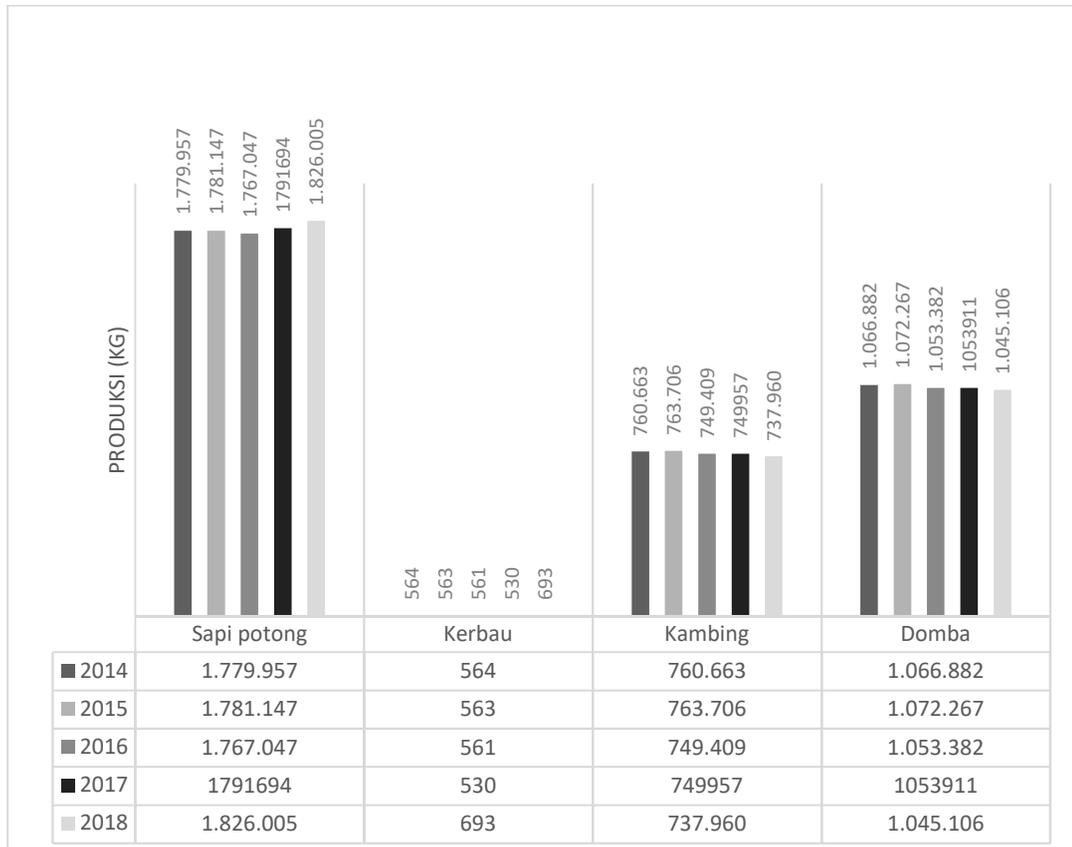
Peternakan sebagai bagian dari kegiatan pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian wilayah. Selain sebagai sumber protein hewani bagi kebutuhan manusia, ternak juga seringkali digunakan sebagai tenaga pengolah lahan persawahan. Teknologi mutakhir saat ini juga telah mampu mengubah kotoran sapi menjadi pupuk organik dan alternatif sumber energi atau dikenal dengan biogas bagi rumah tangga. Banyaknya manfaat dari sektor perekonomian berbasis peternakan, membuat sektor yang bersumber dari *livestock* ini perlu diperhatikan.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.36
Total Populasi Ternak (Ekor) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan populasi masing-masing ternak berbeda, namun cenderung meningkat positif. Kenaikan jumlah populasi paling signifikan terjadi pada kambing dan domba. Populasi domba pada tahun 2017 mencapai 92.340 ekor dan disusul kambing sebanyak 87.701 ekor. Sedangkan populasi sapi potong, kerbau, dan kelinci mengalami penurunan.

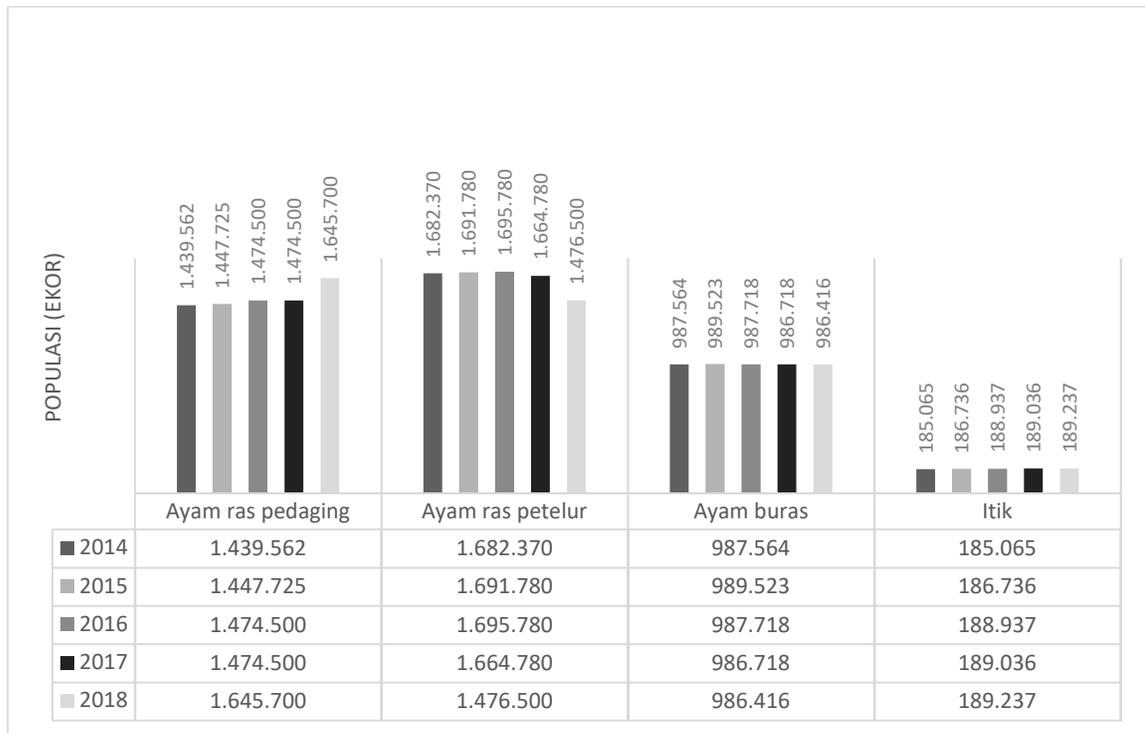


Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.37
Perkembangan Produksi Ternak (kg) Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Perkembangan jumlah produksi hewan ternak di Kabupaten Magelang cenderung meningkat untuk daging sapi dan kerbau, sedangkan untuk daging kambing dan domba, cenderung menurun. Produksi daging sapi meningkat dari 1.779,957 kg pada tahun 2014 menjadi 1.826.005 kg pada tahun 2018. Sedangkan produksi daging kerbau juga meningkat dari 564 kg pada tahun 2014 menjadi 693 kg pada tahun 2018. Sementara itu, produksi daging kambing mengalami penurunan dari 760.663 kg pada tahun 2014 menjadi 737.960 pada tahun 2018. Sama halnya yang terjadi pada produksi daging domba, menurun dari 1.006.882 pada tahun 2014 menjadi 1.045.106 pada tahun 2018.

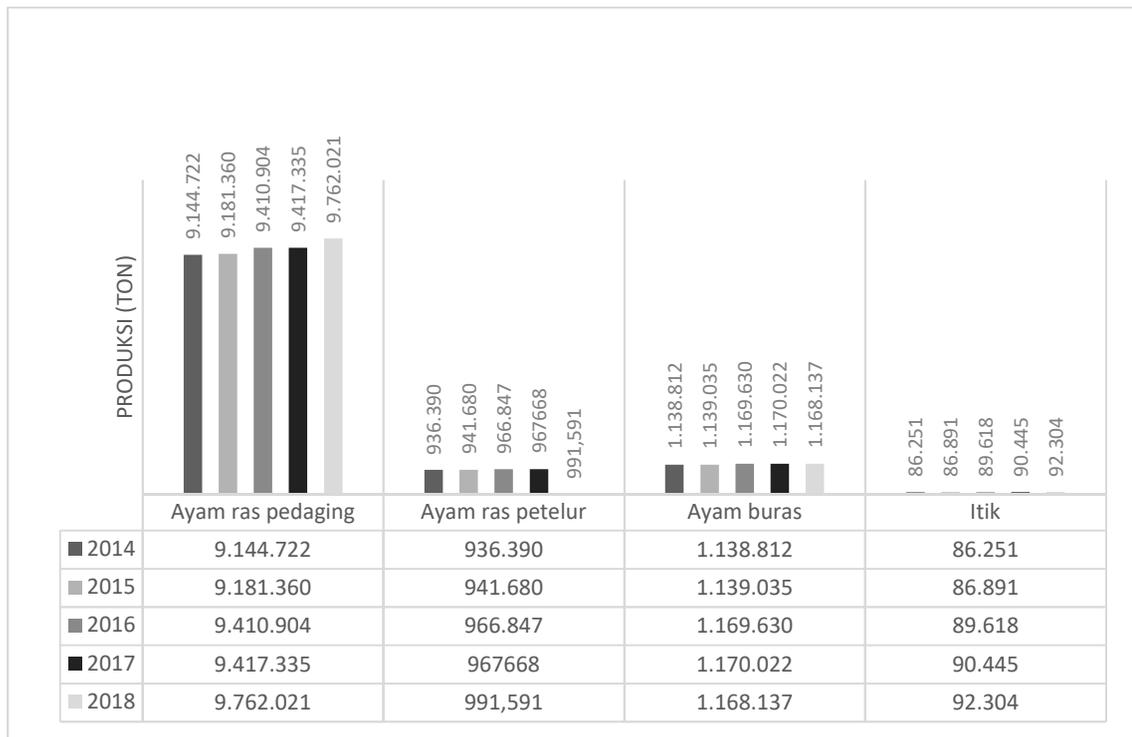
Tidak hanya memiliki potensi peternakan ruminansia, Kabupaten Magelang juga memiliki aktivitas pertanian disektor peternakan unggas. Perkembangan populasi ternak unggas dan hasil produksinya merupakan gambaran tingkat ketersediaan sumber bahan protein nasional. Perkembangan ternak unggas selama lima tahun terakhir relatif meningkat positif di semua jenis unggas.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.38
Grafik Perkembangan Populasi Ternak Unggas (Ekor)
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

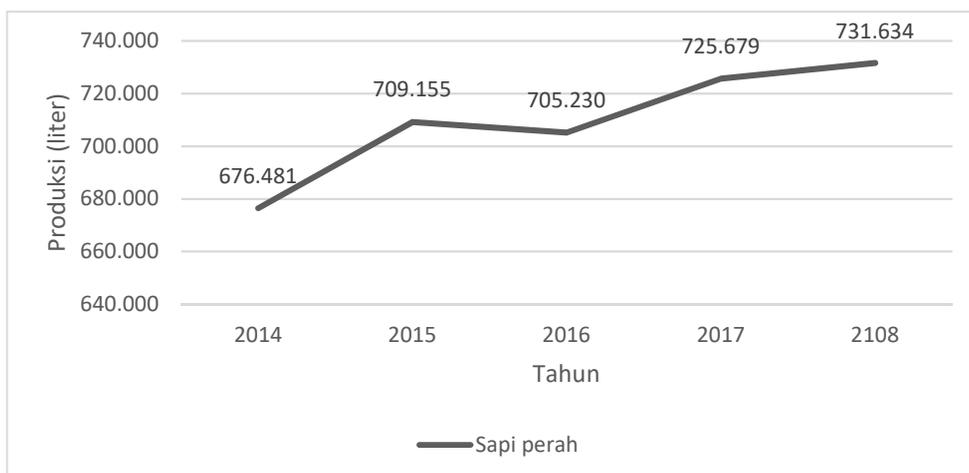
Populasi ternak unggas yang terbesar di Kabupaten Magelang adalah ayam petelur. Populasi ayam petelur mencapai 1.695.700 ekor pada tahun 2016. Angka ini disusul oleh ayam pedaging sebesar 1.474.500 ekor dan ayam kampung 987.718 ekor. Kenaikan populasi terbesar adalah ayam pedaging, sedangkan populasi burung puyuh dan angsa menurun pada tahun terakhir.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.39
 Grafik Perkembangan Produksi Daging Ternak
 Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Selain daging, manfaat yang diperoleh dari ternak ruminansia adalah produksi susu segar dari sapi perah untuk melengkapi pemenuhan gizi penduduk. Selama lima tahun terakhir produksi susu segar di Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 produksi susu sapi segar mencapai 487.743 liter dan meningkat tajam di tahun 2013 hingga mencapai 662.567 liter. Angka ini terus meningkat perlahan dan kini produksi susu sapi segar telah mencapai 705.231 liter pada tahun 2016.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.40
 Grafik Perkembangan Produksi Susu Sapi Perah
 Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

f) Sumber Daya Manusia Pertanian

Kualitas sumber daya manusia pertanian dapat dilihat dari perkembangan kelas kelompok tani. Berikut disajikan perkembangan kelas kelompok tani di Kabupaten Magelang. Semakin berhasil penyuluhan yang dilaksanakan, maka semakin banyak kelompok tani dengan kelas madya dan utama.

Tabel 2.120

Perkembangan Kelas Kelompok Tani di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Kelas Kelompok	2014	2015	2016	2017	2018
Pemula	1337	1615	1772	1534	1599
Lanjut	766	776	872	1125	1149
Madya	103	111	132	99	101
Utama	10	12	17	9	9
Jumlah Total	2216	2514	2793	2767	2858

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2019

Kelompok tani yang menempati kelas madya dan utama masih sangat kecil dibandingkan dengan total kelompok tani yang ada. Pada tahun 2018, 55% kelompok tani masih berada pada kelas pemula, 40% pada kelas lanjut, dan hanya 3,5% yang berada pada kelas madya serta 0,3% yang sudah berada pada kelas utama.

Keberlangsungan pembinaan kelompok tani sangat erat hubungannya dengan keberadaan tenaga penyuluh pertanian yang ada baik tenaga penyuluh ASN maupun tenaga penyuluh THL. Terdistribusinya pembinaan juga tidak lepas dari adanya penyuluh pertanian yang diterjunkan ke lapangan. Berikut ini adalah jumlah penyuluh yang ada di Kabupaten Magelang. Jumlah penyuluh swadaya lebih besar dibandingkan dengan jumlah penyuluh dari pemerintah maupun swasta.

Tabel 2.121

Jumlah Penyuluh di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	Penyuluh Pemerintah Tingkat Kabupaten	Orang	9	8	8	6	6
	Penyuluh Pemerintah Tingkat Kecamatan	Orang					
1	Penyuluh PNS	Orang	126	120	118	125	117
2	Penyuluh THL-TBPP	Orang	162	155	150	102	102
	Penyuluh Swadaya	Orang	525	525	525	540	540
	Penyuluh Swasta	Orang	40	42	42	42	42

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2019

Selama lima tahun terakhir, keberadaan tenaga penyuluhan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan terus berkurang. Hal ini disebabkan banyaknya penyuluh ASN yang memasuki masa

pensiun. Berlawanan dengan hal tersebut, jumlah penyuluh swadaya dan penyuluh swasta justru semakin meningkat.

d. Perdagangan

1) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Perubahan klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 turut mengubah klasifikasi subsektor perdagangan. Semula, subsektor perdagangan termasuk di dalam kategori sektor perdagangan, hotel dan restoran. Namun kini berubah menjadi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Sektor ini meliputi kegiatan ekonomi di bidang perdagangan skala besar maupun eceran atau perdagangan skala masyarakat umum untuk konsumsi perorangan dan rumah tangga. Jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kategori ini antara lain semua yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, hingga suku cadang dan aksesoris mobil dan motor.

Tabel 2.122

Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
PDRB Kabupaten Magelang	18.838.351,97	19.855.844,24	20.882.801	20.882.801
PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Juta Rp)	2.691.442,36	2.833.603,46	3.006.270	3.006.270
Kontribusi (%)	14,43%	14,29%	14,27%	14,40%
Pertumbuhan PDRB sektor (%)	3,52%	3,99%	5,28%	6,09%

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019

Sektor perdagangan dalam PDRB merupakan sektor sekunder kedua paling besar yang berkontribusi untuk PDRB Kabupaten Magelang setelah sektor industri pengolahan. Kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Magelang relatif menurun secara perlahan selama lima tahun terakhir. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten pada tahun 2014 mencapai 14,43% dan terus menurun hingga hanya 14,27% pada tahun 2016. Meski persentase kontribusinya terhadap total PDRB kabupaten, nilai riil PDRB sektor perdagangan tetap mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi dari tahun 2015 ke 2016, yakni dari 2.691.442,36 juta rupiah menjadi 2.833.603,46, atau sebesar 5,28%.

2) Pasar Tertib Ukur

Untuk melindungi dan menjaga kepercayaan konsumen perlu diciptakan pasar tertib ukur. Di Kabupaten Magelang telah dilakukan

penilaian terhadap pasar yang tertib ukur. Jumlah pasar yang telah menerima penghargaan tertib ukur di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.123
Pasar yang Menerima Penghargaan Tertib Ukur
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Pasar Tertib Ukur	Unit	-	1	2	4	6
2	Jumlah Pasar	Unit	17	17	17	17	17
	Persentase	%	0	0	6	24	35

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2018

Dari sejumlah 20 unit pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Magelang yang tersebar di wilayah Kabupaten Magelang. Sampai Tahun 2018 telah memiliki 6 pasar yang telah menerima penghargaan sebagai Pasar Tertib Ukur dari Kementerian Koperasi yaitu Pasar Salaman, Mungkid, Bandongan, Secang, Grabag, dan Talun. Hal ini perlu dilanjutkan karena selain untuk melindungi dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap keakuratan timbangan dan alat ukur dalam perdagangan, juga bisa meningkatkan pemanfaatan pasar rakyat oleh masyarakat lokal.

3) Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan dapat menjadi salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi terkait produksi barang dan perdagangan. Jika nilai ekspor bersih perdagangan positif, maka neraca perdagangan dikatakan positif atau surplus dan sebaliknya defisit.

Tabel 2.124
Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Nilai Ekspor	US \$	90.672.195,97	102.372.685,5	94.310.307,20	102.981.326,5	87.180.566,41
2	Nilai Impor	US \$	2.367.953,18	1.843.877,79	1.233.499,55	1.149.602,58	1.098.663,30
3	Ekspor Bersih Perdagangan	000 US \$	76.027.306,86	88.304.242,79	100.528.807,7	101.831.724	86.081.903,11

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2019

Selama lima tahun terakhir, nilai ekspor bersih perdagangan Kabupaten Magelang positif atau surplus dengan trend fluktuatif, meski kenaikan ataupun penurunannya tidak signifikan. Hal ini menunjukkan Kabupaten Magelang berkontribusi positif terhadap upaya peningkatan nilai ekspor nasional.

Tabel di atas menunjukkan bahwa hingga saat ini nilai ekspor masih lebih besar dibandingkan nilai impor, meski keduanya sama-sama mengalami kenaikan dan penurunan sepanjang tahun 2014 hingga 2018. Nilai ekspor bersih secara bertahap meningkat mulai tahun 2014 dan mencapai puncaknya pada tahun 2017, yaitu sebesar US\$101.831.723,96, namun kemudian menurun kembali pada tahun 2018 dengan penurunan yang signifikan. Kenaikan dan penurunan nilai ekspor sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan moneter. Saat ekonomi dunia melemah maka nilai ekspor Kabupaten Magelang menurun meskipun masih positif atau surplus.

e. Perindustrian

1) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan sektor sekunder penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Magelang dan sektor terbesar kedua setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan dapat berasal dari pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian yang selanjutnya diolah menjadi barang yang memiliki nilai tambah. Kabupaten Magelang yang memiliki potensi alam melimpah merupakan salah satu faktor pesatnya perkembangan industri pengolahan baik pengolahan produk pertanian, kehutanan, perikanan hingga pertambangan penggalian.

Tabel 2.125

Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
PDRB ADHK Kabupaten Magelang	17.936.288,38	18.838.351,97	19.855.844,24	20.882.801
PDRB Kategori Industri Pengolahan (juta Rp)	3.802.680,12	3.997.570,79	4.230.032,32	4.437.345
Kontribusi terhadap PDRB (%)	21,20%	21,22%	21,30%	21,25%
Pertumbuhan (%)	7,44%	5,13%	5,82%	4,53%

Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun, 2018

Apabila dilihat dari segi perkembangan kontribusinya terhadap PDRB dari tahun ke tahun, persentase kontribusi sektor ini memiliki kecenderungan naik, meski tidak signifikan, seiring dengan kenaikan nilai riilnya. Pada tahun 2014, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 21,20% dan terus naik dengan pertumbuhan rata-rata 5,73% hingga tahun 2017. Pada tahun 2016 besar nilai riil sektor industri pengolahan telah mampu mencapai 4.230.032,32 juta rupiah dan berkontribusi sebesar 21,30% terhadap total PDRB kabupaten.

2) Pertumbuhan Industri

Sama halnya dengan sektor perdagangan, sektor industri juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan tingkatan perkembangan ekonomi suatu wilayah dilihat dari kemampuannya mengolah bahan baku dan tidak lagi bergantung pada kegiatan primer. Pada tahun 2014 jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Magelang mencapai 38.427 unit. Angka ini terus meningkat dengan pertumbuhan terbesar pada tahun 2015, yakni naik 7,8% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Magelang sudah mampu mencapai 39.712 unit. Sedangkan industri besar di Kabupaten Magelang didominasi oleh industri di sektor energi. Industri ini paling banyak berkembang di Kecamatan Tempuran, Mungkid, dan Mertoyudan. Perkembangan industri besar dan sedang selama periode tahun 2014 hingga 2016 cenderung menurun.

Tabel 2.126
Pertumbuhan Industri di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017
1	Industri Besar	Unit	20	20	18	6
2	Industri Sedang*	Unit	43	52	39	*
3	Industri kecil	Unit	38.427	39.548	39.580	39,602
4	Industri menengah	Unit	113	123	132	132
5	Total usaha industri kecil dan menengah	Unit	38.540	39.671	39.712	39,734
6	Pertumbuhan usaha industri kecil dan menengah	%	6,03	7,8	3,7	0,05

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2018

Ket: * Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 64 Tahun 2017, kategori Industri terdiri dari : Industri Kecil, Menengah dan besar.

Apabila dilihat dari skala industri, hampir 99% merupakan jenis industri kecil. Pada tahun 2016, jumlah industri kecil mencapai 39.580 dari total unit usaha sebanyak 39.712 unit. Sedangkan jumlah industri menengah hanya sebesar 132 unit atau 0,3% dari total jumlah unit usaha. Perkembangan industri yang tengah berlangsung di Kabupaten Magelang menandakan sudah adanya usaha mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Tingginya pertumbuhan industri juga terbukti mampu melampaui target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sejak tiga tahun terakhir.

2.1.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Konsistensi dan akurasi perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan mulai tahun 2017 dengan dukungan aplikasi yang berbasis teknologi informasi, berupa Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPPD), Sistem Informasi Usulan Masyarakat (SiUma), Sistem Informasi Daftar Usulan RKP Desa (Sidudes), Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan (SIPPD) Versi 2, Sistem Informasi Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD (SiPokir), Sistem Informasi Pengendalian dan Pelaporan (Sidalap). Untuk menjamin ketepatan sasaran pembangunan telah digunakan data album kemiskinan yang berbasis aplikasi sistem penanggulangan kemiskinan (Sinangkis). Aplikasi tersebut diterapkan untuk menentukan proporsi wilayah sasaran dan besaran kuota rumah tangga sasaran penerima program secara berkeadilan dan lebih akurat. Akurat artinya dibuat secara terperinci dan mendetail dan dirumuskan segala aspek organisasi, tata kerja, metode kerja, penggunaan tenaga kerja, pembiayaan, jadwal waktu, target hasil dari sistem pengawasan. Kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur dengan kesesuaian perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara rencana/indikator dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 2.127
Capaian Kesesuaian Perencanaan Program Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Program RKPD	182	184	176	165	174
2	Jumlah Program RPJMD	182	184	176	185	184
3	Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	89,19	94,57
5	Pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah (%)	100	100	100	100	100

Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang, 2019

Rasio penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD pada kurun waktu 5 tahun terakhir seluruh program RPJMD telah dijabarkan dalam RKPD. Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang berkualitas perlu didukung oleh sumberdaya yang memadai, salah satunya sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai, jumlah SDM Perencana di perangkat daerah sejumlah 10 orang, atau baru terpenuhi 45,45% dari total kebutuhan SDM perencana yang sejumlah 22 orang. Hal ini menunjukkan kurangnya SDM perencana di Kabupaten Magelang yang berdampak pada kualitas perencanaan.

b. Keuangan

1) Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate*

disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 2.128
Opini BPK di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
2.	Target	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan tabel tersebut, Kabupaten Magelang sejak tahun 2014 hingga 2016 selalu memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yaitu opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu dinilai tidak wajar. Namun, ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pada tahun 2017-2018 Kabupaten Magelang akhirnya bisa memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Diharapkan ke depannya hal ini bisa dipertahankan dalam pelaporan keuangan dengan menggunakan prinsip akuntansi yang baik dan wajar sehingga terus memperoleh hasil WTP.

2) Persentase Peningkatan PAD

Salah satu sumber pendapatan dan belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah dimasukkan kedalam sumber APBD untuk memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud dari desentralisasi. PAD dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi/potong/bentuk lain sebagai akibat dari penjualan da/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Tabel 2.129
Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018 *)
Pajak daerah	79.395.385.267	88.960.021.815	97.101.522.117	112.344.030.430	124.444.072.963
Retribusi daerah	34.075.776.969	15.939.015.341	15.587.692.390	20.445.297.126	18.186.191.392

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018 *)
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	12.540.994.826	15.264.432.303	17.643.064.538	20.805.304.738	28.634.358.666
Lain-lain PAD yang sah	116.436.520.205	141.405.622.324	158.153.399.083	249.966.606.016	153.833.704.215
Total Pendapatan Asli Daerah	242.448.677.267	261.569.091.783	288.485.678.128	403.561.238.310	325.098.327.236
Persentase Kenaikan PAD	-	7,89	10,29	39,89	(19,44)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2018

Ket: *) Belum diaudit BPK (*unaudited*)

Sumber PAD terbesar Kabupaten Magelang adalah dari pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah, yakni menyumbang masing-masing 27,84% dan 61,94% terhadap PAD kabupaten pada tahun 2017. Sedangkan PAD yang bersumber dari retribusi daerah pada tahun 2016 cenderung menurun karena adanya perubahan peraturan tentang pengalihan kewenangan pengelolaan beberapa aset daerah sehingga retribusi yang dihasilkan tidak masuk ke dalam PAD kabupaten, akan tetapi pada tahun 2017 naik kembali hingga tahun 2018 yang mencapai 5,07%.

Tabel 2.130

Proporsi dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Uraian	Proporsi					Rata-rata Pertumbuhan
	2014	2015	2016	2017	2018	
Pendapatan Asli Daerah						
Pajak daerah	32,75	34,01	33,66	27,84	38,28	11,92
Retribusi daerah	14,05	6,09	5,40	5,07	5,59	-8,83
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	5,17	5,84	6,12	5,16	8,81	23,21
Lain-lain PAD yang sah	48,03	54,06	54,82	61,94	47,32	13,22

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2019

Pertumbuhan rata-rata PAD selama tahun 2014 hingga 2018 sudah mengalami peningkatan. Peningkatan nilai PAD tidak terlepas dari meningkatnya nilai realisasi masing-masing sumber PAD. Hampir seluruh sumber PAD juga mengalami pertumbuhan positif kecuali retribusi daerah. Sumber PAD dari hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan mengalami perkembangan paling signifikan, yakni 23,21% selama lima tahun terakhir, sedangkan besar realisasi retribusi justru menurun 8,83%.

Salah satu indikator *good governance* adalah adalah APBD yang ditetapkan tepat waktu, oleh karena itu di bawah ini disajikan penetapan APBD yang tepat waktu.

Tabel 2.131

Persentase Tahapan Penetapan APBD Tepat Waktu Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Penetapan tahapan APBD Tepat Waktu	Tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tepat waktu

Sumber : BKKPAD Kabupaten Magelang, 2019

3) Peningkatan Pengelolaan BUMD

Saat ini Pemkab Magelang mengelola 6 BUMD, dengan kepemilikan saham, sebagai berikut.

Tabel 2.132

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Magelang Tahun 2018

No.	Nama BUMD	Kepemilikan Saham
1	PT Bank Pembangunan Daerah	0,48 %
2	PD BPR BKK Muntilan	49 %
3	PD BKK Tempuran	49 %
4	PD BPR Bapas 69	100 %
5	PDAM Tirta Gemilang	100 %
6	PD Aneka Usaha	100 %

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Magelang, 2019

Secara akumulasi penyertaan modal sampai dengan tahun 2018 dan penerimaan deviden sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut.

Tabel 2.133

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Magelang Tahun 2018

No.	Nama BUMD	Penyertaan Modal (juta)	Penerimaan Deviden (juta)
1	PT Bank Pembangunan Daerah	27.888,00	27.705,07
2	PD BPR BKK Muntilan	9.800,00	5.762,22
3	PD BKK Tempuran	4.900,00	1.048,67
4	PD BPR Bapas 69	50.000,00	101.108,81
5	PDAM Tirta Gemilang	28.250,00	24.476,72
6	PD Aneka Usaha	3.100,00	382,35

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan rekapitulasi laporan keuangan *audited* BUMD Kabupaten Magelang periode tahun 2014-2018. Beberapa kinerja keuangan BUMD

yang mendukung peningkatan kontribusi kepada pendapatan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.134
Pendapatan Usaha dan Laba Bersih BUMD 2014-2018
(Dalam Juta Rupiah)

NO	BUMD	URAIAN	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	BPR Bank Bapas 69	Pendapatan	81.010,05	93.094,50	107.971,61	116.601,79	123.319,86
		Laba bersih	17.294,70	20.413,68	25.207,03	26.217,62	29.094,64
2	BPR BKK Muntilan	Pendapatan	16.746,51	18.452,24	19.639,25	22.000,77	23.360,44
		Laba bersih	3.007,71	3.203,87	3.343,65	3.390,77	3.749,36
3	BKK Tempuran	Pendapatan	6.144,64	6.226,50	6.908,99	8.221,36	9.640,14
		Laba bersih	586,94	39,13	756,89	841,15	955,87
4	PDAM Tirta Gemilang	Pendapatan	26.040,80	34.460,95	35.646,13	38.135,56	42.136,82
		Laba bersih	4.590,38	4.970,96	5.052,85	5.637,93	6.185,39
5	Aneka Usaha	Pendapatan	2.945,75	3.512,31	3.735,68	4.740,17	5.115,75
		Laba bersih	107,49	158,67	168,86	329,60	250,12

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Magelang Tahun 2018

Secara kinerja keuangan, BUMD Pemkab Magelang menunjukkan kecenderungan membaik. Hal ini ditunjukkan semakin meningkatnya beberapa aspek, yaitu aset, pendapatan dan laba. Namun untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi, terdapat beberapa permasalahan, antara lain manajemen/pengelolaan, regulasi, SDM, modal, sinergi antar BUMD dan inovasi bisnis serta daya saing.

4) Alternatif pembiayaan non-APBD

Mengingat tingginya kebutuhan anggaran dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya serta terbatasnya anggaran yang dapat dialokasikan untuk keperluan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Magelang dituntut untuk mampu mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

Ada beberapa alternatif pembiayaan non-APBD yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, di antaranya skema pinjaman dan hibah, skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema penerbitan obligasi daerah.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Magelang harus mempertimbangkan dan mampu menghitung kemampuan dalam menjalankan kewajiban pengembalian pembiayaan yang diperoleh dari berbagai skema dimaksud.

Skema KPBU dan Obligasi Daerah merupakan pendekatan/skema yang relatif baru dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik di Kabupaten Magelang, sehingga perlu dilakukan berbagai langkah strategis dalam penyiapan pengimplementasian dari sisi regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM, dan lain-lain.

Selain skema pembiayaan yang relatif baru tersebut di atas, adapula bentuk pelibatan lain dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/ *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Selain pembiayaan yang berasal dari pemerintah dan pihak swasta, terdapat potensi pembiayaan yang cukup signifikan dan belum dioptimalkan oleh pemerintah, yaitu pendanaan yang bersifat swadaya dan berasal dari komunitas/masyarakat itu sendiri. Selama ini, pola pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat telah banyak digunakan untuk keperluan aktivitas yang berbasis komunitas seperti pembangunan rumah ibadah, aktivitas sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Untuk lebih menggerakkan potensi swa-pendanaan Pemerintah Kabupaten Magelang perlu mendorong dan melakukan pembinaan melalui tokoh-tokoh masyarakat, memberikan stimulan dan apresiasi terhadap komunitas masyarakat yang mampu memberdayakan potensi yang ada di mereka untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Di samping itu, masih terdapat peluang untuk mendapatkan sumber pembiayaan alternatif khususnya dari instrumen pemanfaatan ruang, seperti kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan pengenaan kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagai salah satu bentuk disinsentif dalam proses pemanfaatan ruang. Tantangan utama yang dihadapi dalam pengimplementasian instrumen tersebut di atas dalam konteks sebagai alternatif pembiayaan pembangunan adalah pengintegrasian program dan pengadministrasian ke dalam sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

c. Penelitian dan Pengembangan

Kelitbangan meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian serta evaluasi kebijakan. Keluaran kelitbangan sebagai berikut.

- 1) Penelitian dan pengkajian baik yang strategis, aktual dan kompetitif yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi.
- 2) Pengembangan berupa Naskah Akademik, Rancangan Regulasi, pemodelan kebijakan/program.
- 3) Perekayasa berupa Pedoman umum/teknis pelaksanaan model kebijakan/program.

- 4) Penerapan berupa uji coba model program pada daerah percontohan.
- 5) Pengoperasionalan berupa Penerapan model kebijakan/program secara lebih luas/ menyeluruh dan pendampingan.
- 6) Evaluasi Kebijakan berupa rekomendasi lanjut dengan perbaikan/dicabut/dihentikan.

Terdapat empat tahap pemanfaatan keluaran kelitbangan/proses inovasi yaitu inisiasi, internalisasi (adopsi, adaptasi, replikasi), institusionalisasi dan keberlanjutan. Sasaran inovasi berupa peningkatan layanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Tabel 2.135
Kegiatan Kelitbangan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Penelitian/pengkajian/evaluasi kebijakan yang dibiayai APBD Kabupaten	Buah	-	-	-	1	3
2.	Naskah akademik yang disusun	Buah	-	-	-	8	1
3.	inovasi yang didampingi	Buah	-	-	-	6	6
4	Jumlah Penelitian diluar APBD Kabupaten	Buah	390	411	430	450	461
5	Kerja sama kelitbangan	Buah	-	-	-	1	11
6	Deseminasi/penerapan	Buah	-	-	-	1	0
7	HAKI	Buah	-	-	-	0	2
8	Pameran Inovasi	Buah	-	-	-	2	2
9	Jurnal/publikasi yang diterbitkan	Edisi	-	-	-	2	1
10	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	-	-	-	-	66,7
11	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	-	-	-	-	0

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2019

Kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan diharapkan dapat mendorong implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Magelang. Implementasi rencana kelitbangan Kabupaten Magelang sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.136
Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Kelitbangan dalam RKPD	buah	-	-	-	1	3
2	Jumlah Kelitbangan dalam RPJMD	Buah	-	-	-	1	3

3	Implementasi Rencana Kelitbangan	Buah	-	-	-	1	3
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Sumber : *Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018*

Hal ini diharapkan dapat mendorong hasil kegiatan kelitbangan dalam memberikan pertimbangan perencanaan pembangunan daerah serta penerapan teknologi dan inovasi daerah.

d. Pengawasan

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Magelang sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi dan reviu. Realisasi pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 disajikan.

Trend adanya temuan pemeriksaan cenderung mengalami fluktuasi baik itu pada pemeriksaan reguler untuk PD, kasus, desa. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal sebagai bagian dari fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal. Untuk rata-rata jumlah temuan pemeriksaan terbanyak ada pada pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemeriksaan reguler karena jumlah obyek pemeriksaan yang paling banyak yaitu desa dan PD. Capaian peningkatan Sistem Pengawasan Internal dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.137
Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018

No	Jenis Obrik	Hasil (LHP, LHE, LHR)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pemeriksaan Berkala/Reguler	216	216	216	216	216	216
2	Pemeriksaan Khusus/Kasus	3	6	14	62	4	7
3	Pemeriksaan Penyelenggara Pemerintahan Desa	106	96	110	150	160	172
4	Review Laporan Keuangan PD	1 LHR	1 LHR	1 LHR	2 LHR	2 LHR	8 LHR
6	Implementasi SPIP	NA	NA	1	1	10	12
7	Evaluasi LKJIP	21 LHE	15 LHE	15 LHE	27 LHE	24 LHE	23 LHE

Sumber : *Inspektorat Kabupaten Magelang, 2019*

Untuk Evaluasi LKjIP pada tahun 2017 dilaksanakan pada 49 PD, yang nilainya meningkat sebanyak 22 PD atau sebesar 56,41% dari total PD. Jika dibandingkan dengan evaluasi tahun sebelumnya terdapat kenaikan jumlah PD yang nilainya meningkat sebesar 46,67%. Hal ini berarti kualitas kinerja pelaporan kinerja PD semakin meningkat.

Berdasarkan data dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dapat kita lihat bahwa penilaian BPKP terhadap perangkat daerah dapat dilihat posisi nilai maturitas SPIP Kabupaten Magelang tahun 2017 kategori terdefinisi. Sementara itu hasil penilaian Inspektorat Daerah yang dilakukan terhadap semua Perangkat Daerah pada tahun 2017 menunjukkan nilai 3,15. Nilai maturitas ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya tergantung pada individu, belum melibatkan semua unit organisasi. Efektifitas pengendalian ini belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP. Nilai kapabilitas APIP semakin meningkat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.138
Level Kapabilitas APIP dan Nilai Maturitas SPIP

No	Uraian	Satuan	Tahun	
			2017	2018
1	Level Kapabilitas APIP	level	2	3
2	Nilai Maturitas SPIP		2	3

Sumber data : Inspektorat Kabupaten Magelang, 2018

e. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

Aspek peningkatan kapasitas SDM Aparatur sebagai upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan melalui: Pengadaan CPNS, Pengangkatan CPNS dan PNS, serta Penyelenggaraan dan Pengiriman Diklat Penjurangan yang terdiri dari : Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan; Diklat Teknis dan Diklat Fungsional; Pengembangan Karir yaitu Promosi dan Uji Kompetensi; Kesejahteraan Pegawai yaitu Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala. Penggajian dan Pensiun.

Tabel 2.139
Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2013–2018

No	Golongan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017*	2018
1	I	236	211	213	185	170	145
2	II	1.904	1.544	1.697	1.487	1.380	1.226
3	III	4.360	4.534	4.811	4.511	4.469	4.450
4	IV	4.505	4.313	4.051	3.446	3.209	2.798
Jumlah		11.677	11.005	10.605	9.629	9.229	8.619

* Pengambilan data Tahun 2017 diambil per 1 Januari 2019

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah PNS sejak Tahun 2013 sampai dengan 2017 dengan rata-rata penurunan tiap tahun sejumlah 612. Pada Tahun 2016 terjadi penurunan yang signifikan yaitu sejumlah 976 Adapun penyebab penurunan ini adalah PNS memasuki masa purna tugas, PNS meninggal dunia, PNS pensiun Atas Permintaan Sendiri, pengalihan PNS guru SLB dan SMA/SMK menjadi PNS Provinsi, dan adanya mutasi keluar daerah. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.140
Komposisi Pendidikan PNS (orang)
Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2018

No	Pendidikan	Tahun											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	S2	250	128	297	163	313	199	281	181	291	192	277	196
3	S1 /D	2.368	3.247	2.307	3.344	2.312	3.514	1.970	3.214	1.885	3.176	1.730	3.042
4	D – III	323	638	303	688	302	734	270	713	232	773	222	779
5	D – II	544	888	424	693	344	583	269	483	203	405	175	370
6	D – I	60	193	51	126	42	116	32	104	30	91	23	82
7	SMA	1.119	795	1.065	712	1.077	752	977	695	912	644	795	579
8	SMP	272	28	265	25	317	24	293	21	263	19	235	17
9	SD	150	2	138	2	139	4	122	4	108	4	91	5
Jumlah		6.182	5.086	5.919	4850	5753	4.846	4.214	5.415	3.924	5.304	3.549	5.070
		11.677		11.005		10.603		9.629		9.228		8619	

Sumber : Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2019

Pada tahun 2017 komposisi pendidikan PNS Kabupaten Magelang didominasi oleh lulusan S1/D-IV, dengan persentase sebesar 54,84%; kemudian lulusan SMA sebesar 16,86%. lulusan D-III sebesar 10,24%; lulusan D-II sebesar 6,59%; lulusan S2 sebesar 5,23%; lulusan SMP sebesar 3,06%; lulusan D-I sebesar 1,31%; serta lulusan SD sebesar 1,21%.

Tabel 2.141
Data PNS yang Mengikuti Diklat Jabatan Struktural
Kabupaten Magelang Tahun 2013–2018 (Orang)

No	Uraian	Jumlah					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Adum (Diklat Pim IV)	14	41	33	30	27	22
2	Spama (Diklat Pim III)	9	43	14	9	7	6
3	Spamen (Diklat Pim II)	2	3	3	6	-	-

Sumber : Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2019

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pada Tahun 2018, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk komoditas makanan sebesar 62,40% pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah; 56,51% pada kelompok pengeluaran 40% tengah; dan 38,19% pada kelompok 20 % atas.

Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk komoditas bukan makanan sebesar 37,67% pada kelompok pengeluaran 40% terbawah, 43,49% pada kelompok pengeluaran 40% tengah dan 61,81% pada kelompok 20% atas.

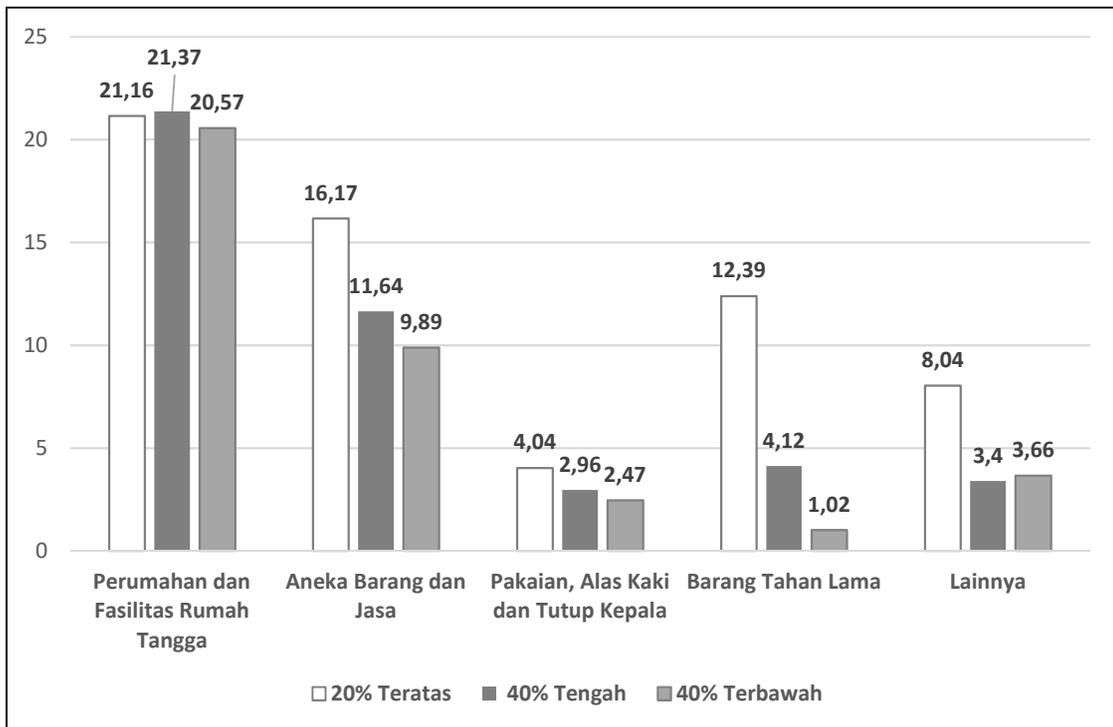
Tabel 2.142
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kabupaten Magelang Tahun 2018

Jenis Pengeluaran	Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan					
	Nominal (Rp.)			Persentase (%)		
	40%	40%	20%	40%	40%	20%
	Terbawah	Tengah	Teratas	Terbawah	Tengah	Teratas
Makanan	230.884	408.387	693.563	62,40	56,51	38,19
Bukan Makanan	139.152	314.316	1.122.312	37,60	43,49	61,81

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019

Sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.39 terlihat bahwa pengeluaran non makanan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan pendekatan pengeluaran). Dari gambar terlihat bahwa semua komoditas pengeluaran non makanan mengalami peningkatan seiring dengan semakin besarnya pengeluaran penduduk, untuk komoditas perumahan cenderung persentasenya sama untuk semua kelompok pengeluaran, sedangkan untuk komoditas lainnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Dari Gambar 2.40 juga terlihat bahwa pengeluaran bukan makanan komoditas barang dan jasa pada tahun 2018 sebesar 9,89% untuk penduduk dengan pengeluaran 40% bawah, meningkat menjadi 11,64 persen pada penduduk dengan pengeluaran 40% tengah dan semakin meningkat menjadi sebesar 16,17% untuk penduduk dengan pengeluaran atas. Komoditas yang mengalami peningkatan yang tinggi adalah komoditas barang tahan lama, di mana untuk penduduk dengan pengeluaran 40% bawah hanya 1,02% sedangkan untuk penduduk dengan 20 % pengeluaran atas sebesar 12,39%.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019

Gambar 2.41
 Persentase Pengeluaran Perkapita Komoditas Non Makanan Menurut Golongan Pengeluaran (Rp/kapita)

Pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2014 sebesar Rp 466.678 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 653.538 dengan proporsi bukan makanan sebesar 50,45%, lebih besar dibandingkan konsumsi makanan (49,55%).



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019

Gambar 2.42
 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

b. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah merupakan perbandingan PDRB sektor tertentu dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut. Produktivitas total daerah digunakan untuk melihat produktivitas tiap sektor dengan melihat produktivitas tenaga kerja di sektor tersebut. Besarnya produktivitas tiap sektor dapat menjadi salah satu indikator daya saing antar daerah. Lapangan usaha utama yang digunakan untuk mengukur produktivitas total daerah terdiri dari lima macam, yaitu (1) pertanian, (2) industri pengolahan, (3) perdagangan, (4) jasa kemasyarakatan, dan (5) lain-lainnya. Masing-masing lapangan usaha utama merupakan gabungan dari beberapa sektor lapangan usaha dalam PDRB. Berikut ini klasifikasi lapangan usaha PDRB ke dalam lapangan usaha utama.

1. Pertanian, terdiri dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Industri pengolahan, terdiri dari sektor industri pengolahan
3. Perdagangan, terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.
4. Jasa kemasyarakatan, terdiri dari jasa yang berhubungan dengan pelayanan sosial meliputi sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya.
5. Lainnya, terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas, dan air, sektor konstruksi, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan, dan sektor real estate.

Produktivitas total daerah Kabupaten Magelang masing-masing sektor lapangan usaha utama berkembang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat selama periode tahun 2014 hingga tahun 2018. Perkembangan produktivitas sektor yang paling signifikan adalah sektor industri pengolahan dan perdagangan, yakni tumbuh hingga lebih dari 30% dari besar produktivitas di tahun awal. Lapangan usaha sektor lain-lain memiliki nilai produktivitas paling besar lebih karena banyaknya jenis sektor yang masuk kategori lapangan usaha lain-lain.

Tabel 2.143

Produktivitas Total Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Produktivitas Total Daerah (Juta Rp)	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,38	14,17	24,09	25,12	30,08
Industri Pengolahan	24,47	27,26	64,43	47,64	46,14
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	16,71	18,27	41,28	25,64	32,35
Jasa Kemasyarakatan	23,85	25,80	28,65	42,68	51,85
Lain-lain	314,17	342,04	455,38	87,02	93,34

Sumber: BAPPEDA dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2019

c. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Magelang rata-rata selama lima tahun terakhir berkisar 105,42. Hal ini berarti bahwa kondisi petani di Kabupaten Magelang sudah cukup sejahtera karena sudah mencapai lebih dari 100. Pada kondisi ini harga produksi pertanian lebih besar daripada kenaikan harga konsumsi, atau dengan kata lain pendapatan petani lebih besar dibandingkan pengeluarannya.

Tabel 2.144
Nilai Tukar Petani Kabupaten Magelang Tahun 2014-2016

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016
1	Indeks yang diterima petani (lt)	%	145,98	157,99	137,21	145,98
2	Indeks yang dibayar petani (lb)	%	137,72	150,38	131,65	137,72
3	NTP	%	105,99	105,11	104,58	105,99

Sumber : Distan dan Pangan Kabupaten Magelang, 2019

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Cakupan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan

Cakupan pembangunan wilayah berkelanjutan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja beberapa urusan dalam satu komposit. Komponennya terdiri dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan cakupan pembangunan wilayah. IKLH digunakan untuk mengukur kinerja urusan lingkungan hidup. Cakupan pembangunan wilayah menjadi tolok ukur kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perhubungan.

Nilai IKLH Kabupaten Magelang tahun 2017 sebesar 70,95% dan nilai cakupan pembangunan wilayah 43,06%. Dengan demikian, dapat dihitung cakupan pembangunan wilayah berkelanjutan Kabupaten Magelang tahun 2017 adalah sebesar 57%. Adapun untuk cakupan pembangunan wilayah berkelanjutan tahun 2018 mencapai 60,07% dengan komponen penyusun IKLH sebesar 71,93% dan nilai cakupan pembangunan wilayah sebesar 48,21%.

b. Cakupan Pembangunan Wilayah

Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dapat dilihat dari cakupan pembangunan wilayah. Cakupan Pembangunan Wilayah merupakan komposit dari cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, serta cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan. Di bawah ini, cakupan pembangunan wilayah Kabupaten Magelang tahun 2017-2018.

Tabel 2.145

Cakupan Pembangunan Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2018

No.	Indikator	Satuan	2017	2018
1.	Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	%	52,94	57,69
2.	Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan	%	33,17	38,72
3.	Cakupan Pembangunan Wilayah	%	43,06	48,21

Sumber: DPUPR, 2019; Dinas Perhubungan, 2019; Data Diolah

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka mengembangkan wilayah adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan jalan dan jembatan berupa pembangunan jalan yang semula panjang jalan kabupaten meliputi 887 km menjadi 1000 km pada tahun 2016; pembangunan bangunan pelengkap jalan meliputi jembatan, trotoar, drainase, dan tanggul penahan jalan; serta peningkatan jalan sesuai standar jalan kabupaten;
 2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014 mampu meningkatkan proporsi jalan kabupaten kondisi baik dari 65,32% menjadi 74,17% pada tahun 2018;
 3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dilaksanakan melalui pengembangan jaringan irigasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 telah meningkatkan prosentase luas irigasi kabupaten kondisi baik dari 51,96% menjadi 59,58%; pembangunan 3 (tiga) embung guna mendukung ketersediaan air irigasi yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 di Desa Wanurejo, Losari, dan Sambak; dan pembinaan terhadap 103 kelompok petani pengelola air irigasi;
 4. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, meliputi pembangunan 6 terminal bus, pembangunan 11 halte bus, penyediaan 175 titik parkir, pemasangan 2.574 rambu-rambu jalan (pelengkap jalan), pembangunan 11.660 marka jalan, pembuatan 20 zebra cross, pemasangan 2.610 PJU, dan pemasangan guardrail 5.104 m.
- c. Ketaatan terhadap RTRW
- Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Indikator ketaatan terhadap RTRW merupakan hasil perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukannya, namun indikator ini belum didukung oleh ketersediaan data, sehingga digantikan dengan pembahasan mengenai luas wilayah lindung dan budidaya di Kabupaten Magelang.
- Ketaatan terhadap rencana tata ruang secara makro terindikasi dengan masih tetapnya luasan yang dialokasikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030. Adapun kawasan lindung dialokasikan seluas kurang lebih 41.770,57 ha dan kawasan budidaya dialokasikan seluas kurang lebih 66.802, 43 ha.

Tabel 2.146
Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Magelang Tahun 2018

No.	Kecamatan	Luas Kawasan Lindung (Ha)		
		Hutan Lindung	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya	Kaw. Perlindungan Setempat
1	Salaman	-	0,02	2.557,87
2	Borobudur	-	-	4.132,94
3	Ngluwar	-	-	1.810,98
4	Salam	-	-	2.336,49
5	Srumbung	-	17,13	3.012,54
6	Dukun	-	-	3.231,89
7	Muntilan	-	-	4.828,23
8	Mungkid	-	-	3.546,00
9	Sawangan	-	-	3.579,05
10	Candimulyo	-	0,04	4.338,49
11	Mertoyudan	35,59	-	4.011,89
12	Tempuran	-	-	3.435,01
13	Kajoran	516,30	-	2.867,77
14	Kaliangkrik	501,15	-	3.609,85
15	Bandongan	-	-	1.024,87
16	Windusari	461,25	-	2.854,02
17	Secang	-	-	4.523,48
18	Tegalrejo	-	-	3.105,16
19	Pakis	-	-	5.180,82
20	Grabag	100,24	-	3.500,57
21	Ngablak	232,49	0,01	1.930,10

Sumber: Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030, Data Diolah.

Luasan kawasan lindung tersebar di 21 kecamatan, berupa hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat. Kecamatan Pakis mempunyai kawasan lindung terluas dengan luasan 5.180 hektar. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sekitar mata air dan sempadan sungai. Kawasan lindung di wilayah kecamatan yang terlewati sungai-sungai berhulu di Gunung Merapi didominasi sempadan sungai yang dalam Perda 5 Tahun 2011 ditetapkan sejauh 300 meter di kanan kiri sungai.

Hutan Lindung terdapat di 6 Kecamatan dan terluas di wilayah Kecamatan Kajoran dengan luas kurang lebih 516,30 hektar. Kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya berupa kawasan resapan air yang terluas terdapat di Kecamatan Srumbung dengan luas lebih kurang 17,13 Hektar.

Tabel 2.147
Luas Kawasan Budidaya di Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Kecamatan	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Rakyat	Kawasan Peruntukkan Industri	Kawasan Peruntukkan Perkebunan	Kawasan Peruntukkan Permukiman	Kawasan Peruntukkan Pertanian
1	Bandongan	178,38	32,40	197,90	-	659,07	834,16	1.965,25
2	Borobudur	-	-	466,00	-	2.435,19	1.274,41	1.674,93
3	Candimulyo	-	-	3,82	-	2.484,93	802,38	1.168,33
4	Dukun	-	-	-	-	2.961,78	708,29	3.001,85
5	Grabag	176,69	765,78	74,29	-	3.168,95	1.327,19	3.037,54
6	Kajoran	981,41	550,05	471,64	-	3.017,04	1.108,36	3.241,75
7	Kaliangkrik	618,81	51,59	250,86	-	1.001,69	697,78	2.889,37
8	Mertoyudan	-	-	-	-	690,09	2.434,70	1.567,28
9	Mungkid	-	-	-	-	172,37	2.534,46	3.293,45
10	Muntilan	-	-	-	-	29,73	1.007,87	1.866,71
11	Ngablak	118,75	525,20	73,10	-	1.374,57	505,99	3.437,10
12	Ngluwar	-	-	0,22	-	194,64	622,66	2.660,26
13	Pakis	-	-	4,74	-	4.639,87	618,83	3.304,03
14	Salam	-	-	186,24	-	347,25	1.006,67	3.466,14
15	Salaman	186,58	3,26	496,62	170,26	4.420,84	1.259,36	2.708,62
16	Sawangan	-	-	396,77	-	2.706,82	698,46	3.958,24
17	Secang	-	-	28,36	-	1.239,42	1.450,16	3.546,14
18	Srumbung	-	-	-	-	3.331,54	819,81	3.477,53
19	Tegalrejo	-	-	3,68	-	971,14	985,79	1.782,13
20	Tempuran	661,49	-	244,29	167,60	1.547,02	1.033,71	1.914,18
21	Windusari	333,98	256,42	249,43	-	1.287,31	769,94	2.194,53

Sumber: Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030, Data Diolah.

Kawasan budidaya di Kabupaten Magelang terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi seluas kurang lebih 3.083 hektar, hutan rakyat seluas kurang lebih 2.919 hektar, kawasan peruntukan pertanian seluas kurang lebih 79.416 hektar, kawasan peruntukkan industri seluas kurang lebih 337,09 hektar, kawasan perkebunan seluas kurang lebih 25.667 hektar, kawasan peruntukkan permukiman seluas kurang lebih 19.751 hektar, serta kawasan peruntukkan pertanian seluas kurang lebih 40.587 hektar.

Kecamatan dengan luas kawasan budidaya terluas terdapat di Kecamatan Kajoran dengan luasan kurang lebih 9.370 hektar dengan dominasi kawasan peruntukkan perkebunan dan pertanian. Apabila dikaitkan dengan fungsinya, kecamatan yang sudah bertransformasi menjadi kota dengan dominasi wilayah berupa kawasan peruntukkan permukiman, yaitu Kecamatan Mertoyudan dan Mungkid. Luas kawasan permukiman di Kecamatan Mertoyudan kurang lebih 51% dan Kecamatan Mungkid 42% dari luas wilayah budidaya yang ada di Kecamatan tersebut.

Kawasan peruntukkan perkebunan, kawasan peruntukkan permukiman dan kawasan peruntukkan pertanian tersebar di 21 kecamatan. Kawasan

peruntukkan industri hanya terdapat di Kecamatan Tempuran seluas kurang lebih 167,60 hektar dan Kecamatan Salaman seluas kurang lebih 170,26 hektar. Hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan rakyat terdapat di 16 kecamatan dengan luas hutan produksi terluas di Kecamatan Kajoran, hutan rakyat terluas terdapat di Kecamatan Salaman, dan hutan produksi terbatas terluas terdapat di Kecamatan Grabag.

d. Luas Wilayah Produktif

Berdasarkan Lampiran Permendagri 86/2017, indikator luas wilayah produktif merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah wilayah produktif dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya. Sesuai dengan kesepakatan, luas wilayah produktif di Kabupaten Magelang diartikan sebagai luas wilayah pertanian produktif.

Tabel 2.148

Luas Wilayah Pertanian Produktif di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah luas wilayah kawasan pertanian produktif	Ha	79.416	79.416	79.416	79.416	79.416
2.	Jumlah luas seluruh wilayah budidaya	Ha	92.449,52	92.449,52	92.449,52	92.449,52	92.449,52
3.	Persentase luas wilayah pertanian produktif	%	85,902	85,902	85,902	85,902	85,902

Sumber: Bappeda Dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2019; Data Diolah

Dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2018, jumlah luas wilayah kawasan pertanian produktif dan jumlah luas seluruh wilayah budidaya di Kabupaten Magelang menunjukkan luasan yang sama. Oleh karena itu, dalam kurun waktu yang sama persentase luas wilayah pertanian produktif juga menunjukkan nilai yang konstan, yakni sebesar 85,902%. Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Magelang meliputi kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering. Kawasan pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih 36.848 (tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan. Adapun kawasan pertanian lahan kering memiliki luas kurang lebih 42.568 (empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan) hektar yang juga tersebar di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Magelang. Lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering dikelola untuk mendukung suatu program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang direncanakan seluas kurang lebih 42.070 (empat puluh dua ribu tujuh puluh) hektar.

Tabel 2.149
Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Peruntukan	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Lahan Pertanian						
1. Lahan sawah	Ha	36.892	36.882	36.855	36.855	36.861
2. Lahan bukan sawah	Ha	49.518	49.523	49.550	49.550	49.494
Lahan Bukan Pertanian	Ha	22.163	22.168	22.168	22.168	22.398
Jumlah		108.573	108.573	108.573	108.573	108.573

Sumber: Bappeda Dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2019; Data Diolah

Pada tahun 2018, luas wilayah Kabupaten Magelang didominasi oleh lahan pertanian bukan sawah, yakni sebesar 45,494% dari keseluruhan wilayah kabupaten. Lahan pertanian bukan sawah menunjukkan luasan yang meningkat dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2016, namun mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,544 % per tahun. Luas lahan sawah di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2017 menunjukkan penurunan dari 36.892 hektar menjadi 36.855. Adapun untuk tahun 2018 meningkat menjadi 36.861 hektar. Lahan bukan pertanian di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2014 sampai 2018 semakin meningkat.

e. Luas Wilayah Industri

Luas wilayah industri didapatkan dari perbandingan antara jumlah luas wilayah industri dengan luas seluruh wilayah budidaya. Dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2018, luas wilayah peruntukan industri di Kabupaten Magelang menunjukkan luasan yang sama, yakni sebesar 337,091 hektar.

Tabel 2.150
Luas Wilayah Peruntukan Industri di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah luas wilayah peruntukan industri	Ha	337,091	337,091	337,091	337,091	337,091
2.	Jumlah luas seluruh wilayah budidaya	Ha	92.449,52	92.449,52	92.449,52	92.449,52	92.449,52
3.	Persentase luas wilayah peruntukan industri dengan wilayah budidaya	%	0,364	0,364	0,364	0,364	0,364

Sumber: Bappeda Dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2019; Data Diolah

Luas wilayah peruntukan industri sangat berkaitan dengan luas wilayah budidaya. Luasan 337,091 hektar tersebut (yang merupakan kawasan peruntukan industri besar) menimbulkan adanya kebutuhan ruang-ruang untuk mendukung kegiatan dalam kawasan peruntukan industri, misalnya kebutuhan perumahan serta kebutuhan perdagangan dan jasa.

f. Luas Wilayah Perkotaan

Indikator luas wilayah perkotaan merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah wilayah perkotaan dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya. Sesuai dengan kesepakatan, luas wilayah perkotaan di Kabupaten Magelang dituliskan sebagai luas wilayah permukiman perkotaan. Dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2018, luas wilayah permukiman perkotaan di Kabupaten Magelang menunjukkan luasan yang sama yakni sebesar 8.875,48 hektar.

Tabel 2.151

Luas Wilayah Permukiman Perkotaan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah luas wilayah permukiman perkotaan	Ha	8.875,48	8.875,48	8.875,48	8.875,48	8.875,48
2.	Jumlah luas seluruh wilayah kawasan budidaya	Ha	92.449,52	92.449,52	92.449,52	92.449,52	92.449,52
3.	Persentase luas wilayah permukiman perkotaan	%	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6

Sumber: Bappeda Dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2019; Data Diolah

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030, kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi:

- a. perkotaan-perkotaan yang masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- b. perkotaan Borobudur di Kecamatan Borobudur yang kaidah pengaturannya mengikuti Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK); dan
- c. ibukota-ibukota kecamatan, meliputi ibukota kecamatan di Kecamatan Windusari, Bandongan, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Salaman, Srumbung, Dukun, Sawangan dan Candimulyo.

g. Luas Wilayah Rawan Bencana

Indikator luas wilayah rawan bencana merupakan salah satu indikator yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan ketersediaan data di Kabupaten Magelang. Indikator ini dapat dikatakan menggantikan indikator luas wilayah banjir dan indikator luas wilayah kekeringan dalam Lampiran 1 Permendagri 54/2010. Indikator luas wilayah rawan bencana terdiri atas wilayah rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin

gunung api, serta wilayah rawan bencana gerakan tanah tinggi di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.152
Wilayah Rawan Bencana Erupsi dan Banjir Lahar Dingin Gunung Api di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah luas wilayah rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api	Kecamatan	10	10	10	10	10
2.	Jumlah kecamatan di Kabupaten Magelang	Kecamatan	21	21	21	21	21
3.	Persentase wilayah rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api	%	47,62	47,62	47,62	47,62	47,62

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2019; Data Diolah

Kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin gunung api di Kabupaten Magelang, meliputi (1) kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Merapi terletak di Kecamatan Srumbung, Dukun, Muntilan, Salam, Sawangan, Ngluwar dan Mungkid dan (2) kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Sumbing terletak di Kecamatan Kajoran, Kaliangkrik dan Windusari. Secara umum, 47,62% wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api. Kawasan-kawasan yang sering mengalami bencana alam, seperti erupsi dan banjir lahar dingin gunung api dapat ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana I, Kawasan Rawan Bencana II dan Kawasan Rawan Bencana III.

Tabel 2.153
Wilayah Rawan Bencana Gerakan Tanah Tinggi di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Gerakan tanah (tinggi)	Kecamatan	12	12	12	12	12
2.	Jumlah kecamatan di Kabupaten Magelang	Kecamatan	21	21	21	21	21
3.	Persentase wilayah rawan bencana gerakan tanah tinggi	%	57,14	57,14	57,14	57,14	57,14

Sumber: Bappeda Dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2019; Data Diolah

Sebanyak 57,14% wilayah Kabupaten Magelang merupakan kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi. Kawasan rawan gerakan tanah tinggi

terletak di Kecamatan Kajoran, Kaliangkrik, Windusari, Tempuran, Borobudur, Salaman, Grabag, Ngablak, Pakis, Sawangan, Bandongan dan Secang. Selain gerakan tanah tinggi, Kabupaten Magelang memiliki wilayah rawan gerakan tanah menengah yang terletak di Kecamatan Kajoran, Windusari, Tempuran, Borobudur, Salaman, Grabag, Ngablak, Pakis, Sawangan, Dukun, Srumbung, Bandongan, Tegalrejo, Candimulyo dan Secang; rawan gerakan tanah rendah yang terletak di Kecamatan Borobudur, Ngablak, Sawangan, Dukun, Srumbung, Mungkid, Muntilan, Salam dan Ngluwar; dan rawan gerakan tanah sangat rendah yang terletak di Kecamatan Borobudur, Mungkid, Mertoyudan dan Secang.

h. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terdapat empat jenis bank yang dimaksudkan dalam indikator ini, yaitu bank umum pemerintah, bank umum swasta, bank pembangunan, dan bank pengkreditan rakyat. Berikut ini jumlah bank dan perusahaan asuransi yang beroperasi di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.154

Jenis dan Jumlah Bank di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	KC Bank Umum	Unit	7	7	7	7	7
2.	KCP Bank Umum	Unit	49	50	48	48	48
3.	KK Bank Umum	Unit	41	43	43	43	43
4.	KP BPR	Unit	12	12	12	12	12
5.	KC BPR	Unit	17	19	21	21	21
6.	KK BPR	Unit	35	38	39	39	39
	Jumlah	Unit	161	169	170	170	170

Sumber: Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kabupaten Magelang, 2019

Perkembangan jumlah bank di Kabupaten Magelang cenderung tetap, serta mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat sedikit. Jumlah bank yang beroperasi di suatu wilayah menunjukkan adanya pergerakan ekonomi dan perputaran uang yang telah berjalan di wilayah tersebut karena bank tidak hanya berperan sebagai lembaga penyimpanan, tetapi juga menyalurkan bantuan modal terutama bagi pemilik usaha.

i. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi). Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang

menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Perusahaan asuransi yang beroperasi di Kabupaten Magelang ada dua jenis, yaitu asuransi umum dan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi jiwa berasal dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan BNI Life Insurance, PT. Sedangkan perusahaan asuransi umum adalah PT Asuransi Sinar Mas.

Tabel 2.155

Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Asuransi Jiwa	Unit	n/a	1	2	2	2
2.	Asuransi Umum	Unit	n/a	1	1	1	1
3.	Asuransi Kerugian	Unit	n/a	0	0	0	0
4.	Asuransi Lainnya	Unit	n/a	0	0	0	0
	Jumlah	Unit	n/a	2	3	3	3

Sumber: Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kabupaten Magelang, 2018

j. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan daya tarik investasi suatu daerah terutama di bidang kuliner. Restoran juga merupakan bentuk kegiatan ekonomi di bidang perdagangan yang juga dapat mendukung sektor pariwisata. Oleh karena itu, banyaknya restoran dan rumah makan dapat menjadi salah satu indikator perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Ada bermacam-macam jenis dan istilah restoran, antara lain restoran merupakan tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sementara itu, pengusaha restoran dan rumah makan adalah penyedia jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu usaha pokok, seperti restoran di dalam hotel. Tabel di bawah ini menjelaskan jumlah restoran dan rumah makan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.156

Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Jenis Restoran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Usaha restoran golongan tertinggi	Unit	3	3	3	3	3
2	Usaha restoran golongan menengah	Unit	0	0	0	0	0
3	Usaha restoran golongan terendah	Unit	0	0	0	0	0
4	Usaha rumah makan kelas A	Unit	6	6	6	6	6
5	Usaha rumah makan kelas B	Unit	33	28	28	28	28
6	Usaha rumah makan	Unit	3	2	2	2	2

No	Jenis Restoran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	kelas C						
7	Usaha rumah makan kelas D	Unit	35	25	25	25	25

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2019

Jumlah usaha restoran rumah makan kelas B sejumlah 33 unit pada tahun 2014 dan mengalami penurunan menjadi 28 unit dari tahun 2015 s.d 2018, sedangkan rumah makan kelas D sejumlah 35 unit pada tahun 2014 dan mengalami penurunan cukup drastis menjadi 25 unit pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Secara umum jumlah semua kelas rumah makan juga menurun dari tahun awal. Sementara itu, jumlah restoran semua kelas cenderung tetap selama lima tahun terakhir. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum dilakukannya *updating* data.

k. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan/hotel merupakan salah satu fasilitas penunjang pariwisata pada suatu wilayah. Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut dan kebutuhan akomodasi penginapan/hotel.

Tabel 2.157
Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Hotel Bintang	Unit					
	Hotel Bintang 5	Unit	1	1	1	1	1
	Hotel Bintang 4	Unit	1	1	1	1	1
	Hotel Bintang 3	Unit	3	3	3	3	3
	Hotel Bintang 2	Unit	-	-	-	-	-
	Hotel Bintang 1	Unit	-	-	-	-	-
2	Hotel Non Bintang/Melati	Unit	32	32	32	32	32
3	Homestay	Unit	153	243	243	243	243
	Jumlah	Unit	185	189	190	280	280

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2019

Kabupaten Magelang yang memiliki daya tarik pariwisata yang cukup besar, mampu menarik investasi berupa penyediaan akomodasi hotel. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah hotel di Kabupaten Magelang dari tahun 2014 hingga 2018 belum mengalami peningkatan terutama hotel bintang 1 sampai hotel bintang 5. Jumlah terbanyak adalah hotel jenis *homestay* yang hingga tahun 2018 mencapai 243 unit. Sedangkan

jumlah hotel nonbintang/melati hanya mengalami peningkatan 1 unit selama lima tahun terakhir. Perkembangan jumlah *homestay* dapat menjadi salah satu indikasi adanya peningkatan permintaan penyedia akomodasi tersebut dari wisatawan dan menjadi peluang untuk mengembangkan perekonomian lokal.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Pertumbuhan Investasi

Realisasi investasi PMDN dan PMA pada periode tahun 2014-2018 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar Rp 374.769 juta pada tahun 2014 dan pada tahun 2018 meningkat tajam menjadi Rp 1.907.516 juta. Peningkatan jumlah proyek dan realisasi investasi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Magelang memiliki prospek dan daya tarik bagi para investor seiring dengan peningkatan kualitas infrastruktur, penetapan upah tenaga kerja yang kompetitif, peningkatan pelayanan melalui penyelenggaraan PTSP, dan komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan pro investasi. Arah kebijakan investasi adalah untuk meningkatkan investasi pada jenis usaha padat modal untuk memanfaatkan bonus demografi. Pertumbuhan investasi (PMA dan PMDN) Kabupaten Magelang Tahun 2014 -2017 sebagai berikut.

Tabel 2.158
Pertumbuhan investasi Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Total Nilai Investasi	Juta Rp	374.769	476.281	490.490	1.030.689	1.907.516
2	Pertumbuhan Investasi	%	27.09	2.98	110.13	91.75	21,71

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Magelang, 2019

b. Angka Kriminalitas

Pemerintah daerah harus dapat mengendalikan kondisi ini dengan baik, agar dapat memberikan jaminan bagi keamanan investasi. Angka kriminalitas ini merupakan nilai yang menunjukkan perkembangan angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Magelang pada 5 tahun terakhir.

Tabel 2.159
Angka Kriminalitas tertangani
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Selesai	Kasus	181	332	186	248	259
3	Lapor	laporan	252	434	252	339	392
4.	Jumlah Penduduk	Jiwa	1,262,500	1,267,090	1,278,624	1,283,405	1,290,115
5.	Rasio	%	71.81	76.49	73.30	73.16	66.10

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
6.	Angka Kriminalitas		2.04	3.48	2.02	2.65	2.60

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah tindak kriminal di Kabupaten Magelang memiliki angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Peningkatan yang terjadi secara drastis terjadi pada tahun 2014-2015. Angka kriminalitas yang terjadi meningkat sebanyak >100%. Pada tahun 2018, terjadi 2,60 tindak kriminal pada setiap 10.000 penduduk setiap tahunnya. Kriminalitas yang semakin tinggi menjadi indikator belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan preventif dalam menanggulangi angka kriminalitas yang semakin tinggi. Selain itu, kegiatan kriminalitas erat kaitannya dengan kurang terserapnya tenaga kerja di dalam lapangan kerja. Tenaga kerja yang ada belum memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan kerja, sehingga mengakibatkan penduduk yang belum memiliki pekerjaan untuk berusaha mencari penghasilan dengan cara instan. Pemerintah diharuskan untuk berperan aktif dalam mengurangi angka kriminalitas, salah satunya dengan peningkatan kualitas penduduknya.

c. Lama Proses Perizinan

Perizinan merupakan sebuah instrumen penting dalam menumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif. Secara umum, lama proses pelayanan perizinan merupakan salah satu hal yang dapat menghambat atau mendorong investasi. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Indikator lama proses perizinan dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan dalam satuan hari. Kabupaten Magelang memiliki kurang lebih 40 jenis perizinan, namun hanya beberapa perizinan saja yang memiliki banyak permintaan.

Tabel 2.160

Lama Proses Perizinan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Jenis Perizinan	Lama Penyelesaian					
		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendaftaran penanaman Modal		1	1	1	1	1
2	Izin Prinsip Penanaman Modal	Hari	3	3	3	3	3
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	Hari	3	3	3	3	3
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	Hari	5	5	5	5	5
5	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Hari	3	3	3	3	3
6	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Hari	3	3	3	3	3
7	Izin Usaha Industri (IUI)		14	14	14	14	14
8	Izin Perluasan Industri	Hari	7	7	7	7	7
9	Tanda Daftar Industri (TDI)	Hari	14	14	14	14	14

No	Jenis Perizinan	Lama Penyelesaian					
		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
10	Izin Usaha Pariwisata	Hari	3	3	3	3	3
11	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Hari	15	15	15	15	15
12	Izin Usaha Penggilingan Padi	Hari	4	4	4	4	4
13	Izin Usaha Angkutan Jalan	Hari	14	14	14	14	14
14	Izin Usaha budidaya sarang burung sriti/walet	Hari	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
15	Izin Usaha Peternakan	Hari	14	14	4	14	14
16	Izin Usaha Perikanan	Hari	14	14			
17	Izin Usaha Pertambangan	Hari					
18	Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu	Hari					
19	Izin Perluasan	Hari	7	7	7	7	
20	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	Hari	7	7	7	7	
21	Izin Usaha Perubahan	Hari	5	5	5	5	
22	Izin Lokasi	Hari	18	18	18	18	
23	Izin Pemanfaatan Tanah	Hari	18	18	18	18	
24	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	Hari	18	18	18	18	
25	Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha (HO)	Hari	14	14	14	14	
26	Izin Mendirikan / mengubah / Merobohkan Bangunan (IMB)	Hari	14	14	14	14	
28	Izin Pemasangan Reklame	Hari	2	2			
29	Izin Trayek	Hari				1086	976
30	Dokumen Amdal. UKL/UPPL dan SPPL	Hari					
	UKL-UPL	Hari	14	14			
	SPL	Hari	1	1			
31	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang kesehatan	Hari					
32	Izin Riset/Penelitian	Hari	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, 2019

Waktu penyelesaian perizinan terlama adalah 18 hari, yaitu perizinan untuk jenis izin lokasi, izin pemanfaatan tanah, dan perubahan penggunaan tanah. Selain itu, izin usaha industri, tanda daftar industri dan izin mendirikan bangunan memakan waktu paling lama, yaitu 14 (empat belas) hari kerja. Target yang diharapkan dari lamanya proses perizinan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang adalah paling lama 9 hari. Beberapa jenis perizinan sudah dapat diusahakan kurang dari 9 hari kerja, namun beberapa lainnya masih lebih dari 9 hari. Perbedaan lamanya proses perizinan dapat disebabkan banyak sedikitnya jumlah berkas atau persyaratan yang perlu dinilai kelayakannya.

d. Jumlah dan Macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada 11 jenis Pajak Daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang, yaitu:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan.

Sedangkan jenis retribusi yang ada di Kabupaten Magelang, antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu yang meliputi jasa pelayanan umum, jasa komersil yang biasanya disediakan oleh pihak swasta, dan perizinan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana tertentu yang dapat mempengaruhi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Dari sumber pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut realisasi Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.

Tabel 2.161
Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Pajak Daerah	Rupiah	79.395.385.267	88.960.021.815	97.101.522.117	112.344.030.430	114.115.398.812
Retribusi Daerah	Rupiah	34.075.776.969	15.9939.015.341	15.587.692.390	20.445.297.133	21.190.318.088

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2019

e. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu *good will* dan *political will* pemerintah yang secara umum diwujudkan ke dalam perda. Dengan adanya perda yang mengatur tentang investasi, maka ada dasar hukum yang kuat untuk mendorong masyarakat melakukan investasi. peraturan daerah (Perda) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan ada atau tidaknya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian.

Tabel 2.162
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha	Buah	9	10	11	11	11

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, 2019

Jenis Peraturan Daerah terkait perizinan yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, antara lain:

1. Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
2. Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang;
3. Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan;
5. Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
6. Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, PST Perbelanjaan, dan Toko Modern;
7. Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang;
8. Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan;

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Pemberdayaan masyarakat dan desa ini merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan. Hal tersebut meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan penguatan kapasitas masyarakat. Kemandirian desa ini diukur berdasarkan status desa.

Pada tahun 2015 jumlah desa yang berstatus maju, mandiri dan berkembang di Kabupaten Magelang sebanyak 251 desa dari 367 Desa (68%) dan pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 292 Desa (80%). Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat cukup banyak desa dengan status tertinggal yang berarti bahwa kemajuan dan kemandirian desa di Kabupaten Magelang perlu ditingkatkan. Status desa ini untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Dari data tersebut diketahui jumlah desa maju mandiri dan berkembang semakin meningkat.

Kapasitas masyarakat di Kabupaten Magelang ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.163
Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah PKK Aktif	394	394	394	394	394
2.	Jumlah LPMD Aktif	367	367	367	367	367
3.	Jumlah PKK	394	394	394	394	394
4.	Jumlah LPMD	367	367	367	367	367

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magelang, 2019

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

a. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Masyarakat merupakan obyek dan subyek pembangunan. Dalam pembahasan indikator rasio lulusan S1/S2/S3, masyarakat ditempatkan sebagai subyek pembangunan. Semakin tinggi rasio lulusan perguruan tinggi menunjukkan daerah tersebut mempunyai potensi sumberdaya manusia yang berkualitas untuk menggerakkan roda pembangunan. Ketersediaan kualitas SDM yang tinggi membuat daerah mempunyai daya saing di sektor SDM. Rasio lulusan S1/S2/S3 ini dihitung dengan rumus formula jumlah lulusan S1/S2/S3 dibagi dengan jumlah penduduk dan dikalikan dengan 10.000.

Tabel 2.164
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Lulusan S1, S2, dan S3	Jiwa	29.691	30.410	32.299	33.979	36,293
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.262.500	1.267.090	1.272.624	1.283.405	1,290,115
3	Rasio Lulusan S1, S2, dan S3		235,18	240,00	253,80	264,76	281.32

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
4	Persentase Lulusan S1, S2, dan S3 terhadap jumlah penduduk	%	2,35	2,40	2,54	2,65	2.81

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase jumlah lulusan S1/S2/S3 selalu meningkat setiap tahunnya. Sebanyak 33.979 jiwa penduduk pada tahun 2017 sudah menamatkan perguruan tinggi atau 2,65% dari total jumlah penduduk. Persentase jumlah lulusan perguruan tinggi yang selalu meningkat memang tidak diiringi dengan peningkatan jumlah lulusan. Pada tahun 2014, jumlah lulusan S1/S2/S3 sempat mengalami penurunan sebelum akhirnya kembali meningkat hingga tahun 2017.

Ketersediaan SDM yang berkualitas mutlak diperlukan oleh Kabupaten Magelang untuk mengolah potensi sumber daya alam yang melimpah. Pemerintah daerah harus mempunyai program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, seperti salah satunya dengan memberikan beasiswa hingga perguruan tinggi ataupun bentuk subsidi lainnya sehingga memudahkan anak sekolah dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduk diharapkan mampu menjadi gerbang perbaikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten magelang, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan per kapita.

b. Rasio Ketergantungan

Apabila dilihat dari jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2018 diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ tahun), dengan komposisi 895.609 penduduk usia produktif (69.44%) dan 394.068 jiwa penduduk usia nonproduktif (30.56%). Dengan demikian, angka rasio ketergantungan di Kabupaten Magelang tahun 2018 sebesar 44,00 yang artinya bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 44 orang penduduk usia tidak produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Magelang telah mengalami bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif.

Dalam memanfaatkan peluang bonus demografi dengan baik, Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan yang di antaranya untuk menciptakan kesempatan kerja dan atau menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada tahun 2018, TPT Kabupaten Magelang sebesar 2,91 dan lebih rendah dari TPT Provinsi Jawa tengah sebesar 4,51.

Tabel 2.165
Rasio Ketergantungan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Penduduk usia < 15 tahun + usia > 64 tahun	Jiwa	376.001	409.703	391.874	384.921	394.068
2	Penduduk usia 15-64 tahun	Jiwa	886.499	835.779	886.750	898.484	895.609
3	Rasio Ketergantungan Kabupaten Magelang	%	42,41	49,02	44,19	42,84	44,00
4	Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Tengah	%	48,74	48,10	48,81	47,51	47,63
5	Rasio Ketergantungan Nasional	%	48,9	48,60	48,30	48,10	47,06

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, 2019

2.1.4.5. Fokus Penyelenggaraan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, salah satu indikator tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

a. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan, serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur. Pencapaian Reformasi Birokrasi diukur dengan Indeks reformasi birokrasi yang merupakan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang pada Tahun 2018 mendapatkan nilai 60,23 atau baik.

b. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Salah satu syarat *good governance* adalah akuntabilitas, di samping transparansi dan partisipasi. Dalam 8 (delapan) area perubahan birokrasi, yaitu mental aparatur, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) menjadi salah satu bagian pencapaian reformasi birokrasi. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Nilai AKIP Kabupaten Magelang pada tahun 2014 sebesar 51,06 sedangkan di tahun 2018 berada di angka 59,05 atau nilai CC.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Indek Kepuasan Masyarakat secara umum memiliki kecenderungan semakin meningkat. Pada Tahun 2014, IKM Kabupaten sebesar 75,93 atau cukup dan tahun 2018 sebesar 82,01 atau baik. Hal ini mencerminkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Magelang semakin baik.

d. Indeks Merit Sistem

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Menejemen ASN, merit sistem didefinisikan sistem adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Magelang sudah berusaha menerapkan merit sistem secara proporsional.

Selanjutnya, Indeks Profesionalitas ASN digunakan untuk mengukur kualitas aparatur negara. Hal ini mencerminkan kompetensi, prestasi kerja, gaji/tunjangan, dan pelanggaran disiplin. Nilai Indeks profesionalisme ASN Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 88,29.

e. Cakupan Penegakan hukum

Cakupan penegakan hukum merupakan penilaian yang mendasarkan pada jumlah penindakan, jumlah pelanggaran, jumlah penertiban, jumlah target perencanaan penertiban, dan jumlah aduan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.166
Cakupan Penegakan Hukum Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penyelesaian penegakan perda	Kasus	171	190	174	251	81
2	Jumlah Pelanggaran perda	Kasus	172	193	175	312	85
3	Jumlah Penertiban	kali	200	3.141	216	312	288
4	Jumlah Target perencanaan Penertiban	kali	200	3.141	216	312	288
5	Jumlah aduan	kali	0	0	0	0	0
6	Cakupan penegakan hukum	%	99,71	99,23	99,72	90,23	97,65

Sumber : Kantor Kebangpol Kabupaten Magelang, 2019

Dari data di atas, dapat dilihat cakupan penegakan hukum di Kabupaten Magelang tahun 2014-2018 menunjukkan fluktuasi. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 90,23% dan naik kembali menjadi 97,65% pada tahun 2018.

Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat terdiri dari jumlah organisasi yang aktif dan yang tercatat, serta jumlah konflik sosial, sebagaimana yang disajikan tabel di bawah ini.

Tabel 2.167
Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang aktif	unit	79	83	93	95	97
2	Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang tercatat	unit	82	87	97	99	101
3	Jumlah Konflik Sosial Tertangani	unit	0	0	0	1	0
4	Jumlah Konflik Sosial	unit	0	0	0	1	0
5	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	%	80.50	85.00	95.00	97.00	99.00

Sumber : Kantor Kebangpol Kabupaten Magelang, 2019

Dari data di atas dapat dilihat cakupan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat selama tahun 2014-2018 menunjukkan peningkatan. Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang aktif dan tercatat menunjukkan tren yang

meningkat. Disamping itu data di atas juga menggambarkan kejadian konflik sosial relatif kecil bahkan tidak ada.

f. Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban

Kondusivitas wilayah dapat dilihat dari frekuensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain demonstrasi atau unjuk rasa dan tindak pidana. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Kegiatan demonstrasi terkadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjung rasa yang berlebihan. Kegiatan perusakan terhadap benda-benda itulah yang terkadang menimbulkan gangguan kecil atau besar bagi rutinitas masyarakat yang berada di lingkungan tersebut, meskipun sebenarnya demonstrasi merupakan sebuah fenomena geliat dan dinamika kesadaran masyarakat untuk berpolitik.

Tabel 2.168

Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan Penegakan Hukum	%	99,71	99,23	99,72	90,23	90,55
2.	Cakupan Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana	%	20,00	20,00	47,00	66,67	74,10
3.	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	%	80.50	85.00	95.00	97.00	99.00
4.	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	%	66.74	68.08	80.57	84.63	87.88

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2019

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019

2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat ditunjukkan dengan 10 indikator kinerja. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 10 indikator tersebut sebanyak 4 indikator berstatus tercapai, 4 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.169
Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Sta-tus*
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Angka Usia Harapan Hidup	70,56	Tahun	70,50	73,39	73,25	73,39	104.01	
2	Indeks Gini**	0,295	Indeks	0,295	0,316	0,31	0,316	92.88	
3	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,4046	Indeks	0,4046	0,4057	0,42	0,4057	99.73	
4	Persentase penduduk miskin**	8,00	Persen	9,00	11,23	12,42	11,23	59.63	
5	IPM	75,94	Indeks	75,94	74,17	74,74	74,17	97.67	
6	Pertumbuhan PDRB	6,4 – 7,1	Persen	6,20 – 6,70	5,06	5,43	5,06	79.06	
7	PDRB per kapita	15,06	Juta Rp,	13,75	25,92	22,35	25,92	172.18	
8	Laju inflasi	4±1	Persen	4±1	2,66	3,47	2,66	111.33	
9	Rasio penduduk yang bekerja	97,97	-	73,66	96,79	96,79	96,79	98.80	
10	Angka kriminalitas per sepuluh ribu penduduk	1,45	Indek	1,82	0,26	2,65	0,26	182.07	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Indikator berstatus Perlu Kerja Keras, yaitu pertumbuhan PDRB dan prosentase penduduk miskin. Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja persentase penduduk miskin adalah:

- Data base kemiskinan belum sepenuhnya digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.
- Penanggulangan kemiskinan belum memaksimalkan integrasi berbagai sektor dan stakeholder yang terkait, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal
- Kenaikan biaya hidup masyarakat yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat khususnya kaum petani.

2.2.2 Aspek Daya Saing

Kinerja pembangunan aspek daya saing ditunjukkan dengan 9 indikator kinerja. Pada tahun 2018 jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 9 indikator kinerja program pada aspek daya saing, 7 indikator berstatus tercapai, 2 indikator berstatus akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.170
Capaian Kinerja Aspek Daya Saing

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status*
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	38.38	Rp. (juta)	35,30	44,72	51,74	44,72	116.52	
2	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	37.03	Persen	36,56	47,03	55,80	47,03	127.01	
3	Nilai tukar petani	106.99	-	106,85	103,31	106.70	103,31	96.56	
4	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0.0017	-	0,0019	0,0029	0.0029	0,0029	170.59	
5	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	76,80	persen	76,60	84,61	83,09	86,79	113.01	
6	Luas Wilayah Industri	0.37	Persen	0,37	0,37	0,34	0,37	100.00	
7	Lama Proses Perijinan (Hari)	9	Hari	9	9	9	9	100.00	
8	Opini BPK 'WTP'	WTP	-	WTP	WTP	WTP	WTP	100.00	
9	Nilai AKIP	B	-	B	CC	CC	CC	99.42	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Pada tahun 2018, dari 9 indikator kinerja program pada aspek daya saing, 4 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus belum tercapai, dan 4 indikator melampaui target, serta 1 indikator berstatus belum tersedia data. Data yang belum tersedia adalah NTP (nilai tukar petani), dimana penghitungan NTP dilakukan oleh BPS. Kendalanya adalah, tidak setiap tahun BPS Kab. Magelang melakukan penghitungan NTP.

2.2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.2.3.1.1 Pendidikan

Kinerja pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan 23 indikator kinerja. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 23 indikator tersebut sebanyak 8 indikator berstatus tercapai, 6

indikator berstatus akan tercapai, dan 4 indikator berstatus perlu kerja keras. Sementara 5 indikator lainnya belum tersedia data. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.171
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status*
				Target RKPd 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	APK PAUD	54,54	persen	54,54	62,64	62,64	62,64	114.85	●
2	Angka melek huruf	93,95	persen	93,85	NA	94,63	NA	NA	
3	Angka rata-rata lama sekolah	10,00	tahun	9	7,57	7,40	7,57	75,70	▼
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/Paket A	97,09	persen	96,79	92,66	92,66	92,66	95.44	▶
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82,65	persen	81,96	67,76	67,76	67,76	81.98	▼
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	66,56	persen	64,06	NA	46,88	NA	NA	
7	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ Paket A	101,84	persen	101,94	105,87	105,77	105,87	103.96	●
8	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B	97,56	persen	97,06	88,38	88,36	88,38	90.59	▶
9	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	80,00	persen	75,10	NA	64,23	NA	NA	●
10	Angka Putus Sekolah SD/MI **	0,14	persen	0,14	0,65	0,05	0,65	164.29	●
11	Angka Putus Sekolah SMP/MTs **	0,57	persen	0,59	0,24	0,24	0,24	157.89	●
12	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA **	0,81	persen	0,81	NA	0,13	NA	NA	
13	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,98	persen	99,98	100	99,99	100	100.02	●
14	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,99	persen	99,99	99,91	99,77	99,91	99.92	▶
15	Angka Kelulusan (AL) SMA/ SMK/MA	99,98	persen	99,98	NA	99,90	NA	NA	
16	Rerata Nilai UN SD/MI	7,75	persen	7,72	7,03	7,59	7,03	90.71	▶
17	Rerata Nilai UN SMP/ MTs	6,49	persen	6,48	5,98	5,78	5,98	92.14	▶
18	Rerata Nilai UN SMA/ MA/SMK	7,18	persen	7,16	NA	5,77	NA	NA	
19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88,00	persen	86,00	87,42	87,42	87,42	99.34	▶
20	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	89,62	persen	89,62	90,72	91,78	90,72	101.23	●
21	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/ MK/MA	71,55	persen	70,70	79,18	79,18	79,18	110.66	●
22	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB /MI	86,74	persen	84,68	73,20	85,58	73,20	84.39	▼
23	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	91,43	persen	90,00	78,28	90,70	78,28	85.62	▼

Status* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan pendidikan adalah:

- a. Keseriusan dari Pemerintah Daerah dalam mendukung urusan pendidikan
- b. Koordinasi serta kerjasama yang baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait
- c. Adanya regulasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga DAK dan Silpa DAK dapat dimanfaatkan dan dialokasikan dengan baik
- d. Kerjasama dan peran aktif berbagai stakeholder pendidikan dalam menangani pendidikan di Kabupaten Magelang
- e. Semangat dan etos kerja yang tinggi dari jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Adapun faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja program, khususnya tidak tercapainya target APM dan APK adalah :

- a. Anak yang berusia diluar usia sekolah jenjang tertentu yang bersekolah pada jenjang tertentu
- b. Belum meratanya kualitas pendidikan di kecamatan-kecamatan
- c. Pembiayaan melalui BOSDA relatif masih rendah
- d. Anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah cukup tinggi
- e. Anak usia sekolah Kabupaten Magelang yang bersekolah di luar Kabupaten Magelang cukup banyak.
- f. Regulasi yang membatasi penghitungan APK dengan sekat kewilayahan

Faktor penghambat belum tercapainya indikator program terkait nilai UN adalah

- a. Belum optimalnya proses belajar mengajar di Sekolah
- b. Keterbatasan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan
- d. Partisipasi orangtua dan masyarakat kurang optimal

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan mempertahankan faktor pendorong adalah :

- a. Peningkatan mutu pendidikan di semua komponen (8 standar nasional pendidikan)
- b. Penyediaan dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan
- c. Peningkatan partisipasi stake holders lain dan masyarakat untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Magelang

2.2.3.1.2 Kesehatan

Kinerja pembangunan urusan kesehatan ditunjukkan dengan 10 indikator kinerja. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 10 indikator tersebut sebanyak 8 indikator berstatus tercapai, 0 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.172
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status*
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kasus Kematian Ibu Melahirkan	11	kasus	11	6	8	6	145.45	●
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	6,50	kasus	6,50	5,72	6,63	5,72	112.00	●
3	Persentase Balita Gizi Buruk	0,15	Persen	0,15	0,02	0,02	0,02	186.67	●
4	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	8,00	Permil	8,00	6,70	7,5	6,70	116.25	●
5	Cakupan Penemuan Dan Penangan-an Penderita Penyakit DBD	100	Persen	100	100	100	100	100.00	●
6	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immuni-zation (UCI)	100	Persen	100	100	100	100	100.00	●
7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	Persen	100	100	100	100	100.00	●
8	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	90,00	Persen	90	41,00	90	41,00	45.56	▼
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	Persen	100	88,30	100	88,30	88.30	▼
10	Cakupan Kunjungan Bayi	95,00	Persen	95,00	98,89	95,56	98,89	104.09	●

Status* : ● : Tercapai; ▲ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Dalam hal menekan angka kematian ibu melahirkan, Kabupaten Magelang sudah berhasil mencapai target SDGs. Hal ini ditunjukkan dengan AKI Kabupaten Magelang sebesar 11, jauh dibawah target SDGs yaitu sebesar 70. Beberapa indikator lain juga menunjukkan tren yang semakin baik, antara lain: angka kematian bayi, persentase balita gizi buruk, Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup dan cakupan kunjungan bayi.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan kesehatan adalah:

- Komitmen dari pemerintah kabupaten untuk memajukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Magelang
- Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- Ketersediaan anggaran yang cukup, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang maupun anggaran DAK.

Faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja urusan kesehatan adalah:

- a. Belum optimalnya keterlibatan pemangku kepentingan lain dalam pembangunan sector kesehatan, khususnya masyarakat sendiri.
- b. Pemerataan sarana dan prasarana kesehatan belum optimal.
- c. Masih kurangnya SDM sector kesehatan, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- d. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, khususnya yang berada di daerah pelosok.
- e. Belum optimalnya akses pelayanan kesehatan.

2.2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.2.3.1.3.1 Pekerjaan Umum

Kinerja urusan pekerjaan umum ditunjukkan dalam 3 indikator. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 3 indikator tersebut sebanyak 2 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.173
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	69,73	persen	69,49	74,17	73,63	74,17	106.37	
2	Luas Jaringan Irigasi	30,57	persen	30,57	43,68	41,31	43,68	142.89	
3	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	67,40	Persen	64,60	65,93	64,55	65,93	97.82	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan pekerjaan umum adalah urusan pekerjaan umum merupakan salah satu program prioritas Bupati periode tahun 2014-2019, sehingga banyak dana, tenaga dan upaya diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja. Selain itu, SKPD teknis yang menangani urusan pekerjaan umum melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, peralatan dan dana yang tersedia dengan efektif dan efisien sehingga hasil kinerja melampaui target.

2.2.3.1.3.2 Penataan Ruang

Kinerja urusan penataan ruang ditunjukkan dalam 7 indikator. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 7 indikator tersebut sebanyak 4 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.174
Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	>30	persen	>30	39,27	31	39,27	103.33	
2	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	4.00	persen	3,85	3,6	3,6	3,6	90.00	
3	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	0	Persen	0	0	0	0	100.00	
4	Luas Kawasan Lindung (ha)	25.886	Ha	25.886	25. 886	25. 886	25. 886	100.00	
5	Luas Kawasan Budidaya (ha)	82.687	Ha	82.687	82.687	82.687	82.687	100.00	
6	Jumlah IMB Yang Dikeluarkan	676	-	645	346	577	346	51.18	
7	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	38	Persen	38	35	35	35	84.21	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja program urusan penataan ruang adalah konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan regulasi penataan ruang.

Faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja urusan penataan ruang sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sosialisasi fungsi IMB kepada masyarakat.
2. Belum selesainya revisi perda 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang.

2.2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kinerja urusan perumahan ditunjukkan dalam 3 indikator. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 3 indikator tersebut sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 2 indikator berstatus akan tercapai, dan 0 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.175
Capaian Kinerja Urusan Perumahan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d . 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	84,20	Persen	83,00	85,64	81,42	85,64	98.34	
2	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	2,45	Persen	2,50	2,22	2,24	2,22	197.96	
3	Rumah Layak Huni (%)	85,00	Persen	80,00	57,8	56,7	57,8	94.12	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor yang mendukung indikator kinerja prosentase Lingkungan Pemukiman Kumuh melampaui target, adalah telah tersusunnya dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh Perkotaan (RP2KPKP) serta adanya bantuan fisik penanganan permukiman kumuh melalui APBN dan APBD Provinsi.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja persentase rumah tangga Rumah Tangga Ber-Sanitasi adalah telah tersusunnya dokumen Masterplan Air Limbah Domestik dan adanya dukungan dana untuk pembangunan IPAL Komunal.

Adapun faktor penghambat belum tercapainya indikator Rumah Layak Huni (%) adalah karena jumlah penanganan rumah layak huni di Kabupaten Magelang tiap tahun mengalami kenaikan yang tidak sebanding dengan kenaikan jumlah seluruh rumah di Kabupaten Magelang. Walaupun belum tercapai, namun adanya bantuan penanganan rumah tidak layak huni dari provinsi, BSPS dari pusat dan program penanganan RTLH APBD Kabupaten Magelang sangat membantu penanganan rumah tidak layak huni.

2.2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Kinerja pembangunan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat daerah ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 6 indikator tersebut sebanyak 4 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.176
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	0.44	-	0,44	0,69	0,39	0,69	100.00	●
2	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	100.87	-	99,64	88,13	91,32	88,13	100.00	●
3	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Dan Adiministrasi Pemerintah	4	-	4	4	2	4	100.00	●
4	Penegakan PERDA	75	Persen	75	95,29	80,45	95,29	100.00	●
5	Persentase Peningkatan PAD	12.02	Persen	12,02	17,89	7,42	17,89	86.25	▼
6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ada		ada	Ada	Ada	Ada	96.66	▶

Status* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya indikator adalah adanya komitmen dari seluruh komponen masyarakat, khususnya SKPD teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi urusan ketertiban dan keamanan.

Faktor penghambat tidak tercapainya indikator cakupan petugas Linmas per sepuluh ribu jumlah 10.000 penduduk adalah karena selama ini menjadi Anggota Linmas merupakan satu pilihan untuk kegiatan sosial yang secara ekonomi belum dapat dijadikan sebagai pekerjaan yang dapat menopang kebutuhan rumah tangga. Rekrutment anggota baru tidak sebanding dengan jumlah Anggota Linmas yang pensiun maupun meninggal dunia sehingga pertumbuhan jumlah anggota Linmas tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Dari aspek kelembagaan Pengorganisasian Linmas, berdasarkan sejarahnya kelembagaan Linmas pernah berdiri sendiri menjadi Mawil Hansip sejajar dengan Kantor eselon III, namun seiring dengan perubahan SKPD di Kabupaten Magelang kelembagaan Linmas mulai menurun hanya ditangani oleh Kasi/ Kasubid Linmas (eselon IV). Penggabungan Linmas ke Satpol PP di Kabupaten Magelang, diawali dari Penggabungan Mawil Hansip dan Kantor Sospol Menjadi Kantor Kesbanglinmas (Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat) sehingga Lembaga Linmas dibawah Kasi Linmas (eselon IV.a). Pada Tahun 2009, Kelembagaan Linmas masuk di Badan Kesbangpol dan PB. Kelembagaan Linmas dibawah Bidang Penanggulangan Bencana melalui Kasubid Bina Linmas (eselon IV.a). Setelah terbitnya PP 6 Tahun 2010 bahwa fungsi Linmas berada di Satpol PP maka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kelembagaan Linmas masuk dalam Satpol PP Kabupaten Magelang di bawah Seksi Pengamanan dan Bina Linmas (eselon IV.a).

2.2.3.1.6 Sosial

Kinerja pembangunan urusan sosial ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 2 indikator tersebut sebanyak 2 indikator berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.177
Capaian Kinerja Urusan Sosial

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	34	Unit	34	39	39	39	114,71	
2	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	20.00	Persen	18,50	46,32	28,95	46,32	231,60	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Pendekatan penanganan PMKS dilakukan melalui 4 (empat) pilar yakni perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Melalui pendekatan ini tidak semua penanganan PMKS bermuara pada bantuan. Namun disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan kondisi masing-masing PMKS. Penanganan PMKS dibagi ke dalam dua kelompok yaitu PMKS potensial dan non potensial. Dalam kurun waktu Tahun 2013-2018 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan mengalami kenaikan secara signifikan, dimana sampai dengan tahun 2018 capaian kerja sebesar 46,32 persen, jauh melampaui target sebesar 28,95 persen.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat diketahui dari jumlah persentase yang ditangani dibagi dengan jumlah PMKS yang ada.

Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja urusan Sosial adalah :

- a. Perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sosial di Kabupaten Magelang
- b. Adanya ketersediaan dana untuk pembinaan panti sehingga partisipasi panti untuk tumbuh kembang bertambah
- c. Adanya program Keluarga Harapan dari Pusat yang sasarannya di Kabupaten Magelang sehingga menambah jumlah PMKS yang memperoleh bantuan.
- d. Adanya peran serta stake holders serta masyarakat dalam penanganan masalah-masalah sosial di Kabupaten Magelang.
- e. Pendataan PMKS yang dilakukan secara periodik.

2.2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.2.3.2.1 Ketenagakerjaan

Kinerja pembangunan Urusan Ketenagakerjaan ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 6 indikator tersebut sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu kerja keras. Sementara 1 indikator belum dapat dianalisis karena belum ada data. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.178
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPDP 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	76,65	Persen	75,65	71,28	75,46	71,28	92.99	
2	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	1,28	Persen	1,28	2,70	1,34	2,70	-10.94	
3	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	54,27	Persen	48,32	42,86	43,31	42,86	78.98	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka **	3,02	Persen	3,10	2,91	3,21	2,91	103.64	
5	Keselamatan dan Perlindungan	79,00	Persen	77,00	NA	75	NA	0.00	
6	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	100	Persen	100	100	100	100	100.00	

Status* : : Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Kerja Keras

2.2.3.1.2 Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan ditunjukkan dalam 7 indikator. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 7 indikator tersebut sebanyak 3 indikator berstatus tercapai, 2 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.179
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPDP 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Jumlah Arus Penumpang	3.705.271	orang	3.705.271	3.121.745	2.794.562	3.121.745	84.25	

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
	Angkutan Umum								
2	Jumlah Ijin Trayek	1.069	-	1.057	976	1.089	976	91.30	▶
3	Rasio Uji Kir Kendaraan	96.7	Persen	96,30	88,10	98,39	88,10	91.11	▶
4	Jumlah Terminal Bis	8	terminal	8	6	6	6	75.00	▼
5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	32	menit	32	32	32	32	100.00	●
6	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan Wajib Uji	ada		ada	Ada	Ada	Ada	100.00	●
7	Pemasangan Rambu-Rambu	94,00	persen	79,00	111,72	106,36	111,72	118.85	●

Status* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan perhubungan adalah:

- Perencanaan kegiatan/program yang baik
- Dukungan ketersediaan dana
- Pelaksanaan kegiatan/program yang baik
- Sarana dan prasarana mendukung.

Sedangkan faktor yang menyebabkan beberapa indikator kinerja program urusan perhubungan belum tercapai, yaitu:

- Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum.

Indikator ini belum tercapai karena:

- Adanya Kecenderungan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum
- Kurang nyamannya fasilitas Angkutan umum dan fasilitas di terminal
- Waktu tunggu angkutan Umum yang relatif lama
- Banyak agen bus/angkutan umum yang melakukan jemput bola pada penumpang sehingga minat masyarakat masuk terminal menurun.

- Jumlah ijin trayek

Indikator ini belum tercapai dikarenakan saat ini banyak kendaraan yang sudah habis masa ijin trayek, namun ijin trayeknya tidak diperpanjang lagi karena sepi penumpang. Masyarakat lebih sering memanfaatkan jasa angkutan online.

- Rasio Uji KIR Kendaraan

Indikator ini belum tercapai karena adanya keterlambatan pemilik kendaraan wajib uji yang tidak melakukan uji kendaraan bermotor.

4. Jumlah Terminal Bis.

Faktor penghambat tidak tercapainya indikator jumlah terminal bis adalah karena keberadaan Terminal Muntilan yang sudah menjadi kewenangan Provinsi; dan rencana pembangunan Terminal Sawangan yang belum terealisasi karena gagalnya proses pengadaan tanahnya.

2.2.3.1.3 Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup ditunjukkan dalam 5 indikator. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 5 indikator tersebut sebanyak 4 indikator berstatus tercapai, dan 1 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.180
Capaian Kinerja Lingkungan Hidup

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Persentase Penanganan Sampah	31,00	Persen	29,00	33,60	28,14	33,60	108.37	●
2	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor Dan Sumber Mata Air	2,10	Persen	1,90	4,10	2,85	4,10	195.39	●
3	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	30	Persen	30	38,84	33,06	38,84	129.48	●
4	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	1,76		1,78	2,32	0,99	2,32	214.94	●
5	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	2.300.000	m ³	2.300.000	297.475	186.585	297.475	12.93	▼

Status* : ● : Tercapai; ▲ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Secara Umum, faktor pendorong tercapainya indikator kinerja program urusan Lingkungan Hidup adalah:

- Sinergitas antar stakeholder baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pusat.
- Adanya peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui pembentukan kelompok peduli lingkungan.
- Pelaksanaan program dan kegiatan secara efisien dan efektif.
- Pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Sedangkan indikator Jumlah Daya Tampung TPS masih memerlukan upaya keras untuk mencapainya dikarenakan belum terealisasinya pengadaan TPA di Kabupaten Magelang, sehingga daya tampung TPS yang ditargetkan tidak tercapai. Kendala yang dihadapi adalah adanya regulasi yang

mensyaratkan bahwa lokasi TPA minimal berjarak 1.000 meter dari permukiman. Hal ini menyebabkan lokasi yang disediakan untuk TPA tidak memenuhi syarat.

2.2.3.1.4 Pertanahan

Kinerja urusan pertanahan ditunjukkan dalam 2 indikator. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 2 indikator tersebut sebanyak 2 indikator berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.181
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	33,83	Persen	33,80	53,41	53,41	53,41	157,88	●
2	Penyelesaian Izin Lokasi	100	Persen	100	100	100	100	100	●

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja program urusan Pertanahan adalah:

1. Kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan lahannya cukup tinggi;
2. Pelayanan pengurusan pensertifikatan lahan dan ijin lokasi tidak berbelit-belit;
3. Biaya sertifikat dan ijin lokasi relatif terjangkau;
4. Tingginya program pemerintah terkait pelayanan sertifikasi tanah.

2.2.3.1.5 Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil ditunjukkan dengan 4 indikator. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 4 indikator tersebut sebanyak 3 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.182
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	91,87	Persen	91,81	96,13	88,66	96,13	104,64	●
2	Bayi Berakte Kelahiran	100	persen	98,77	94,29	86,44	94,29	94,29	►
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	1.80	persen	1,80	34,26	39,37	34,26	1,903.33	●

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPDP 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
4	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	100	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja program urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah: (1) Disdukcapil sudah mulai melakukan upaya jemput bola pelayanan pencatatan sipil (2). Kegiatan Sosialisasi Administrasi kependudukan kepada masyarakat semakin diintensifkan (3). Pembebasan biaya untuk beberapa pelayanan pengurusan administrasi kependudukan.

Indikator kinerja program yang belum tercapai adalah prosentase bayi berakte kelahiran dan rasio pasangan berakte nikah, hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat, yaitu:

- Faktor geografis, yaitu domisili pemohon akte kelahiran jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Kendala jaringan internet yang kurang lancar di beberapa wilayah, sehingga berpengaruh pada jangka waktu pembuatan dokumen kependudukan
- Keterbatasan blangko E-KTP dari pusat sehingga pencetakan E-KTP tidak sesuai standar waktu.
- Kesadaran masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan masih rendah, dimana masyarakat biasanya membuat dokumen kependudukan manakala dibutuhkan.

2.2.3.1.6 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dalam 3 indikator. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 3 indikator tersebut sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 2 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.183

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPDP 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	2.56	Persen	2,54	1,98	1,88	2.56	77.34	
2	Rasio KDRT	0.024	Persen	0,025	0,023	0,017	0.024	104.17	
3	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan	100	Persen	100	75,51	75	100	75.51	

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPDP 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
	Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan								

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah: (1) semakin mantapnya pola pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak melalui P2T2A semanah dan jaringan PTT Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan (2). Partisipasi masyarakat dalam pencegahan KDRT cukup tinggi.

Salah satu indikator kinerja program yang belum tercapai adalah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Faktor penghambat tidak tercapainya indikator ini adalah adanya ASN perempuan yang pensiun dan adanya kebijakan moratorium ASN sehingga Pemerintah Kabupaten Magelang tidak dapat menambah ASN perempuan.

2.2.3.1.7 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ditunjukkan dalam 5 indikator. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 5 indikator tersebut sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.184

Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPDP 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1.57	Anak	1,60	1,14	1,13	1,14	127.39	
2	Rasio Akseptor KB	81.50	Persen	81,45	73,08	79,71	73,08	89.67	
3	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	80.89	Persen	80,84	73,08	79,71	73,08	90.34	
4	Keluarga Pra Sejahtera(%)	20.18	Persen	21,28	21,23	22,33	21,23	94.80	
5	Keluarga Sejahtera I (%)	14.38	Persen	14,88	15,29	16,39	15,29	93.67	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

- Norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) sudah melembaga di lapisan masyarakat

- b. Fasilitas dan akses pelayanan KB semakin mudah
- c. Sarana komunikasi informasi dan edukasi lebih bervariasi dan tersebar baik melalui media luar ruang maupun media dalam ruang.
- d. Semakin efektifnya program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang
- e. Membaiknya kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu indikator yang belum mencapai target ada 3 yaitu : Rasio Akseptor KB, Cakupan Peserta KB Aktif (%) dan Keluarga Sejahtera (%). Adapun Faktor penghambat dari ketiga indikator diatas adalah :

- a. Kenaikan jumlah pasangan usia subur tidak langsung diikuti dengan kenaikan kesertaan ber KB. Penambahan jumlah PUS tersebut berasal dari dari pengantin baru yang tidak langsung ikut KB karena menginginkan untuk segera mempunyai anak.
- b. Adanya PUS yang drop out KB karena ingin punya anak lagi, ada pula yang usianya telah melebihi 45 tahun dan merasa aman tidak berKB padahal masih termasuk subur.
- c. Tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan KB, khususnya Laki-laki masih belum optimal.
- d. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

2.2.3.1.8 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kinerja pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 4 indikator tersebut sebanyak 3 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.185
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPDP 2018	Realisasi Tahun 2018		Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6		8		9
1	Persentase Koperasi Aktif	78.18	Persen	77,95	94	94	94	120.24	
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	106.384	-	106.387	106.600	106.200	106.600	100.20	
3	Jumlah BPR/LKM	382	-	379	297	297	297	77.75	
4	Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	0.38	Persen	0,37	1,15	20,56	1,15	302.63	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Pada tahun 2018, dari 4 indikator kinerja program urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 1 indikator berstatus belum tercapai, dan 3 indikator melampaui target.

2.2.3.1.9 Penanaman Modal

Kinerja pembangunan urusan penanaman modal ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja, Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 4 indikator tersebut semua indikator berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.186
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1.164	-	1.085	1.194	730	1.194	102.58	●
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	724.647	Juta rupiah	665.163	1.976.374	1.030.689	1.976.374	272.74	●
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	31.19	-	28,19	31,43	11,37	31,43	100.77	●
4	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	359	Milyar rupiah	164	945,69	539.750	945,69	263.42	●

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

2.2.3.1.10 Kebudayaan

Kinerja pembangunan urusan kebudayaan ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 3 indikator kinerja program urusan kebudayaan, semuanya berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.187
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	38	kali	38	38	38	38	100,00	●

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPDP 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
2	Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya	18	Unit	18	18	27	18	100,00	●
3	Benda. Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	70,00	persen	66,95	100	66,85	100	149,37	●

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya indikator Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya adalah Karena Kabupaten Magelang kaya akan sumber daya Budaya yang oleh pemerintah daerah di dukung dengan pendanaan untuk penyelenggaraan festival. Sedangkan untuk indikator benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mampu melampaui target disebabkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten untuk membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di Kabupaten Magelang sejak tahun 2015, sehingga upaya-upaya pendaftaran, pelestarian dan pemanfaatan benda/ bangunan cagar budaya bisa berjalan secara optimal.

2.2.3.1.11 Pemuda dan Olahraga

Kinerja pembangunan urusan pemuda dan olahraga ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 5 indikator kinerja program urusan Pemuda dan Olahraga, 4 indikator berstatus tercapai, 1 indikator perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.188
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPDP 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Jumlah Organisasi Pemuda	27	organisasi	26	27	26	27	103,85	●
2	Jumlah Organisasi Olahraga	36	organisasi	35	35	29	35	100,00	●
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	19	kegiatan	18	20	17	20	111,11	●
4	Jumlah Kegiatan Olahraga	24	kegiatan	24	24	24	24	100,00	●
5	Lapangan Olahraga	2.00	permil	1,50	1,25	0,02	1,25	83,33	▼

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

2.2.3.1.12 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 6 indikator kinerja program urusan Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, 4 indikator berstatus tercapai, 2 indikator berstatus akan tercapai. Dibandingkan capaian tahun 2017, ada peningkatan capaian di Tahun 2018. Pada tahun 2017, dari 6 indikator urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, 3 indikator berstatus tercapai dan 3 indikator berstatus akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.189
Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM. Ormas Dan OKP	12	-	12	12	12	12	100	●
2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	12	-	12	12	7	12	100	●
3	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	100	Persen	100	100	70	100	100	●
4	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100	Persen	100	100	100	100	100	●
5	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100	Persen	90	86,25	70	86,25	95,83	▶
6	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	100	Persen	100	96,66	100	96,66	96,66	▶

Status* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja program urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah:

- Adanya Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebencanaan.
- Dukungan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholders.
- Ketersediaan SDM yang kompeten.
- Peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.

e. Merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang mempunyai standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah.

Sedangkan faktor penghambat tidak tercapainya indikator Kegiatan Pembinaan Politik Daerah adalah adanya ketidaktepatan perumusan target indikator kinerja pada level perencanaan SKPD.

2.2.3.1.13 Ketahanan Pangan

Kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 2 indikator kinerja program urusan Ketahanan Pangan, 1 indikator berstatus tercapai, dan 1 indikator akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.190
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPDP 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Ketersediaan Pangan Utama Beras	188.1	Ton	188,06	220,23	287.172	220,23	117,11	●
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	93.1	-	93,1	87,90	87,10	87,90	94,41	▶

Status* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

2.2.3.1.14 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 3 indikator kinerja program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2 indikator kinerja berstatus tercapai dan 1 indikator kinerja perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.191
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPDP 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Cakupan Pembi-naan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	19.00	persen	17,00	20	20	20	117,65	●
2	Cakupan Kelompok Binaan PKK	39.52	persen	33,87	24,82	28,24	24,82	73,28	▼
3	Jumlah LSM	6	buah	6	4	4	4	100,00	●

Status* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor penghambat atas ketidak capaian 1 indikator diatas adalah:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan khususnya pemerintah desa untuk memberdayakan kelompok PKK.
2. Peran organisasi PKK masih dipandang sebelah mata.
3. Dukungan anggaran untuk PKK dan LSM relative masih rendah.
4. Masih rendahnya kesadaran untuk membentuk lembaga swadaya yang non profit.

2.2.3.1.15 Statistik

Kinerja pembangunan urusan statistik ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 2 indikator kinerja program urusan Statistik, semua indikator kinerja berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.192
Capaian Kinerja Urusan Statistik

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPDP 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada	Ada/tidak	ada	Ada	ada	Ada	100	
2	Buku "PDRB Kabupaten"	ada	Ada/tidak	ada	Ada	ada	Ada	100	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya urusan statistik adalah: (1). Hubungan dan kerjasama yang baik dengan Stakeholder pengampu data; (3). Ketersediaan Dana

2.2.3.3.1.16 Kearsipan

Kinerja pembangunan urusan kearsipan ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja. Semua indikator kinerja program urusan kearsipan pada tahun 2018 telah tercapai. Capaian ini merupakan capaian akumulasi dari tahun 2014. Realisasi capaian yang melebihi target ini dikarenakan adanya tambahan kegiatan monitoring evaluasi diluar jadwal dan adanya permintaan dari desa-desa. Indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan juga realisasinya melampaui target karena didukung oleh kegiatan sosialisasi dan kegiatan workshop. Capaian ini masih relative sama dengan capaian tahun 2017. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.193
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Pengelolaan Arsip Secara Baku	100	persen	89,61	89,77	73,02	89,77	100,18	●
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	329	orang	282	901	791	901	319,50	●

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

2.2.3.1.17 Komunikasi dan Informatika

Kinerja pembangunan urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 3 indikator kinerja program komunikasi semuanya telah tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.194
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	6	-	6	8	8/0	8	133,33	●
2	Web Site Milik Pemerintah Daerah	ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	100	●
3	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	9/3	-	9/3	9/3	9/3	9/3	100	●

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika adalah:

- (1). Partisipasi masyarakat yang tinggi
- (2). Komitmen Pemda dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat tinggi

2.2.3.1.26. Perpustakaan

Kinerja pembangunan urusan perpustakaan ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut. Dari 3 indikator kinerja program urusan perpustakaan, pada tahun 2018 dua indikator berstatus

tercapai dan satu indikator akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.195
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Jumlah Perpustakaan	815	Unit	794	797	793	797	97,79	▶
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	45.335	orang	44.447	76.548	39.967	76.548	168,85	●
3	Rasio Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	2.24	persen	2,20	2,24	2,16	2,24	100,00	●

Status* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja urusan perpustakaan adalah: (1). Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan; (2). Meningkatnya mutu dan jenis layanan perpustakaan; (3). Meningkatnya jam kunjung pemustaka; (4). Ketersediaan dana dan (5). Dukungan dan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu perpustakaan.

2.2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.2.3.3.1 Pertanian

Kinerja pembangunan urusan pertanian ditunjukkan dengan 21 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 21 indikator kinerja program urusan Pertanian, 8 indikator berstatus tercapai, 9 indikator berstatus akan tercapai, dan 4 indikator perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.196
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar								
1	Produktivitas Padi	60.10	Kw/ha	60,09	62,24	62,90	62,24	103,56	●
2	Produksi Padi	355.676	Ton/Th	355.617	478.266	483.331	478.266	134,47	●
3	Produktivitas Jagung	59.30	Kw/ha	59,28	63,53	58,73	63,53	107,13	●
4	Produksi Jagung	74.337	Ton/Th	74.307	51.446	55.083	51.446	69,21	▼
5	Kontribusi	20.03	Persen	20,89	21,78	22,78	21,78	108,74	●

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
	Sektor Pertanian Terhadap PDRB **								
6	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%sektor pertanian	71.84	Persen	72,22	72,11	72,83	72,11	100,38	●
7	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB sektor pertanian	7.73	Persen	7,60	5,68	5,25	5,68	73,48	▼
8	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB sektor pertanian	13.09	Persen	12,86	17,65	17,65	17,65	134,84	●
9	Cakupan Bina Kelompok Petani	14,9	Persen	2,5	14,00	2.6	14,00	518,52	●
	Produksi Hewan ternak								
10	Sapi potong	1.862.169	Kg	1.825.656	1.826.011	1.791.694	1.826.011	98,06	▶
11	Kerbau	541	kg	530	693,20	520	693,20	128,13	●
12	Kambing	793.265	Kg	777.711	737.749	749.957	737.749	93,00	▶
13	Domba	1.115.626	Kg	1.093.751	1.043.219	1.053.911	1.043.219	93,51	▶
	Produksi Hewan Unggas								
14	Ayam Pedaging	9.957,1	ton	9.761,90	9.762,02	9.417,335	9.762,02	98,04	▶
15	Ayam Ras Petelur	1.019.5	ton	999,59	991,59	967.668	991,59	97,26	▶
16	Ayam Buras	1.239.98	ton	1.215,67	1.168,78	1.170.022	1.168,78	94,26	▶
17	Itik	94.106	ton	92.260	92,30	90.445	92,30	98,09	▶
18	Sapi Perah	746.158	liter	731.528	731.634	725.679	731.634	98,05	▶
	Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hr)								
19	a. daging	6.20	Gr/kap/hr	5,95	5,96	5,87	5,96	96,13	▶
20	b. telur	4.65		4,35	4,00	3,97	4,00	86,02	▼
21	c. susu	0.11		0,08	0,04	0,02	0,04	36,36	▼

Status* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

2.2.3.3.2 Kehutanan

Kinerja pembangunan urusan kehutanan ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. Indikator tersebut tidak bisa dievaluasi karena saat ini indikator kehutanan sudah menjadi kewenangan Provinsi. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.197
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPDP 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis	2.822	ha	2.680	NA	NA	NA	NA	NA
2	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	4.66	Persen	4,70	NA	3,92	NA	NA	NA

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

2.2.3.3.3 Energi dan Sumberdaya Mineral

Kinerja pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. Indikator tersebut tidak bisa dievaluasi karena saat ini indikator pertambangan sudah menjadi kewenangan Provinsi. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.198
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPDP 2018	Realisasi tahun 2018				
1	Persentase Pertambangan Berijin	50	Persen	40	NA	NA	NA	50	NA
2	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	2.64	Persen	2,64	NA	4,35	NA	2.64	NA

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

2.2.3.3.4 Pariwisata

Kinerja pembangunan urusan pariwisata ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 3 indikator kinerja program urusan Pariwisata, 2 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.199
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Kunjungan Wisata: Manca Negara	860.549	Orang	723.151	358.673	337.515	358.673	41,68	▼
2	Kunjungan Wisata: Nusantara	6.594.051	Orang	5.963.149	5.977.422	4.510.363	5.977.422	90,65	▶
3	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	6.89	persen	6,63	5,10	4,30	5,10	74,02	▼

Status* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

2.2.3.2.5 Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 4 indikator kinerja program urusan Peternakan dan Perikanan, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 4 indikator berstatus akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.200
Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Produksi Perikanan (Benih)	2.000	Juta ekor	1.750	2,01	1.717.550	2,01	100,40	●
2	Produksi Perikanan Budidaya	18.000	Ton	16.800	23.097,01	21.058.460	23.097,01	128,32	●
3	Produksi Perikanan Tangkap	263.57	Ton	253,43	278,14	275,90	278,14	105,53	●
4	Konsumsi Ikan	15.75	Kg/kap/tahun	15,30	19,60	18,61	19,60	124,44	●
5	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sector Pertanian	2.68	Persen	2,62	2,29	2,82	2,29	85,45	▶

Status* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

2.2.3.2.6 Perdagangan

Kinerja pembangunan urusan perdagangan ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 3 indikator kinerja program urusan Perdagangan, 2 indikator berstatus Tercapai, dan 1 indikator Perlu Kerja Keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.201
Capaian kinerja Urusan Perdagangan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status*
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	9.98	Persen	10,01	10,85	13,41	10,85	108,72	●
2	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	89	Juta US\$	88,80	50,87	88,5	50,87	57,16	▼
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	13,55	Persen	1,79	3,90	20,56	3,90	224,14	●

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

2.2.3.2.7 Perindustrian

Kinerja pembangunan urusan perindustrian ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 3 indikator kinerja program urusan Perindustrian, 1 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.202
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	16.83	Persen	2,81	2,95	0,72	2,95	17,53	▼
2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	17.95	Persen	18,03	19,55	22,66	19,55	108,91	●
3	Pertumbuhan Sektor Industri.	3.76	Persen	3,76	3,70	2,88	3,70	98,40	►

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras
 2.2.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Kinerja urusan perencanaan pembangunan ditunjukkan dalam 4 indikator dengan 3 Indikator berstatus Tercapai dan 1 Indikator berstatus akan tercapai, Selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 2.203
 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yg Telah Ditetapkan Dgn PERDA	ada	Dokumen	Ada	Ada	ada	Ada	100	●
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	Dokumen	Ada	Ada	ada	Ada	100	●
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	Dokumen	Ada	Ada	ada	Ada	100	●
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100	Persen	100	94,57	87,03	94,57	94,57	►

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

2.2.3.4.2 Keuangan

Kinerja pembangunan urusan keuangan diukur dengan satu indikator, yaitu persentase peningkatan PAD. Dari target peningkatan PAD 12,02 per tahun, pada tahun 2018 tercapai 17,89 atau 148,84 persen.

Tabel 2.204
 Capaian Kinerja Urusan Keuangan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Peningkatan PAD	12.02	Persen	12,02	17,89	7,42	17,89	148,84	●

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Magelang dirumuskan berdasarkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah masa yang lalu, khususnya terkait dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan pembangunan juga diidentifikasi dari seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta yang ingin dicapai di masa datang yang didasarkan pada kondisi riil saat ini.

1. Kinerja Pembangunan Pendidikan
2. Kinerja Pembangunan Kesehatan
3. Masih Tingginya Jumlah PMKS
4. Ketahanan Pangan Daerah
5. Tingkat Pengangguran Terbuka
6. Layanan Hunian yang Layak dan Berkualitas
7. Keberdayaan Berbasis Gender
8. Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik
9. Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur
10. Daya Saing Daerah
11. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
12. Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
13. Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
14. Kualitas Pelayanan Publik
15. Pelayanan Kearsipan
16. Sistem Manajemen Kepegawaian

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

1. Pendidikan
Pembangunan Pendidikan memberikan sumbangan yang besar dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Permasalahan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan yang memerlukan penanganan adalah:
 - 1) partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan;
 - 2) daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah
 - 3) mutu pendidikan.
2. Kesehatan
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Dalam upaya

pencapaian peningkatan derajat kesehatan tersebut masih terdapat permasalahan kualitas kesehatan masyarakat.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang. Hal ini disebabkan oleh permasalahan sebagai berikut:

- 1) akses dan kualitas infrastruktur jalan;
- 2) layanan infrastruktur sumberdaya air;
- 3) penataan bangunan gedung dan lingkungan;
- 4) layanan air minum dan sanitasi;
- 5) kualitas konstruksi dan sarana prasarana pekerjaan umum; dan
- 6) kesesuaian tata ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman memiliki tiga hal krusial yang menuntut penyelesaian di setiap periode RPJMD, yakni terkait dengan perumahan, kawasan permukiman dan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman. Permasalahan yang dihadapi pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah layanan hunian yang layak dan sehat. Penjabaran dari permasalahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah penyediaan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas. Hal ini disebabkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

- 1) Pengembangan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau.
- 2) Penanganan PSU perumahan.
- 3) Pengembangan kawasan pemukiman layak.
- 4) Penyediaan dan penanganan PSU permukiman.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penegakan Perda merupakan persoalan yang krusial, terutama berkaitan dengan pembentukan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, demikian juga dengan antisipasi dan penanganan bencana kebakaran, sehingga permasalahannya adalah belum optimalnya:

- 1) cakupan penegakan hukum;
- 2) kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana; dan
- 3) wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

6. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Permasalahan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

7. Tenaga Kerja

Sebagai implikasi dari bonus demografi yang menciptakan banyak penduduk usia kerja, serta tantangan kebutuhan tenaga kerja yang

sesuai dengan kebutuhan pasar ekonomi global dan revolusi industri 4.0, maka pembangunan ketenagakerjaan saat ini menjadi penting untuk perhatian berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Magelang telah berupaya melakukan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghadapi tantangan tersebut. Namun demikian, masih ada permasalahan yang memerlukan perhatian ke depan yaitu upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan implementasi dari pembangunan berbasis gender. Dalam pelaksanaannya, permasalahan yang masih perlu diperhatikan adalah kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga

9. Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Pangan yang aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan daerah diukur dengan Indeks Ketahanan Pangan yang merupakan indeks komposit yang terbentuk dari komponen ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. Beberapa kendala yang masih dihadapi oleh daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah adalah:

- 1) ketersediaan bahan pangan utama;
- 2) akses dan distribusi bahan pangan;
- 3) pola konsumsi pangan masyarakat.

10. Lingkungan Hidup

Kelestarian lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan. Meningkatnya tekanan terhadap lingkungan akibat dari berbagai aktivitas manusia perlu diimbangi dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Permasalahan utama yang dihadapi di Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis kelestarian lingkungan. Beberapa penyebab munculnya masalah tersebut adalah belum optimalnya:

- 1) pengendalian pencemaran lingkungan dan gas rumah kaca;
- 2) kapasitas dan tata kelola lingkungan hidup;
- 3) pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
- 4) kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau; dan
- 5) konservasi sumberdaya alam.

11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan. Oleh karena itu, layanan dan data kependudukan merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Permasalahan pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah kualitas pelayanan serta pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil.

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perubahan paradigma dalam pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat dan desa adalah kemajuan dan kemandirian desa.

13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Akan tetapi, keluarga berencana tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengendalian kelahiran semata, akan tetapi juga membangun kesadaran setiap keluarga agar memiliki dukungan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai agar kehidupan keluarga menjadi sejahtera. Permasalahan yang masih perlu perhatian adalah menurunnya kualitas pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.

14. Perhubungan

Transportasi atau perhubungan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan hampir semua kegiatan manusia tidak lepas dari proses transportasi. Di Kabupaten Magelang permasalahan utama di urusan perhubungan adalah belum optimalnya cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan. Hal ini disebabkan oleh permasalahan sebagai berikut.

- 1) ketersediaan prasarana angkutan jalan.
- 2) keamanan dan keselamatan lalu lintas.
- 3) layanan angkutan.

15. Komunikasi dan Informatika

Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Namun demikian, amanah ini belum dapat dilakukan secara optimal di Kabupaten Magelang. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika adalah belum optimalnya pelaksanaan *e-Government* yang disebabkan oleh adanya berbagai masalah sebagai berikut.

- 1) prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memenuhi standar komunikasi informasi.
- 2) integrasi sistem informasi pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat.
- 3) diseminasi informasi publik.
- 4) pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi tingkat masyarakat.

16. Koperasi dan UKM

Pemberdayaan koperasi dan UKM secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian,

mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi dan UMKM masih ditemukan permasalahan pada kinerja koperasi dan UKM.

17. Penanaman Modal

Investasi diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan investasi, yaitu belum terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan meminimalkan hambatan-hambatan Investasi.

18. Kepemudaan dan Olahraga

Peningkatan kualitas dan kapasitas pemuda dalam keikutsertaannya membangun, serta meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Magelang, masih dihadapkan pada permasalahan rendahnya peran serta pemuda dalam pembangunan.

19. Statistik

Permasalahan urusan statistik adalah belum dilaksanakannya satu data terintegrasi yg dapat digunakan menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah.

20. Persandian

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan persandian, antara lain belum tersedianya sistem persandian dan keamanan informasi yang sesuai dengan standar, belum optimalnya pengamanan jaringan informasi, dan pengamanan ruang penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

21. Kebudayaan

Permasalahan bidang kebudayaan yang muncul adalah pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan.

22. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Hal ini untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, menumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi. Permasalahan perangkat daerah terkait urusan Perpustakaan adalah minat baca masyarakat masih rendah.

23. Kearsipan

Permasalahan terkait pembangunan kearsipan di Kabupaten Magelang adalah terbatasnya pelayanan kearsipan.

24. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan perikanan adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang diarahkan pada berkembangnya perikanan yang maju, efisien, dan tangguh. Tujuan pembangunan perikanan adalah untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani ikan, memperluas lapangan kerja dan

kesempatan berusaha, menunjang pembangunan agroindustri serta mendukung pengembangan ekonomi daerah.

Perikanan merupakan salah satu sektor yang diunggulkan di Kabupaten Magelang. Hal tersebut karena sampai dengan saat ini, sektor perikanan masih menjadi penyumbang PDRB. Selain itu, perikanan juga mampu menampung tenaga kerja perikanan cukup banyak.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Magelang saat ini adalah:

- 1) produksi dan produktivitas produk perikanan; dan
- 2) pemberdayaan SDM perikanan.

25. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dan penyediaan lapangan kerja. Selain itu, pariwisata juga mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif. Sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Namun demikian, dalam pengembangannya terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian, yaitu jumlah kunjungan dan terbatasnya lama tinggal wisatawan.

26. Pertanian

Pembangunan pertanian adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien, dan tangguh. Tujuan pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan agroindustri serta mendukung pengembangan ekonomi daerah.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang diunggulkan di Kabupaten Magelang, bersama dengan sektor pariwisata dan sektor UKM. Hal tersebut karena sampai dengan saat ini, sektor pertanian masih menjadi penyumbang PDRB dengan persentase terbesar. Selain itu, pertanian juga mampu menampung tenaga kerja pertanian paling banyak.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Magelang saat ini adalah:

- 3) produksi dan produktivitas produk pertanian; dan
- 4) pemberdayaan SDM Pertanian.

27. Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Selain itu, sektor perdagangan penting untuk terus dikembangkan mengingat sifat sektor perdagangan yang saling berkaitan

dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu perkembangan sektor perdagangan dalam peningkatan PDRB.

28. Perindustrian

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Permasalahan dalam pembangunan sektor industri yang perlu mendapat perhatian, yaitu lambatnya pertumbuhan dan rendahnya daya saing IKM.

29. Perencanaan

Permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Magelang adalah kualitas perencanaan pembangunan daerah

30. Keuangan

Pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah adalah belum optimalnya:

- 1) pengelolaan pendapatan daerah;
- 2) pengelolaan keuangan daerah;
- 3) pengelolaan aset daerah;
- 4) pengembangan BUMD; dan
- 5) pengelolaan sumber-sumber pendanaan daerah non APBD melalui CSR dan kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

31. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi atau institusi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah institusi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan institusi tersebut. Saat ini, karyawan bukan dianggap sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset utama bagi institusi. Permasalahan terkait sistem manajemen kepegawaian antara lain kualitas aparatur

32. Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya kebutuhan terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu belum optimalnya penelitian dan pengembangan

yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, serta penerapan pengembangan teknologi dan inovasi daerah.

33. Pengawasan

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Inspektorat yang mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan internal di Kabupaten Magelang adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

34. Fungsi lain

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Tata kelola pemerintahan yang baik berprinsip pada partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, transparansi, dan responsif. Permasalahan yang muncul adalah belum optimalnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah

2.3.3. Isu Strategis Daerah

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Magelang didasarkan pada permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan, dan potensi pembangunan yang belum terkelola dan dapat menjadi peluang untuk dikembangkan di masa datang. Isu strategis yang perlu mendapat prioritas penanganan selama kurun waktu 5 tahun mendatang di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut.

1. Kualitas Sumberdaya Manusia

Secara umum, nilai IPM di Kabupaten Magelang memiliki besaran yang meningkat. IPM adalah suatu indeks untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Harapan lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Riil Per Kapita. Hampir semua komponen pembentuk indikator IPM mengalami peningkatan. Angka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Magelang pada tahun 2013 hingga 2018 menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,95% per tahun. Meski terus mengalami perkembangan positif, nilai indikator IPM Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2013 hingga 2017 masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Jawa Tengah maupun Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Magelang belum berjalan secara optimal di bandingkan provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Magelang cenderung meningkat dari sebesar 12 (2014) menjadi 12,47 (2017). Data menunjukkan bahwa harapan lama sekolah di Kabupaten Magelang tahun 2014-2017 lebih rendah dari provinsi dan nasional. Hal ini berarti

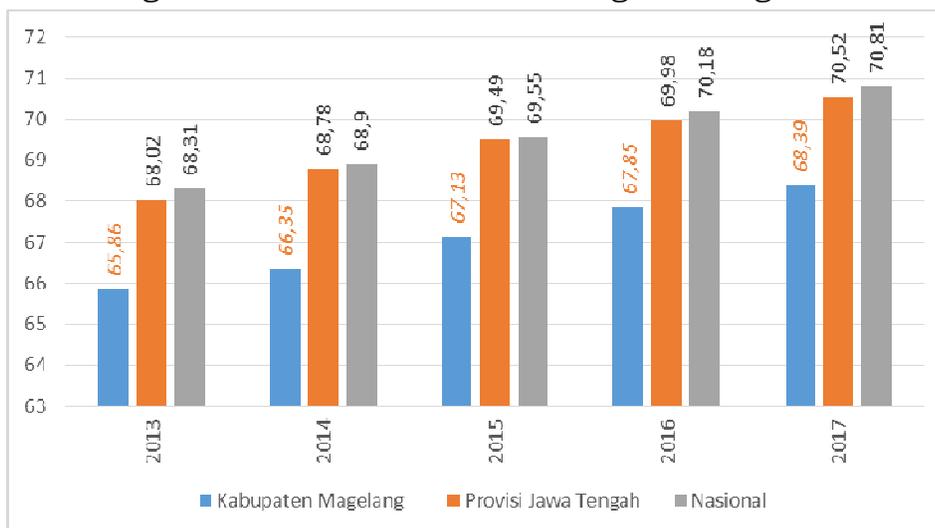
keberhasilan pembangunan sistem pendidikan di Kabupaten Magelang lebih rendah daripada provinsi dan nasional.

Nilai rata-rata lama sekolah tahun 2017 di Kabupaten Magelang sebesar 7,41 tahun. Hal ini berarti pendidikan yang ditamatkan penduduk hanya sampai tamat SD atau dapat mengenyam pendidikan SMP. Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah belum tuntas. Jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah tingkat nasional, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang pada tahun 2013-2017 lebih rendah dari Rata-rata lama sekolah nasional.

Umur harapan hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2014 adalah 73,25. dan cenderung meningkat mulai tahun 2014 di kisaran 73 tahun, sehingga pada tahun 2017 angka harapan hidup dapat mencapai 73,39 tahun. Artinya, secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia 73 – 74 tahun. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan didukung meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Secara series dari tahun 2014 sampai 2018, umur harapan hidup di Kabupaten Magelang di bawah Provinsi Jawa Tengah, namun di atas angka nasional.

Besarnya pengeluaran riil per kapita Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2014 hingga tahun 2018. Rata-rata pertumbuhan besarnya pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang mencapai 2,38% selama lima tahun terakhir. Namun, apabila dibandingkan dengan nilai Kabupaten lain disekitar dan Provinsi Jawa Tengah, kondisi Kabupaten Magelang masih cukup jauh berada di bawah. Sejak tahun 2014 hingga kini, pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Besarnya pengeluaran riil per kapita dapat menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap komoditi pokok. Dalam hal ini, daya beli masyarakat di Kabupaten Magelang masih tergolong rendah.

Adapun IPM di Kabupaten Magelang apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019

Gambar 2.43.

IPM Kabupaten Magelang Tahun 2013 - 2017

Kualitas sumber daya manusia juga dapat dilihat dari capaian kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.205
Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Target RKPD 2019	Sta-tus*
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018			
1	Angka Usia Harapan Hidup	70,56	Tahun	70,50	73,47	73,25	70,56	>
2	Indeks Gini**	0,295	Indeks	0,295	0,344	0,31	0,295	<
3	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,4046	Indeks	0,4046	-	0,42	0,4046	
4	Persentase penduduk miskin**	8,00	Persen	9,00	11,23	12,42	8,00	<
5	IPM	75,94	Indeks	75,94	69,11	74,74	75,94	<
6	Pertumbuhan PDRB	6,4 – 7,1	Persen	6,20 – 6,70	n/a	5,43	6,4 – 7,1	
7	PDRB per kapita	15,06	Juta Rp,	13,75	n/a	22,35	15,06	
8	Laju inflasi	4±1	Persen	4±1	2,66	3,47	4±1	>
9	Rasio penduduk yang bekerja	97,97	-	73,66	71,28	96,79	97,97	<
10	Angka kriminalitas per sepuluh ribu penduduk **	1,45	Indek	1,82	2,60	2,65	1,45	<

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019, Diolah

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Indikator kinerja program aspek kesejahteraan sosial pada RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019 terdiri dari 10 indikator. Pada tahun 2018 sebanyak 5 indikator belum mencapai target dan 2 indikator melampaui target. Sedangkan 3 indikator belum dapat diukur kinerjanya karena belum terdapat data. Indikator-indikator yang belum tercapai, yaitu indek gini, persentase penduduk miskin, IPM, rasio penduduk yang bekerja dan angka kriminalitas.

Selain itu perkembangan teknologi, kemajuan zaman serta interaksi dengan berbagai budaya akan memberikan pengaruh positif atau negatif. Pengaruh negatif menyebabkan perilaku yang bertentangan dengan norma dan budaya, kejahatan dan rusaknya moral terutama pada generasi muda.

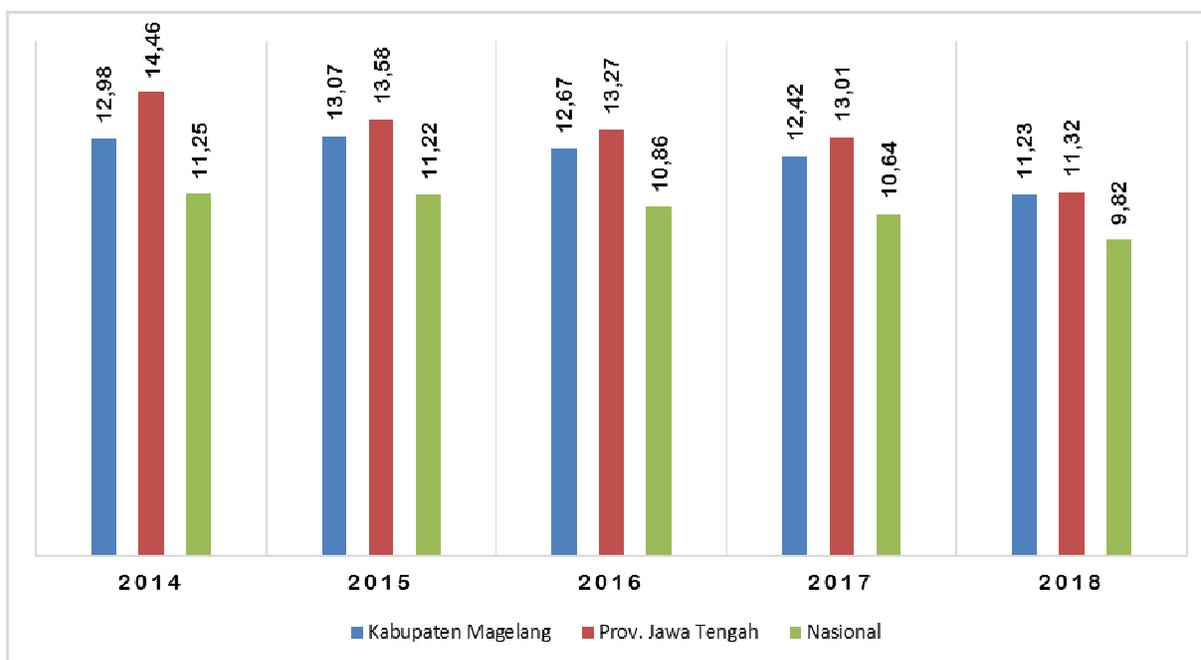
Kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan oleh IPM di Kabupaten Magelang dipengaruhi oleh 3 hal utama :

a. Kemiskinan

Sesuai data terakhir BPS yang dirilis pada Tahun 2018, angka kemiskinan di Kabupaten Magelang sebesar 11,23%, turun 1,19% dibanding

tahun 2017, sebesar 12,42. Hal ini menunjukkan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten hingga desa sudah mulai dirasakan hasilnya, mengingat selama rentang 5 (lima) tahun terakhir baru pada tahun 2018 angka kemiskinan turun lebih dari 1 (satu) digit.

Jika dilihat dalam rentang 5 (lima) tahun terakhir, walaupun angka kemiskinan mengalami penurunan, tetapi belum menunjukkan angka yang mengembirakan. Target di RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2018 sebesar 9,00% masih belum tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan kemiskinan pada sampai dengan tahun 2018 belum berjalan dengan baik. Perbandingan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana gambar di bawah ini:



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019, Diolah

Gambar 2.44.
Perbandingan angka kemiskinan
di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, Kabupaten Magelang berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Namun, jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, posisi Kabupaten Magelang masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional.

Belum optimalnya pelaksanaan program-program daerah untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Magelang disebabkan salah satunya oleh ketersediaan basis data kemiskinan yang belum lengkap dan akurat. Terbatasnya ketersediaan data menyebabkan penetapan sasaran program tidak tepat dan tidak mampu memenuhi target yang diharapkan. Sementara itu, inovasi dan integrasi program pengentasan kemiskinan juga masih kurang dan cenderung hanya melanjutkan program sebelumnya.

Pengentasan kemiskinan hingga kini tidak hanya menjadi isu di daerah saja, melainkan juga menjadi salah satu agenda pembangunan dunia, salah

satunya menjadi tujuan pertama dalam *Sustainable Development Goals* yang diharapkan tercapai hingga tahun 2030. Kabupaten Magelang hingga tahun 2018 juga masih berada di peringkat ke-18 tertinggi untuk angka kemiskinan Kabupaten/kota se-Jawa Tengah, yakni 11,23%.

Dalam rangka mengatasi kemiskinan, Kabupaten Magelang telah melakukan beberapa upaya, salah satunya menyusun rencana program penanggulangan kemiskinan daerah. Meski kebijakan dan program terkait penanggulangan kemiskinan telah disusun, hal tersebut masih belum mampu menurunkan angka kemiskinan dengan optimal. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang selama periode lima tahun rata-rata kurang dari 1 persen per tahun.

Belum optimalnya pelaksanaan program-program daerah untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Magelang disebabkan salah satunya oleh ketersediaan basis data kemiskinan yang belum lengkap dan akurat. Terbatasnya ketersediaan data menyebabkan penetapan sasaran program tidak tepat dan tidak mampu memenuhi target yang diharapkan. Sementara itu, inovasi dan integrasi program pengentasan kemiskinan juga masih kurang dan cenderung hanya melanjutkan program sebelumnya. Salah satu upaya untuk penanggulangan kemiskinan adalah melalui pengurangan pengeluaran, terutama pada pemenuhan kebutuhan dasar di antaranya kebutuhan rumah tinggal. Penyediaan Rumah Tinggal Layak Huni diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan tujuan akhir menurunkan angka kemiskinan.

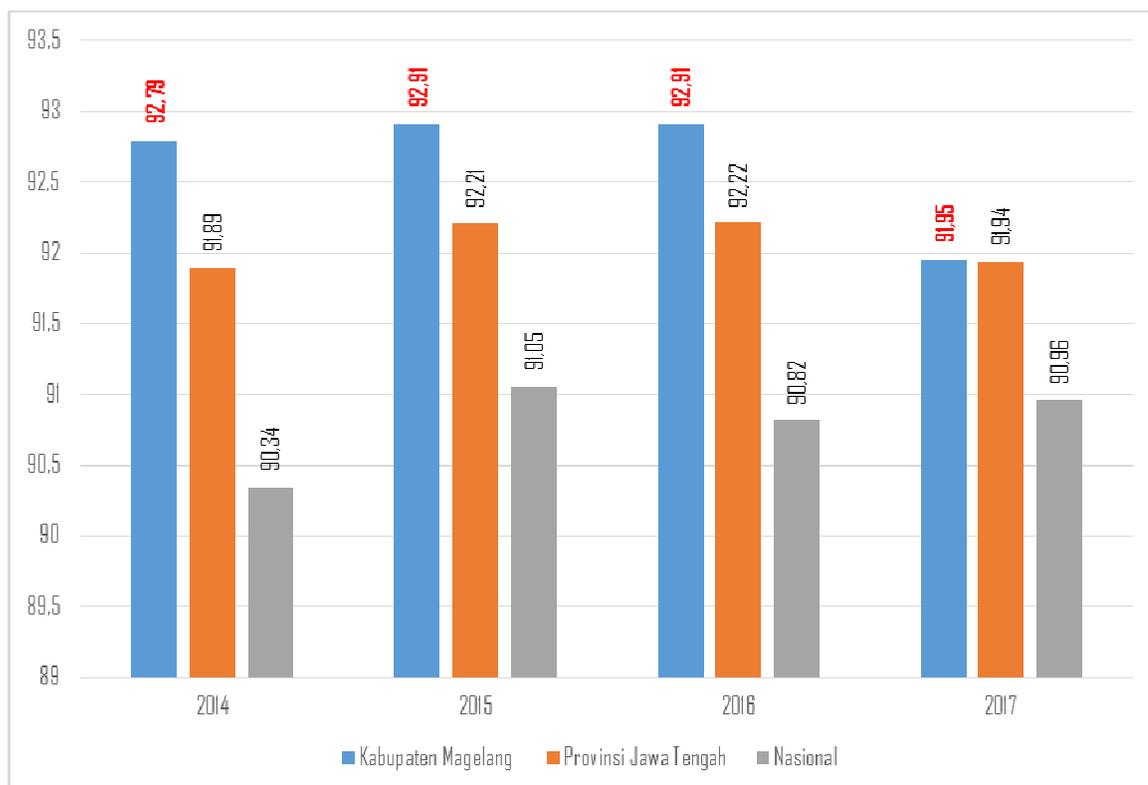
Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja persentase penduduk miskin adalah:

- a. kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang belum berjalan secara optimal;
- b. penanggulangan kemiskinan belum memaksimalkan integrasi berbagai sektor dan stakeholder yang terkait, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal; dan
- c. kenaikan biaya hidup masyarakat, seperti kenaikan BBM, listrik, pajak, tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, khususnya kaum petani yang merupakan masyarakat penyumbang penduduk miskin terbesar di Kabupaten Magelang.

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender (BPS). Indeks pembangunan gender ini diukur berdasarkan umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Secara umum IPG di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Magelang karena secara tidak langsung angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan dasar (umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak) dapat dipenuhi. Adapun perbandingan capaian IPG Kabupaten

Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan nasional disajikan dalam gambar berikut.



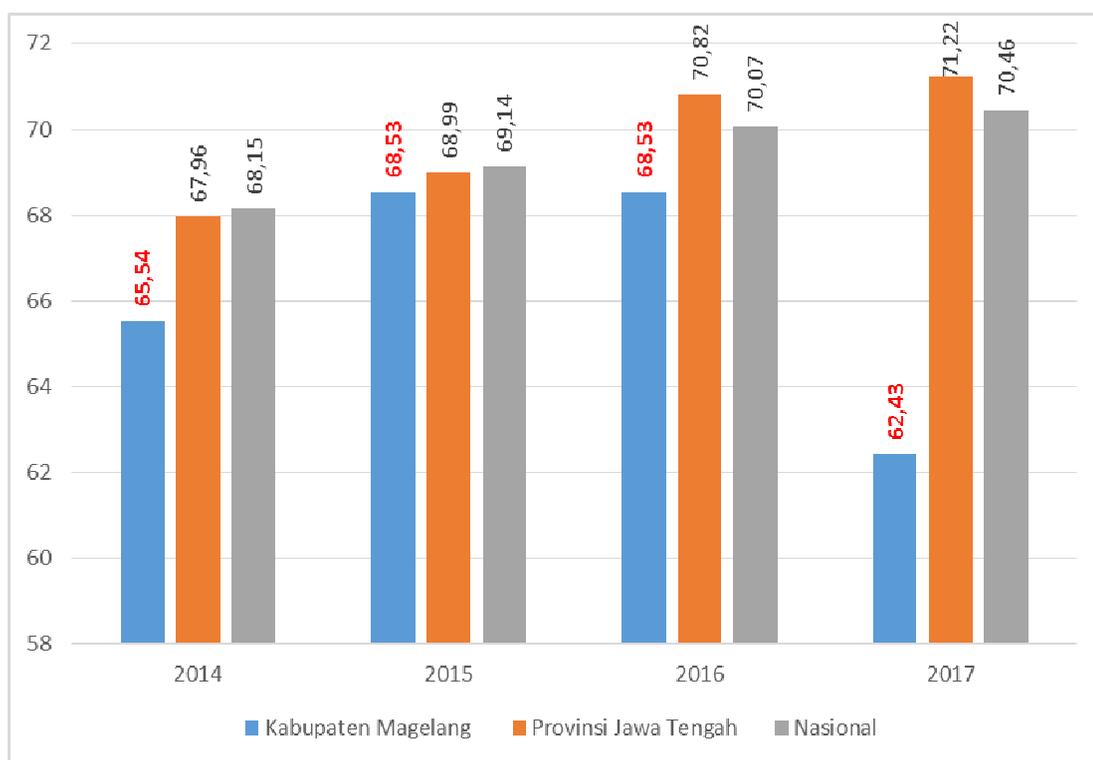
Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019; Diolah

Gambar 2.45.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Magelang Tahun 2014 -2017

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG mencakup partisipasi berpolitik, ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dimensi berpartisipasi politik diwakili dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Dimensi ekonomi dan pengambilan keputusan diwakili oleh perempuan sebagai tenaga profesional teknisi, kepemimpinan, dan ketatalaksanaan. Dimensi terakhir adalah dimensi penguasaan sumber daya ekonomi, yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Berdasarkan data tahun 2013-2017 angka IDG di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Angka IDG dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2016, IPG di Kabupaten Magelang sebesar 68,53. Angka IDG tersebut menunjukkan masih cukup rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019; Diolah

Gambar 2.46.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2017

2. Daya Saing Daerah

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang yang berada di bawah angka Provinsi Jawa Tengah dengan laju pertumbuhan cenderung melambat mengindikasikan belum optimalnya daya saing ekonomi Kabupaten Magelang. Di sisi lain, sebenarnya Kabupaten Magelang memiliki potensi yang cukup banyak tercermin dari 3 (tiga) sektor unggulan, yaitu pariwisata, pertanian, dan industri kecil menengah.

Dalam era globalisasi dan bisnis modern di mana banyak wilayah yang memiliki produk hampir sama, maka merek atau *brand* menjadi suatu keharusan. Sampai saat ini, Kabupaten Magelang belum memiliki *branding* yang diharapkan menjadi diferensiasi, memperkuat identitas, serta meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan. Oleh karena itu, perlu dibangun *branding* Kabupaten Magelang yang akan menjadi salah satu cara efektif meningkatkan daya saing dan mampu mencakup aspek-aspek potensial Kabupaten Magelang secara menyeluruh, walaupun tetap ada penekanan pada aspek yang paling “menjual”.

Selain hal yang dikemukakan di atas, daya saing daerah juga dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur. Isu strategis di Kabupaten Magelang berkaitan dengan hal tersebut adalah belum optimalnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur. Jenis dan layanan infrastruktur yang dimaksud antara lain adalah transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, dan persampahan, di mana semua dilaksanakan secara terintegrasi dengan meningkatkan peran kerja sama pemerintah-swasta. Kerja sama pemerintah

dan swasta ditujukan untuk meningkatkan jumlah dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas dan mobilitasnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Magelang dengan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Dalam rangka mewujudkan daya saing daerah, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi hal sangat penting untuk diperhatikan, dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan harus berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, mengurangi laju pemanasan global, serta meningkatkan kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis sumber daya alam sebagai modal pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, daya dukung lingkungan hidup Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori sedang meliputi daya dukung air, daya dukung pangan, daya dukung lahan terbangun, dan daya dukung fungsi lindung. Adapun berkaitan dengan bencana dan kerentanan iklim, Kabupaten Magelang berada pada kategori risiko bencana tinggi untuk seluruh jenis bencana meliputi risiko terhadap bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, dan tanah longsor. Melihat kondisi tersebut, maka sudah menjadi keharusan bahwa tujuan akhir dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang serta mengurangi risiko bencana alam.

3. Kualitas Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Hal tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama, sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Tata kelola pemerintahan yang baik berprinsip pada partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, transparansi, dan responsif.

Regulasi yang mengatur mengenai tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang yang mengatur etika penyelenggara negara, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan sejarahnya, *good governance* diterapkan sejak dimulainya era reformasi di mana pada era tersebut terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam sistem pemerintahan, termasuk di Kabupaten Magelang.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Magelang. Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu arah kebijakan RPJP Kabupaten Magelang, yaitu terwujudnya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Dalam mencapai arah kebijakan itu, maka ditandai oleh hal-hal sebagai berikut.

- 1) Meningkatnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) didukung oleh aparatur daerah yang profesional, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- 2) Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, ditunjang dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat dan meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- 3) Berkembangnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat yang mandiri, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat berbagai kendala yang perlu untuk dihadapi dan diselesaikan. Kendala yang pertama adalah membenahi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang belum optimal. Akuntabilitas kinerja menunjukkan seberapa kinerja pemerintah tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Magelang menjadi persoalan tersendiri, mengingat terdapat beberapa hal yang masih belum mencapai standar atau target yang telah ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang belum berjalan dengan optimal. Sistem tersebut dibagi ke dalam 3 aspek, yaitu aspek perencanaan, pelaporan implementasi, monitoring dan evaluasi (monev). Kendala utama yang dihadapi dalam membentuk suatu sistem

akuntabilitas kinerja yang optimal terletak pada indikator-indikator perencanaan yang belum sinkron dan terukur. Indikator yang sinkron dan terukur menjadi penting dalam tahapan-tahapan sistem pemerintahan karena indikator tersebut menunjukkan keterkaitan antar tahapan dan keterukuran proses perencanaan hingga pengawasan program atau kegiatan. Apabila indikator suatu program dapat tersinkronisasi dan terukur, maka dapat tercipta pelayanan publik yang baik karena tujuan dari program tersebut menjadi lebih jelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya indikator yang baik, maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Magelang akan menjadi belum optimal yang dapat menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Magelang.

Sistem manajemen pemerintahan merupakan suatu bentuk inovasi birokrasi yaitu dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengorganisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut, maka proses pengelolaan SDM akan menjadi lebih mudah. Pengelolaan SDM dengan memanfaatkan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pegawai dalam rangka pelayanan publik. Salah satu upaya untuk mendorong kualitas pelayanan publik tersebut adalah melalui pelaksanaan pembangunan berbasis *Smart City*.

Konsep *Smart City* merupakan tuntutan masyarakat dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah dan layanan publik, peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat, solusi bagi permasalahan masyarakat, publikasi potensi daerah, dan percepatan pembangunan.

Lemahnya pelaksanaan penegakan peraturan daerah (perda) di Kabupaten Magelang juga mengindikasikan belum optimalnya pelayanan publik sebagai bentuk supremasi hukum. Suatu perda disusun sebagai sebuah regulasi yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di suatu wilayah. Penegakan perda harus didukung oleh komitmen pemerintah daerah yang kuat dan kerja sama lintas sektoral. Komitmen pemerintah daerah dapat diwujudkan dengan terus memfasilitasi pihak-pihak terkait dalam menjalankan tugas penegakan perda. Sedangkan kerjasama lintas sektoral dan stakeholder bertujuan untuk terbentuknya kesepakatan terkait peraturan-peraturan yang sudah disepakati, sehingga pelanggaran perda dapat diminimalisasi. Saat ini, komitmen pemerintah Kabupaten Magelang dalam penegakan perda masih belum optimal, mengingat masih adanya otoritas penegak perda yang belum difasilitasi dengan baik dan komunikasi pihak-pihak terkait penegakan perda masih belum optimal. Apabila penegakan perda dapat berjalan dengan baik, maka pelayanan publik di Kabupaten Magelang menjadi lebih optimal karena ketenteraman dan ketertiban umum menjadi lebih kondusif.

Fungsi penelitian dan pengembangan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan di lingkungan pemerintahan melalui penelitian dan pengembangan penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu,

dan berkesinambungan. Penguatan fungsi penelitian dan pengembangan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Magelang menjadi penting karena pada zaman modern ini, diperlukan berbagai inovasi dan terobosan baru agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya. Fungsi penelitian dan pengembangan yang belum berjalan dengan optimal dapat menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan menjadi kurang tingkat efektifitas dan efisiensinya. Produk dari penelitian dan pengembangan tersebut juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Magelang.

Pelayanan perizinan merupakan salah satu pelayanan publik yang esensial. Hampir seluruh aspek membutuhkan izin dalam pelaksanaannya, yang berarti hampir seluruh elemen masyarakat berurusan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perizinan. Kabupaten Magelang memiliki permasalahan tersendiri terkait perizinan, yaitu belum optimalnya pelayanan perizinan terpadu. Pelayanan perizinan terpadu adalah proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Hal tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen perizinan. Dengan pelayanan perizinan terpadu yang optimal dapat meningkatkan nilai investasi karena iklim investasi yang lebih terjaga.

Kendala yang kedua adalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan adanya kendala dalam menciptakan aparatur yang profesional, maka kualitas dan kuantitas ASN mutlak untuk ditingkatkan. Hal tersebut berkaitan dengan manajemen ASN. Manajemen ASN terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu *recruitment*, *promotion*, dan *utilization* (pemanfaatan). Apabila ketiga aspek tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka kuantitas dan kualitas ASN dapat meningkat. Saat ini, Kabupaten Magelang mengalami masalah terkait dengan kualitas dan kuantitas ASN. Dari segi kualitas, masih ada pegawai yang belum memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Adapun dari segi kuantitas, Pemerintah Kabupaten Magelang masih mengalami kekurangan jumlah ASN. Kurangnya kualitas dan kuantitas ASN tersebut menjadi tantangan tersendiri yang wajib diselesaikan, selain pembenahan kelembagaan dan sistem demi terwujudnya pelayanan publik yang optimal.

Smart City di era industri 4.0 sudah merupakan tuntutan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan publik, peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat, publikasi potensi daerah, dan percepatan pembangunan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah didasarkan pada misi kedua Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, yaitu meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Adapun sasarannya meliputi meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan, peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, peningkatan nilai PDRB sektor industri pengolahan, peningkatan nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah, seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat terkait sektor moneter maupun sektor riil.

Beberapa kondisi yang berpotensi berpengaruh terhadap pelambatan perekonomian global yang perlu diwaspadai, antara lain meliputi kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, pemulihan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia, kelesuan transaksi perdagangan dunia, meningkatnya daya saing eksternal serta ketergantungan bahan baku impor industri manufaktur dan produk konsumsi masyarakat.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku dari tahun 2013 – 2017 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2013, PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku sebesar Rp.19,602 triliun. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 11,84% menjadi Rp.21,923 triliun dan meningkat menjadi Rp.24,148 triliun pada tahun 2015 atau mengalami kenaikan sebesar 10,15 %. Pada tahun 2016 naik sebesar 8,12% menjadi Rp.26,108 triliun, sedangkan tahun 2017 naik sebesar 7,42 % menjadi Rp.28,045 triliun.

PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2013 sebesar Rp.17,020 triliun dan pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp.17,936 triliun atau mengalami kenaikan 5,38 %. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 5,18% menjadi Rp.18,864 triliun dan tahun 2016 naik sebesar 5,37% menjadi Rp.19,876 triliun, sedangkan tahun 2017 naik sebesar 5,06% menjadi 20,882 triliun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017

No	Tahun	PDRB (juta Rp.)	
		ADHB	ADHK 2010
1	2013	19.602.844,86	17.020.755,61
2	2014	21.923.411,31	17.936.288,38
3	2015	24.148.644,16	18.864.651,97
4	2016	26.108.949,06	19.876.744,24
5	2017	28.045.174,00	20.882.801,03

Sumber : BPS, 2018.

b. Peranan Sektor dalam Pembentukan PDRB

Kekuatan perekonomian Kabupaten Magelang terletak pada tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan, serta sektor perdagangan besar dan eceran. Kontribusi PDRB yang terbesar pada tahun 2017 adalah sektor pertanian sebesar 21,78%, disusul sektor industri pengolahan sebesar 21,69%, dan sektor perdagangan sebesar 13,75%.

Apabila dikelompokkan terdapat 3 (tiga) sektor PDRB, yaitu primer, sekunder, dan tersier, di mana pada tahun 2017 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 42,53%, disusul sektor sekunder sebesar 31,28%, dan sektor primer sebesar 26,19%. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2013-2017, kontribusi sektor primer semakin menurun dari tahun ke tahun, dari tahun 2013 sebesar 27,84% menjadi 26,19% pada tahun 2017.

Kontribusi sektor sekunder dari tahun 2013–2017 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 kontribusi sektor sekunder sebesar 30,6% dan meningkat menjadi 31,29% pada tahun 2016. Adapun untuk tahun 2017, kontribusi sektor sekunder turun menjadi 31,28%.

Kontribusi sektor tersier dalam pembentukan PDRB Kabupaten Magelang merupakan penyumbang tertinggi kontribusi dan mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Tahun 2013 sampai 2014 kontribusi sektor tersier menurun dari sebesar 41,58% menjadi 41,12%. Sementara itu, tahun 2015 sampai 2017 kontribusi sektor tersier cenderung meningkat, yaitu 40,80% pada tahun 2015, sebesar 41,35 % pada tahun 2016 dan 42,53% pada tahun 2017.

Tabel 3.2
 Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017

NO	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Primer	27,84	27,85	27,97	27,36	26,19
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,97	23,63	23,49	22,99	21,78
B	Pertambangan dan Penggalian	3,87	4,22	4,48	4,37	4,41
2	Sekunder	30,6	31,03	31,23	31,29	31,28
C	Industri Pengolahan	21,24	21,62	21,82	21,89	21,69

NO	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi	9,21	9,27	9,28	9,27	9,46
3	Tersier	41,58	41,12	40,80	41,35	42,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,25	13,60	13,35	13,47	13,75
H	Transportasi dan Pergudangan	3,20	3,33	3,40	3,37	3,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,96	4,02	4,06	4,20	4,28
J	Informasi dan Komunikasi	3,26	3,21	3,13	3,14	3,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	2,57	2,63	2,74	2,81
L	Real Estate	1,82	1,83	1,85	1,85	1,88
M,N	Jasa Perusahaan	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,85	3,67	3,62	3,61	3,56
P	Jasa Pendidikan	5,66	5,82	5,74	5,83	6,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,77	0,78	0,80	0,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,00	2,07	2,01	2,10	2,17

Sumber : BPS, 2018.

c. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2013 sebesar Rp.16,05 juta, meningkat menjadi Rp.17,77 juta pada tahun 2014 dan meningkat lagi menjadi Rp.19,39 juta pada tahun 2015. Adapun tahun 2016 PDRB per kapita sebesar Rp.20,77 juta dan naik menjadi Rp.22,11 juta pada tahun 2017. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

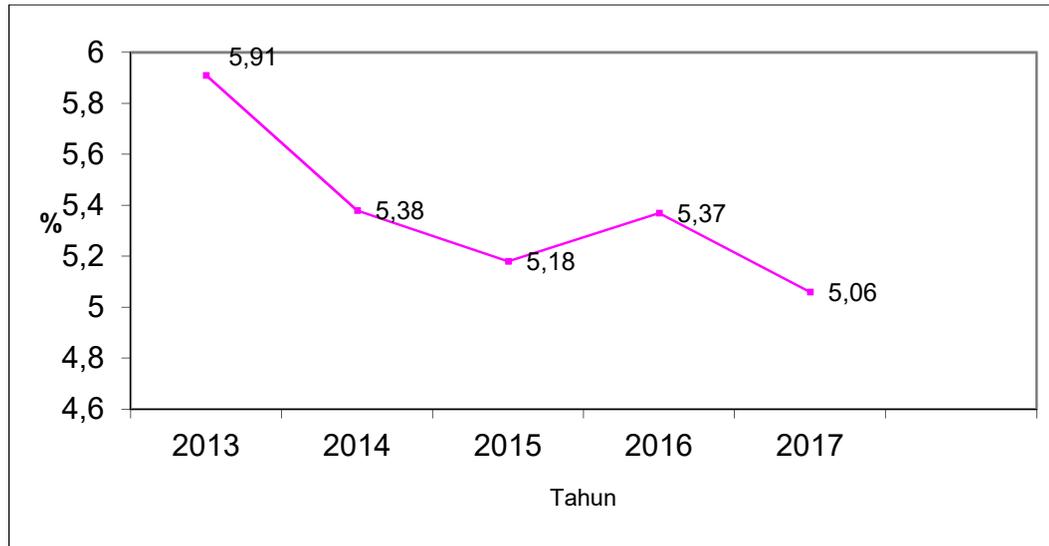
Tabel 3.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita
Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017

No	Tahun	PDRB Per Kapita (Rp.)
1	2013	16,05
2	2014	17,77
3	2015	19,39
4	2016	20,77
5	2017	22,11

Sumber : BPS, 2018.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari tahun 2013 – 2017 mendasari pada perhitungan PDRB yang sudah diperbarui, mengalami fluktuasi dari 5,91 % pada tahun 2013, lalu 5,38 % pada tahun 2014, kemudian melambat menjadi 5,18 % pada tahun 2015, naik menjadi 5,37% pada tahun 2016 dan tahun 2017 turun menjadi 5,06%.



Sumber : BPS, 2018.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang 2013-2017

Tabel 3.4
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang
Tahun 2013 – 2017

NO	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,89	1,75	3,54	3,32	1,86
2	Pertambangan dan Penggalian	5,90	4,52	1,71	2,94	4,20
3	Industri Pengolahan	10,93	7,44	5,52	5,79	4,53
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,65	3,32	1,50	4,84	4,91
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,29	1,81	1,33	2,17	6,51
6	Konstruksi	5,42	5,08	5,93	6,32	6,23
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,13	3,52	3,99	5,28	6,09
8	Transportasi dan Pergudangan	8,56	8,55	8,54	6,61	6,13
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,40	7,5	6,60	6,02	6,35
10	Informasi dan Komunikasi	7,95	13,04	9,45	8,09	11,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,39	5,23	8,44	9,06	5,89
12	Real Estate	7,7	7,18	7,35	6,56	6,49
13	Jasa Perusahaan	12,06	8,36	9,74	10,18	8,72
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,73	1,67	4,24	2,22	2,57
15	Jasa Pendidikan	9,41	10,17	7,10	6,45	7,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,10	11,78	6,92	9,78	8,60
17	Jasa lainnya	9,22	8,51	3,29	8,64	8,79

NO	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
	PDRB	5,91	5,38	5,03	5,40	5,06

Sumber : BPS, 2018.

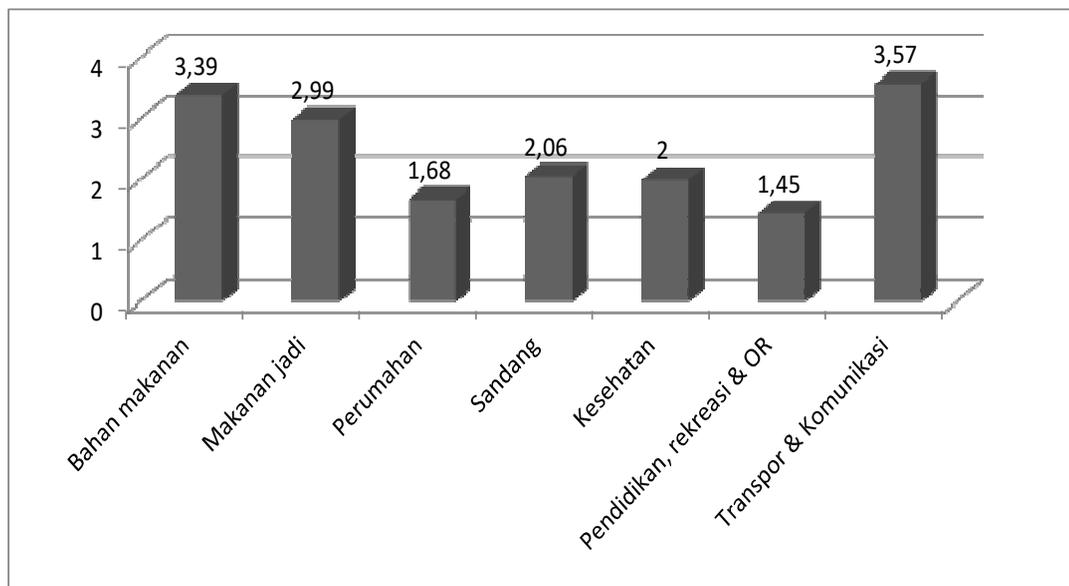
e. Inflasi

Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi dan distribusi barang juga jasa, serta peredaran uang di suatu daerah.

Selama tahun 2018, laju inflasi di Kabupaten Magelang mencapai 2,66 persen, lebih rendah dibanding tahun 2017 yang laju inflasinya sebesar 3,6 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 2,82 persen dan lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional sebesar 3,13 persen.

Selama periode Januari-Desember 2018 dapat dilihat bahwa inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari 2018 sebesar 0,95 persen. Inflasi terendah terjadi pada Agustus 2018 sebesar minus 0,22 persen (terjadi deflasi).

Inflasi menurut kelompok pengeluaran selama periode Januari-Desember 2018 bisa dilihat dalam grafik. Laju inflasi pada tahun 2018 tertinggi pada kelompok transportasi sebesar 3,57%, Kelompok bahan makanan 3,39%, kelompok makanan jadi sebesar 2,99%, kemudian kelompok sandang sebesar 2,06%, diikuti kelompok kesehatan 2,00%, kelompok perumahan sebesar 1,68%, dan terakhir kelompok pendidikan sebesar 1,45%.



Sumber : BPS, 2018.

Gambar 3.2

Grafik Laju Inflasi Tahun 2018 Menurut Kelompok Pengeluaran

Keberhasilan pemerintah menekan laju inflasi pada level satu digit menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 masih dapat dikendalikan. Kondisi ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada kisaran angka 4%.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Meskipun diharapkan perekonomian tahun 2020 akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun masih tetap penuh dengan tantangan karena diperkirakan perekonomian global masih belum sepenuhnya kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi yang optimal.

Melihat kondisi ini maka tantangan ke depan dalam pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita, sehingga kesejahteraan masyarakat turut meningkat. Menyikapi hal ini maka diperlukan antisipasi terjadinya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (sektor industri/pengolahan) dan sektor tersier (sektor jasa). Sinergi antara sektor primer, sekunder dan tersier dalam rangka pemberdayaan potensi lokal merupakan isu penting untuk dikembangkan.

Pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Magelang diharapkan masih menunjukkan prospek yang positif. Target indikator ekonomi makro tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Target Indikator Makro Ekonomi Tahun 2020

No.	Indikator Ekonomi	Target
1	Pertumbuhan PDRB ADHK	5,1 – 5,6 %
2	PDRB Perkapita ADHB	Rp. 26,70 Juta
3	Inflasi	3,5 ± 1 %

Sumber : Bappeda dan Litbangda, 2018.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Salah satu elemen penting dalam proses pembangunan daerah adalah ketersediaan anggaran. Dokumen RKPD merupakan skenario kebijakan pembangunan sebagai representasi dari rencana kerja pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan tahunan. Implementasi RKPD yang dalam implementasinya akan didukung oleh alokasi anggaran dari berbagai sumber dana yang meliputi APBD Kabupaten Magelang, APBD Provinsi, dan APBN serta peran swasta maupun swadaya masyarakat.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan ada kenaikan setiap tahun.

Untuk meningkatkan kapasitas PAD dan dalam upaya kedepan untuk memperkuat kemampuan fiskal, perlu dilakukan :

- a. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;

- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas atau pengelola pajak daerah;
- c. Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti system pembayaran dan pelaporan pajak secara online (e-SPTPD, SIMBPHTB, SISMIOP, pemungutan pajak MBLB dengan teknologi informasi atau komputerisasi);
- d. Sosialisasi kepada masyarakat khususnya para wajib pajak daerah;
- e. Peninjauan kembali terhadap dasar perhitungan perpajakan daerah seperti tarif, NJOP dsb;
- f. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
- g. Peningkatan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal;
- h. Pengelolaan manajemen kas yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang menganggur untuk diinvestasikan seperti deposito untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Realisasi pendapatan tahun 2017-2018 dan target pendapatan daerah tahun 2019-2020 yang meliputi PAD, perimbangan dan lain-lain pendapatan yang Sah, dapat dilihat dalam tabel 3.6.

Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan Tahun 2017-2018 dan Target 2019
serta Proyeksi Tahun 2020-2021

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Target 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	403.561.238.310	325.098.327.236	427.614.179.270	399.230.445.000	427.176.576.150
1	Pajak Daerah	112.344.030.430	124.444.072.963,00	139.331.510.000	153.812.696.000	171.160.239.150
2	Retribusi Daerah	20.445.297.126	18.186.191.392,00	33.972.851.270	45.249.771.000	37.940.604.000
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.805.304.738	28.634.358.666,00	25.560.305.000	24.774.158.000	29.044.666.000
4	Lain-lain PAD Yang Sah	249.966.606.016	153.833.704.215,00	228.749.513.000	175.393.820.000	189.031.067.000
II	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	1.407.243.138.226	1.398.132.841.570	1.538.049.441.000	1.570.286.969.800	1.576.048.341.818
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	45.499.673.539	36.431.591.975,00	36.150.173.000	37.750.315.832	37.865.526.116
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.060.027.733.000	1.060.540.612.000	1.091.002.259.000	1.169.421.171.968	1.175.067.333.702
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	257.495.109.687	301.160.637.595	363.115.482.000	363.115.482.000	363.115.482.000
4	Dana Insentif Daerah (DID)	44.220.622.000		47.781.527.000		
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	460.531.639.322	581.273.629.232	644.163.935.000	653.267.944.000	663.878.308.000
1	Hibah	3.801.511.675	91.762.241.127	109.619.800.000	109.619.800.000	109.619.800.000
2	Dana Bagi Hasil Pajak dr Prov. Dan Pemerintah Daerah Lainnya	151.472.357.647	154.791.322.105	151.472.358.000	160.576.367.000	171.186.731.000
3	Dana penyesuaian dan otsus	-		-	-	-
4	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemerintah Daerah Lainnya	15.643.871.000	9.359.234.000	-	-	-
	Dana Desa	289.613.899.000	325.360.832.000	383.071.777.000	383.071.777.000	383.071.777.000
	J U M L A H	2.271.336.015.858	2.304.504.798.038	2.609.827.555.270	2.622.785.358.800	2.667.103.225.968

Sumber : BPPKAD, 2019

Kenaikan PAD Tahun 2018 dibandingkan dengan PAD Tahun 2017 tersebut berasal dari :

1. Pajak daerah mengalami peningkatan dikarenakan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah atau pendataan wajib pajak baru dan pemutakhiran subjek dan objek pajak serta dilaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak untuk peningkatan kesadaran dalam melaporkan omzet dan pembayaran pajak;
2. Retribusi Daerah mengalami penurunan dikarenakan pengaruh yang signifikan dari retribusi pelayanan pasar karena pada Tahun 2017 ada realisasi peningkatan yang sangat besar dari retribusi penempatan kios pertama di Pasar Secang, sedangkan pada Tahun 2018 tidak ada kontribusi dari izin penempatan kios pertama di Dinas Perdagangan, Koperasi UMKM;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan disebabkan meningkatnya bagi hasil laba BUMD terutama di Sektor Perbankan seperti Bapas, Bank Jateng dan BPR/BKK ini menunjukkan semakin membaiknya manajemen pengelolaan perbankan.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan disebabkan beberapa faktor, antara lain penerimaan bunga deposito yang mengalami penurunan sangat signifikan ini menggambarkan bahwa perencanaan penganggaran belanja Tahun 2018 lebih baik dari Tahun 2017 dengan kata lain menurunnya SILPA Tahun 2018 apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun 2017.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Sistem ini memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem anggaran daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud, ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kerjanya.

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Penggunaan dana belanja tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, partai politik, serta belanja tidak terduga.

Kebijakan belanja pegawai diasumsikan pada tahun 2020 sesuai dengan pidato presiden pada Bulan Agustus 2018 pada penyampaian Nota Keuangan diasumsikan kenaikan gaji pegawai sebesar 5 % dan dianggarkan pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji 13 untuk PNS dan CPNS, dialokasikan juga gaji CPNS sebanyak 259 beserta gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya bagi CPNS. Asumsi ini belum menganggarkan biaya pegawai yang bersumber dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Surat Kementerian PAN & BR Nomor B/212/FP3K/M.SM.01.00/2019, bahwa penganggaran gaji dan tunjangan P3K dibiayai oleh APBD.

Dalam rangka pelaksanaan pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan

belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengalokasikan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa guna percepatan pembangunan di desa sesuai kewenangannya.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang.

Rincian perkembangan alokasi belanja dari tahun 2017 s.d. 2019 dan proyeksi tahun 2020-2021 disajikan dalam tabel 3.7.

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Tahun 2017 - 2018, Target Tahun 2019
dan Proyeksi Tahun 2020 - 2021

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Target 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
2	BELANJA DAERAH					
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1.440.436.939.257	1.469.755.920.226	1.618.062.669.100	1.646.019.388.290	1.648.886.034.690
	1 Belanja Pegawai	862.787.039.594	843.116.457.075	900.637.044.000	880.097.036.420	880.097.036.420
	2 Belanja Bunga	-	-	-	-	-
	3 Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
	4 Belanja Hibah	38.032.365.000	55.322.664.784	65.877.835.000	71.312.070.000	73.224.960.000
	5 Belanja Bantuan Sosial	41.991.275.000	40.944.365.000	25.804.725.000	43.343.750.000	43.343.750.000
	6 Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota/Desa	13.864.123.170	15.546.920.254	19.200.797.000	21.852.832.770	22.806.589.170
	7 Belanja Bantuan Keuangan	479.610.746.506	513.879.513.113	601.542.268.100	624.413.699.100	624.413.699.100
	8 Belanja Tidak Terduga	4.151.389.987	946.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
2.2.	Belanja Langsung	1.011.004.215.484	1.018.093.312.487	1.052.828.042.000	1.078.844.532.498	1.074.028.757.505
	Belanja pegawai	82.845.345.123	82.099.898.924	113.682.955.595		
	Belanja barang dan jasa	424.757.302.457	434.066.204.801	541.337.529.859		
	Belanja modal	503.401.567.904	501.927.208.762	397.807.556.546		
	Jumlah Belanja	2.451.441.154.741	2.487.849.232.713	2.670.890.711.100	2.724.863.920.788	2.722.914.792.195

Sumber : BPPKAD, 2019.

Pada prinsipnya, kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas serta efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan untuk menutup beban hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga, dan apabila memungkinkan dapat pula dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMD atau investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha dan pemberian pinjaman daerah. Sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan. Pada Tahun 2020, penyertaan modal belum mengakomodir penyertaan modal untuk Bapas dan PDAM.

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2017 s.d. 2021 dapat dilihat dalam tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8
Realisasi Pembiayaan Tahun 2017-2018, Target Tahun 2019,
dan Proyeksi Tahun 2020-2021

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
3.1.	Penerimaan Pembiayaan daerah	521.583.993.264	434.704.300.294	71.223.715.830	117.782.561.988	71.515.566.227
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	457.569.190.778	303.453.312.294	71.223.715.830	117.782.561.988	71.515.566.227
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	63.994.404.086	131.250.988.000	0	0	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	20.398.400	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	0
3.1.7	Penerimaan hasil penarikan	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	521.583.993.264	434.704.300.294	71.223.715.830	117.782.561.988	71.515.566.227
3.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	38.025.542.086	25.755.000.000	10.204.000.000	15.704.000.000	15.704.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	24.723.542.086	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	13.302.000.000	25.755.000.000	10.204.000.000	5.704.000.000	5.704.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	38.025.542.086	25.755.000.000	10.204.000.000	15.704.000.000	15.704.000.000
	Pembiayaan neto	483.558.451.178	408.949.300.294	61.019.715.830	102.078.561.988	55.811.566.227
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkeanaan (SILPA)					

Sumber : BPPKAD, 2019.

Secara keseluruhan, postur APBD Tahun 2017 – 2018, target tahun 2019 dan Proyeksi tahun 2020-2021 dapat dilihat dalam tabel 3.9.

Tabel 3.9
Realisasi APBD Tahun 2017-2018, Target Tahun 2019, dan Proyeksi Tahun 2020-2021

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018 *)	Target 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	403.561.238.310	325.098.327.236	427.614.179.270	399.230.445.000	427.176.576.150
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	112.344.030.430	124.444.072.963	139.331.510.000	153.812.696.000	171.160.239.150
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.445.297.126	18.186.191.392	33.972.851.270	45.249.771.000	37.940.604.000
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.805.304.738	28.634.358.666	25.560.305.000	24.774.158.000	29.044.666.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	249.966.606.016	153.833.704.215	228.749.513.000	175.393.820.000	189.031.067.000
1.2	Bagian Dana Perimbangan	1.407.243.138.226	1.398.132.841.570	1.538.049.441.000	1.570.286.969.800	1.576.048.341.818
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	45.499.673.539	36.431.591.975	36.150.173.000	37.750.315.832	37.865.526.116
1.2.2	D A U	1.060.027.733.000	1.060.540.612.000	1.091.002.259.000	1.169.421.171.968	1.175.067.333.702
1.2.3	D A K	257.495.109.687	301.160.637.595	363.115.482.000	363.115.482.000	363.115.482.000
1.2.4	DID	44.220.622.000		47.781.527.000		
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	460.531.639.322	581.273.629.232	644.163.935.000	653.267.944.000	663.878.308.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.801.511.675	91.762.241.127	109.619.800.000	109.619.800.000	109.619.800.000
1.3.2	Dana Darurat					
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lain	151.472.357.647	154.791.322.105	151.472.358.000	160.576.367.000	171.186.731.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus					
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda Lain	15.643.871.000	9.359.234.000			
1.3.6	Dana Desa	289.613.899.000	325.360.832.000	383.071.777.000	383.071.777.000	383.071.777.000
A	JUMLAH PENDAPATAN	2.271.336.015.858	2.304.504.798.038	2.609.827.555.270	2.622.785.358.800	2.667.103.225.968

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018 *)	Target 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.440.436.939.257	1.469.755.920.226	1.618.193.073.200	1.646.019.388.290	1.648.886.034.690
2.1.1	Belanja Pegawai	862.787.039.594	843.116.457.075	900.637.044.000	880.097.036.420	880.097.036.420
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	38.032.365.000	55.322.664.784	65.877.835.000	71.312.070.000	73.224.960.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	41.991.275.000	40.944.365.000	25.804.725.000	43.343.750.000	43.343.750.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov. Kab. Kota dan Desa	13.864.123.170	15.546.920.254	19.329.767.100	21.852.832.770	22.806.589.170
2.1.7	Belanja Bant. Keuangan kepada Provinsi/Kab dan Pemerintah Desa.	479.610.746.506	513.879.513.113	601.543.702.100	624.413.699.100	624.413.699.100
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.151.389.987	946.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.440.436.939.257	1.487.399.242.000	1.618.062.669.100	1.646.019.388.290	1.648.886.034.690
2.2	Belanja Langsung	1.011.004.215.485	1.018.093.312.487	1.052.828.042.000	1.078.844.532.498	1.074.028.757.505
2.2.1	Belanja Pegawai	82.845.345.123	82.099.898.924	113.682.955.595		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	424.757.302.457	434.066.204.801	541.337.529.859		
2.2.3	Belanja Modal	503.401.567.905	501.927.208.762	397.807.556.546		
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1.011.004.215.485	1.018.093.312.487	1.052.828.042.000	1.078.844.532.498	1.074.028.757.505
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	2.451.441.154.742	2.487.849.232.713	2.671.021.115.200	2.724.863.920.788	2.722.914.792.195
	SURPLUS/(DEFISIT)	(180.105.138.884)	(183.344.434.675)	(61.193.559.930)	(102.078.561.988)	(55.811.566.227)
3.1.	Penerimaan Pembiayaan daerah	521.583.993.264	434.704.300.294	71.397.559.930	117.782.561.988	71.515.566.227
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	457.569.190.778	303.453.312.294	71.397.559.930	117.782.561.988	71.515.566.227

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018 *)	Target 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	63.994.404.086	131.250.988.000	0	0	0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	20.398.400				
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah					
3.1.7	Penerimaan Hasil Penarikan					
E	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	521.583.993.264	434.704.300.294	71.397.559.930	117.782.561.988	71.515.566.227
3.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	38.025.542.086	25.755.000.000	10.204.000.000	15.704.000.000	15.704.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	24.723.542.086			10.000.000.000	10.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	13.302.000.000	25.755.000.000	10.204.000.000	5.704.000.000	5.704.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang					
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah					
F	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	38.025.542.086	25.755.000.000	10.204.000.000	15.704.000.000	15.704.000.000
	Pembiayaan Netto	483.558.451.178	408.949.300.294	61.193.559.930	102.078.561.988	55.811.566.227
G	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	303.453.312.294	225.604.865.619			

*) *Belum diaudit*

Sumber : BPPKAD, Bappeda dan Litbangda, 2019.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020

Tahun 2020 adalah tahun perencanaan pertama RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Dalam penyusunan dokumen RKPD tahun 2020 berpedoman mengacu kepada (1) permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, (2) hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2018, (3) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024, serta (4) arah dan prioritas kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Visi Kabupaten Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Maju dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”. Adapun Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata, dalam terminologi jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*. Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir-batin, jasmani-rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.
2. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang Berdaya Saing, yang dimaksud adalah kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan ditengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.
3. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang Amanah, yang dimaksud adalah keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan *transparansi, partisipasi, inovasi* dan *akuntabel*, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahteraan Berakhlak Mulia

2. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pencapaian perwujudan visi dan misi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, dijabarkan dalam Tujuan dan sasaran pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) tujuan dan 15 (lima belas) sasaran daerah sebagaimana uraian berikut :

1. Tujuan pertama adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran :
 - a) meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan;
 - b) meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan.
2. Tujuan kedua adalah meningkatnya paritas daya beli masyarakat, dengan sasaran:
 - a) menurunnya jumlah PMKS;
 - b) meningkatnya ketahanan pangan daerah;
 - c) menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
 - d) meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas.
3. Tujuan ketiga adalah meningkatnya pembangunan berbasis gender, dengan sasaran meningkatnya keberdayaan gender.
4. Tujuan keempat adalah meningkatnya daya saing daerah, dengan sasaran :
 - a) tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik;
 - b) meningkatnya cakupan layanan infrastruktur;
 - c) meningkatnya daya saing ekonomi daerah.
5. Tujuan kelima meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan *akuntable*, dengan sasaran:
 - a) meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
 - b) meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - c) meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;
 - d) meningkatnya kualitas pelayanan publik;
 - e) meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian.

Selengkapnya keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Magelang
Tahun 2020

VISI: KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH						
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja tujuan dan sasaran	Satuan	Target	
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka (0-100)	69,34	
		Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan;	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,86	
			Harapan Lama Sekolah	tahun	12,76	
			Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	persen	94,41	
			Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan.	Angka Harapan Hidup	tahun	73,52
	Meningkatnya paritas daya beli masyarakat		. Inflasi	persen	2,5-4,5	
			Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.400,64	
			.Angka Kemiskinan	persen	9,93	
		Menurunnya jumlah PMKS;	Persentase penurunan PMKS	persen	0,58	
			Meningkatnya ketahanan pangan daerah;	Indeks Ketahanan Pangan	Angka (0-100)	78,42
			Meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas	Cakupan hunian layak dan berkualitas	persen	63,87
			Menurunnya tingkat pengangguran terbuka;	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	2,4-3,0
	Meningkatnya pem-bangunan berbasis gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka (0-100)	93,21	
		Meningkatnya	Indeks	Angka (0-	69,33	

VISI: KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH					
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja tujuan dan sasaran	Satuan	Target
		keberdayaan gender	Pemberdayaan Gender (IDG Kabupaten Layak Anak	100)	Nindya
Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya daya saing daerah		Cakupan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan	persen	66,95
			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	5,1-5,6
			PDRB Perkapita	juta rupiah	26,70
		Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik;	IKLH	angka (0-100)	72,12
		Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur;	Cakupan Pembangunan Wilayah	persen	61,79
		Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan	milyar rupiah	255,56
			Peningkatan nilai PDRB sektor pertanian	milyar rupiah	150,89
			Peningkatan nilai PDRB sektor perindustrian pengolahan	milyar rupiah	372,47
			Peningkatan nilai PDRB sektor pariwisata	milyar rupiah	52,32
			Pertumbuhan Investasi	persen	5,00
	Cakupan ketentraman & ketertiban masyarakat		persen	82,97	
	Indeks Desa Membangun		angka (0-1)	0,68	
Meningkatkan	Meningkatnya		Indeks Reformasi	persen	63,82

VISI: KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH					
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja tujuan dan sasaran	Satuan	Target
Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah	tata kelola pemerintah-an yang bersih dan <i>akuntabel</i>		Birokrasi (IRB)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan ;	Nilai AKIP	angka (0-100) (huruf)	63,03 (B)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;	Indeks SPBE	angka (0-5)	2
		Meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;	Opini BPK	-	WTP
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik;	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka (0-100)	84,23
		Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian.	Indeks Merit System	angka (0-1)	0,55

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian visi melalui upaya pengembangan misi, maka setiap misi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah secara sinergis, berkesinambungan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian misi adalah sebagai berikut.

- a. Memperhatikan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional, sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, yaitu :
 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
 3. Nilai Tambah Sektor Rill, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;

4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup;
 5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.
- b. Mendasarkan arah dan prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 yang diarahkan pada “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia” dengan prioritas sebagai berikut:
1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
 2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah;
 3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
 4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional tahun 2020 dan arah dan prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2020, maka prioritas pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2020 dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan akses layanan Pendidikan
- b. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Meningkatkan kualitas Puskesmas dan Rumah sakit dalam pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan
- e. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau
- f. Meningkatkan Ketersediaan Pangan
- g. Meningkatkan infrastruktur jaringan jalan
- h. Meningkatkan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan
- i. Meningkatkan layanan terhadap masyarakat
- j. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memenuhi standar keamanan informasi

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magelang tahun 2020 diarahkan untuk “Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung Peningkatan kualitas SDM, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi”, dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan :

- a. Pemenuhan akses layanan Pendidikan, difokuskan kepada :
 1. pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan siswa berprestasi;
 2. meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan;
 3. penyiapan tenaga kerja terdidik yang siap kerja baik melalui pendidikan formal maupun nonformal;
 4. pencapaian wajib belajar 9 tahun;
 5. pendidikan anak usia dini melalui penambahan jumlah lembaga PAUD-HI dan peningkatan persentase lembaga PAUD yang terakreditasi;
 6. penguatan basis data pendidikan; dan
 7. penguatan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan.
 8. Bantuan Pembangunan tempat ibadah

- b. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, difokuskan pada :
 1. meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap pada sekolah swasta dan negeri;
 2. peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
 3. Peningkatan kesejahteraan guru ngaji
- c. Meningkatkan kualitas Puskesmas dan Rumah sakit dalam pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan difokuskan pada :
 1. mengoptimalkan layanan puskesmas rawat inap;
 2. peningkatan pelayanan rumah sakit umum daerah;
 3. peningkatan sarana prasarana puskesmas dan rumah sakit
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan
 1. bantuan ambulan desa;
 2. peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan;
 3. peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
 4. pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
 5. peningkatan upaya kesehatan masyarakat;
 6. optimalisasi pelayanan kesehatan bagi warga miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan difabel, Jamkes “Semesta
- e. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau
 1. RTLH *Plus* untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin
 2. pemenuhan akses air bersih melalui pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) perkotaan/pedesaan;
 3. pemenuhan akses sanitasi layak bagi masyarakat
 4. penataan hunian kumuh
- f. Meningkatkan Ketersediaan Pangan, difokuskan pada :
 1. pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk pertanian organik;
 2. bantuan modal dan alat bagi warga miskin (Petani)
- g. Meningkatkan infrastruktur jaringan jalan, difokuskan pada :
 1. peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana ekonomi);
 2. peningkatan aksesibilitas dan konektifitas di seluruh wilayah kabupaten magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah;
 3. pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
- h. Meningkatkan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan, difokuskan pada :
 1. pengelolaan sampah mandiri (3R) dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
 2. penyediaan sarana dan prasarana persampahan;
- i. Meningkatkan layanan terhadap masyarakat
 1. Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel

2. sinergi perencanaan, penganggaran, kepegawaian dan pengawasan
 3. peningkatan layanan publik;
- j. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memenuhi standar keamanan informasi melalui Pengembangan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi serta pengelolaan sarana informatika.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2020 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2020 yaitu:

- a. Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,34
- b. Inflasi sebesar 2,5 – 4,5
- c. Pengeluaran Perkapita Riil yang disesuaikan sebesar 9400,64 ribu rupiah
- d. Angka Kemiskinan turun menjadi sebesar 9,93%
- e. Indek Pembangunan Gender sebesar 93,21
- f. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,1-5,6 %
- g. PDRB Per Kapita sebesar 26,70 juta rupiah
- h. Cakupan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan sebesar 66,95%
- i. Indek Reformasi Birokrasi sebesar 65,53

Rencana pembangunan daerah tahun 2020 juga untuk mewujudkan implementasi Program Unggulan Kabupaten Magelang yaitu:

- a. Peningkatan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan akhlak mulia
- b. Peningkatan pemerataan pendidikan yang seluas-luasnya dan peningkatan mutu pendidikan
- c. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat yang semakin baik dan terjangkau
- d. Penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi
- e. Pemanfaatan sektor unggulan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana public
- g. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat
- h. Peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel
- i. Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
- j. Peningkatan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda untuk berprestasi

Selain itu, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Magelang juga dilakukan untuk mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2020.

Dengan memperhatikan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan nasional tahun 2020 tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten

Magelang telah selaras. Keselarasan tersebut tertuang pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional

	Uraian		Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Jawa Tengah		Prioritas Kabupaten Magelang
	Tema/fokus Pembangunan		Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manu		Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas SDM, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
	Prioritas Pembangunan	1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;	1	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;	1	Pemenuhan akses layanan Pendidikan
				2	Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah;	2	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
						3	Meningkatkan kualitas Puskesmas dan Rumah sakit dalam pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan
						4	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan

	Uraian		Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Jawa Tengah		Prioritas Kabupaten Magelang
						5	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau
		2	Nilai Tambah Sektor Rill, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;	3	Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;	6	Meningkatkan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan
		3	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;			7	Meningkatkan infrastruktur jaringan jalan
		4	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup;			8	Meningkatkan Ketersediaan Pangan
		5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	4	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah	9	Meningkatkan layanan terhadap masyarakat

	Uraian		Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Jawa Tengah		Prioritas Kabupaten Magelang
						10	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memenuhi standar keamanan informasi
	Sasaran Pembangunan						
a.	Pertumbuhan ekonomi		5,3-5,6%		5,4 – 5,7%		5,1 - 5,6
b.	Tingkat Pengangguran Terbuka		4,8-5,1%		4,33%		2,4 – 3,0
c.	Angka kemiskinan		8,5-9,0%		9,81-8,8%		9,93
d.	Rasio gini		0,375-0,380		0,34		'-
e.	Indeks Pembangunan Manusia		72,51		72,00		69,34

4.3 Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD memuat kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diselaraskan dengan sasaran dan/ prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Adapun pokok-pokok pikiran DPRD tersebut yaitu

1. Penyusunan APBD harus tepat waktu.
 - a. APBD Kabupaten Magelang tahun 2018 dan 2019 telah ditetapkan tepat waktu. Diharapkan APBD tahun anggaran 2020 ditetapkan tepat waktu juga. Berkaca dari keterlambatan penetapan APBD tahun anggaran 2017 sehingga pemkab Magelang terkena sanksi dan kehilangan potensi penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan (pada tahun 2016 pemkab mendapat DID sebesar 40 Milyar Rupiah dan tahun 2018 menerima DID sebesar 47 Milyar Rupiah)
 - b. Keterlambatan penetapan APBD akan berpengaruh pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
 - c. Saran DPRD : penyerahan KUA PPAS tahun anggaran 2020 agar tidak terlambat dan diserahkan kepada DPRD paling lambat bulan Juli 2019
2. Pengelolaan Anggaran Belum Maksimal
 - a. APBD tahun anggaran 2018 sebesar 2,7 Triyun Rupiah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 374 Milyar Rupiah
 - b. APBD tahun anggaran 2019 sebesar 2,8 Trilyun Rupiah dan PAD sebesar 426 Milyar Rupiah (proporsi PAD kurang lebih 15%). Proporsi PAD masih rendah untuk itu perlu ditingkatkan.
 - c. Untuk tahun anggaran 2020 PAD harus naik signifikan utamanya yang bersumber dari PBB Perkotaan, PPJU, BPHTB, Retribusi Pasar dan Metrologi, RSUD, BUMD, Menara Telekomunikasi, Parkir dan sebagainya.

- d. Komponen Belanja Modal didalam APBD Tahun Anggaran 2019 baru sekitar 20% dari APBD, idealnya 30%
 - e. Penyerapan anggaran APBD tahun anggaran 2018 sebesar 86,35%
 - f. Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu (SILPA):
 - tahun 2013 sebesar 417 Milyar Rupiah,
 - tahun 2014 sebesar 373 Milyar Rupiah,
 - tahun 2015 sebesar 492 Milyar Rupiah,
 - tahun 2016 sebesar 457 Milyar Rupiah,
 - tahun 2017 sebesar 303 Milyar Rupiah,
 - tahun 2018 kurang lebih 300 Milyar Rupiah
 - g. Besarnya SILPA cerminan APBD kurang sehat, hal ini menggambarkan perencanaan dan kinerja yang kurang baik.
 - h. APBD tahun anggaran 2020 agar dirancang Belanja Modal menjadi 25%. Proporsi belanja modal yang semakin besar menggambarkan keberpihakan APBD kepada masyarakat. Belanja ini digunakan untuk membiayai program kerja yang tertunda dan program kerja strategis bagi public.
3. Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
 - a. WTP sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah oleh BPK
 - b. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, BPK telah memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemkab Magelang. Untuk itu tahun 2019 dan tahun 2020 penghargaan tersebut harus dipertahankan.
 4. Reformasi Birokrasi
 - a. Masih banyaknya keluhan atas kualitas pelayanan, dan lamanya perizinan perlu mendapat perhatian yang serius. Proses ini harus ditata kembali agar Pemkab Magelang menjadi kabupaten yang ramah pelayanan
 - b. Banyaknya kekosongan jabatan dan dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) selama bertahun-tahun, berdampak pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
 - c. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Bupati agar memilih pejabat yang kompeten, berintegritas dan professional
 5. Prioritas Program Pendidikan, kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan
 - a. Alokasikan anggaran yang cukup untuk kesehatan dan pendidikan sebagai urusan wajib
 - b. Sinergi APBD dan Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan utamanya untuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan program pemberdayaan
 6. Prioritas pada bidang unggulan : pertanian, UKM dan pariwisata
 - a. Untuk peningkatan daya saing daerah, difokuskan pada penguatan sentra-sentra produk pertanian, perikanan darat dan UKM
 - b. Untuk pariwisata focus pada penataan obyek wisata unggulan

7. Pembangunan Infrastruktur
 - a. Infrastruktur jalan/jembatan/irigasi harus dalam kondisi baik
 - b. Pemeliharaan infrastruktur jalan evakuasi perlu diperhatikan, mengingat kabupaten Magelang merupakan daerah rawan bencana
 - c. Kualitas bangunan harus baik dan diawasi dengan ketat
 - d. Manajemen proses lelang harus direncanakan dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan
8. Penguatan Pemerintah Desa
 - a. Perencanaan pemerintah desa yang dituangkan dalam RPJMDes harus selaras dengan perencanaan kabupaten yang dituangkan dalam RPJMD
 - b. Fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan anggaran desa harus diintensifkan agar program kerja pemerintah desa sinergis dengan pemerintah kabupaten, serta tercipta tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
9. Pembangunan *Islamic Centre* dan *Sport centre* tahun 2020, sebagai program prioritas Bupati agar direncanakan dengan matang dari sisi kemanfaatan, lokasi dan penganggarannya.
10. Pembangunan Pasar
 - a. Pembangunan Pasar Kaliangkrik di tahun 2019 ini merupakan proyek besar dan strategis. Pastikan program tersebut sudah direncanakan dengan baik dan berjalan sesuai dengan rencana
 - b. Untuk pembangunan program-program besar perlu penanganan matang dan pengawasan serius
 - c. Mendorong revitalisasi pasar tradisional lainnya seperti pasar Borobudur, pasar windusari dan pasar salaman

Disamping catatan penting di atas ada beberapa isu-isu menonjol yang perlu mendapat perhatian Bupati:

1. Penataan Kawasan Borobudur
 - a. Penataan tata ruang dengan menyesuaikan perencanaan kawasan oleh pemerintah pusat
 - b. Penataan pasar, terminal dan PKL yang kondisinya kumuh, hal ini tidak mendukung Borobudur sebagai destinasi pariwisata internasional
2. Rencana Pembangunan Jalan Tol Semarang-Yogya
 - a. Sejauh mana progres rencana pembangunan jalan tol Semarang-Yogya yang trasenya melintasi Kabupaten Magelang
 - b. Pembangunan jalan tol akan berdampak pada pertumbuhan kawasan, untuk itu perlu kajian mendalam agar pembangunan jalan tol bermanfaat bagi perekonomian daerah
3. Pemanfaatan Obyek Wisata Kalibening

Pembangunan obyek wisata kalibening sudah selesai, untuk itu segera difungsikan guna peningkatan daya tarik wisata, pemenuhan kebutuhan rekreatif masyarakat dan peningkatan PAD

4. Pasar Muntilan dan UKM Centre segera difungsikan
 - a. Hasil-hasil pembangunan agar segera difungsikan agar dapat dinikmati masyarakat
 - b. Dengan dibangunnya pasar muntilan diharapkan dapat mengatasi masalah parker, pedagang eyek dan pedagang kaki lima yang berada disekitar pasar Muntilan
 - c. Pasar-pasar yang baru selesai dibangun agar dikelola secara professional dengan menerapkan e-retribusi untuk peningkatan PAD
5. *Smart City*
 - a. Program ini sudah berjalan 2 tahun namun belum dirasakan implementasi/manfaatnya
 - b. Perlu keseriusan dalam pelaksanaannya untuk kepentingan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah
6. Penegakkan aturan Perda
Belum optimalnya penegakkan perda terkait pelanggaran tata ruang dan perizinan toko modern
7. Pemilu tahun 2019
 - a. Diharapkan akan berjalan dengan baik, suasana yang kondusif, aman dan partisipasi masyarakat tinggi.
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) agar netral dan fokus pada program/kegiatan tahun anggaran 2019

DPRD juga mengusulkan agar pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses dan penjangkaran aspirasi masyarakat mendapat perhatian Bupati. Usulan yang diajukan oleh DPRD sebesar 70 Milyar Rupiah dengan komposisi alokasi : Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 50%, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) 30% dan Hibah/Bansos 20%

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2020

Sebagaimana tertuang dalam Bab 3 tentang Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah, pendapatan daerah tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp.2,622 trilyun yang bersumber dari PAD sebesar Rp. 399,230 milyar dan Dana Perimbangan sebesar Rp. 1,570 trilyun, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.653,268 milyar. Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2020.

Rencana pendanaan dan belanja pembangunan daerah tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020

No	Uraian	Rp
A	Belanja Tidak Langsung	1.647.932.278.290
1	Belanja Pegawai	880.097.036.420
2	Belanja Bunga	-
3	Belanja Subsidi	-
4	Belanja Hibah	73.224.960.000
5	Belanja Bantuan Sosial	43.343.750.000
6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov. Kab. Kota dan Desa	21.852.832.770
7	Belanja Bant. Keuangan kepada Provinsi/Kab dan Pemerintah Desa.	624.413.699.100
8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
B	Belanja Langsung	1.076.931.638.598

Mendasarkan kerangka pendanaan tersebut, dijabarkan dalam rencana program prioritas daerah seluruh perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020

5.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program pendidikan sekolah dasar.

Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan BOS SD, Pengembangan Kurikulum SD, Penyelenggaraan MBS SD, Fasilitasi dan Pengembangan SD, Fasilitasi dan Pengembangan Peserta Didik, Pengembangan dan Penjaminan Mutu SD, Peningkatan Mutu

Sarana Prasarana Pendidikan SD,

- b. program pendidikan sekolah menengah pertama
Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan BOS SMP, Pengembangan dan penjaminan mutu SMP, Pengembangan Kurikulum SMP, Fasilitasi dan Pengembangan Peserta Didik SMP, Fasilitasi dan pengembangan SMP, Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SMP, ;
- c. program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
Kegiatan prioritas diarahkan pada Pembelajaran PAUD, Fasilitasi dan pengembangan PAUD, Pendampingan Operasional BOP PAUD, Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C, Peningkatan mutu sarana prasarana Paud dan Dikmas, Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan PAUD dan Dikmas;
- d. program pembinaan guru dan tenaga kependidikan
Kegiatan diarahkan pada Pembinaan GTK, Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Pendidid, Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi, BOSDA untuk Sekolah Negeri, .

2. Kesehatan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pelayanan kesehatan
Kegiatan diarahkan pada Pengadaan Bahan dan Pemeriksaan Laboratorium, Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas, Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin, Jaminan Persalinan, Peningkatan Mutu Pelayanan FKTP, Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Rumah Sakit Kelas D dan C, ;
- b. Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit
Kegiatan diarahkan pada Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah, Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit, Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit, Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit, Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Pembangunan Instalasi Farmasi Kesehatan, ;
- c. program pencegahan dan pengendalian penyakit
Kegiatan diarahkan pada Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Penanggulangan kesehatan Jiwa Masyarakat, Bantuan Operasional Kesehatan, Pencegahan dan pengendalian penyakit TB, HIV/AIDS dan penyakit menular terabaikan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD, Malaria dan Penyakit Zoonosis, Penyelenggaraan Imunisasi;
- d. Program sumber daya kesehatan
Kegiatan diarahkan pada Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan, Pembinaan Pengelolaan BLUD;

- e. program kesehatan masyarakat
Kegiatan diarahkan pada Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pelayanan Gizi Keluarga, Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Lansia;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
Program yang akan dilaksanakan adalah:
- a. program peningkatan akses dan kualitas jalan
Kegiatan diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jalan, Pembangunan dan Peningkatan Pelengkap jalan, Penyediaan dan Pengelolaan Data / Informasi Jalan dan pelengkap jalan, dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik;
 - b. program peningkatan layanan sumber daya air dan jaringan irigasi
Kegiatan diarahkan pada Pengembangan dan Penguatan Pengelola Irigasi dan SDA, Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif, Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi / Pembangunan Jaringan Irigasi, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - c. program peningkatan dan pengembangan bangunan gedung dan AMPL
Kegiatan diarahkan pada Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah, Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pembangunan Sarana Sanitasi, Peningkatan dan Pengembangan Layanan Air Minum, Peningkatan dan Pengembangan Layanan Sanitasi;
 - d. program pengembangan sarana dan prasarana ke-PU-an
Kegiatan diarahkan pada Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ke-PU-an, Fasilitasi dan Pengawasan Jasa Konstruksi, Pengadaan / Pemeliharaan alat - alat laboratorium ke-PU-an;
 - e. program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang
Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah, Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Fasilitasi Informasi Tata Ruang, Fasilitasi Pengadaan Tanah dan Penyusunan Dokumen Ketataruangan;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Program Pengembangan Kawasan Permukiman
Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi dan Penataan Kawasan Permukiman, Penanganan Permukiman Kumuh, Pengendalian Kawasan Permukiman, dan Penyediaan PSU Permukiman;
 - b. program pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman
Kegiatan diarahkan pada Pengendalian Perumahan, Pengembangan Perumahan Akibat Bencana, Pengembangan Perumahan Umum, Khusus dan Swadaya, Perencanaan Perumahan, dan Fasilitasi dan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program Penanggulangan Bencana

Kegiatan diarahkan pada Mitigasi Bencana, Pelatihan pencegahan dan mitigasi, Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Manajemen Pusdalops PB, Manajemen penanganan Darurat Bencana, Manajemen Logistik dan peralatan bencana, Fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi, Pengadaan tanah, huntara dan huntap, Penyusunan Dokumen Penanggulangan Bencana, Manajemen dan perencanaan penanggulangan Bencana,

b. program peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan Politik Daerah, Peningkatan Kewaspadaan Dini Daerah dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, Peningkatan Kesadaran Bela Negara, Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan;

c. program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Kegiatan diarahkan pada Operasi Represif Non Yustisi, Deteksi Dini dan Pengendalian Massa, Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas, Pengamanan Obyek Vital dan Keramaian Daerah, Pengawasan Bupati, Pejabat dan Tamu Penting dan Patroli Wilayah dan Pembinaan Masyarakat;

d. program penegakan perda

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Penanganan Perkara Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah;

e. program penanggulangan kebakaran

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan Penanggulangan Kebakaran, Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran dan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Korban;

6. Sosial

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program penanganan dan perlindungan PMKS

Kegiatan diarahkan pada Rehabilitasi Sosial, Penanganan PMKS Melalui Rumah Singgah, Perlindungan dan Jaminan Sosial;

b. program pemberdayaan sosial

Kegiatan diarahkan pada Penanganan Fakir Miskin, Pemberdayaan Sosial, Fasilitasi Komda Lansia, Optimalisasi Data Kemiskinan, Fasilitasi Program Bantuan Sosial Pangan.

5.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

a. program pengembangan kompetensi, penempatan dan perluasan

kesempatan kerja

Kegiatan diarahkan pada Pelatihan Ketrampilan dan Sertifikasi Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan.

- b. Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja
Kegiatan diarahkan pada Pembinaan Hubungan Industrial, Pembinaan Pengupahan, Pembinaan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Peningkatan Kompetensi Pekerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Kegiatan diarahkan pada Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Mitra Gender (Advokasi PUG), Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), Percepatan Pencapaian Menuju Kabupaten Layak Anak, dan Penanganan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

3. Pangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program peningkatan ketahanan pangan. Kegiatan diarahkan pada Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Pembinaan dan Pengembangan Kemandirian Pangan, Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Pengembangan dan Penguatan Distribusi Pangan, Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis.

4. Lingkungan Hidup

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengendalian pencemaran lingkungan dan gas rumah kaca
Kegiatan diarahkan pada Pengendalian Pencemaran Udara dan Gas Rumah Kaca, Pengendalian Pencemaran Limbah B3, Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah, Pengelolaan Laboratorium Lingkungan, Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan, dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran;
- b. program peningkatan kapasitas dan tata lingkungan hidup
Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Pelayanan dan Pengawasan Dokumen Lingkungan Hidup, Pengkajian dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Penanganan Kasus dan Penaatan Lingkungan Hidup;
- c. program peningkatan kinerja pengelolaan sampah
Kegiatan diarahkan pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah, Peningkatan Kinerja Pengelolaan Penanganan Sampah, Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah;
- d. program peningkatan kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, Pengendalian dan Adaptasi Perubahan Iklim, Konservasi Lahan Kritis dan Rawan Bencana, Konservasi Kawasan Resapan Air, Konservasi Keanekaragaman Hayati.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. program pelayanan administrasi kependudukan
Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Penerbitan Perubahan Identitas Penduduk dan Fasilitasi Penerbitan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
 - b. program pelayanan pencatatan sipil
Kegiatan diarahkan pada Pelayanan Penerbitan Akta Kematian dan Kelahiran, serta Pelayanan Penerbitan Akte Perceraian, Perkawinan, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
 - c. program pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK) dan pemanfaatan data
Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan Fasilitasi & evaluasi Pemanfaatan Data dan Pengelolaan Dokumen.
6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. program pemberdayaan masyarakat dan desa
Kegiatan diarahkan pada Penguatan Kapasitas Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS), Penguatan kapasitas pengelola pasar desa, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pemerintah Desa dan Masyarakat, Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Pengembangan Swadaya Masyarakat, TNI Manunggal Membangun Desa dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya;
 - b. program pembinaan pemerintahan dan kelembagaan desa
Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa, Fasilitasi Penegasan Batas Desa, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Fasilitasi Pengisian Data Informasi Desa;
 - c. program perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset desa
Kegiatan diarahkan pada Penguatan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi bantuan keuangan kepada desa, Fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi aset desa.
7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. program keluarga berencana
Kegiatan diarahkan pada Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana,

Integrasi Pelayanan KB Bersama Mitra Kerja Melalui Momentum, Optimalisasi KIE dan Konseling KKBPK, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana;

- b. program pembangunan ketahanan keluarga
Kegiatan diarahkan pada Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Advokasi dan KIE Kampung KB Bagi SKPD, Sosialisasi bagi Pokja Tingkat Kabupaten Pencanaan dan Evaluasi Kampung KB.

8. Perhubungan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program peningkatan pelayanan angkutan
Kegiatan diarahkan pada Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang dan Pemeliharaan dan Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor.
- b. program pengembangan jaringan prasarana angkutan jalan
Kegiatan diarahkan pada Pemeliharaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Perhubungan, Pengelolaan Parkir, Survey Potensi Parkir, Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Angkutan Darat;
- c. program peningkatan pengamanan dan keselamatan lalu lintas
Kegiatan diarahkan pada Pengamanan Lalu Lintas, Pengembangan Pelayanan Angkutan, Pembayaran Rekening LPJU, Pengelolaan LPJU, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perlengkapan Jalan, Peningkatan Keselamatan LLAJ dan Fasilitasi Koordinasi LLAJ.

9. Komunikasi dan Informatika

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengembangan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi
Kegiatan diarahkan pada Layanan pengelolaan akses internet, intranet dan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah dan perbaikan peralatan operasional sarana TIK, Layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK center, Pengelolaan penarikan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi;
- b. program pengelolaan aplikasi informatika
Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi pengelolaan aplikasi SKPD, dan Penyelenggaraan ekosistem TIK;
- c. program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
Kegiatan diarahkan pada Sosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau, Pengelolaan diseminasi informasi melalui media masa, Diseminasi informasi melalui media publik, Fasilitasi pengelolaan layanan keterbukaan informasi publik.

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Kegiatan diarahkan pada pengawasan koperasi, Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan daya saing Koperasi, dan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi;

b. peningkatan pemberdayaan usaha mikro

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, Fasilitasi promosi dan pameran produk usaha mikro, Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana bagi Usaha Mikro, Peningkatan kapasitas Kelembagaan dan Legalitas Usaha dan Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Penanggulangan Kemiskinan.

11. Penanaman Modal

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program pelayanan investasi

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Profil Potensi Investasi Unggulan Kabupaten Magelang, Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Potensi Investasi dan Fasilitasi dan koordinasi Kerjasama bidang Investasi (CJIBF);

b. program pemantauan dan pengendalian investasi

Kegiatan diarahkan pada Pengendalian, monitoring, evaluasi pelayanan perizinan dan penanganan, Pengaduan, Pengelolaan bahan dan data informasi perizinan;

c. program pelayanan perizinan

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Operasional Pelayanan Pendaftaran Perijinan dan Fasilitasi Operasional Pelayanan Penerbitan Perijinan.

12. Kepemudaan dan Olahraga

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, dan Implementasi IPTEK dalam Pembinaan Olah Raga.

b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan Kelembagaan Pemuda dan Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pemuda.

13. Statistik

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengelolaan dan pengembangan statistik. Kegiatan diarahkan pada Penyusunan dokumen statistik sektoral dan Koordinasi pengintegrasian data tingkat Kabupaten.

14. Persandian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program persandian dengan kegiatan diarahkan pada Pengelolaan persandian dan telekomunikasi.

15. Kebudayaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengembangan nilai budaya
Kegiatan diarahkan pada Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, Pertunjukan Seni Budaya, Pengiriman Kesenian ke Luar Daerah, Pendataan Kesenian dan Pengadaan Tanah Gedung Kesenian;
- b. Program pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya
Kegiatan diarahkan pada Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, Edukasi Berbasis Kebudayaan, Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya.

16. Perpustakaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dengan kegiatan yang diarahkan pada Pelayanan Perpustakaan, Pengembangan Perpustakaan, Promosi Perpustakaan dan Penyediaan Bahan Pustaka.

17. Kearsipan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan
Kegiatan diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan SDM Kearsipan dan Pengawasan Kearsipan;
- b. program pengelolaan dan pelestarian arsip
Kegiatan diarahkan pada Pengolahan Arsip Dinamis dan Statis dan Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan.

5.2.3 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengembangan budidaya perikanan, kesehatan ikan dan lingkungan
Kegiatan diarahkan pada Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan, Peningkatan Kapasitas dan Revitalisasi BBI Lokal, Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan, Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Pelestarian Sumber Daya Hayati Perikanan;
- b. program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan sistem penyuluhan
Kegiatan diarahkan pada Gerakan Makan Ikan (Gemarikan), Peningkatan Mutu Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Peningkatan Jaringan Pemasaran/Promosi Perikanan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Perikanan (PUPP);

2. Pariwisata

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program Peningkatan sarana prasarana dan industri pariwisata
Kegiatan diarahkan pada Penataan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Pelayanan Kepariwisata, Penataan Kawasan Pariwisata Daya Tarik Wisata, Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha

Pariwisata dan Penataan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Ketep Pass;

- b. program pengembangan kelembagaan, pemasaran, dan ekonomi kreatif

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan Kelembagaan Pariwisata, Pemasaran dan promosi Pariwisata, dan Pembinaan Komunitas/ Pelaku Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Kegiatan diarahkan pada Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Produsen Benih Pertanian, Pengembangan Tanaman Buah dan Florikultura, Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat, Peningkatan Produksi Tanaman Semusim Perkebunan, Pengembangan Benih Tanaman Unggulan, Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hias dan Anggrek, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tembakau (DBHCHT), Pengembangan Tanaman Penyegar (DBHCHT), Pengembangan Tanaman Tahunan dan Rempah (DBHCHT);

- b. program peningkatan produksi hasil peternakan

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Agribisnis Peternakan, Pembinaan Kelompok ternak, Pengembangan itik Magelang, Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan, Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Perundangan Peternakan Perikanan, Pengelolaan dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan, dan Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan;

- c. Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan, Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Buah dan Florikultura, Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat, Gelar Promosi Produk Pertanian Unggulan, Pembinaan Kemitraan Petani Tembakau (DBHCHT), Penumbuhan Sentra Buah Lokal Mendukung Agrowisata (DBHCHT), Peningkatan Daya Saing Tanaman Penyegar, dan Peningkatan Daya Saing Tanaman Tahunan dan Rempah;

- d. Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif, Peningkatan Infrastruktur Pendukung Produksi Pertanian, Peningkatan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian, Modernisasi dan Mekanisasi Pertanian, Penyediaan Bufferstock Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman, Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Pupuk, Pengadaan Alat Mesin Perkebunan (DBHCHT) dan Pembiayaan Pertanian;

- e. Program pemberdayaan sumber daya manusia pertanian

Kegiatan diarahkan pada Penumbuhan, Pengembangan dan

- Penguatan Kapasitas Lembaga Petani, Penyusunan Program dan Programa Penyuluhan, Fasilitasi Pelaksanaan Metode Penyuluhan Pertanian, Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian, Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tembakau (DBHCHT);
- f. program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan
Kegiatan diarahkan pada Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular, Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban, Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Jasa Medik, Surveillens dan Pengujian Penyakit Hewan dan Ikan, Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan, dan Peningkatan Pelayanan Puskesmas.
4. Perdagangan
Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. program peningkatan dan pengembangan perdagangan
Kegiatan diarahkan pada Pengawasan dan Pengembangan Distribusi Perdagangan, Pengembangan kerjasama dan promosi perdagangan, dan Pengawasan Pita Cukai Legal dan Ilegal (DBCHT);
 - b. program pembinaan dan penataan pasar
Kegiatan diarahkan pada Peningkatan sarana dan prasarana pasar, Pengelolaan Pendapatan Pasar, dan Pemberdayaan Pasar;
 - c. program Peningkatan dan pengembangan pelayanan kemetrolagian
Kegiatan diarahkan pada Pendataan UTTP Metrologi, Peningkatan Pelayanan Metrologi, Peningkatan Pengawasan Metrologi, dan Fasilitasi Penilaian Metrologi.
 5. Perindustrian
Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengembangan industri, dengan kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kapasitas Industri Makanan Minuman, Peningkatan Kapasitas Industri Logam Kimia Elektronika, Peningkatan Kapasitas Industri Kerajinan dan Aneka, Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Fasilitasi Kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual bagi Industri Kecil.

5.2.4 Fungsi Penunjang Urusan pemerintahan

1. Perencanaan
Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. program perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan diarahkan pada Perencanaan Umum Pembangunan Daerah, Pengelolaan Data dan Laporan Pembangunan Daerah, Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. program perencanaan pembangunan bidang tata ruang, prasarana wilayah dan infrastruktur
Kegiatan diarahkan pada Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah dan Perencanaan Infrastruktur Daerah;
 - c. program perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam

Kegiatan diarahkan pada Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian dan Pangan;

- d. program perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya

Kegiatan diarahkan pada Perencanaan Sektor Pemerintahan Umum, Perencanaan Sektor Kesejahteraan Sosial dan Perencanaan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan serta Perencanaan Sektor Akuntabilitas Pemerintahan.

2. Keuangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengelolaan pendapatan daerah

Kegiatan diarahkan pada Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak, Pengelolaan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, Penerbitan SPPT dan DHKP, Sosialisasi Pajak Dan Retribusi Daerah, Pemungutan dan Intensifikasi PAD dan PBB, Pengelolaan Administrasi Pemungutan Pajak Daerah, dan Penyelesaian Pajak dan Retribusi Daerah;

- b. program pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penilaian RKA dan Pergeseran Anggaran, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, Penelitian DPA/DPPA-SKPD, Pengelolaan Kas Daerah, Pengendalian Perbendaharaan, Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam rangka SAKD, Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan KUA dan PPAS;

- c. program pengelolaan aset daerah

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah, Penyusunan Peraturan Barang Milik Daerah dan Penyusunan RKBMD, Manajemen Pengelolaan BMD, Penyusunan Kajian Investasi, Pengolahan Data Barang Milik Daerah, dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program informasi dan pengadaan pegawai

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Kebutuhan Formasi, Validasi Database Kepegawaian ASN, Pengelolaan Manajemen Pengadaan dan Pelayanan ASN, Pengangkatan CPNS menjadi PNS;

- b. program pengembangan sumber daya aparatur

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Diklat Dasar dan Penjurusan, Pengembangan kompetensi kualifikasi pendidikan ASN dan Sertifikasi, Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional, Penataan ASN, Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN, Fasilitasi Kepangkatan, Pengembangan Jabatan fungsional, dan Penyelenggaraan Bintek;

- c. program kesejahteraan dan pembinaan pegawai
Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Pemberhentian ASN, Fasilitasi Layanan Kesejahteraan dan Penghargaan ASN, Penegakan Disiplin ASN dan Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian.
- 4. Penelitian dan Pengembangan
Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penelitian dan pengkajian daerah, dengan kegiatan diarahkan pada Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Sosial dan Budaya, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah.
- 5. Pengawasan
Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dengan kegiatan diarahkan pada Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, Pelaksanaan Pengawasan Internal, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi, Implementasi SPIP, Pelaksanaan Review, Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar, Peningkatan Kapabilitas APIP, Evaluasi SAKIP SKPD, dan Penilaian Integritas Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 6. Fungsi Lainnya
Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. program penataan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum
Kegiatan diarahkan pada Perencanaan, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi serta Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Penyusunan Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan JDIH, Penanganan Permasalahan Hukum dan Harmonisasi Konsep Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama dan Penyuluhan Hukum dan HAM;
 - b. program perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan
Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan Umum, Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan, Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Daerah, Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa;
 - c. program perumusan dan pengendalian kebijakan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan
Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Koordinasi dan

Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Budaya, dan Pengembangan dan Pengelolaan Islamic Center;

- d. program perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian
Kegiatan diarahkan pada Pembinaan BUMD, Penyusunan Kajian Pengembangan BUMD, Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi Masyarakat, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program DBHCHT, dan Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Pelaporan Peredaran Pupuk dan LPG Bersubsidi;
- e. program perumusan dan pengendalian kebijakan pembangunan
Kegiatan diarahkan pada Administrasi Perencanaan Pembangunan, Penyusunan LKPJ, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pembangunan;
- f. program pengembangan kelembangan, tata laksana dan peningkatan kinerja organisasi
Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kesesuaian Kelembagaan OPD terhadap Peraturan Perundangan, Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan SKPD, Pengembangan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah, Peningkatan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan Pengembangan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi;
- g. program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH
Kegiatan diarahkan pada Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rumah Jabatan, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Fasilitas Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu;
- h. program peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa
Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- i. program kehumasan dan layanan keprotokolan
Kegiatan diarahkan pada Analisis Pemberitaan, Naskah Pidato, dan Dokumentasi, Peliputan, Editorial, dan Publikasi, serta Layanan Keprotokolan;
- j. program peningkatan pelayanan kedinasan DPRD
Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD, Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum, Peningkatan Kapasitas DPRD, Kegiatan Reses DPRD, Pelayanan Kehumasan dan Publikasi DPRD, dan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
- k. program pelayanan publik kecamatan dengan kegiatan diarahkan

pada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN);

1. program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat, Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan dan Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan, serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

5.3 Rencana Implementasi Program Unggulan

Rencana Implementasi Program Unggulan di Kabupaten Magelang Tahun 2020 tertuang dalam Tabel 5.2. Sebagai berikut:

Tabel 5.2
Rencana Implementasi Program Unggulan Tahun 2020

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kehidupan beragama dan Akhlak Mulia									
	a. Pembangunan <i>Islamic center</i>	Rencananya Pem Kab Magelang merencanakan pembangunan masjid agung sebagai pusat ibadah, edukasi, dan rekreasi religi. Dalam perkembangannya, Pemprov juga mempunyai program unggulan yang sama. Sehingga pemprov dan pemkab akan bersinergi dalam pembangunannya.	Pengadaan Tanah	Pengadaan tanah untuk menambah luasan tanah yang dibutuhkan dalam pembangunan <i>islamic centre</i> (Kebutuhan ideal 5 ha, kondisi existing 1,6 ha)	2500	m2	Sawitan, Kota Mungkid (kompleks masjid An-Nur)	APBD	BPPKAD	Tahun 2019 telah dianggarkan untuk pengadaan tanah sebesar Rp. 3,025 Milaya untuk pengadaan tanah seluas 3.000 m2

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	b. Bantuan Pembangunan tempat ibadah	Diberikan melalui hibah uang, sebagai bentuk tali asih atas keterlibatannya dalam penguatan karakter masyarakat. Hibah diberikan untuk tempat ibadah: gereja, kapel, vihara, klenteng, masjid dan mushala diutamakan yang berlokasi di pelosok desa	Hibah (Belanja Tidak Langsung)	Setiap tempat ibadah mengajukan proposal	786	Unit	Kabupaten Magelang	APBD	Bag Admin Bangda dan Kesra Setda, serta BPPKAD	Setiap lembaga akan diberikan bantuan dengan kisaran sebesar Rp. 5 juta sd Rp. 10 juta
	c. Bantuan Kepada Keagamaan, Pesantren, Madrasah Diniyah, TPA, TPQ, Majelis taklim sebagai	Diberikan melalui hibah uang, sebagai tali asih dalam rangka partisipasinya dalam penguatan karakter masyarakat		Setiap tempat ibadah mengajukan proposal	463	Unit	Kabupaten Magelang	APBD	Bag Admin Bangda dan Kesra Setda, serta BPPKAD	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	penguatan pendidikan karakter.									
	Peningkatan kesejahteraan guru ngaji	Diberikan melalui hibah uang, untuk guru rohani di: gereja, kapel, vihara, klenteng, masjid dan mushala diutamakan untuk guru rohani di pelosok desa. Tali asih ini diberikan dalam rangka partisipasinya dalam penguatan karakter masyarakat	Hibah (Belanja Tidak Langsung)	Setiap tempat ibadah mengajukan proposal	3932	orang	Kabupaten Magelang	APBD	Bag Admin Bangda dan Kesra Setda, serta BPPKAD	Setiap orang akan diberikan tali asih sebesar Rp. 600.000,00/ tahun
2.	Pendidikan	Belanja bantuan sosial untuk beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang SD dan SMP.	Pendampingan BSM dan Gulkin SD	Belanja bantuan sosial untuk beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang SD	210	Siswa	SD di 21 Kecamatan	APBD	Disdikbud	Anggaran @ Rp. 825.000,- x 210 Siswa = Rp. 173.250.000,-
				Penyaluran beasiswa siswa miskin/ PIP SD	42.000	Siswa	SD di 21 Kecamatan	APBN	Disdikbud	Anggaran @ Rp. 450.000 x 42.000 siswa = Rp.

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										18.900.000.000,-
			Pendampingan BSM dan Gulkin SMP	bantuan transport untuk bagi siswa miskin pada jenjang SMP	996	Siswa	SMP Pinggiran di Kab. Magelang	APBD	Disdikbud	Anggaran @ Rp. 5.500,- x 996 siswa x 100 hari = Rp. 547.800.000,-
				Belanja bantuan sosial untuk beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang SMP	1.250	Siswa	SMP di 21 Kecamatan	APBD	Disdikbud	Anggaran @ Rp. 850.000,- x 1250 siswa = Rp. 1.062.500.000,-
				Penyaluran beasiswa siswa miskin/ PIP SMP	12,000	Siswa	SMP di 21 Kecamatan	APBN	Disdikbud	Anggaran @ Rp. 750.000,- x 12.000 siswa = Rp. 9.000.000.000,-
		Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan	Peningkatan mutu sarana dan sarana PAUD dan dikmas	Pengadaan sarana prasarana PAUD (sarana belajar, APE, mebelair)	100	lembaga PAUD	100 lembaga PAUD di 21 Kecamatan	APBD	Disdikbud	
			Peningkatan mutu sarana dan prasarana SKB	pengadaan komputer, rehab gedung, pembangunan toilet, pengadaan media pendidikan	1	lembaga SKB	SKB Salaman	DAK	Disdikbud	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Peningkatan mutu sarana prasana pendidikan SD Negeri dan Swasta	Pembangunan talud dan pengadaan mebelair	65	Sekolah	65 SD di 21 Kec. Kabupaten Magelang	APBD	Disdikbud	
			Peningkatan mutu sarana prasarana SD negeri, Swasta (DAK)	Pengadaan alat praktek sekolah, pembangunan dan rehab gedung dan pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	136	Sekolah	136 SD di 21 Kec. Kabupaten Magelang	DAK	Disdikbud	
			Peningkatan mutu sarana prasarana SMP	Pengadaan genset, pembangunan talud, pengadaan komputer jaringan, pengadaan komputer personal	3,12,10,333	unit, paket, paket, unit	59 SMP di 21 Kec. Kab. Magelang	APBD	Disdikbud	
			Peningkatan mutu sarana prasarana SMP negeri, Swasta (DAK)	Belanja alat peraga/ praktek sekolah, pembangunan gedung dan rehab gedung	26	Paket	21 Kec. Kab. Magelang	DAK	Disdikbud	
		Meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap pada sekolah swasta dan negeri termasuk guru	BOSDA sekolah Negeri	Pemberian insentif bagi GTT dan PTT di Sekolah Negeri	1.662	Orang	Kab. Magelang	APBD	Disdikbud	Anggaran GTT lulus uji kompetensi @ 1.882.000,-, PTT lulus UK @ Rp. 1.000.000,-, GTT dan PTT tdk lulus UK (

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PAUD/ TK.								BOSDA @ Rp. 400.000,-, Satap Rp. 500.000,-, K2 @ Rp. 800.000,-) Total Rp. 37.265.472.000,-
			Belanja hibah untuk sekolah Swasta	Belanja hibah untuk insentif bagi GTT dan PTT di Sekolah Swasta	1.858	Orang	Kabupaten Magelang	APBD	Disdikbud	Anggaran @ Rp. 4.800.000,- x 1.858 orang = Rp. 8.910.000.000,-
		Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui beasiswa sekolah lanjut.	Peningkatan guru dan tenaga kependidikan	Pemberian beasiswa sekolah lanjut berupa biaya SPP bagi pendidik dan tenaga kependidikan	5	orang	Kabupaten Magelang	APBD	Disdikbud	Anggaran @ Rp. 3.500.000,- x 5 orang = Rp. 17.500.000,-
		Peningkatan dan pengembangan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.	-	-	-	-	-	-	-	Fasilitasi peningkatan dan pengembangan SMA dan SMK ke pemerintah Provinsi
3.	Kesehatan									

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program pelayanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin sesuai dengan regulasi yang ada	Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin (Maskin) Non JAMKESMAS (Gulkin)	Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Miskin secara menyeluruh	166,168	jiwa	Kab. Magelang	APBD	DINKES	
		Pelayanan persalinan	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Pelayanan persalinan secara menyeluruh mulai dari pendataan sampai persalinan	1	paket	Kab. Magelang	APBD	DINKES	
		Pelayanan kesehatan masyarakat	Pelayanan RS Merah Putih	Pelayanan kesehatan di RS Merah Putih	1	unit	RS Blondo	APBD	DINKES	
		Pelayanan kesehatan masyarakat	Pelayanan RS Candi Umbul	Pelayanan kesehatan di RS Candi Umbul	1	unit	RS Grabag	APBD	DINKES	
		Pelayanan kesehatan masyarakat	Pelayanan RS Bukit Menoreh	Pelayanan kesehatan di RS Bukit Menoreh	1	unit	RS Salaman	APBD	DINKES	
	Program Peningkatan kualitas Puskesmas dan RS	Pembangunan puskesmas	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan puskesmas	2	unit	Pusk. Salaman 2 dan Secang 2	APBD	DINKES	
		Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1	unit	Kota Mungkid	APBD	DINKES	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembangunan Instalasi Farmasi Kesehatan	Pembangunan Instalasi Farmasi Kesehatan	Pembangunan Instalasi Farmasi Kesehatan	1	unit	Kota Mungkid	APBD	DINKES	
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Penyelenggaraan Surveilans	Penyelenggaraan Surveilans Penyakit Menular dan Keracunan Makanan yang berpotensi KLB serta Penanganan Krisis Kesehatan	Melakukan surveilans	1	paket	Kab. Magelang	APBD	DINKES	
		Pencegahan dan pengobatan penyakit TB, HIV/AIDS dan penyakit menular terabaikan	Pencegahan dan pengendalian penyakit TB, HIV/AIDS dan penyakit menular terabaikan	Pelaksanaan pemeriksaan, pengobatan dan pemantauan penyakit TB, HIV/AIDS dan penyakit menular terabaikan	1	paket	Kab. Magelang	APBD	DINKES	
		Pencegahan dan pengobatan Penyakit DBD, Malaria dan Penyakit Zoonosis	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD, Malaria dan Penyakit Zoonosis	Pelaksanaan pemeriksaan, pengobatan dan pemantauan Penyakit DBD, Malaria dan Penyakit Zoonosis	1	paket	Kab. Magelang	APBD	DINKES	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program sumber daya kesehatan	Pembelian obat dan perbekalan kesehatan	Pengadaan Perbekalan Kesehatan (BMHP) dan Reagensia	Pembelian obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	1	paket	Kab. Magelang	APBD	DINKES	
	Program Kesehatan Masyarakat	Penyebarluasan informasi tentang kesehatan	Upaya Promosi Kesehatan	Penyebarluasan informasi tentang kesehatan melalui mediomasa da promosi langsung	1	paket	Kab. Magelang	APBD	DINKES	
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Kesehatan Masyarakat	1	paket	Kab. Magelang	APBD	DINKES	
4.	Penanggulangan Kemiskinan									
	RTLH Plus untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin.	Meningkatkan kualitas RTLH menjadi RLH	Pengembangan Perumahan Umum, Khusus dan Swadaya	Tercapainya fasilitasi pembangunan RTLH baik melalui hibah bansos ataupun swadaya	3.000	unit	RTLH di Kabupaten Magelang	APBD, APBD Prov dan APBN	DPRKP	Prioritas sasaran adalah RTLH yang masuk dalam Verval BDT
		Pengembangan perumahan akibat bencana	Fasilitasi/pembangunan rumah korban bencana	Terbangunnya / terehabilitasinya hunian korban bencana	5	unit	Wilayah yg terkena bencana	APBD	DPRKP	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di semua Tingkatan (kabupaten, kecamatan, desa, dusun)	Peningkatan kapasitas Tim Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan	Sosialisasi dan bimtek anggota TPK dan pelaksanaan TPK Award	1	paket	21 kecamatan	APBD	Bappeda dan Litbangda	
		Peningkatan pelaksanaan verifikasi dan validasi Basic Data Terpadu (BDT) dan Data PMKS	Optimalisasi Data Kemiskinan	Pelaksanaan verifikasi dan validasi Basic Data Terpadu (BDT) dan Data PMKS	1	paket	Kab. Magelang	APBD	Dinsos PPKBPPPA	
5.	Pemanfaatan sektor unggulan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat									

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan	
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Mengembangkan beberapa komoditas terpilih melalui SL, dan sebagainya.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan,	SL dan Bimtek GAP tanaman pangan	2	paket		APBD	Distanpan gan		
					pemberian sarana produksi tanaman pangan	30	paket		APBD	Distanpan gan	
				Pengembang an tanaman penyegar (DBHCHT)	pemberian bibit tanaman kopi, cengkeh, the	42,900	batang		APBD	Distanpan gan	
	Peningkatan daya saing produk pertanian	Mengembangkan sistem budidaya pertanian organik, ramah lingkungan, tanpa bahan kimia.	Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan,	SL dan Bimtek GHP tanaman pangan	2	paket		APBD	Distanpan gan		
					pemberian sarana prasarana pasca panen tanamna pangan	20	unit				
				Peningkatan Daya Saing Tanaman Penyegar,	pemberian alsin pasca panen kopi	3	paket		APBD	Distanpan gan	
				sertifikasi organik kopi	20	ha		APBD	Distanpan gan		

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan	
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	peningkatan sarana dan prasarana pertanian	membangun berbagai infrastruktur pertanian yang dibutuhkan (pembangunan irigasi, dam parit, jalan pertanian, embung) serta pemberian bantuan alsintan	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Produksi Pertanian,	pembangunan dam parit	4	unit		APBD	Distanpan gan		
					pembangunan embung	1	unit		APBD	Distanpan gan	
					pembangunan jalan usaha tani	6	unit		APBD	Distanpan gan	
					pembangunan irigasi tersier dan sumur tanah dangkal	10	unit		APBD	Distanpan gan	
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Infrastrukturu Pertanian	pembangunan infrastruktur pertanian	26	paket		DAK	Distanpan gan	
				Modernisasi dan mekanisasi pertanian	pemberian alsin	1	paket		APBD	Distanpan gan	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pemberdayaan sumber daya manusia pertanian	penguatan SDM penyuluhan, baik pelaku utama, pelaku usaha, kelembagaan, maupun SDM penyuluh pertanian	Penumbuhan , Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Lembaga Petani,	penumbuhan dan pengembangan serta penguatan kelembagaan tani, kelembagaan penyuluhan	37	lembaga		APBD	Distanpan gan	
			Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha,	peningkatan kapasitas pelaku usaha, pelaku utama (pengetahuan, sikap, ketrampilan)	700	orang		APBD	Distanpan gan	
			Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian,	pelatihan penyuluh, training, bimtek untuk penyuluh pertanian PNS, swadaya dan swasta	260	orang		APBD	Distanpan gan	
	pengecehan dan penanggulangan penyakit hewan	peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui puskesmas dan pembinaan penyedia bahan PAH yang ASUH, serta peningkatan konsumsi PAH	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner,	pembinaan penyedia Pah yang ASUH	100	orang		APBD	Dispeterik an	
				Gerimis lur	2750	orang		APBD	Dispeterik an	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	program peningkatan produksi hasil peternakan	peningkatan produksi daging, telur dan susu serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung peternakan	Pengembangan Agribisnis Peternakan,	pemberian indukan sapi perah	60	ekor		APBD	Dispeterikan	
				bantuan ayam buras untuk KK miskin dan non miskin	10	kelompok		APBD	Dispeterikan	
				bantuan untuk pengembangan kelinci	4	kelompok		APBD	Dispeterikan	
			Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan,	peningkatan sarpras peternakan sapi perah, sapi potong, kambing/domba, itik, kelinci dan peningkatan Pasar Hewan Grabag	32	lokasi/paket/unit		APBD	Dispeterikan	
	peningkatan ketahanan pangan	Meningkatkan ketahanan pangan daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan	Pembinaan dan Pengembangan Kemandirian Pangan,	fasilitasi dan pengembangan desa mandiri pangan, fasilitasi dewan ketahanan pangan	5	desa		APBD	Distanpangan	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		untuk budidaya pertanian, mendorong diversifikasi pangan olahan lokal. Serta memasyarakatkan pola pangan B2SA.	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan,	pembinaan pemanfaatan pekarangan, pengukuran skor PPH	10	kelompok		APBD	Distanpangan	
			Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis	pelatihan pengolahan pangan bahan lokal	21	kelompok		APBD	Distanpangan	
	GERAKAN SERIBU KOLAM	mengembalikan kejayaan kabupaten magelang sebagai daerah perikanan, dengan meningkatkan produksi dan konsumsi serta meningkatkan kualitas SDM perikanan								

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pengembangan budidaya perikanan, kesehatan ikan dan lingkungan	peningkatan produksi, dan sarana dan prasarana produksi perikanan	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan,	demplot UPR	2	lokasi		APBD	Dispeterikan	
				fasilitasi sertifikasi CPIB dan CBIB	10	kelompok		APBD	Dispeterikan	
				bantuan pokdaka pembudidaya ikan kolam pekarangan (KK miskin)	6	kelompok		APBD	Dispeterikan	
				pengembangan minapadi	5	kelompok		APBD	Dispeterikan	
				fasilitasi pertemuan pelaku kawasan minapolitan	80	orang		APBD	Dispeterikan	
				Rehabilitasi/ Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan,	pembangunan/rehab BBI	1	paket		APBD	Dispeterikan
			pembangunan sentra kuliner perikanan	1	paket		APBD	Dispeterikan		

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pembangunan/rehab sarpras pokdakan	1	paket		APBD	Dispeterikan	
	optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan sistem penyuluhan	meningkatkan mutu olahan hasil perikanan dan promosi pemasaran hasil perikanan	Gerakan Makan Ikan (Gemarikan),	melakukan kampanye gerakan makan ikan	3.000	orang		APBD	Dispeterikan	
			Peningkatan Jaringan Pemasaran/Promosi Perikanan	promosi perikanan	4	event		APBD	Dispeterikan	
				edukasi perikanan	10.000	orang		APBD	Dispeterikan	
6.	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana publik									
	Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung,									

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	embung, irigasi, dan sarana ekonomi)									
		Membangun / meningkatkan jalan	Pembangunan dan Peningkatan jalan	Pembangunan Jalan	67	paket	Ruas Jalan Kabupaten, di 67 ruas jalan	APBD	DPUPR	Jalan
		Merehabilitasi/memelihara kualitas jalan dan pelengkap jalan	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap Jalan	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap Jalan	26	paket	3 paket Pemeliharaan rutin dan pemeliharaan di 6 UPT, 17 paket pelengkap jalan dan 6 paket jembatan	APBD	DPUPR	Jalan dan Jembatan
		Membangun pelengkap jalan	Pembangunan pelengkap jalan	Pembangunan jembatan, drainase, trotoar, groundsil dan senderan/talud jalan	32	paket	di 32 ruas jalan kabupaten di seluruh wilayah kabupaten magelang	APBD	DPUPR	Jembatan dan pelengkap jalan

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							g			
		Merehabilitasi dan meningkatkan jaringan irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Merehabilitasi jaringan irigasi yang kondisi tidak baik menjadi baik	28	paket	di 28 DI di wilayah Kabupaten Magelang	APBD	DPUPR	Jaringan Irigasi
			Pembangunan jaringan irigasi	Membangun jaringan irigasi / meningkatkan jaringan irigasi	13	paket	di 13 DI di wilayah Kabupaten Magelang	APBD	DPUPR	Jaringan Irigasi
		Merehabilitasi bangunan irigasi	Operasi Jaringan Irigasi	pemeliharaan bangunan irigasi seperti pintu air, bangunan debit air	2	paket	DI Kabupaten Magelang	APBD	DPUPR	Jaringan Irigasi

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memelihara Jaringan irigasi tetap baik	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pemeliharaan jaringan irigasi sehingga tetap dalam kondisi baik	43	Paket	43 DI di wilayah Kabupaten Magelang	APBD	DPUPR	Jaringan Irigasi
		Memelihara bangunan irigasi tetap berfungsi baik	Pemeliharaan bangunan irigasi	Pemeliharaan bangunan irigasi sehingga tetap berfungsi baik	2	Paket	2 paket di 2 DI	APBD	DPUPR	Jaringan Irigasi
		Membangun bangunan penampung /saluran air irigasi	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air	Membangun bangunan air untuk meningkatkan debit air layanan sarana air baku untuk irigasi pada mata air	3	paket	Grabag, Tempuran, Ngluwar	APBD	DPUPR	Embung/Bendung/ Penampung air
		Membangun sarana ekonomi dan kesehatan	Pembangunan Rumah Sakit	Penyempurnaan Pembangunan fasilitas kesehatan di RSUD Blondo	1	paket	Blondo Mertoyudan	APBD	DPUPR	
			Pembangunan Kantor Pemerintah	Pembangunan fasilitas layanan masyarakat pada kantor pemerintah	4	paket	Kec. Borobudur, DPRKP, Pertanian, Dishub	APBD	DPUPR	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh wilayah Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah	Membangun / meningkatkan jalan	Pembangunan dan Peningkatan jalan	Pembangunan Jalan untuk peningkatan konektivitas di seluruh wilayah Kabupaten Mageang	67	paket	Ruas Jalan Kabupaten, di 67 ruas jalan	APBD	DPUPR	
		Menyediakan dan memelihara sarana perlengkapan jalan	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perlengkapan Jalan	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Perlengkapan Jalan (ITS, Rambu, Zebra Cross, Guard Rail)	1	paket	Kec. Muntilan , Mertoyudan, Borobudur, Secang, Ngluwar, Bandongan, Salam , Srumbung, Tegalrejo ,	APBD	Dinas Perhubungan	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Candimulyo, Kaliangkrik, Mungkid			
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal sesuai standart teknis dan kebutuhan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Angkutan Darat	Rehabilitasi Bangunan Fisik Terminal Borobudur	1	paket	Kecamatan Borobudur	APBD	Dinas Perhubungan	Mendukung Program KSPN Borobudur dan Program Aglomerasi Transportasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
7.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat									
	a. Pengelolaan Borobudur, Merapi dan Sumbin	Menyediakan data berdasarkan daya dukung lingkungan dan kemampuan daya tampung aktifitas	Pengkajian dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup	Perhitungan IKLH, Penyusunan SILH dan penyusunan dokumen kinerja lingkungan hidup	2	paket	Kabupaten Magelang	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	g berbasis konservasi untuk kesejahteraan masyarakat									
	b. Pengelolaan Sampah Mandiri (3R) dan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Melakukan pembentukan bank sampah dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan bank sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah	Fasilitasi Sarana Bank sampah, Lomba bank sampah	100	Unit bank Sampah	Kabupaten Magelang	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
	c. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan Fasilitas Penanganan Sampah yang optimal	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah.	pembelian tanah untuk TPST dan Pembangunan TPST	1	paket lahan	Kabupaten Magelang	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	d. Konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan mata air.	Kegiatan ini ditujukan untuk memelihara lingkungan hidup terutama mata air	Konservasi Kawasan Resapan Air	Optimasi konservasi di kawasan resapan air (pembentukan komunitas, penanaman pohon, pembuatan sumur resapan dan biopori)	60	Ha	Kabupaten Magelang	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
	e. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Penataan Hunian Kumuh	Mengelola taman-taman yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Publik	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.	Pengelolaan dan peningkatan kinerja RTH Publik (taman-taman)	1	paket	Kabupaten Magelang	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
8.	Peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel									

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a. E-Government/ Smart Regency	Menyediakan Layanan Komunikasi Data yang lebih Optimal dan Stabil sebagai pendukung Smart Regency	Layanan pengelolaan akses internet, intranet dan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerahn dan perbaikan peralatan operasional sarana TIK	peningkatan kualitas transver data internet	257	SKPD	Kabupaten Magelang	APBD	Dinas Kominfo	
		Penyediaan Layanan pembangunan dan pemeliharaan aplikasi	Fasilitasi pengelolaan aplikasi SKPD	Menyediaan tenaga ahli untuk menyusun aplikasi yang dibutuhkan SKPD atau Pemerintah Desa	6	Aplikasi	Kabupaten Magelang	APBD	Dinas Kominfo	Kegiatan ini ditujukan untuk mempermudah integrasi antar layanan dan efisiensi anggaran. SKPD atau Pemerintah Desa menyusun Kerangka Acuan dan dikordinasikan dengan Dinas Kominfo

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	b. Sinergi Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian dan Pengawasan	Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Pelaksanaan pengawasan internal	Pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kasus	144	LHP	21 Kec. Kabupaten Magelang	APBD	Inspektora t	
			Tindaklanjut hasil temuan	Penanganan tindaklanjut LHP	420	LHP	21 Kec. Kabupaten Magelang	APBD	Inspektora t	
	c.Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (data kependudukan) Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Sistem pelayanan administrasi kependudukan (dokumen kependudukan)	Fasilitasi Penerbitan Perubahan Identitas Penduduk	peningkatan kualitas pelayanan	80000	lembar	Kabupaten Magelang	APBD	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Fasilitasi Penerbitan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk		1	paket		APBD		
			DAK (Pelayanan Adminduk)					APBD		
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil		Pelayanan Penerbitan Akta Kematian dan Kelahiran		30,000	lembar	Kabupaten Magelang	APBD	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
			Pelayanan Penerbitan Akte Perceraian, Perkawinan, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan		400	lembar		APBD		
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)		1	paket	Kabupaten Magelang	APBD	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kegiatan ini ditujukan untuk mempermudah penyediaan data kependudukan

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan Pemanfaatan Data									
			Fasilitasi & evaluasi Pemanfaatan Data dan Pengelolaan Dokumen		1	paket		APBD		
9.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA									
	Penguatan Sistem Penanggulangan Bencana (legislasi, kelembagaan dan pendanaan)	Pengembangan sister village, desa tangguh bencana, TEA dan sistem informasi kebencanaan	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Pembentukan sister village, desa tangguh bencana, TEA dan sistem informasi kebencanaan	1	paket	Kab. Magelang	APBD	BPBD	
10.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA									

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a. Peningkatan peran serta Kepemudaaan	Peningkatan kapasitas pemuda dalam kepemimpinan, kemampuan manajerial organisasi dan pembangunan karakter melalui pelatihan	Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	pembinaan pemuda melalui kegiatan pelatihan diklat, pramuka dan paskibraka	1	paket	Kabupaten Magelang	APBD	DISPARPO RA	
			Pembinaan Kelembagaan Pemuda	penguatan kelembagaan pemuda dalam manajerial dan administrasi	1	paket	Kabupaten Magelang	APBD	DISPARPO RA	
	b. Pembangunan Sport Centre dan pengembangan pembinaan olah raga berprestasi	Pengembangan Stadion Olah raga sepakbola "Gemilang" menjadi pusat olah raga dengan multi cabang olah raga	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (DED), peningkatan sarana prasarana Stadion dan pengadaan alat olah raga serta pemeliharaan stadion	5	paket	Kabupaten Magelang	APBD	DISPARPO RA	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	c. Peningkatan pengembangan olahraga sepak bola dengan mengoptimalkan peran serta swasta	Pelibatan swasta dalam memfasilitasi pembinaan Klub olah raga sepakbola Daerah	peningkatan swasta sebagai sponsor dalam pembinaan klub sepakbola Daerah	Mendorong pengusaha dalam ikut berpartisipasi dalam pembinaan klub sepak bola melalui sponsorship	1	paket	Kabupaten Magelang	CSR	KONI	
	d. Penghargaan atlet berprestasi	meningkatkan semangat dan motivasi atlet daerah untuk lebih mengembangkan kemampuan dan keahlian dalam cabang olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	pemberian tali asih bagi atlet berprestasi	1	paket	Kabupaten Magelang	APBD	DISPARORA	

Seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020 adalah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020, yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan tahun 2020. Uraian program dan kegiatan tahun 2020 secara rinci tertuang dalam tabel berikut :

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pada tahap ke-4 (keempat) dari RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2005-2025 dan menjadi tahap awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Pelaksanaan tahapan ini membutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi yang kuat dari segenap pemangku kepentingan pembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif dari sisi perencanaan, kelembagaan, penganggaran, sampai dengan implementasinya. Hal ini penting untuk meletakkan landasan yang kokoh untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi pencapaian target lima tahun terakhir RPJPD Kabupaten Magelang.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2020, digunakan sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja. Indikator kinerja tersebut terdiri atas Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Daerah. Ketiga indikator tersebut dituangkan dalam matriks yang digunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama Daerah merupakan indikator yang menggambarkan kinerja Kepala Daerah. Pada tahun 2020, terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama Daerah. Secara lengkap Indikator Kinerja Utama Daerah yang dilengkapi dengan Indikator Sasaran Daerah disajikan pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Matriks Indikator Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2020

No.	Aspek/Tujuan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2018	2019			
MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia							
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Tujuan : Meningkatnya kualitas SDM							
1	Nilai IPM	Indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak	angka (0-100)	69,11	69,11	69,34	70,33
Sasaran :							
	Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	tahun	7,57	7,72	7,86	8,41
	Harapan Lama Sekolah	lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh	tahun	12,48	12,67	12,76	13,27

No.	Aspek/Tujuan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019		
		anak pada umur tertentu di masa mendatang					
	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	$((\text{Jumlah SD berakreditasi minimal B} / \text{Jumlah SD}) * 100\% + (\text{jumlah SMP berakreditasi minimal B} / \text{Jumlah SMP}) * 100\%) / 2$	persen	93,86	93,89	94,41	95,94
	Angka harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	tahun	73,47	73,47	73,52	73,70
Tujuan : Meningkatkan paritas daya beli masyarakat							
2	Angka kemiskinan		persen	11,23	10,58	9,93	7,33
3	Pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan	Kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa	ribu rupiah	9.025,00	9.262,68	9.400,64	10.400,12
4	Inflasi	Inflasi = $((\text{Inf } n+1 - \text{Inf } n) / \text{Inf } n) * 100\%$ Dimana: Inf n = nilai inflansi pd tahun n Inf(n+1) = nilai inflasi pada 1 th berikutnya n = tahun	persen	2,66	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5
	Sasaran :						
	Persentase penurunan PMKS	$(\text{Jumlah PMKS tahun } n - \text{jumlah PMKS tahun } n-1) * 100\%$	persen	0,57	0,58	0,58	0,58
	Indeks ketahanan pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	angka (0-100)	76,32	77,37	78,42	82,62
	Tingkat pengangguran terbuka	$(\text{Jumlah Pengangguran} / \text{Jumlah Angkatan Kerja}) * 100\%$	persen	2,91	2,4-3,0	2,4-3,0	2,25-2,55
	Cakupan hunian layak dan berkualitas	$(\text{Persentase ketersediaan rumah layak huni} + \text{Persentase kawasan permukiman berkualitas}) / 2$	persen	55,29	69,88	72,66	96,28
Tujuan : Meningkatkan pembangunan berbasis gender							
5	IPG	$IPG = (\text{Xede}(1) + \text{Xede}(2) + \text{Iinc-dis}) / 3$ Xede(1) = Xede untuk harapan hidup Xede(2) = Xede untuk harapan pendidikan Sensus Penduduk Iinc-dsi = indeks distribusi pendapatan, variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh juga dari Sakernas, SUPAS dan sensus penduduk	angka (0-100)	92,23	92,91	93,21	94,41
	Sasaran :						
	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	$1/3 (\text{Ipar} + \text{IDM} + \text{Linc-dist})$ Ipar = Indek keterwakilan perempuan di parlemen IDM = Indek pengambilan keputusan, Linc-dist = indek distribusi pendapatan	angka (0-100)	62,43	69,03	69,33	70,53

No.	Aspek/Tujuan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019		
	Kabupaten layak anak	Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak	kategori	madya	madya	nindya	utama
Misi II : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup							
ASPEK DAYA SAING							
Tujuan : Meningkatnya daya saing daerah							
6	Cakupan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan	(Persentase ketercapaian IKLH+Cakupan pembangunan wilayah)/2	persen	60,07	63,20	66,95	83,16
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	LPE = ((LPE tahun n - LPE tahun n-1)/LPE tahun n-1)*100%	persen	5,06*	5,0-5,5	5,1-5,6	5,5-6,0
8	PDRB Perkapita	BPS	juta rupiah	23,70*	25,20	26,70	32,72
Sasaran :							
	IKLH	IKLH = (IKA*30%)+(IKU*30%)+(IKTL*40%) IKA = Indek Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka (0-100)	71,93	72,10	72,12	72,20
	Cakupan pembangunan wilayah	(Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang+Cakupan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman+Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan)/3	persen	48,21	54,29	61,79	94,12
	Peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan tahun ke n - PDRB sektor perdagangan tahun (n-1)	milliar rupiah	200,15*	227,64	255,56	367,20
	Peningkatan nilai PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian tahun ke n - PDRB sektor pertanian tahun (n-1)	milliar rupiah	113,80*	120,09	150,89	274,10
	Peningkatan nilai PDRB sektor industri pengolahan	PDRB sektor industri pengolahan tahun ke n - PDRB sektor industri pengolahan tahun (n-1)	milliar rupiah	369,23*	370,28	372,47	380,61
	Peningkatan nilai PDRB sektor pariwisata	PDRB sektor pariwisata tahun ke n - PDRB sektor pariwisata tahun (n-1)	milliar rupiah	52,32*	52,32	52,32	54,25
	Pertumbuhan investasi	((Investasi tahun n - Investasi tahun n-1)/Investasi tahun n)*100%	persen	0,92	5,00	5,00	5,00
	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	(Cakupan penegakan hukum+Cakupan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana+Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat)/3	persen	84,42	79,25	82,97	88,09
	Indeks desa membangun	Indeks komposit yang terdiri dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan	angka (0-1)	0,66*	0,67	0,68	0,72

No.	Aspek/Tujuan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2018	2019			
Misi III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah							
ASPEK DAYA SAING							
Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel							
9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan		56,45	63,82	65,53	72,39
	Sasaran :						
	Nilai AKIP	Indeks untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	angka (0-100) (huruf)	59,05 (CC)	61,04 (B)	63,03 (B)	71 (BB)
	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks untuk mengukur pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	angka (0-5)	1,85	1,85	2,00	3,00
	Opini BPK "WTP"	Opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material	-	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	angka (0-100)	82,01	82,74	84,23	90,16
	Indek merit system	Indeks untuk mengukur profesionalitas manajemen kepegawaian ASN dalam memberikan pelayanan publik	angka (0-1)	-	0,50	0,55	0,76

Sumber: Bappeda dan Litbangda, 2019

Keterangan: *) Angka proyeksi

6.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Adapun matriks Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Matriks Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2020

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	$(APK\ PAUD + APK\ SD/MI/Paket\ A + APK\ SMP/MTS/Paket\ B)/3$	angka (0-100)	87,43	89,97	91,14	95,80
		2	Angka Partisipasi Murni (APM)	$(APM\ SD/MI/Paket\ A + APM\ SMP/MTS/Paket\ B)/2$	Angka (0-100)	87,64	88,25	88,79	90,94
		3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	$(APS\ SD/MI/Paket\ A + APS\ SMP/MTS/Paket\ B)/2$	angka (0-100)	98,30	98,62	98,93	99,92
		4	Rerata Nilai UN	$(Rerata\ Nilai\ UN\ SD + Rerata\ Nilai\ UN\ SMP)/2$	Angka (0-10)	6,28	6,30	6,40	6,65
		5	Angka Kelulusan	$(Angka\ Kelulusan\ SD + Angka\ kelulusan\ SMP)/2$	angka (0-100)	99,88	99,90	99,92	100
		6	Persentase peningkatan jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	$(karya\ budaya\ yang\ direvitalisasi\ dan\ diinventarisasi\ pada\ tahun\ n) - (karya\ budaya\ yang\ diinventarisasi\ dan\ direvitalisasi\ pada\ tahun\ n-1) / karya\ budaya\ yang\ direvitalisasi\ dan\ diinventarisasi\ pada\ tahun\ n-1) * 100\%$	persen	1	1	1	5
2	DINAS KESEHATAN	7	Kualitas pelayanan kesehatan	$(Jumlah\ FKTP/FKTL/Lab\ yang\ bermutu) / (Jumlah\ FKTP/FKTL/Lab\ yang\ ada) * 100\%$	persen	10	15	25	45
		8	Angka kesakitan	SIM Dinkes	persen	-	-	5,33	4,68
		9	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas selama 1 tahun	jumlah kasus	6	-	11	9
		10	Angka Kematian Bayi (AKB)	$(Jumlah\ Kematian\ Bayi\ (berumur\ kurang\ 1\ tahun)\ pada\ satu\ tahun\ tertentu / Jumlah\ Kelahiran\ Hidup\ pada\ satu\ tahun\ tertentu) * 1000$	per 1000 KH	5,72	-	6,5	6,3

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
		11	Angka Kematian Balita (AKABa)	(Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu/Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu) x 1000	per 1000 KH	6,70	-	8	7,6
		12	Angka Kematian Neonatal (AKN)	(Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu / Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu) x 1000	per 1000 KH	4	-	6	5,6
3	RSUD MUNTILAN	13	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri kesehatan	Akreditasi (dasar, madya, utama, paripurna)	Madya (Bintang 3)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	(Cakupan Peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan + Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik + cakupan layanan jaringan irigasi + Cakupan layanan Sumber Daya Air + Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik + Cakupan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik + Persentase terbangunnya landmark + Cakupan layanan air minum + Cakupan layanan sanitasi + Cakupan layanan drainase lingkungan + Cakupan sarana prasarana ke- PU-an + cakupan layanan Jasa konstruksi + Persentase dokumen rekomendasi perijinan + Persentase kesesuaian tata ruang + Cakupan kinerja pertanahan)/15	persen	57,69	60,83	66,37	92,13

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15	Persentase ketersediaan rumah layak huni	(Persentase peningkatan rumah layak huni + Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi MBR+Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana+Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi warga terdampak proyek pemerintah+Persentase Penanganan PSU Perumahan)/5	persen	43,46	71,34	75,59	92,56
		16	Persentase kawasan permukiman berkualitas	(persentase penanganan kawasan permukiman kumuh + persentase pengendalian kawasan permukiman + persentase penyediaan TPU + persentase penanganan PSU Permukiman)/4	persen	47,20	49,45	51,70	79,47
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	17	Cakupan penegakan hukum	((jml penindakan / jml pelanggaran)*0,50 + ((jml penertiban/(jml target perencanaan penertiban + jml aduan))*0,50	persen	-	80,45	88,50	92,50
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	18	Cakupan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana	((jml desa tangguh bencana/jml desa rawan bencana)*100 + (jml penanganan tanggap darurat yg dilakukan / jml sasaran dampak bencana yg harus dilakukan tanggap bencana)*100 + (jml kejadian bencana yg direkomendasikan rehabilitasi dan rekonstruksi / jml kejadian bencana yg harus dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi*100))/3	persen	74,1	75	75,9	79,48
8	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19	Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	((jml ormas, LSM dan OKP yg aktif / jml ormas, LSM dan OKP yg tercatat)*0,50 + (jml konflik sosial tertangani/jml konflik sosial)*0,50	persen	80	80	80	80

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	20	Cakupan penanganan PMKS	(Persentase PMKS yang tertangani + Persentase PSKS yang berperan dalam penanganan PMKS)/2	persen	46,32	46,86	47,46	49,8
		21	Cakupan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	(Persentase perempuan di lembaga legeslatif+Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi+Persentase SKPD yang melaksanakan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)+rasio kekerasan terhadap perempuan + rasio kekerasan terhadap anak)/5	persen	60,91	57,99	57,99	58,63
		22	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	BPS	persen	0,79	0,76	0,73	0,65
		23	Presentase keluarga Pra Sejahtera	(Jumlah Keluarga Pra sejahtera/Jumlah keluarga)*100%	persen	21,23	20,69	20,15	18
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	24	Produktivitas tenaga kerja	nilai PDRB/Total angkatan kerja yang bekerja	rupiah	689.827	700.905	711.763	756.306
		25	Persentase Pertumbuhan Industri	((jumlah industri tahun n-jumlah industri tahun (n-1)) / (jumlah industri s/d tahun n)) x 100%	persen	2,10	2,21	2,33	12,16
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	26	Ketersediaan pangan utama	(Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun ())/Jumlah Penduduk) x 100%	kg/jiwa/tahun	284,121	320,692	341,502	424,745
		27	Stabilitas harga pangan	inflasi harga bahan pangan pokok (BPS)	persen	93,95	93,96	93,97	94,30
		28	Skor PPH	persen Angka Kecukupan Gizi (A) x bobot masing-masing kelompok pangan	persen	87,90	87,95	87,98	88,40
		29	Produksi Padi	Jumlah produksi padi dalam 1 tahun	ton	478.199	478.300	478.500	480.500
		30	Produksi Jagung	Jumlah produksi jagung dalam 1 tahun	ton	51.446	51.448	51.450	51.650
		31	Produksi Cabai	Jumlah produksi cabai dalam 1 tahun	ton	211.124	215.346	219.653	237.760

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
		32	Produksi Kopi	Jumlah produksi kopi dalam 1 tahun	ton	1.468	1.480	1.490	1.530
		33	Produksi Cengkeh	Jumlah produksi cengkeh dalam 1 tahun	ton	161	163	165	173
		34	Produksi kelengkeng	Jumlah produksi kelengkeng dalam 1 tahun	ton	88	90	93	100
		35	Produksi jeruk	Jumlah produksi jeruk dalam 1 tahun	ton	2.646	2.650	2.655	2.675
		36	Produksi kelapa	Jumlah produksi kelapa dalam 1 tahun	ton	7.520	7.525	7.530	7.550
		37	Produksi Salak	Jumlah produksi salak dalam 1 tahun	ton	69.362	69.372	69.380	69.420
		38	Produksi Bawang putih	Jumlah produksi bawang putih dalam 1 tahun	ton	2.053,5	2.156,2	2.264	2.522,7
		39	Persentase produk pertanian yang terstandarisasi	(produksi produk unggulan terstandarisasi : total produksi produk unggulan) x 100%	persen	0,3*	0,3	0,3	1,5
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	40	Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	((Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai ranking emas + Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai ranking hijau + Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai ranking biru)/Jumlah perusahaan peserta proper)*100%	persen	6	8	10	22
		41	Persentase pengelolaan sampah	Neraca Jakstrada pengelolaan sampah	persen	32,42	39,87	43,00	65,43
		42	Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	(Persentase Ketersediaan RTH Publik di Wilayah Perkotaan+Persentase RTH Publik yang terkelola+Persentase Ketersediaan RTH Privat di Wilayah Perkotaan)/3	persen	39,59	39,27	40,06	40,06

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
		43	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim	(Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi + Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi + Persentase mata air yang dikonservasi + Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim + Persentase sekolah Adiwiyata)/5	persen	5,52	5,94	7,64	13,52
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	44	Rasio Perekaman KTP - elektronik dan Keluarga yang Ber KK	(Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP+Persentase penerbitan KK)/2	angka	96,10	96,83	97,48	99,75
		45	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	(Persentase penerbitan Akta Kelahiran+Persentase Penerbitan Akta perkawinan+Persentase Penerbitan Akta Kematian)/3	angka	55,01	63,75	66,67	96,67
		46	Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	(Persentase Pengelolaan Informasi+Persentase Pemanfaatan Data)/2	angka	-	70	77,5	95
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	47	Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang	(Jumlah Desa Maju, Mandiri dan Berkembang)/Jumlah Seluruh Desa)*100%	persen	10	10	20	30
15	DINAS PERHUBUNGAN	48	Cakupan Infrastruktur perhubungan	(Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan + Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas + Persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas + Persentase peningkatan angkutan umum layak jalan)/4	persen	38,72	47,76	57,20	96,12
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	49	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	(Cakupan SKPD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil+Cakupan Layanan Komunikasi+Persentase SKPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah)/3	persen	31,28	37,26	44,52	76,67

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
		50	Cakupan layanan informasi bagi Desa dan PD	(Persentase aplikasi sistem informasi SKPD yang terintegrasi dengan sistem informasi instansi vertikal+Persentase ketersediaan perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK+Persentase layanan domain dan subdomain bagi Desa dan SKPD)/3	persen	40,44	41,32	48,16	98,32
		51	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	((Persentase layanan website SKPD dan Desa yang memenuhi kriteria+Persentase diseminasi informasi melalui media massa+Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat+Cakupan diseminasi melalui media interpersonal+Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang+Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah))/6	persen	36,67	57,36	83,94	94,15
		52	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	(Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan+Cakupan Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar)/2	persen	62,50	66,67	75	100
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	53	Cakupan Pelayanan Perdagangan	((Cakupan legalitas pelayanan perdagangan x 0,5) + (Cakupan Promosi perdagangan x 0,2) + (Cakupan Sarpras perdagangan x 0,3))	miliar rupiah	-	-	70	78
		54	Jumlah Pasar yang mendapat penghargaan Pasar Tertib Ukur	Kementerian Perdagangan	unit	7	7	8	12
		55	Persentase koperasi sehat	((jumlah koperasi sehat/Jumlah total koperasi)) x 100%	persen	78,13	78,13	78,13	80
		56	Peningkatan Omzet usaha Mikro	(nilai omzet tahun n - nilai omzet tahun n-1)/(nilai omzet tahun n-1) x 100%	persen	-	5	5	25

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	57	Jumlah nilai investasi PMA	Jumlah investasi yang masuk dari LN (PMA)	miliar rupiah	68.858	75.000	78.750	95.721
		58	Jumlah nilai investasi PMDN	Jumlah investasi yang masuk dari DN (PMDN)	triliun rupiah	1.907	2.174	2.391	3.501
		59	Survey kepuasan pelayanan perizinan	Survey/kuesioner pengguna layanan perizinan	angka	86,3	86,5	87	89
19	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA	60	Cakupan prestasi generasi muda	$((\text{jumlah pemuda berprestasi} / \text{jumlah pemuda peserta lomba}) * 100) * 0,50 + (\text{jumlah atlet berprestasi} / \text{jumlah atlet yang ikut kejuaraan}) * 100) * 0,50$	persen	36,50	38,50	41,00	52,00
		61	Peningkatan kunjungan wisatawan	$((\text{jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke } n - \text{jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke } n - 1 / \text{jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke } n - 1) * 100) * 0,35 + ((\text{jumlah kunjungan wisatawan manca negara tahun ke } n - \text{jumlah kunjungan wisatawan manca negara tahun ke } n - 1 / \text{jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun ke } n - 1) * 100) * 0,65$	persen	1,82	5	5	25
		62	Peningkatan lama tinggal wisatawan	$((\text{lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke } n - \text{lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke } n - 1 / \text{lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke } n - 1) * 100) * 0,35 + ((\text{lama tinggal wisatawan manca negara tahun ke } n - \text{lama tinggal wisatawan manca negara tahun ke } n - 1 / \text{lama tinggal wisatawan mancanegara tahun ke } n - 1) * 100) * 0,65$	persen	3,70	5,3	5,3	30

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	63	Rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten	(Jumlah pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten/jumlah penduduk) x 100%	persen	0,06	0,07	0,07	0,10
		64	Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku	(Pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku / jumlah pengolah arsip) x 100%	persen	-	38,46	38,46	100
21	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	65	Produksi daging	Jumlah produksi daging dalam 1 tahun	ton	15.622,3	16.111,4	16.393,3	90.997,4
		66	Produksi Telur	Jumlah produksi telur dalam 1 tahun	ton	16.204,2	16.787,5	17.071,2	105.078
		67	Produksi susu	Jumlah produksi susu dalam 1 tahun	liter	-	746.158	761.08	4.706.851
			Produksi benih ikan	Jumlah produksi ikan (benih) dalam 1 tahun (ekor)	ekor (x1000)	2.008.038	2.008.038	2.100.000	13.603.826
		68	Produksi ikan konsumsi	Jumlah produksi ikan (konsumsi) dalam 1 tahun	ton	23.097,01	23.097,01	24.150,00	156.444,00
		69	Produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi dalam 1 tahun	ton	278,14	280,50	294,53	1.907,94
22	SEKRETARIAT DAERAH	70	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	((jumlah kebijakan yang tidak bermasalah/jumlah kebijakan yang ada	persen	-	-	70,00	80,00
		71	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		Angka (1-100)	83,25	83,50	83,75	85,00
23	SEKRETARIAT DEWAN	72	Cakupan fasilitasi layanan produk- produk hukum daerah	((jumlah fasilitasi raperda yang dikeluarkan/jumlah fasilitasi propemperda)x100%)+(jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang disepakati tepat waktu/jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang harus disepakati)x100% + (jumlah fasilitasi rekomendasi DPRD yang dikirim kepada bupati /jumlah fasilitasi rekomendasi DPRD kepada bupati yang direncanakan) x 100%)))/3	persen	-	-	93	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	73	Tingkat ketercapaian dan keterukuran kinerja pembangunan daerah	(Jumlah indikator kinerja tujuan, sasaran, dan program daerah yang berpredikat sangat tinggi ($\geq 91\%$) dan tinggi (76%-90%)/Jumlah indikator kinerja tujuan, sasaran, dan program)*100%	persen	-	-	69,42	77,82
		74	Persentase implementasi rencana kelitbangan	(Jumlah kelitbangan dalam RKPD/Jumlah kelitbangan dalam RPJMD) *100%	persen	-	100	100	100
25	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	75	Persentase kenaikan PAD	$((PAD_{th-n} - PAD_{th-n-1})/PAD_{n-1}) * 100\%$	persen	15,07	10,49	-6,30	14,15
		76	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	(Jumlah APBD yang ditetapkan tepat waktu/jumlah APBD)x100%	persen	100	100	100	100
		77	Persentase kejelasan status aset daerah	(Jumlah Aset yang jelas statusnya / Jumlah aset seluruhnya) x 100%	persen	100	100	100	100
26	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH	78	Indek profesionalitas ASN	$IdxPro = koef(1-gaps) + Koef(Kj) + Koef(1 - \delta SI(inex)) + Koef(1 - inDiscpl)$	angka (0-100)	63	65	67	76
27	INSPEKTORAT	79	Level kapabilitas APIP	Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah	level (1-5)	3	3	3	4
		80	Nilai maturitas SPIP	Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang pedoman penilaian dan strategi peningkatan maturitas SPIP	level (0-5)	3	3	3	4
28	KECAMATAN	81	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan						
		82	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan						

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
	KECAMATAN BANDONGAN		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	81,2	82	83	87
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	-	100	100	100
	KECAMATAN BOROBUDUR		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	78	80	81	82,5
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	85	85	85	90
	KECAMATAN CANDIMULYO		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	80,03	81,35	82,67	87,95
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	-	100	100	100
	KECAMATAN DUKUN		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	80	81	82	86
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	100	100	100	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
	KECAMATAN GRABAG		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	88	88	88	88
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	100	100	100	100
	KECAMATAN KAJORAN		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	-	70,75	70,75	80
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	-	100	100	100
	KECAMATAN KALIANGKRIK		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	79,55	80	80	80
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	100	100	100	100
	KECAMATAN MERTOYUDAN		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	75	77	79	85
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	80	83	85	87

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
	KECAMATAN MUNGKID		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	85,57	87,00	87,50	87,90
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)*100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)*100%)/2	persen	100	100	100	100
	KECAMATAN MUNTILAN		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	87,73	87,90	88,50	90,25
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)*100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)*100%)/2	persen	-	-	80	80
	KECAMATAN NGABLAK		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	82,85	82,85	82,85	82,85
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)*100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)*100%)/2	persen	100	100	100	100
	KECAMATAN NGLUWAR		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	88,90	89	89	90
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)*100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)*100%)/2	persen	78	79	80	84

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
	KECAMATAN PAKIS		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	82	84	86	95
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)*100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)*100%)/2	persen	-	100	100	100
	KECAMATAN SALAM		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	81	82	83	87
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)*100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)*100%)/2	persen	81	82	83	87
	KECAMATAN SALAMAN		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	80	86	87	88
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)*100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)*100%)/2	persen	88	95	95	95
	KECAMATAN SAWANGAN		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	81,98	81,98	82,00	82,40
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)*100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)*100%)/2	persen	-	-	80	100
	KECAMATAN SECANG		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	89,40	89,40	90,00	91,00

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	90	90	90	90
	KECAMATAN SRUMBUNG		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}/\text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	80,45	81	82	86
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	80	82,5	85	95
	KECAMATAN TEGALREJO		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}/\text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	82	84	86	94
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	100	100	100	100
	KECAMATAN TEMPURAN		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}/\text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	85,80	86,40	86,50	88,30
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	100	100	100	100
	KECAMATAN WINDUSARI		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}/\text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	-	81,98	82,00	82,40

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) \times 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa}) \times 100\%) / 2$	persen	-	-	80	100

Sumber: Bappeda dan Litbangda, 2019

Keterangan: *) Angka proyeksi

6.3 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah. Indikator tersebut terdiri dari indikator tujuan dan sasaran daerah, serta indikator sasaran Perangkat Daerah yang dibagi sesuai aspek dan urusan. Matriks Indikator Kinerja Daerah disajikan pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3
Matriks Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020

No	Aspek/ Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Kinerja Periode RPJMD
			2018	2019		
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Nilai IPM (Index Pembangunan Manusia)	angka (0-100)	69,11	69,11	69,34	70,33
2	Angka Kemiskinan	persen	11,23	10,58	9,93	7,33
3	Indeks Pembangunan Gender	angka (0-100)	92,23	92,91	93,21	94,41
4	Indeks Pemberdayaan Gender	angka (0-100)	62,43	69,03	69,33	70,53
5	Persentase penurunan PMKS	persen	0,57	0,58	0,58	0,58
6	Kabupaten Layak Anak	kategori	madya	madya	nindya	utama
7	Angka Harapan Hidup	tahun	73,47	73,47	73,52	73,70
8	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,57	7,72	7,86	8,41
9	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,48	12,67	12,76	13,27
10	Presentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	persen	93,86	93,89	94,41	95,94
11	Indeks ketahanan pangan	angka (0-100)	76,32	77,37	78,42	82,62
12	Cakupan hunian layak dan berkualitas	persen	55,29	69,88	72,66	96,28
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,06*	5,0-5,5	5,1-5,6	5,5-6,0
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	2,91	2,4-3,0	2,4-3,0	2,25-2,55
15	PDRB Per Kapita	juta rupiah	23,70*	25,20	26,70	32,72
16	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.025,00	9.262,68	9.400,64	10.400,12
17	Inflasi	persen	2,66	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5
18	Peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan	miliar rupiah	200,15*	227,64	255,56	367,20
19	Peningkatan nilai PDRB sektor pertanian	miliar rupiah	113,80*	120,09	150,89	274,10
20	Peningkatan nilai PDRB sektor perindustrian pengolahan	miliar rupiah	369,23*	370,28	372,47	380,61

No	Aspek/ Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Kinerja Periode RPJMD
			2018	2019		
21	Peningkatan nilai PDRB sektor pariwisata	miliar rupiah	52,32*	52,32	52,32	54,25
B. ASPEK PELAYANAN UMUM						
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
PENDIDIKAN						
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	angka (0-100)	87,43	89,97	91,14	95,80
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	angka (0-100)	87,64	88,25	88,79	90,94
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	angka (0-100)	98,30	98,62	98,93	99,92
4	Rerata Nilai UN	angka (0-100)	6,28	6,30	6,40	6,65
5	Angka Kelulusan	angka (0-100)	99,88	99,90	99,92	100
KESEHATAN						
6	Kualitas pelayanan kesehatan	persen	10	15	25	45
7	Angka kesakitan	persen	-	-	5,33	4,68
8	Jumlah Kematian Ibu	jumlah kasus	6	-	11	9
9	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	5,72	-	6,5	6,3
10	Angka Kematian Balita (AKABa)	per 1000 KH	6,70	-	8	7,6
11	Angka Kematian Neonatal (AKN)	per 1000 KH	4	-	6	5,6
12	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi (dasar, madya, utama, paripurna)	Madya (Bintang 3)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
13	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	persen	57,69	60,83	66,37	92,13
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
14	Persentase ketersediaan rumah layak huni	persen	43,46	71,34	75,59	92,56
15	Persentase kawasan permukiman berkualitas	persen	47,20	49,45	51,70	79,47
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
16	Cakupan penegakan hukum	persen	-	80,45	88,50	92,50
17	Cakupan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana	persen	74,1	75	75,9	79,48

No	Aspek/ Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Kinerja Periode RPJMD
			2018	2019		
18	Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	persen	80	80	80	80
	SOSIAL					
19	Cakupan penanganan PMKS	persen	46,32	46,86	47,46	49,8
20	Presentase keluarga Pra sejahtera	persen	21,23	20,69	20,15	18,00
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
	TENAGA KERJA					
21	Produktivitas tenaga kerja	rupiah	689.827	700.905	711.763	756.306
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
22	Cakupan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	persen	60,91	57,99	57,99	58,63
	PANGAN					
23	Ketersediaan pangan utama	kg/jiwa/tahun	284,121	320,692	341,503	424,745
24	Stabilitas harga pangan	persen	93,95	93,96	93,97	94,30
25	Skor PPH	persen	87,90	87,95	87,98	88,40
	LINGKUNGAN HIDUP					
26	Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	persen	6	8	10	22
27	Persentase pengelolaan sampah	persen	32,42	39,87	43,00	65,43
28	Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	persen	39,59	39,27	40,06	40,06
29	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim	persen	5,52	5,94	7,64	13,52
	ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
30	Rasio perekaman KTP - elektronik dan keluarga yang ber-KK	angka (0-100)	96,10	96,83	97,48	99,75
31	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	angka (0-100)	55,01	63,75	66,67	96,67
32	Rasio pengelolaan informasi dan pemanfaatan data	angka (0-100)	-	70	77,5	95
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
33	Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang	persen	10	10	20	30
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					
34	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	persen	0,79	0,76	0,73	0,65
	PERHUBUNGAN					

No	Aspek/ Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Kinerja Periode RPJMD
			2018	2019		
35	Cakupan Infrastruktur perhubungan	persen	38,72	47,76	57,20	96,12
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
36	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	persen	36,67	57,36	83,94	94,15
37	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	persen	62,50	66,67	75	100
	KOPERASI DAN UKM					
38	Persentase koperasi sehat	persen	78,13	78,13	78,13	80
39	Peningkatan omzet usaha Mikro	persen	-	5	5	5
	PENANAMAN MODAL					
40	Jumlah nilai investasi PMA	miliar rupiah	68.858	75.000	78.750	95.721
41	Jumlah nilai investasi PMDN	triliun rupiah	1,907	2,174	2,391	3,501
42	Survey kepuasan pelayanan perijinan	angka (0-100)	86,3	86,5	87	89
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
43	Cakupan prestasi generasi muda	persen	36,50	38,50	41,00	52,00
	STATISTIK					
44	Cakupan layanan informasi bagi Desa dan PD	persen	40,44	41,32	48,16	98,32
	PERSANDIAN					
45	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	persen	31,28	37,26	44,52	76,67
	KEBUDAYAAN					
46	Persentase peningkatan jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	persen	1	1	1	1
	PERPUSTAKAAN					
47	Rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten	persen	0,056	0,066	0,07	0,10
	KEARSIPAN					
48	Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku	persen	-	-	38,46	100
	URUSAN PILIHAN					
	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
49	Produksi daging (ton)	ton	15.622,3	16.111,4	16.393,3	90.997,4
50	Produksi Telur (ton)	ton	16.204,2	16.787,5	17.071,2	105.078
51	Produksi susu	liter	-	746.158	761.08	4.706.851

No	Aspek/ Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Kinerja Periode RPJMD
			2018	2019		
52	Produksi benih ikan	ekor (x1000)	2.008.038	2.008.038	2.100.000	13.603.826
53	Produksi ikan konsumsi	ton	23.097,01	23.097,01	24.150,00	156.444,00
54	Produksi perikanan tangkap	ton	278,14	280,50	294,53	1.907,94
	PARIWISATA					
55	Peningkatan kunjungan wisatawan	persen	1,82	5	5	25
56	Peningkatan lama tinggal wisatawan	persen	3,70	5,3	5,3	30
	PERTANIAN					
57	Produksi Padi	ton	478.199	478.300	478.500	480.500
58	Produksi Jagung	ton	51.446	51.448	51.450	51.650
59	Produksi Cabai	ton	211.124	215.346	219.653	237.760
60	Produksi Kopi	ton	1.468	1.480	1.490	1.530
61	Produksi Cengkeh	ton	161	163	165	173
62	Produksi kelengkeng	ton	88	90	93	100
63	Produksi jeruk	ton	2.646	2.650	2.655	2.675
64	Produksi kelapa	ton	7.520	7.525	7.530	7.550
65	Produksi Salak	ton	69.362	69.372	69.380	69.420
66	Produksi Bawang putih	ton	2.053,5	2.156,2	2.264	2.522,7
67	Persentase produk pertanian yang terstandarisasi	persen	0,3	0,3	0,3	1,5
	PERDAGANGAN					
68	Cakupan pelayanan perdagangan	persen	-	-	70	78
69	Jumlah Pasar yang mendapat penghargaan Pasar Tertib Ukur	unit	7	7	8	12
	PERINDUSTRIAN					
70	Persentase pertumbuhan industri	persen	2,10	2,21	2,33	12,16
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	PERENCANAAN					
71	Tingkat ketercapaian dan keterukuran kinerja pembangunan daerah	persen	-	-	69,42	77,82
	KEUANGAN					
72	Persentase kenaikan PAD	persen	15,07	10,49	-6,3	4,75
73	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	persen	100	100	100	100
74	Persentase kejelasan status aset daerah	persen	100	100	100	100

No	Aspek/ Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Kinerja Periode RPJMD
			2018	2019		
	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
75	Indek profesionalitas ASN	Angka (0-100)	63	65	67	76
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
76	Persentase implementasi rencana kelitbangan	persen	-	100	100	100
	PENGAWASAN					
77	Level kapabilitas APIP	Level (1-5)	3	3	3	4
78	Nilai maturitas SPIP	Level (0-5)	3	3	3	4
	FUNGSI LAINNYA					
79	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	persen	-	-	70,00	80,00
80	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Angka (1-100)	83,25	83,50	83,75	85,00
81	Cakupan fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	persen	-	-	93	100
C. ASPEK DAYA SAING						
1	Cakupan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan	persen	60,07	63,20	66,95	83,16
2	IKLH	Angka (0-100)	71,93	72,10	72,12	72,20
3	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	persen	56,45	63,82	65,53	72,39
4	Cakupan ketentraman & ketertiban masyarakat	persen	84,42	79,25	82,97	88,09
5	Nilai AKIP	angka (0-100) (huruf)	59,05 (CC)	61,04 (B)	63,03 (B)	71,00 (BB)
6	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka (0-5)	1,85	1,85	2	3
7	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka (0-100)	82,01	82,74	84,23	90,16
9	Indek Merit System	angka (0-1)	-	0,5	0,55	0,76
10	Pertumbuhan Investasi	persen	0,92	5,00	5,00	5,00
11	Cakupan Pembangunan Wilayah	persen	48,21	54,29	61,79	94,12
12	Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,66*	0,67	0,68	0,72

Sumber: Bappeda dan Litbangda, 2019

Keterangan: *) Angka proyeksi

BAB VII PENUTUP

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 disusun melalui serangkaian tahapan penyusunan. Pelaksanaan Musrenbang melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk dari anggota DPRD sebagai penyeimbang dalam mengimplementasikan pola pendekatan perencanaan pembangunan. Hasil proses perencanaan pembangunan sebelumnya, seperti Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan menjadi salah satu bahan utama dalam menentukan sasaran/target maupun lokasi kegiatan yang dirancang oleh perangkat daerah. Sehingga dalam proses tahapan perencanaan akan tergambarkan simbiosis mutualisme antara pendekatan perencanaan pembangunan secara partisipatif, teknokratis dan politis.

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 merupakan tahapan strategis dalam rangkaian proses perencanaan karena sebagai *starting point* (titik awal) dalam rencana pencapaian pembangunan jangka menengah (RPJMD) tahap selanjutnya yaitu tahun 2019-2024. RKPD tahun 2020 ini, memetakan permasalahan dan isu strategis serta menentukan prioritas pembangunan daerah tahun 2020 secara tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah.

Dokumen RKPD merupakan bagian dan implementasi dokumen RPJMD di setiap tahunnya. Saat ini Pemerintah Kabupaten Magelang sedang berproses menyusun Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Sehingga penyusunan RKPD Tahun 2020 disamping memperhatikan masukan-masukan dalam setiap tahapan perencanaan, RKPD Tahun 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2019-2024. Dokumen RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 diharapkan mampu mensinergiskan seluruh pelaku pembangunan dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program kegiatan.

Pada Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2019-2024 berhenti pada tataran program, sedangkan dalam RKPD program-program yang ada sudah harus dijabarkan kedalam nomenklatur kegiatan, sehingga nama-nama program dan kegiatan yang ada dalam RKPD Tahun 2020 akan lebih fokus sesuai hasil pembahasan dalam Musrenbang. Arah kebijakan pembangunan Tahun 2020 adalah “Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM, dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal didukung pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi”. Arah kebijakan ini menjadi bingkai untuk seluruh perangkat daerah dalam merancang pelaksanaan kegiatan dikaitkan dengan rencana pencapaian target-target indikator kinerja yang ditetapkan, baik pada tataran kegiatan, program, maupun indikator kinerja perangkat daerah, yang akan bermuara pada pencapaian target indikator kinerja daerah pada Tahun 2020. Dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD, beberapa hal tersebut menjadi batasan yang tegas dalam pembahasan tentang kondisi kemampuan keuangan daerah yang dirancang untuk

membiayai program dan kegiatan dimasing-masing rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.

Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020 sangat diperlukan. Pada saatnya RKPD ini akan menjadi titik awal dalam merancang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020. KUA dan PPAS tersebut akan menentukan bagaimana dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 sudah mencerminkan pelaksanaan penjabaran Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang pada Tahun 2020 yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga upaya untuk melaksanakan Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (Sedaya Amanah)” sudah mantap sejak Tahun 2020 yang merupakan awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang pada Tahun 2019-2024.

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2020 memerlukan dukungan sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparat pemerintah, peran masyarakat dan dunia usaha untuk mencapai cita-cita dan harapan masyarakat.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 19670212 199312 1 001